



# 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>

# DASAWARSA POLRI



# DAN TANTANGAN MASA DEPAN

PUSAT SEJARAH POLRI
PERPUSTAKAAN
NOMOR :
TANGGAL :



**4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>**

**DASAWARSA POLRI**

**DAN**

**TANTANGAN MASA DEPAN**

## DAFTAR ISI

	Halaman
1. Sapta Marga .....	7
2. Sumpah Prajurit .....	8
3. Tri Brata .....	9
4. Catur Prastya .....	9
5. Kata Pengantar .....	11
6. Foto Kapolri .....	13
7. Hari Bhayangkara Ke 45 1 Juli 1991 .....	15
8. Tekadku Pengabdian Terbaik .....	24
9. Pesan-Pesan Kapolri .....	27
10. Polri Dewasa Ini .....	33
* Struktur Organisasi .....	34
* Satker di Mabes Polri .....	35
* Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah .....	89
* Perkembangan Hingga Kini (Hasil Yang Dicapai) .....	189
11. Tantangan Masa Depan .....	197
* Perkembangan Kriminalitas .....	198
* Kejahatan Dimensi Baru .....	199
* Penggolongan Kejahatan Dimensi Baru .....	200
12. Langkah-Langkah Penanggulangan .....	206
* Analisa Sumber Daya .....	208
* Kebijakan Pembinaan Kekuatan Dan Kemampuan .....	215
* Pola Penanggulangan Kejahatan Dimensi Baru .....	221

### EMPAT SETENGAH TAHUN DASAWARSA POLRI DAN TANTANGAN MASA DEPAN

**Pelindung** : Kepala Kepolisian RI.  
**Penanggung Jawab** : Kepala Dinas Penerangan Polri.  
**Wakil Penanggung Jawab** : Sekretaris Dinas Penerangan Polri.  
**Penyusun** : Subdit Penpas Dispen Polri.  
**Pelaksana** : 1. Mayor Pol. Maislan Sjarif BA.  
               2. Kamirullah Ahmad.

### COVER DEPAN :

Kapolri Letjen. Pol. Drs. Kunarto dengan rasa kasih sayang menyerahkan nasi tumpeng kepada mantan Kapolri pertama R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo disaat sukuran pada peringatan Hari Bhayangkara ke - 45 1 Juli 1991.



# PANCASILA



**KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB**

**PERSATUAN INDONESIA**

**KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN  
DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN**

**Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**

## SAPTA - MARGA

- I. KAMI WARGA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERSENDIKAN PANCASILA;
- II. KAMI PATRIOT INDONESIA, PENDUKUNG SERTA PEMBELA IDEOLOGI NEGARA, YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN TIDAK MENGENAL MENYERAH;
- III. KAMI KSATRIA INDONESIA, YANG BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, SERTA MEMBELA KEJUJURAN, KEBENARAN DAN KEADILAN;
- IV. KAMI PERAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, ADALAH BHAYANGKARI NEGARA DAN BANGSA INDONESIA;
- V. KAMI PERAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, MEMEGANG TEGUH DISIPLIN, PATUH DAN TAAT KEPADA PIMPINAN, SERTA MENJUNJUNG TINGGI SIKAP DAN KEHORMATAN PERAJURIT;
- VI. KAMI PERAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, MENGUTAMAKAN KEPERWIRAAN DI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, SERTA SENANTIASA SIAP SEDIA BERBAKTI KEPADA NEGARA DAN BANGSA;
- VII. KAMI PERAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, SETIA DAN MENEPATI JANJI SERTA SUMPAAH PERAJURIT.

## SUMPAH PRAJURIT

1. SETIA KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945.
  2. TUNDUK KEPADA HUKUM DAN MEMEGANG TEGUH DISIPLIN KEPRAJURITAN.
  3. TAAT KEPADA ATASAN DENGAN TIDAK MEMBANTAH PERINTAH ATAU PUTUSAN.
  4. MENJALANKAN SEGALA KEWAJIBAN DENGAN PENUH RASA TANGGUNG JAWAB KEPADA TENTARA, DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
  5. MEMEGANG TEGUH RAHASIA TENTARA SEKERAS-KERASNYA.
-



## **TRI BRATA**

POLISI ITU :

1. **RASTRASEWAKOTTAMA** Abdi Utama daripada Negara.
2. **NAGARAYANOTTAMA** Warga Negara Teladan daripada Negara.
3. **YANA ANUCASANADHARMA** Wajib menjaga ketertiban pribadi daripada rakyat.

## **CATUR PRASATYA**

1. **SATYA HAPRABU** Setya kepada Negara dan Pimpinan Negara.
2. **HANYAKEN MUNGSIH** Mengenyahkan musuh-musuh Negara dan masyarakat.
3. **GINEUNG PRATIDIDA** Mengagungkan Negara dan Bangsa.
4. **TAN SATRISNA** Tidak terikat Trisna kepada sesuatu.

MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DINAS PENERANGAN



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas izinNya Dinas Penerangan Polri telah berhasil menerbitkan buku "EMPAT SETENGAH DASAWARSA POLRI DAN TANTANGAN MASA DEPAN", sebagai kenang-kenangan dengan genapnya 4½ Dasawarsa usia Polri pada tanggal 1 Juli 1991.

Disamping sebagai kenang-kenangan, buku ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai Polri dewasa ini, berbagai tantangan yang dihadapi mengingat banyaknya penyalahgunaan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih untuk tujuan kejahatan serta menginformasikan kebijaksanaan-kebijaksanaan Pimpinan Polri beserta upaya-upaya yang tengah dilancarkan Polri untuk mengantisipasi segala macam tantangan tersebut.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan dharma bhakti Polri kepada bangsa dan negara oleh Kapolri digelorakan tema "Tekadku Pengabdian Terbaik" mulai pada tanggal 1 Juli 1991, yang harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari oleh semua anggota Polri.

Kami menyadari, buku ini baik materi maupun cara penyajiannya masih ada kekurangan namun diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi Polri dan masyarakat.

Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penerbitan buku ini kami ucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, Juli 1991

KEPALA DINAS PENERANGAN POLRI

  
NY. JEANNE MANDAGI. SH  
BRIGADIR JENDERAL POLISI



*Letnan Jenderal Polisi Drs. KUNARTO  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.*

PANGLIMA ABRI PADA HARI BHAYANGKARA KE - 45  
1 JULI 1991

## KONDISI KAMTIBMAS SEMAKIN MERUPAKAN KEBUTUHAN YANG TIDAK DAPAT DITAWAR-TAWAR LAGI

Kemantapan landasan kepejuangan yang kita miliki saat ini, masih harus ditunjang dan dilengkapi dengan penguasaan kualitas profesionalisme yang memadai, yang mampu menjawab tantangan serta tuntutan kebutuhan tugas, yang cenderung semakin meningkat, guna mempersiapkan diri memasuki tahapan penting menjelang era tinggal landas nanti, terutama pada masa sebelum, selama dan sesudah penyelenggaraan Pemilu 1992 dan Sidang Umum MPR 1983.

Guna menyongsong dan menyukseskan tugas nasional yang penting itu, maka kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai bagian dari upaya menciptakan kondisi stabilitas nasional yang mantap, sehat dan dinamis, semakin merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Hal tersebut dikemukakan Panglima ABRI Jenderal Try Sutrisno dalam amanatnya pada peringatan Hari Bhayangkara ke 45 tanggal 1 Juli 1991 di Kebayoran Baru Jakarta.

Lebih lanjut Panglima ABRI mengatakan, kita sepenuhnya menyadari, bahwa upaya untuk mewujudkan stabilitas seperti itu tidaklah mudah, lebih-lebih apabila kita melihat gelagat perkembangan lingkungan strategik dalam dan luar negeri, serta pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, yang kesemuanya menunjukkan kecenderungan akan semakin berat dan kompleksnya permasalahan dan tantangan di bidang kamtibmas, yang akan senantiasa kita hadapi. Kesemuanya

itu jelas menuntut dimilikinya daya antisipasi yang tinggi, serta langkah-langkah tindakan yang tepat, cepat dan cermat, baik dalam rangka pencegahan maupun penanggulangannya.

Untuk mewujudkan kondisi seperti itu, diperlukan kadar mental kepejuangan yang benar-benar tangguh, disertai dengan bobot mutu profesionalisme yang handal, yang termanifestasikan kedalam sikap dan perilaku prajurit Polri selaku insan Bhayangkara, yang di dalam setiap pola pikir, tingkah laku, tutur kata dan tindakannya, senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Saptamarga, Tri Brata dan dan Catur Prasetya, baik di dalam setiap pelaksanaan tugas, maupun di dalam kehidupan pribadi masing-masing.

Menyadari akan hal ini, Polri hendaknya terus berupaya meningkatkan kemampuannya, dengan mutu keterampilan yang semakin memadai, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin mantap, dengan dilandasi oleh nilai-nilai kepejuangan ABRI.

### KEBUTUHAN PENGUASAAN PROFESIONALISME YANG TANGGUH

Kualitas pengabdian Polri, yang ditopang oleh penguasaan profesionalisme yang tangguh, serta semangat kepejuangan yang handal, dan kadar disiplin yang tinggi, jelas akan semakin dibutuhkan, di dalam dinamika perkembangan kemajuan pembangunan saat ini. Kondisi ini perlu terus dipelihara dan bahkan dimantapkan, karena kualitas yang seperti itu, juga merupakan



*Mantan Kapolri pertama R.S. Soekanto memasuki tempat upacara*



*Kapolri Letjen Pol. Drs. Kunarto menyambut kehadiran Kapolri Pertama R.S. Soekanto*

dibinaan masyarakat, yang senantiasa menuntut peningkatan pelayanan dan pengayoman yang lebih baik. Hal ini dapat terjadi, sebagai akibat dari keberhasilan pembangunan, yang ditandai oleh semakin tingginya tingkat kecerdasan dan kesadaran hukum serta taraf hidup masyarakat, sehingga tuntutan kebutuhan mereka pun menjadi semakin meningkat pula.

Pembangunan serta perkembangan dan kemajuan itu sendiri, di samping telah membawa hasil dan dampak positif, seperti meningkatnya kecerdasan, taraf hidup dan kesejahteraan sebagaimana telah saya sampaikan di muka, sekaligus akan muncul pula berbagai eksek negatif yang bersifat ikutan, yang kesemuanya itu harus mampu dijawab dengan penanganan secara tepat, cermat dan profesional.

Dengan semakin meningkatnya spektrum ancaman, sejalan dengan dinamika perubahan dan perkembangan jaman, maka ABRI khususnya jajaran Polri, dituntut untuk mampu menciptakan situasi kamtibmas yang mantap, yaitu suatu bentuk situasi, di mana didalamnya tercipta suatu kondisi kehidupan masyarakat yang berjalan secara tertib dan teratur, sesuai norma-norma yang berlaku, sehingga masyarakat dapat memiliki perasaan aman, tenteram dan damai lahir bathin, karena bebas dari rasa takut, atau khawatir terhadap adanya berbagai bentuk ancaman dan gangguan, baik yang bersifat fisik maupun psikis.

Kondisi kamtibmas demikian itu, merupakan kebutuhan hakiki, yang memungkinkan terwujudnya semangat dan kegairahan untuk berkarya, yang mendorong peningkatan produktivitas kerja, bagi seluruh lapisan masyarakat dan segenap jajaran pemerintah, guna melanjutkan dan menyukseskan pembangunan nasional.

#### **POLRI DITUNTUT MEMILIKI CIRI-CIRI KEPELOPORAN**

Keseluruhan upaya pembinaan kamtibmas ini, harus dapat diselenggarakan secara fungsional, serta dikoordinasikan dan diintegrasikan dengan segenap aparat terkait, maupun dengan

terus menggalakkan peranserta seluruh lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, segenap jajaran Polri dituntut untuk memiliki ciri-ciri kepeloporan, ketauladanan, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, kesederhanaan dan kesemestaan, baik di dalam setiap pelaksanaan tugas, maupun di dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karenanya, dalam mengemban tugas dan kepercayaan yang demikian mulia itu, saya tekankan kembali bahwa Polri dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar, serta berbobot kualitas mental kepejuangan yang benar-benar tangguh, yang merupakan perpaduan dari kondisi terbaik aspek mental ideologi, mental kerohanian dan mental kejiwaan, sehingga setiap warga Polri benar-benar dapat berperan sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari, serta tetap kokoh dan tegar dalam menghadapi segala bentuk bujukan, rangsangan dan godaan negatif, baik yang datang dari dalam dirinya sendiri, maupun yang berasal dari pengaruh luar.

Di samping mental kejuangan yang tinggi, setiap aparat Polri dituntut pula untuk mampu menampilkan sikap dan sifat profesionalisme yang benar-benar handal, yang mencakup berbagai ragam kemahiran dan keterampilan, terutama dalam hal penguasaan dan penerapan hukum serta teknologi kepolisian, baik dalam rangka penyidikan, deteksi dan prevensi, maupun dalam rangka melakukan bimbingan dan pembinaan keamanan swakarsa masyarakat, di bidang kamtibmas.

Oleh karena itu, perlu saya tekankan kembali, bahwa dalam setiap menangani penyelesaian masalah, hendaknya senantiasa mengutamakan kecepatan dan ketepatan, namun tetap memegang teguh etika dan profesionalisme kepolisian, sehingga masyarakat betul-betul merasa diperhatikan, dilayani dan diayomi.

Hal ini perlu untuk benar-benar dihayati, karena penanganan suatu kasus yang dilakukan secara kurang cermat dan cenderung berlarut-larut, akan dapat memungkinkan terjadinya



*Panglima ABRI Jenderal TNI Try Sutrisno selaku Irup tengah memeriksa pasukan upacara.*



*Mantan Kapolri Jenderal Pol. (Purn) Drs. Moh. Hasan beserta para undangan.*

*Peserta upacara.*

penyimpangan dari permasalahan intinya, yang pada gilirannya dapat berakibat tidak terungkapnya masalah tersebut secara tuntas, serta menurunnya kepercayaan masyarakat.

### **POLRI MASIH DIHARAPKAN PADA KONDISI YANG SULIT**

Untuk mewujudkan kondisi kamtibmas yang kita dambakan dan kita cita-citakan itu, hendaknya perlu senantiasa disadari, bahwa ABRI khususnya Polri, saat ini masih dihadapkan pada kondisi yang sulit, karena masih adanya kesenjangan yang cukup besar, antara harapan masyarakat yang hampir tidak terbatas, dengan keterbatasan kemampuan pelayanan maupun pengayoman yang dapat diberikan oleh Polri.

Dalam upaya memenuhi tuntutan tugas serta harapan masyarakat, Polri perlu terus berusaha mengatasi berbagai kekurangan dan kendala yang ada, meskipun masih harus menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari aspek sumber daya, manajemen, operasional rutin, maupun aspek-aspek lainnya yang bersifat non teknis.

Untuk dapat menjawab semua itu, kita harus mampu melihat kedalam, dalam arti kita harus melihat apa yang menjadi kekurangan kita, untuk selanjutnya diupayakan pembenahan, penyempurnaan dan peningkatannya, melalui berbagai langkah antisipatif, kreatif dan inovatif. Keterbatasan di bidang personel, harus diimbangi dengan peningkatan kualitas profesionalisme dan jiwa kepejuangan, serta penataan personel, melalui suatu kebijaksanaan personel yang cermat dan obyektif, yang betul-betul diorientasikan pada kepentingan organisasi dan keberhasilan pelaksanaan tugas.

Demikian juga di bidang sarana dan prasarana, hendaknya diimbangi dengan upaya pemeliharaan dan pelayanannya secara efektif dan efisien, guna memperpanjang usia pakai alat peralatan yang telah dimiliki. Untuk mendukung itu semua, hendaknya seluruh unsur pembinaan dan pengawasan, harus dapat didayagunakan secara optimal, sesuai dengan

kemampuan yang ada. Dalam hal ini, sistem dan metoda serta manajemen, disemua sisi kegiatan pembinaan maupun operasional, perlu terus-menerus dimantapkan, termasuk didalamnya masalah tertib administrasi, serta sarana dan prasarana pendukungnya.

Sedangkan dalam tampilan keluar, hendaknya diarahkan bagi terwujudnya Binkamtibmas Swakarsa, dalam arti terciptanya situasi, di mana masyarakat menyadari, akan arti pentingnya keamanan, baik bagi diri dan lingkungan mereka, maupun bagi pembangunan, serta kesadaran dan kerelaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya dalam mewujudkan stabilitas Kamtibmas yang mantap.

### **PELIHARA CITRA POLRI**

Satu hal lagi yang perlu mendapat perhatian kita, adalah masih perlunya terus ditingkatkan upaya untuk memelihara citra Polri, selaku aparat penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat, serta pembina Kamtibmas, yang jelas menuntut adanya perhatian khusus dan kewaspadaan seluruh Pimpinan Polri, mulai dari yang teratas sampai eselon yang terendah, untuk menyempurnakannya. Dalam hal ini, segenap warga Polri hendaknya tidak perlu berkecil hati, namun juga jangan mengabaikannya. Marilah kita belajar berjiwa besar, yang dengan sikap arif dan berlapang dada selaku abdi masyarakat, terus berupaya membenahi diri, dan menyempurnakan berbagai kekurangan dan kelemahan yang ada, secara teguh dan konsisten.

### **INSTRUKSI PANGAB**

Guna mewujudkan apa yang menjadi harapan kita, sebagaimana telah saya utarakan terdahulu, dan untuk dapat memperbaharui tekad dan semangat Polri di usia yang ke-45 ini, maka perlu saya Instruksikan kepada seluruh Prajurit Bhayangkara dimanapun berada, untuk :

**Pertama** : Lanjutkan dan mantapkan terus, upaya pembenahan Polri yang telah dilaksanakan selama ini, dengan



**SUASANA  
DEFILE**

*Helikopter Polri tengah melakukan terbang lintas diangkasa MABES Polri .*



*Peserta Defile*

- bobot prioritas pada sasaran yang bernilai strategis, baik terhadap pembangunan ABRI maupun pembangunan bangsa.
- Kedua** : Tingkatkan kegiatan pengawasan dan mantapkan pengendalian dalam semua bentuk operasi Kepolisian, agar diperoleh hasil guna dan daya guna yang maksimal.
- Ketiga** : Mantapkan pembinaan segenap potensi Kamtibmas, dalam rangka kesiapan pengerahan kekuatan kamtibmas secara terkoordinasi, total dan integral, terutama yang bersangkutan dengan upaya peningkatan kadar disiplin masyarakat di jalan raya, yang diharapkan mampu memberikan sumbangannya, dalam meningkatkan disiplin nasional.
- Keempat** : Mantapkan terus kualitas koordinasi fungsional dan keterpaduan segenap aparat, dalam rangka mewujudkan suasana kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan, bagi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.
- Kelima** : Wujudkan dengan nyata serta penuh rasa tanggung jawab, ciri kepeloporan dan ketauladanan peranan Polri sebagai ujung tombak, serta sekaligus kekuatan inti dalam Binkamtibmas.

Demikianlah amanat saya pada kesempatan yang baik ini, dan apa yang saya sampaikan tadi, hendaknya dapat digunakan sebagai bahan introspeksi, evaluasi dan koreksi diri, untuk

dapat melangkah lebih tegar dan optimistik di masa yang akan datang, yang jelas akan semakin sarat dengan berbagai ragam permasalahan dan tantangan, namun juga sekaligus mengandung harapan.

Akhirnya, sehubungan dengan ulang tahun Polri ke-45 yang kita rayakan pada hari ini, kepada segenap warga Polri saya ucapkan Selamat Merayakan Ulang Tahun.

Selesai upacara dilapangan dilanjutkan dengan defile meliwati Jl. Trunojoyo di halaman Mabes Polri, yang diikuti oleh seluruh pasukan peserta upacara ditambah dengan berbagai jenis kendaraan dari berbagai kesatuan Polri dan pasukan dari Satwa Polri.

Di atas tribune yang menghadap ke Mabes Polri tampak Panglima ABRI didampingi Kapolri dengan ceria membalas penghormatan para peserta defile yang diberikan kepadanya.

Sementara defile berlangsung, diangkasa Mabes Polri terlihat pesawat-pesawat Helikopter maupun pesawat bersayap tetap milik Subdit Polair tengah melakukan terbang lintas, sehingga membuat acara defile menjadi lebih meriah.

Selesai acara defile dilanjutkan dengan acara syukuran bertempat di wisma Bhayangkari. Disini berlangsung dalam suasana silaturahmi, nostalgia yang santai.

Secara keseluruhan perayaan peringatan Hari Bhayangkara ke 45 yang dihadiri oleh sesepuh Polri dan sebagian besar mantan Kapolri tersebut berlangsung secara sederhana, namun cukup meriah dan khidmad.

\*  
\* \*  
\* \* \*  
\* \* \* \*  
\* \* \* \*  
\* \* \*  
\* \*  
\*



Unit kendaraan bermotor  
Shabara



Unit Satwa



PJR



Panser Brimob



Dengan rasa kasih sayang Kapolri Letjen Pol. Drs. Kunarto memberikan nasi tumpeng kepada mantan Kapolri pertama R.S. Soekanto.



Kapolri menyerahkan piagam kepada pemenang Lomba Polsek se Indonesia.



Kapolri beramah tamah dengan mantan Kapolri Drs. Awaloedin Djamin

# TEKADKU PENGABDIAN TERBAIK

Dengan menyadari bahwa pelaksanaan tugas Polri belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat pada umumnya, maka pimpinan Polri pada peringatan Hari Bhayangkara ke-45 tanggal 1 Juli 1991, telah mengeluarkan thema "TEKADKU PENGABDIAN TERBAIK" sebagai arahan yang mengandung esensi yang sangat mendasar, dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas Polri semaksimal mungkin.

Thema "TEKADKU PENGABDIAN TERBAIK" mempunyai makna, yaitu : "Suatu niat, keinginan atau kemauan yang sudah kuyakini dan kupateri di dalam hati sanubariku, bahwa aku harus mewujudkan niat, keinginan atau kemauan itu, yaitu melaksanakan tugas kewajiban dengan penuh kepercayaan diri, kepercayaan kepada lingkungan pekerjaanku, termasuk kepercayaan kepada kawan-kawan sekerja dan atasanku, sesuai dengan kemampuanku yang maksimal, sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal pula".

Ungkapan Pimpinan Polri tersebut menggugah dan mewajibkan setiap insan Bhayangkara untuk introspeksi, menilai kembali "apa yang telah diberikan olehnya untuk Polri" dan "apa yang sebenarnya dapat diberikan untuk Polri".

Dengan demikian thema "TEKADKU PENGABDIAN TERBAIK" mencakup dua tataran pendaya-gunaan yaitu :

1. Bagi anggota Polri merupakan rangsangan untuk introspeksi, meningkatkan semangat juang, meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan prestasi kerja serta rangsangan untuk penyesuaian posisi dan kemampuan dirinya untuk lebih berperan dalam peningkatan keberhasilan tugas Polri.
2. Bagi unsur pimpinan ditiap tingkatan organisasi selain tataran pertama juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas manajemen kesatuannya sebagai dasar untuk mencari dan menemukan metoda memotivasi anggota dalam pencapaian tujuan organisasi secara optimal yang sekaligus juga merupakan tataran untuk meningkatkan kualitas kepemimpinannya.

Untuk mewujudkan semangat pengabdian sebagaimana yang diamanatkan thema tersebut adalah menjadi tanggung jawab seluruh elemen organisasi dari tingkat yang paling tinggi sampai kepada seluruh anggota. Dengan demikian thema tersebut dapat dilaksanakan dengan seksama dan membuahkan semangat pengabdian yang benar.

Adapun upaya-upaya yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan thema "TEKADKU PENGABDIAN TERBAIK" dimaksud adalah :

1. Bagi pimpinan kesatuan harus memotivasi bawahannya agar selalu bekerja dalam keadaan bersemangat dan mau mengerahkan kemampuannya untuk melaksanakan pekerjaan itu. Berbagai cara dapat ditempuh dalam memotivasi anggota, antara lain dengan :
  - a. Pimpinan Kesatuan harus punya kemampuan untuk meyakinkan anggotanya tentang pentingnya tujuan organisasi.
  - b. Mampu menunjukkan sikap keteladanan.
  - c. Komunikasi yang terbuka antara atasan dan bawahan.
  - d. Mengatur pembagian tugas pekerjaan dan pendelegasian wewenang, serta penetapan koordinasi dan sistim pengawasan sebaik-baiknya, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anggota-anggotanya, sehingga anggota dapat bekerja dengan ketenangan hati.
  - e. Menciptakan kenikmatan kerja, sehingga bawahan akan dengan kesadaran dan sukarela untuk melaksanakan pekerjaannya.
  - f. Menerima ide-ide baru, atau menerima kebutuhan akan perubahan-perubahan, sehingga bawahan merasakan adanya kenikmatan dalam menciptakan kreasi-kreasi baru dari ide-idenya.
  - g. Memberikan penghargaan kepada yang berprestasi dan memberikan hukuman kepada yang bersalah.

Dengan cara-cara motivasi anggota semacam itu, diperlukan adanya suatu sistem penilaian yang obyektif, tidak didasarkan atas pertimbangan pribadi, tetapi penilaian itu dikaitkan dengan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran.

Penilaian itu diperlukan karena :

- a. Penilaian hasil kerja dapat memberikan informasi untuk pengambilan keputusan dalam hal promosi dan penghargaan.
- b. Penilaian hasil kerja dapat memberikan kesempatan kepada bawahan maupun atasan untuk bersama-sama meninjau hubungan kerja mereka.
- c. Untuk mengidentifikasi ketidak efisienan yang mungkin timbul.

Dengan demikian, maka penting bagi pimpinan Kesatuan untuk mengintegrasikan kriteria kepentingan pribadi dengan tujuan organisasi.

2. Bagi bawahan adalah sangat penting untuk menyadari bahwa kebijaksanaan yang disampaikan pimpinan, bukanlah untuk kepentingan pribadi pimpinan itu sendiri, tetapi semata-mata adalah untuk kepentingan organisasi dan kepentingan masyarakat luas sesuai dengan tujuan dan tugas organisasi. Thema "TEKADKU PENGABDIAN TERBAIK" dimaksudkan untuk meningkatkan hasil pelaksanaan tugas Polri semaksimal mungkin, agar harapan masyarakat akan kondisi Kamtibmas yang mantap dan terkendali dapat dicapai, sehingga masyarakat akan dapat merasakan adanya perasaan aman dan tenteram lahir bathin, bebas dari gangguan dan rasa kekhawatiran serta ketidak pastian hukum.

Untuk menunjang agar keijaksanaan pimpinan dapat terlaksana dengan baik, perlu meyakinkan sendiri bahwa segala kesadaran dan kemampuan yang dimiliki sudah disambungkan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kita. Dan juga keyakinan bahwa dengan bekerja sungguh-sungguh adalah merupakan pilihan terbaik, karena dengan itu pulalah kepentingan dirinya juga akan dipenuhi.

Lebih dari itu perlu disertai dengan upaya-upaya peningkatan kemampuan diri, dengan lebih banyak belajar menambah pengetahuan dan keterampilan, serta mencoba ide-ide baru untuk menciptakan metoda-metoda pelaksanaan tugas yang lebih baik.

Pokok-pokok pikiran ini perlu dipahami, demengerti, dihayati dan diamalkan oleh semua anggota Polri.



# Pesan-Pesan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Segenap Prajurit Bhayangkara,  
beserta keluarga yang saya cintai.

Sejak saya ditunjuk menjadi Pimpinan Polri oleh Bapak Presiden pada tanggal 7 Pebruari 1991 saya sudah berkeinginan untuk melihat dengan mata kepala sendiri kondisi satuan saya. Dan harus selesai sebelum 1 Juli 1991. Kiranya Tuhan meridhoi, karena saya dapat menyelesaikan kunjungan saya ke semua Polres di jajaran bumi Pertiwi ini pada tanggal 20 Juni 1991.

Senang dan bahagia sekali saya bisa berada di tengah anda semua. Tapi juga berprihatin karena kondisi Polri yang masih harus dipacu dengan kerja keras untuk dibangun. Inilah pekerjaan besar yang harus kita lakukan.

Disemua tempat saya sampaikan bahwa kemajuan pribadi yang dapat mengangkat kemajuan satuan harus dilakukan. Semua anggota pangkat terendah sekalipun harus dibuat sependai KAPOLRESnya. Dan saya berjanji bahwa tahun depan akan kembali untuk melihat kemajuan yang mereka capai.

Sementara itu perkembangan masyarakat Indonesia yang sedang membangun ini juga maju dengan pesat. Tuntutan terhadap pelayanan dan pelaksanaan tugas POLRI meningkat tajam juga. Mereka tidak mau tahu adanya berbagai kendala yang dihadapi POLRI. Mereka hanya ingin melihat Polisi ini sempurna – perfect – dalam betugas – untuk itulah mereka digaji dengan uang rakyat.

Menghadapi kenyataan ini memang tidak ada cara lain kecuali kita **harus sanggup mempersembahkan kerja keras dengan sikap rela berkorban** demi Nusa dan Bangsa. Untuk itulah kita harus mematok ikrar disanubari kita masing-masing :

## " TEKADKU PENGABDIAN TERBAIK "

Selamat bertugas ! Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi perlindungan dan kekuatan pada kita semua.

**2.** Segenap Prajurit Bhayangkara,  
beserta keluarga yang saya cintai.

Pada Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-45 tanggal 1 Juli 1991 yang singkatan resminya : "HUT BHAYANGKARA 45-1991" telah kita ikrarkan satu tekad murni dari sanubari kita masing-masing : " TEKADKU PENGABDIAN TERBAIK "

Saya merasa perlu untuk mengingatkan secara terus menerus bahwa ; hakekat dari eksistensi atau keberadaan kita sebagai Anggota Polri itu adalah mengabdikan Rastra Sewakotama – adalah kaul utama segenap Anggota Polri yang artinya : POLRI adalah abdi utama dari masyarakat.

Pernahkan anda mendalami makna dari ikrar dan kaul itu – luangkan waktu anda sejenak untuk merenung : Apakah yang sudah aku lakukan – dilanjutkan dengan – Apakah yang seharusnya aku lakukan ? Ini adalah wujud nyata dari sikap introspeksi. Orang yang melakukan hal ini, akan dapat menerapkan ilmu management yang baik karena dia menganalisa "SWOT" (Strength, Weakness, Oportunity, Threats) tentang dirinya – tentang satuannya – tentang keluarganya dan sebagainya, dengan arah : Hari esok yang lebih baik.

Banyak waktu kita telah mengkhianati ikrar itu dengan sikap; "lupa kacang akan kulitnya". Banyak waktu kita terpeleset oleh kulit pisang – oleh kerikil yang kadang-kadang kita pasang sendiri. Melalui instrospeksi sederhana ini saya ingin mengajak agar kita menyadari kembali tentang jati diri kita masing-masing. Yang utama introspeksi itu harus ditutup dengan menggelorakan ikrar thema "HUT BHY 45-1991": "TEKADKU PENGABDIAN TERBAIK".

Marilah hari-hari ini kita hadapi dengan penuh ketegaran sikap seorang hamba penegak hukum yang tangguh dengan niat baik, tekad baik, perilaku baik pasti berakhir baik – Yakini-lah ! Tuhan beserta kita. Selamat bertugas !

3. Segenap Prajurit Bhayangkara,  
beserta keluarga yang saya cintai.

Hari-hari semakin jauh dengan "HUT BHY 45-1991" yang lalu, tapi apakah ikrar kita menjadi padam? Saya harap tidak! Saya ingin justru semakin berkobar – menyala dan membahana – bergema diseantero wilayah pengabdian kita masing-masing.

Saya gembira mendengar bahwa keluarga besar POLRI semakin manis, semakin kompak. Itu sebenarnya proyeksi dari sikap pengabdian terbaik kita. Ada juga yang segera bereaksi: Ah itu tidak benar!

Buktinya si Anu berbuat pungli, main pukul, baku piara (punya simpanan) tidak ditindak. Omong kosonglah itu pengabdian terbaik! Makanlah kentut itu! – Ya memang, kita tidak bisa ingkar dari kenyataan, bahwa yang demikian masih terjadi. Tapi saya berharap agar yang sedemikian itu bisa mengecil dan terkikis.

Bagaimana caranya? kembali kepada hakekat ikrar kita saja: Tekadku Pengabdian Terbaik! kalau tiap individu Polri mampu mempedomaninya, mampu mewujudkan dalam sikap dan perbuatan nyata, insyaallah secara umum kita akan menjadi baik juga.

Perlu disadari bahwa orang ingin berbuat baikpun, tidak pernah luput dari goda. Makin keras kita berusaha makin besar dan makin canggih godaannya. Disitu sebenarnya iman dan taqwa kita diuji dan disitu jugalah kemantapan ikrar kita ditempa. Setiap hambatan teratasi berarti ikrar itu makin kokoh – cerminan iman dan taqwa yang semakin baik. Karenanya melalui kesempatan ini untuk kesekian kalinya saya ingin mengajak keluarga besar POLRI untuk lebih memperteguh pancangan ikrar: Tekadku Pengabdian Terbaik!

Karena ini cerminan iman dan taqwa; pasti Tuhan akan mengabulkan dan melindungi kita semua – Selamat bertugas!

DIREKTUR UTAMA : PROF. DR. ING. B.J. HABIBIE  
BERSERTA PARA DIREKSI  
DAN SELURUH KARYAWAN

MENYAMPAIKAN  
**SELAMAT ATAS 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> DASAWARSA  
POLRI 1991**  
SEMOGA SUKSES DAN TETAP JAYA



SS1V1



SS1V2



## PT PINDAD (Persero)

HEAD OFFICE : Jl. Jendral Gatot Soebroto, Kiaracondong, P.O. Box 8 Bandung - Indonesia  
• Phones : (022) 71608, 72073 - 72076, 304095 • Telex : 28572 BD • Facsimile (022) 301222, 304095

SALES OFFICE : ARTHALOKA Building 6th Floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 2 Jakarta - Indonesia  
• Phones : (021) 586770, 584544 • Telex : 62984 PINDAD IA • Facsimile (021) 587612, 536770



"Dirgahayu POLRI  
yang ke 45 Tahun  
1 Juli (1946 - 1991)."

Kami selalu siap berada  
diantara jajaran pertahananmu:  
digaris depan maupun digaris  
belakang, bahkan memasok  
kebutuhan logistikmu serta  
jasa-jasa lain yang engkau  
butuhkan.

NBO-105



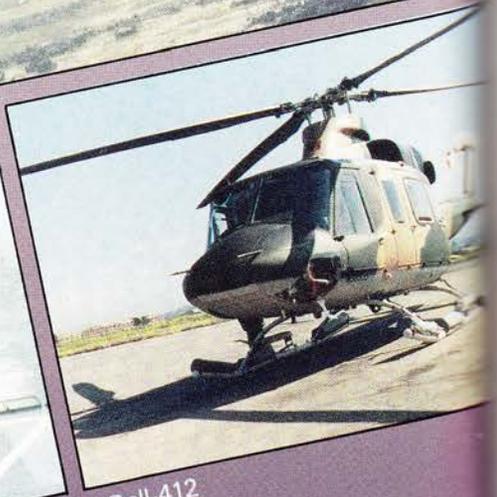
NC-212



Super Puma NAS-332



NBell-412



PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara

CN-235



## Polri Dewasa Ini

### PENDAHULUAN

Yang dimaksud dengan "Polri Dewasa Ini" adalah gambaran wajah serta keadaan Polri dalam usianya yang 4½ dasawarsa pada tanggal 1 Juli 1991.

Yang disuguhkan pada bagian ini meliputi struktur organisasi beserta para pejabatnya, baik di tingkat Markas Besar maupun di tingkat Polda, serta perkembangan ataupun keadaan Polri pada usia 4½ dasawarsa tersebut.

Mengenai struktur organisasi beserta keterangannya, disini tidak dipaparkan secara mendetil dan menyeluruh, karena maksudnya hanya untuk diketahui secara garis besar dalam rangka penggambaran Polri secara umum.

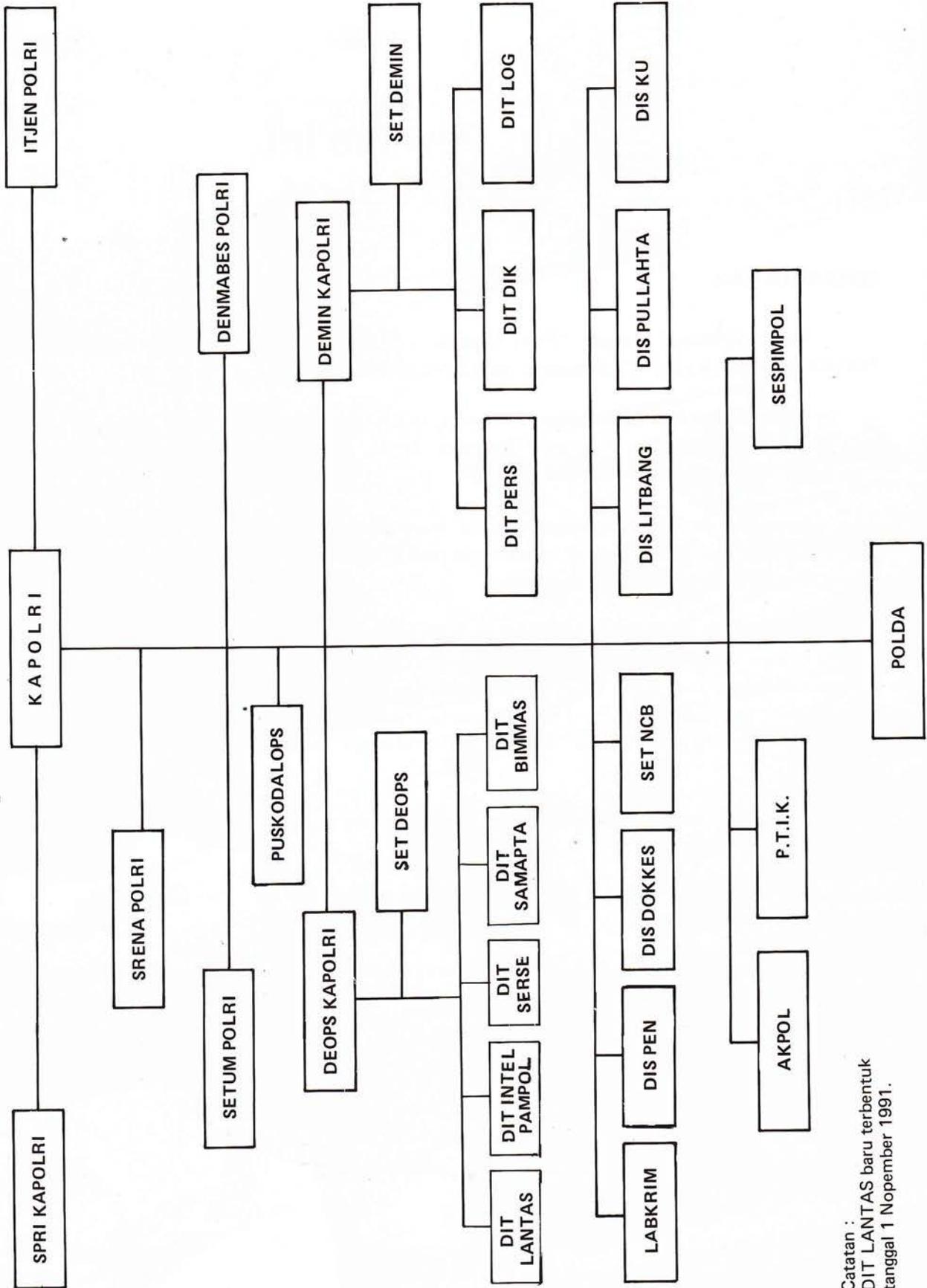
Polri selalu dihadapkan pada semua aspek kehidupan masyarakat yang berkembang dengan cepat. Perkembangan disegala bidang ini, disamping berdampak positif, juga melahirkan permasalahan yang perlu penanganan mendasar. Dengan demikian tugas Polri akan selalu berkembang, dan untuk itu Polri dengan sendirinya harus pula mengembangkan diri, kalau tidak melebihi, minimal sejajar dengan perkembangan masyarakat dan berbagai bidang lainnya itu.

Sampai dimana perkembangan dan keadaan Polri dewasa ini, disini dilukiskan secara sederhana dalam garis besar.

### STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Polri baik pusat maupun daerah sering berubah-robah sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Pada tingkat Markas Besar saat ini struktur organisasinya memakai tipe Direktorat sebagai berikut :

# Struktur Organisasi Polri (Kep/11/III/1984)



Catatan :  
DIT LANTAS baru terbentuk  
tanggal 1 Nopember 1991.

Untuk lebih jelasnya disajikan pokok-pokok organisasi dan prosedur dari Satuan-Satuan yang terdapat di dalam Struktur Organisasi Polri diatas secara garis besar sebagai berikut :

## **Staf Pribadi Kapolri ( SPRI KAPOLRI )**

Spri Kapolri adalah sekelompok Perwira dan personil lainnya pada eselon pembantu pimpinan/staf yang berkedudukan di bawah Kapolri.

Spri bertugas membantu Kapolri dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun tugas lain yang memerlukan perhatian khusus dari Kapolri.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Spri bertugas :

- Membantu Kapolri dalam menampung dan menangani masalah-masalah yang tidak terwadahi oleh badan-badan lain pada tingkat Mabes Polri, termasuk tugas dan fungsi Polri selaku kekuatan sosial.
- Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kapolri dalam menghadapi tugas sehari-hari, yang meliputi bahan-bahan rapat, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, amanat, naskah dan lain-lain.
- Menghubungi badan/pejabat yang bersangkutan untuk mendapatkan bahan/naskah/keterangan yang diperlukan oleh Kapolri untuk memungkinkan pemberian keterangan umum mengenai bidangnya.
- Menyiapkan rencana program Kerja Kapolri serta mengatur waktu/acara kegiatan sehari-hari Kapolri termasuk pengaturan kewajiban sosial.
- Mengatur penyelenggaraan pengamanan pribadi Kapolri, kegiatan protokol dan hubungan/liaison.
- Mengurus surat-surat pribadi Kapolri, serta melaksanakan tugas lain yang dibebankan tersendiri oleh Kapolri.

Spri Kapolri di pimpin oleh Koordinator Staf Pribadi, disingkat Korspri, serta unsur pembantu dan pelaksana, yaitu Staf Ahli, Sekretariat Pribadi Kapolri, disingkat Setpri Kapolri, dan Perwira Penghubung dan Protokol, disingkat Pabungkol.

## **Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan Kepolisian Negara Republik Indonesia ( ITJEN POLRI )**

Inspektorat Jenderal dan Perbendaharaan Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Itjen Polri, adalah badan pelaksana pada tingkat Markas Besar Polri yang berkedudukan dibawah Kapolri.

Itjen Polri bertugas menyelenggarakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur / satuan organisasi Polri berdasarkan kebijaksanaan Kapolri.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Itjen Polri melaksanakan berbagai fungsi sebagai berikut :

- Menyusun petunjuk, norma dan ketentuan sebagai pedoman penilaian dalam pengawasan dan pemeriksaan.
- Penyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan atas pembinaan personil, materil, fasilitas, keuangan, produksi dan jasa, organisasi dan metoda termasuk dalam pengelolaan badan-badan ekstra struktural dan badan-badan lain yang dibentuk oleh dan dalam lingkungan Polri.
- Penyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan tentang kesiapan dan kesiagaan serta penyelenggaraan kegiatan operasional.
- Penyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan dalam bidang hukum disiplin, tata tertib dan masalah-masalah khusus.
- Penyelenggarakan pengujian, penganalisaan, evaluasi, penilaian dan penyusunan laporan atas hasil pengawasan dan pemeriksaan.
- Merumuskan saran tindakan preventif dan represif kepada Kapolri atas segala penyimpangan dalam pelaksanaan tugas unsur/satuan organisasi Polri.
- Penyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan badan-badan atau instansi didalam dan diluar Polri dalam rangka pendinamisan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan serta untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

Itjen Polri dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal dan Perbendaharaan Polri, di singkat Irjen Polri, dengan pangkat Mayjen Pol.

Irjen Polri dibantu oleh suatu Staf, yaitu Staf Pembinaan Itjen, disingkat Sbin Itjen, bertugas membina serta menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemeriksaan. Disamping itu Itjen Polri dibantu pula oleh unsur pelaksana, yaitu :

- Inspektur Operasi, disingkat Irops, adalah pembantu dan pelaksana Irjen Polri dalam penyelenggaraan dan pemeriksaan bidang operasional.
- Inspektur Perbendaharaan, disingkat Irben, adalah pembantu dan pelaksana Irjen Polri dalam penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan bidang perbendaharaan dan pembinaan logistik.
- Inspektur Pembinaan, disingkat Irbin, adalah pembantu dan pelaksana Irjen Polri dalam penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan bidang pembinaan personil, pendidikan dan masalah khusus lainnya.
- Tim Pemeriksa, yaitu yang melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan, yang dibentuk oleh Irjen Polri untuk membantu para Inspektur, yang terdiri dari: Parik Inspektur yang bersangkutan, dan beberapa orang pejabat fungsional/pembina teknis dari lingkungan Polri sesuai kebutuhan, dan Tim bertanggungjawab kepada Irjen Polri.

## **Staf Perencanaan dan Anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia ( SRENA POLRI )**

Staf Perencanaan dan Anggaran Polri, disingkat Srena Polri, adalah badan pembantu pimpinan dan staf yang berkedudukan dibawah Kapolri, dengan tugas membantu Kapolri dalam membina, menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi perencanaan serta fungsi penganggaran bagi pelaksanaan tugas Polri.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Srena Polri melaksanakan berbagai fungsi, yaitu :

- Merumuskan kebijaksanaan dan rencana strategi keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penjabaran kebijaksanaan Pangab.
- Merumuskan perencanaan strategik pembinaan kemampuan dan pembinaan kekuatan Polri.
- Merumuskan dan mengembangkan sistem, metode, organisasi dan prosedur Polri.
- Merumuskan kebijaksanaan dalam bidang penelitian dan pengembangan serta pengumpulan, pengolahan dan penyajian data.
- Merumuskan rencana program dan anggaran Polri.
- Menyelenggarakan pelaksanaan anggaran Polri.
- Menyelenggarakan pengendalian program dan anggaran Polri.
- Mengadakan penelaahan dan pengkajian kuantitatif terhadap hal-hal yang menyangkut kebutuhan, efektivitas dan efisiensi dengan pendekatan ilmiah.
- Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan badan atau instansi didalam dan diluar Polri, dalam rangka pelaksanaan tugasnya, serta melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Kapolri.

Srena Polri dipimpin oleh seorang Asisten, disingkat Asrena Kapolri, pangkat Mayjen Pol. dan seorang wakil Asisten, disingkat Waasrena Kapolri.

Asrena juga dibantu oleh unsur-unsur pelaksana, yaitu :

- Perwira Pembantu Utama—I/Strategi, disingkat Paban I/Strategi, bertugas membantu Asrena Kapolri dalam penyelenggaraan perumusan kebijaksanaan dan perencanaan strategik termasuk pembangunan dalam lingkungan Polri.
- Perwira Pembantu Utama—II/Sistem Manajemen, disingkat Paban II/Sisjemen, bertugas membantu Asrena dalam penyelenggaraan pembinaan sistem manajemen, termasuk sistim informasi, organisasi dan prosedur serta penelitian dan pengembangan.
- Perwira Pembantu Utama—III/Perencanaan Program dan Anggaran, disingkat Paban III/Renprogar, bertugas membantu Asrena Kapolri dalam penyelenggaraan penyusunan rencana program dan anggaran Polri.
- Perwira Pembantu Utama—IV/Pelaksanaan Anggaran, disingkat Paban IV/Lakgar, bertugas membantu Asrena Kapolri dalam penyelenggaraan pelaksanaan anggaran Polri.
- Perwira Pembantu Utama—V/Pengendalian Program, disingkat Paban V/Dalpro, bertugas membantu Asrena Kapolri dalam penyelenggaraan pengendalian program dan anggaran Polri.

## **Sekretariat Umum Polri ( SETUM POLRI )**

Sekretariat Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Setum Polri, adalah badan pelayanan pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara RI yang berkedudukan dibawah Kapolri.

Setum Polri bertugas membina dan melaksanakan urusan kesekretariatan umum Polri.

Untuk itu Setum Polri menyelenggarakan pembinaan kesekretariatan umum dalam lingkungan Polri; menyelenggarakan korespondensi, dokumentasi termasuk pemeliharaannya dan ketatalaksanaan perkantoran; serta menyelenggarakan pendinamisasian kearsipan Polri dan pelaksanaan Pos Militer dalam lingkungan Mabes Polri.

Setum Polri dipimpin oleh seorang Kepala, disingkat Kasetum Polri dengan pangkat Kolonel Polisi, dan dibantu oleh seorang Wakil, disingkat Wakasetum Polri dengan pangkat Letkol Pol.

---

## **Detasemen Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia ( DENMABES POLRI )**

Detasemen Markas Mabes Polri, disingkat Denmabes Polri, adalah badan pelayanan pada tingkat Mabes Polri yang berkedudukan dibawah Kapolri, yang bertugas membantu Kapolri dan staf dalam menyelenggarakan pelayanan bagi dan dalam lingkungan Mabes Polri.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut diatas, Denmabes Polri melakukan berbagai fungsi seperti :

- Menyelenggarakan urusan dalam, termasuk penegakan tata tertib, disiplin, tertib hukum serta pengamanan personil, fasilitas dan instalasi.
- Menyelenggarakan perawatan personil dan kesehatan anggota.
- Menyelenggarakan pemeliharaan materiil dan pembekalan.
- Mengatur dan melaksanakan pengangkutan, pemondokan/perumahan dan perkantoran.
- Menyelenggarakan pengamanan dan penjagaan bagi pejabat dan tamu penting Kapolri.
- Menyelenggarakan pelayanan komunikasi markas.
- Melaksanakan urusan protokol dan pembinaan korps musik.

Denmabes Polri dipimpin oleh seorang Kepala dan Wakil Kepala, disingkat dengan Kadenmabes Polri, dengan pangkat Kolonel Pol. dan Wakadenmabes Polri, dengan pangkat Letkol Pol.

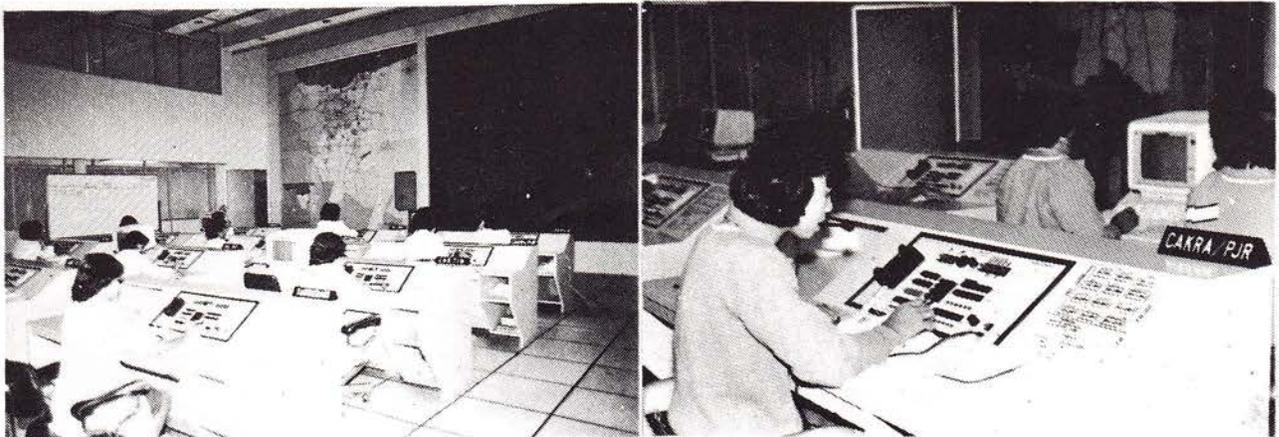
## Pusat Komando dan Pengendalian Operasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (PUSKODALOPS POLRI)

Puskodalops Polri, adalah badan pelaksana staf pada tingkat Mabes Polri yang berkedudukan dibawah Kapolri, dengan tugas menyelenggarakan pembinaan sistim dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya komando dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas operasional sehari-hari pada tingkat Mabes Polri.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Puskodalops melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- Ikut serta membina sistim informasi lingkungan operasional kepolisian termasuk metoda dan tehnik pengendalian operasional.
- Menerima dan menyalurkan semua data/informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas operasional melalui jaringan komunikasi yang tersedia baik antara satuan-satuan dalam lingkungan Polri maupun dengan instansi di luar Polri, termasuk berita/informasi bidang pembinaan.
- Memonitor secara aktif dan terus menerus tentang situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dari seluruh wilayah.
- Menyelenggarakan komando dan pengendalian operasi.
- Dalam situasi krisis, berfungsi sebagai pusat pengendalian krisis.

Puskodalops dipimpin oleh seorang Kepala, dan disingkat Kapuskodalops Polri dengan pangkat Kolonel Polisi.



*Peralatan telekomunikasi canggih di Puskodalops,*

## **Sekretariat Deputi Kapolri Bidang Operasi ( SET DEOPS )**

Sekretariat Deputi Kapolri bidang Operasi, disingkat Set Deops Kapolri, adalah badan pelayanan dan staf yang berkedudukan dibawah Deops Kapolri, yang bertugas memberi bantuan dan pelayanan administrasi kepada Deops dan semua direktorat serta badan-badan yang berada dibawah pengendalian dan koordinasi Deops Kapolri.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Set Deops melaksanakan berbagai fungsi seperti :

- Merumuskan dan menyiapkan petunjuk perencanaan program kerja bidang operasional serta memadukan rencana dan program kerja badan-badan yang berada dibawah koordinasi dan pengendalian Deops Kapolri.
- Mengkaji masalah-masalah yang berkenaan dengan bidang operasional dan penyelenggaraan pembinaan operasi dan latihan serta merumuskan dan menyiapkan kebijaksanaan bidang operasional.
- Menyusun statistik dan menyiapkan laporan Deops Kapolri serta administrasi operasional lainnya.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan administrasi personil semua Direktorat yang berada dibawah pengendalian Deops Kapolri, dan lain-lain.

Set Deops Kapolri dipimpin oleh seorang Kepala, disingkat Kaset Deops Kapolri dengan pangkat Kolonel Polisi.

---

## **Sekretariat Deputy Bidang Administrasi ( SET DEMIN )**

Sekretariat Deputy Kapolri Bidang Administrasi, disingkat Set Demin Kapolri, adalah badan pelayanan dan staf yang berkedudukan dibawah Demin Kapolri, yang bertugas memberikan bantuan dan pelayanan administrasi kepada Demin Kapolri dan semua Direktorat serta badan-badan yang berada dibawah koordinasi dan pengendalian Demin Kapolri.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Set Demin melaksanakan beberapa fungsi sebagai berikut :

- Merumuskan dan menyiapkan petunjuk perencanaan program kerja bidang administrasi serta memadukan rencana dan program kerja badan-badan yang berada dibawah koordinasi dan pengendalian Demin Kapolri.
- Mengkaji masalah-masalah yang berkenaan dengan bidang administrasi serta merumuskan dan menyiapkan kebijaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi personil, pendidikan termasuk pendidikan tingkat akademi, pengembangan keahlian dan pengembangan umum tertinggi serta pembinaan logistik termasuk materiil khusus kesehatan dan pelayanan.
- Menyusun statistik dan menyiapkan laporan Demin Kapolri.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan administrasi personil semua Direktorat yang berada dibawah pengendalian Demin Kapolri, dan lain-lain.

Set Demin Kapolri dipimpin oleh seorang Kepala, disingkat Kaset Demin Kapolri dengan pangkat Kolonel Polisi.

## Direktorat Intelijen dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia ( DITINTELPAMPOL )

Direktorat Intelpampol adalah badan pelaksana pada tingkat Markas Besar Polri yang berkedudukan dibawah Deputi Kapolri Bidang Operasi disingkat Deops Kapolri.

Ditintelpampol bertugas membina fungsi Intelijen dan Pengamanan Kepolisian bagi pelaksanaan tugas Polri serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi Intelijen dan pengamanan Kepolisian baik bersifat nasional/terpusat maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat kewilayahan.

Intelijen Kepolisian adalah bagian integral dari fungsi Polri yang melakukan kegiatan intelijen yang meliputi antara lain "Early Detecting" dan Early Warning", dalam rangka kegiatan/operasi Kepolisian maupun operasi Kamtibmas. Teknik penyelenggaraan fungsi tersebut meliputi segala kegiatan dan pekerjaan antara lain penyelidikan, pengamanan dan pengalaman dalam rangka pelaksanaan tugas operasional Kepolisian yang bersifat preventif maupun represif, termasuk tugas - tugas operasional Hankam yang dibebankan kepada Polri.

Pengamanan Kepolisian adalah bagian integral dari fungsi Intelpol yang melakukan kegiatan pengamanan terhadap Komando, Kesatuan, personil, Materiil, pemberitaan dan kegiatan-kegiatan Polri lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya Ditintelpampol mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Membina dan mengembangkan fungsi Intelijen dan Pengamanan Kepolisian yang meliputi fungsi-fungsi teknis Intelijen Kepolisian, Pengamanan Polri, Pengamanan Masyarakat dan Pembangunan, Pengamanan serta Pengawasan Senjata Api dan Bahan Peledak, baik menyangkut doktrin maupun sistem dan metoda.
- b. Menyelenggarakan upaya untuk mendeksi dan mengidentifikasi sumber - sumber ancaman Kamtibmas, meliputi antara lain "Early Detecting" dan "Early Warning", khususnya kriminalitas dan sumber gangguan Kamtibmas.
- c. Menyelenggarakan upaya dalam rangka menciptakan kondisi tertentu di dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Polri.
- d. Menyelenggarakan pengamanan ke dalam tubuh Polri, baik pengamanan personil, materiil, informasi, maupun kegiatan terhadap ancaman dari luar dan dalam tubuh Polri serta menyelenggarakan dan melaksanakan pengamanan persandian Polri.
- e. Menyelenggarakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- f. Menyelenggarakan upaya pengamanan masyarakat, untuk menghilangkan kerawanan Kamtibmas, termasuk pengawasan orang asing.
- g. Menyelenggarakan pengamanan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan nasional untuk mencegah tumbuhnya kondisi kriminogen.
- h. Menyelenggarakan pengamanan dan pengawasan terhadap pengadaan, perijinan, penggunaan, pemindahan, pengangkutan, penyimpanan/penimbunan senjata api, amunisi dan bahan peledak yang bukan organik ABRI.
- i. Menyelenggarakan pemberian bantuan operasional kepada Kepolisian Daerah. Seperti penjinakan bahan peledak dan barang berbahaya lainnya.
- j. Menyusun perkiraan-perkiraan intelijen Kepolisian baik jangka panjang, jangka sedang, jangka pendek dan insidental untuk kepentingan kebutuhan operasional Polri berdasarkan Perkiraan Intelijen Strategik ABRI.
- k. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi/badan/instansi di dalam

dan di luar Polri dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Disamping itu tentunya melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Kapolri.

Direktorat Intelpampol dipimpin oleh seorang Direktur dengan pangkat sampai Brigjen Pol. dan dibantu oleh Staf berupa Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan pangkat Kolonel Pol., serta 5 Sub Direktorat (Subdit) yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala dengan pangkat Kolonel Pol. selaku pelaksana.

Adapun ke 5 Subdit itu adalah :

— **Subditintelkrim**, yang bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis serta pelaksanaan fungsi teknis Intelijen Kriminil, baik yang bersifat nasional/terpusat maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat kewilayahan.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Subintelkrim melaksanakan kegiatan antara lain :

- a. Menyelenggarakan pembinaan teknis fungsi intelkrim dalam rangka pembinaan fungsi Intelpampol secara menyeluruh.
- b. Menyelenggarakan upaya mendeteksi dan mengidentifikasi sumber-sumber ancaman Kamtibmas khususnya terhadap kejahatan yang berkadar ancaman tinggi termasuk kejahatan Internasional dan yang berlatar belakang subversi (kejahatan terhadap keamanan negara).
- c. Mengumpulkan bahan keterangan, penelitian dan penganalisaan terhadap kriminalitas pada umumnya, untuk dapat menandai trend perkembangannya.
- d. Menyelenggarakan pengungkapan terhadap jaringan-jaringan kejahatan, khususnya yang berkadar ancaman tinggi, baik secara mandiri maupun secara terpadu dengan fungsi teknis kepolisian lainnya.
- e. Menyelenggarakan upaya dalam rangka menciptakan kondisi tertentu di dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Subditintelkrim.

— **Subditpammasbang**, yang bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis serta pelaksanaan fungsi teknis Pammabang (Pengamanan masya-

rakat dan pembangunan) baik yang bersifat nasional/terpusat maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat kewilayahan.

Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Subditpammasbang menyelenggarakan beberapa kegiatan antara lain :

- a. Menyelenggarakan pembinaan teknis fungsi Pammabang dalam rangka pembinaan fungsi Intelpampol secara menyeluruh.
  - b. Menyelenggarakan upaya pengamanan masyarakat, untuk menghilangkan kerawanan kammas dengan melaksanakan deteksi dan identifikasi terhadap faktor-faktor korelatif kriminogen bidang pembangunan sosial politik, ekonomi, budaya dan kegiatan masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun hasil-hasilnya.
  - c. Melakukan upaya pencegahan dan menanggulangi timbulnya aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau ancaman persatuan dan kesatuan bangsa.
  - d. Menyelenggarakan upaya pengamanan / pengawasan kegiatan masyarakat melalui pemberian izin/rekomendasi dan surat keterangan serta pengamanan kegiatan pejabat-pejabat penting/tamu pemerintah.
  - e. Menyelenggarakan upaya dalam rangka menciptakan kondisi tertentu di dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Subditpammasbang.
- **Subditpamsan**, yang bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis serta pelaksanaan



*Bahan amunisi untuk bahan peledak yang pengawasannya menjadi tanggung jawab Polri Intelpampol.*

fungsi teknis Pengamanan Kepolisian (Pampol) dan Sandi Kepolisian (Sandipol), baik yang bersifat nasional/terpusat maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat kewilayahan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Subditpamsan menyelenggarakan, antara lain :

- a. Melakukan pembinaan teknis fungsi pampol dan sandipol dalam rangka pembinaan fungsi Intelpampol secara menyeluruh.
- b. Menyelenggarakan upaya pengamanan ke dalam tubuh Polri, baik pengamanan personil, materiil, informasi maupun kegiatan terhadap ancaman dari luar tubuh Polri serta menyelenggarakan dan melaksanakan pengamanan persandian Polri.
- c. Melaksanakan deteksi dan pengamanan terhadap perubahan-perubahan serta perkembangan aspek-aspek pelaksanaan tugas Polri yang merupakan kerawanan-kerawanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
- d. Menyelenggarakan upaya dalam rangka menciptakan kondisi tertentu didalam tubuh Polri yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas dan upaya pembinaan Polri.
- e. Menyelenggarakan analisa dan evaluasi tentang pelaksanaan penerimaan calon anggota Polri dan melaksanakan screening personil Polri pada saat masuk anggota Polri maupun untuk kepentingan tertentu serta screening terhadap orang-orang yang berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas Polri.

— **Subditpoa**, yang bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis serta pelaksanaan pengawasan orang asing baik yang bersifat nasional/terpusat maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat kewilayahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subditpoa menyelenggarakan beberapa kegiatan antara lain :

- a. Menyelenggarakan pembinaan teknis pengawasan orang asing dalam rangka pembinaan fungsi teknis pengamanan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan upaya pengamanan/pengawasan orang asing untuk menghilangkan kerawanan Kamtibmas.
- c. Menyelenggarakan tugas pengamanan, pengawasan, perlindungan terhadap orang asing yang berada di Indonesia yang legal maupun illegal (Imigran gelap) sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

- d. Menyelenggarakan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran ketentuan perundang-undangan tentang orang asing.
- e. Menyelenggarakan upaya dalam rangka menciptakan kondisi tertentu yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Subditpoa.

— **Subditwassendak**, yang bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis serta pelaksanaan fungsi teknis Wassendak (Pengawasan senjata api dan bahan peledak) baik yang bersifat nasional/terpusat maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat kewilayahan.

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Subditwassendak melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain :

- a. Menyelenggarakan pembinaan teknis fungsi Wassendak dalam rangka pembinaan fungsi Intelpampol secara menyeluruh.
- b. Menyelenggarakan pengamanan, pengawasan dan pengendalian serta perijinan senjata api, amunisi dan bahan peledak serta alat/bahan berbahaya lainnya termasuk bahan radio aktif yang bukan organik ABRI, yang meliputi kegiatan pasukan, pengeluaran, pengangkutan, penyimpanan (penimbunan) penggunaan, pemindahan, pemindah tanganan (penghibahan), pembuatan dan pemusnahan.
- c. Menyelenggarakan penyidikan terhadap penyimpanan / penimbunan, penggunaan, pemindahan, pemindah tanganan senjata api, amunisi dan bahan peledak serta alat/bahan berbahaya lainnya termasuk bahan radio aktif yang bukan organik ABRI.
- d. Menyelenggarakan upaya dalam rangka menciptakan kondisi tertentu di dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Subditwassendak.
- e. Melaksanakan pengamatan dan penelitian dengan mengikuti perkembangan teknologi senjata api, amunisi dan bahan peledak serta alat/bahan berbahaya lainnya termasuk bahan radio aktif bukan organik ABRI baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri, dan ikut serta dalam melaksanakan uji coba senjata api dan bahan peledak apabila dipandang perlu.
- f. Menyelenggarakan upaya dan tindakan penjinakan bahan peledak, amunisi dan barang berbahaya lainnya, baik atas permintaan maupun berdasarkan pertimbangan keamanan.

## Direktorat Reserse Kepolisian Negara Republik Indonesia ( DITSERSE POLRI )

Direktorat Reserse Polri, disingkat Ditserse Polri, adalah badan pelaksana pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dibawah Deputi Operasi (Deops) Kapolri.

Ditserse Polri yang merupakan fungsi teknis operasional kepolisian bertugas membina fungsi reserse kepolisian termasuk identifikasi bagi pelaksanaan tugas Polri serta menyelenggarakan

dan melaksanakan fungsi tersebut baik yang bersifat nasional/terpusat maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat kewilayahan.

Reserse Polri yang penyelenggaraannya melalui teknik-teknik tertentu, mengusahakan penindakan yang cepat, tepat dan cermat terhadap segenap peristiwa pidana, baik yang bersifat kriminal biasa maupun yang bermotif/



*Kapal CHERRY NAVEE yang telah mencuri muatan berupa playwod yang diangkut dari Indonesia, tetapi tidak pernah sampai ke negara tujuan, dengan cara menjual/menurunkan muatan di laut untuk dipindahkan ke kapal lain, kemudian Kapal CHERRY NAVEE diganti warna cat, nama Kapal dan Crew roll seolah-olah ganti, dan selanjutnya masuk ke Indonesia lagi untuk mengulangi perbuatan yang sama.*

latarbelakang subversi dalam rangka Binkamtibmas maupun Operasi Kamtibmas/Kamdagri, dengan sasaran untuk menghilangkan, setidaknya mengurangi terjadi / timbulnya kriminalitas, ancaman serta gangguan Kamtibmas lainnya, dengan prinsip represif untuk mendapatkan efek preventif.

Teknik-teknik dalam menaikan fungsi reserse Polri tersebut meliputi antara lain : pengejaran, penangkapan, pemeriksaan, penyidikan dan pengungkapan perkara sampai ke Pengadilan.

Fungsi tersebut disebut sebagai fungsi represif.

Fungsi Reserse Polri diterapkan dan dikembangkan dalam tugas operasional Kepolisian sesuai dengan perkembangan pola ancaman/gangguan kriminalitas yang terjadi, termasuk faktor pelaku, tempat, waktu, instrumen, motif dan modus operandi, sehingga dari penerapan dan pengembangan macam dan bentuk peristiwa/perkara yang terjadi, dijadikan ilmu kejuruan dan keahlian dalam fungsi Reserse Polri, antara lain : Reserse Kriminil, Reserse Ekonomi, Reserse Narkotika, Reserse Uang Palsu dan lain-lain.

Dalam pengembangan kejuruan/keahlian diatas, masih diperlukan perkembangan lebih lanjut yang lebih "specialized", antara lain dalam bidang pembunuhan (Homicide), pemalsuan (Forgery) dan sebagainya.

Dalam menyelenggarakan fungsi reserse Polri yang cepat, tepat dan cermat, maka sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih, timbullah fungsi - fungsi bantuan teknis operasional yang bersifat teknis, teknologis/ilmiah, antara lain : Identifikasi Kepolisian, Laboratorium Kriminil Kepolisian, Psikologi Kepolisian, Hukum Kepolisian, dan lain-lain.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Ditserse Polri menyelenggarakan berbagai fungsi sebagai berikut :

a. Membina dan mengembangkan fungsi reserse kepolisian yang meliputi reserse mobil, reserse umum, reserse ekonomi, reserse narkotika, reserse uang palsu dan pemalsuan, serta fungsi identitas dan kriminalistik, baik yang menyangkut dokterin maupun sistim dan metoda.

- b. Menyelenggarakan kegiatan represif kepolisian melalui upaya penyelidikan, seperti pengejaran, penangkapan dan pemeriksaan; dan upaya penyidikan terhadap kasus-kasus kejahatan yang bersifat canggih dan mempunyai intensitas dan kualitas gangguan dengan dampak nasional maupun internasional, baik yang menyangkut kriminalitas umum maupun kriminalitas dalam bidang ekonomi termasuk penyelundupan, uang palsu dan narkotika.
- c. Melaksanakan penyidikan terhadap kejahatan internasional dalam rangka Internasional Criminal Police Organization (ICPO)/Interpol.
- d. Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Hukum Acara Pidana.
- e. Menyelenggarakan dan membina upaya penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam rangka pembuktian secara ilmiah melalui kegiatan identifikasi dan kriminalistik.
- f. Memberikan bantuan operasional kepada Satuan kewilayahan dan instansi-instansi lain di luar Polri, termasuk pelayanan umum di bidang identifikasi/daktiloskopi dan kriminalistik.
- g. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi/badan/instansi di dalam dan di luar Polri dalam rangka pelaksanaan tugasnya, serta melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Kapolri.



Pemeriksaan perbandingan sidik jari dengan peralatan Fingerprint Comparator.



*Para petugas komputer AFIS sedang memasukan keterangan perorangan/Sinyalemen dengan Data Entry Terminal.*

Direktorat Reserse Polri dipimpin oleh seorang Direktur dengan pangkat sampai Brigjen Pol., dibantu oleh suatu Staf berupa Sekretariat, disingkat Set Ditserse yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, disingkat Ses Ditserse, dengan pangkat Kolonel Polisi.

Disamping itu Direktur Serse Polri dibantu pula oleh 7 Sub Direktorat dan sebuah Satuan, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala dengan pangkat Kolonel Polisi.

Adapun Sub Direktorat (Subdit) dan Satuan tersebut adalah :

— **Sub Direktorat Reserse Umum**, disingkat Subditserseum adalah badan pembantu pimpinan dan pelaksana yang bertugas membantu menyelenggarakan pembinaan teknis fungsi reserse umum serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut baik yang bersifat nasional/terpusat maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat kewilayahan.

Untuk itu, Subditserseum melaksanakan berbagai fungsi, antara lain : menyiapkan rencana penyelenggaraan operasi dan latihan fungsi reserse umum yang bersifat terpusat; ikut mengawasi, menganalisa dan mengevaluasi hasil operasi dan latihan tersebut; melaksanakan kegiatan represif kepolisian melalui upaya penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kejahatan yang bersifat canggih dan mempunyai intensitas gangguan dengan dampak nasional maupun internasional, khususnya kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa, badan, kemerdekaan,

kehormatan orang dan harta benda serta kejahatan lain yang tidak menjadi bidang tugas dari reserse ekonomi, narkotika dan uang palsu.

Disamping itu mengadakan analisa kriminalitas terhadap korban, modus operandi dan pelaku, guna menemukan perkembangan pola kriminalitas; serta melaksanakan penyidikan terhadap kejahatan internasional dalam rangka Internasional Criminal Police Organization (ICPO)/ Interpol.

— **Sub Direktorat Reserse Ekonomi**, disingkat Subditserseek, dengan tugas membantu menyelenggarakan pembinaan teknis fungsi reserse ekonomi serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut baik yang bersifat nasional/terpusat, maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat kewilayahan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Subditserseek melaksanakan berbagai fungsi, yang umumnya sama dengan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh Subditserseum, namun hanya khusus bidang kejahatan yang ditujukan terhadap masalah perbankan (tidak termasuk pemalsuan giral), ekspor—import, moneter dan produksi perdagangan.

— **Sub Direktorat Reserse Narkotika**, disingkat Subditsersetik, bertugas membantu menyelenggarakan pembinaan teknis reserse narkotika serta melaksanakan fungsi tersebut secara terpusat/nasional, maupun untuk mendukung tugas tingkat kewilayahan.

Untuk itu Ditsersetik melaksanakan fungsi-fungsi yang juga sama seperti yang dilaksanakan oleh Ditserseum, tapi khusus dalam bidangnya,



*Data Entry Terminal, keterangan perorangan/Sinyalemen yang tertera di belakang kartu sidik jari dientry/dimasukan dengan terminal ini ke data base.*

yaitu kejahatan yang ditujukan pada penyelundupan narkotika, psicotropika, obat-obat keras dan zat-zat berbahaya lainnya, termasuk segala aspek yang terkait padanya.

— **Sub Direktorat Reserse Uang Palsu**, disingkat Subditserseupal, dengan tugas membantu menyelenggarakan pembinaan teknis fungsi reserse uang palsu serta menyelenggarakan fungsi tersebut baik yang bersifat nasional/terpusat maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat kewilayahan. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Subditserseupal melaksanakan berbagai fungsi yang sama dengan beberapa Subditserse terdahulu, namun hanya khusus menangani masalah kejahatan yang ditujukan pada pemalsuan mata uang dan pemalsuan surat berharga non uang (chartal, giral dan surat-surat berharga lainnya).

— **Sub Direktorat Identifikasi**, disingkat Subditiden, yang bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi khusus identifikasi serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut, baik yang bersifat nasional/terpusat maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat kewilayahan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Subditiden melaksanakan berbagai fungsi antara lain : mengembangkan teknis fungsi khusus identifikasi ; pembinaan personil pengembangan fungsi identifikasi, baik profesi, jiwa korsa maupun karier; membina peralatan khusus fungsi identifikasi; menyelenggarakan administrasi operasional, termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan aspek pelaksanaan fungsi identifikasi.

Disamping itu melaksanakan upaya pengenalan kembali ciri-ciri seseorang/pejabat dengan pembuktian secara ilmiah melalui sarana daktiloskopi, fotografi kepolisian, sinyalemen dan sarana identifikasi lain sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyelidikan.

Melaksanakan bantuan teknis identifikasi dalam rangka penyidikan dan pertukaran data/informasi identifikasi kriminal dalam lingkungan ICPO/Interpol.

— **Subdirektorat Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil**, disingkat Subditkorwas PPNS, yang bertugas menyelenggara-

kan pembinaan teknis serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersifat nasional/terpusat, termasuk memberikan bimbingan terhadap unsur-unsur pelaksana Korwas PPNS pada tingkat kewilayahan.

Untuk itu Subditkorwas PPNS melaksanakan fungsi-fungsi antara lain: Menyelenggarakan pembinaan teknis serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS agar pelaksanaan penyidikan memenuhi persyaratan teknis dan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Memberikan bimbingan dan petunjuk lapangan kepada unsur-unsur pelaksana Korwas PPNS pada kewilayahan dalam rangka mewujudkan keseragaman pelaksanaan Korwas terhadap PPNS.

Menyusun kurikulum dan mengadakan koordinasi dalam rangka pendidikan dan latihan PPNS.

Meneliti berkas perkara yang dilakukan PPNS sebelum diajukan kepada penuntut umum.

Menyusun persyaratan dan menyeleksi PNS untuk menjadi Penyidik.

— **Satuan Reserse Mobil Pusat**, disingkat Satresmobpus, bertugas melaksanakan fungsi reserse mobil baik yang bersifat nasional/terpusat maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat kewilayahan terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yakni yang mempunyai dampak nasional serta yang berintensitas dan dengan mobilitas tinggi. ◊



*Penyelundupan kayu yang berhasil digagalkan di Palembang beberapa waktu lalu.*

## Direktorat Samapta Kepolisian Negara Republik Indonesia ( DITSAMAPTA POLRI )

Direktorat Samapta Polri, yang disingkat dengan Ditsamapta Polri, adalah badan pelaksanaan pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dibawah Deputi Operasi (Deops) Kapolri.

Ditsamapta Polri bertugas membina fungsi kesamaptaan Kepolisian termasuk dalam kaitannya dengan fungsi lain bagi pelaksanaan tugas Polri serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut baik yang bersifat nasional/terpusat maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat kewilayahan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Ditsamapta Polri melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Membina dan mengembangkan fungsi kesamaptaan kepolisian, termasuk dalam kaitannya dengan fungsi lain, yang meliputi fungsi teknis Kepolisian Udara, Kepolisian Perairan, Lalu—Lintas, Sabhara dan Satwa, baik yang menyangkut doktrin maupun sistem dan metoda.
- Menyelenggarakan fungsi kesamaptaan Kepolisian dalam bentuk operasi rutin, operasi kepolisian dan operasi Kamtibmas.
- Menyelenggarakan pemberian bantuan operasional unsur-unsur Brimob, Polisi Perairan dan Polisi Udara serta satwa kepada satuan kewilayahan atau unsur lain.
- Menyelenggarakan pembinaan, penyediaan dan penyiapan unsur-unsur Polri untuk pelaksanaan upaya pertahanan dan keamanan Negara serta peranserta Polri dalam rangka pencarian dan penyelamatan Nasional.
- Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi/badan/instansi di dalam

dan di luar Polri dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

- Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Kapolri.

Direktorat Samapta Polri dipimpin oleh seorang Direktur dengan pangkat hingga Brigadir Jenderal Polisi.

Direktur Samapta Polri dibantu suatu Staf, yaitu Sekretariat Direktorat Samapta, disingkat Set Ditsamapta yang dipimpin oleh seorang sekretaris dengan pangkat Kolonel Polisi.

Sekretaris Ditsamapta, yang disingkat dengan Ses Ditsamapta dibantu oleh Tata Usaha dan Urusan Dalam, disingkat Taud dan 4 Bagian, masing-masing Bagian Perencanaan (Bagren), Bagian Pembinaan Sistim (Binsis) Bagian Logistik (Baglog) dan Bagian Pembinaan Personil (Bagbinpers).



*Kehadiran Patroli Polisi Didambakan Pemakai Jalan*

Disamping itu Dir Samapta dibantu oleh unsur pelaksana yang terdiri dari 6 Sub Direktorat, yang disingkat dengan Subdit, dan dipimpin oleh seorang Kasubdit dengan pangkat Kolonel Polisi.

Adapun ke 6 Subdit tersebut adalah :

– **Sub Direktorat Sabhara**, disingkat Subdit-sabhara, bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi teknis Sabhara dalam lingkungan Polri. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Subdit-sabhara menyelenggarakan beberapa fungsi antara lain :

Membina dan mengembangkan teknis fungsi Sabhara dalam rangka pembinaan fungsi kesamaptaan kepolisian secara menyeluruh termasuk dalam kaitannya dengan fungsi lain.

Membina personil pengembangan fungsi Sabhara, peralatan khusus Sabhara, serta mengatur penyelenggaraan operasi dan latihan fungsi Sabhara yang bersifat nasional/terpusat. Memonitor, mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan operasi dan latihan fungsi Sabhara termasuk yang diselenggarakan oleh tingkat kewilayahan, serta pengumpulan, pengolahan dan penyajian data tentang pelaksanaan fungsi sabhara.

Sabhara merupakan fungsi teknis operasional kepolisian yang bersifat preventif pasif, diselenggarakan dengan tujuan untuk mengusahakan pencegahan terhadap terjadinya kriminalitas atau ancaman/gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.



*Kehadiran Polri akan menimbulkan ketenangan ditengah Masyarakat.*

Sasaran yang hendak dicapai ialah menghilangkan atau minimal mengurangi adanya faktor **kesempatan** dan **niat** kriminogen, sehingga pelanggaran serta tindak pidana maupun non pidana tidak akan terjadi.

Penyelenggaraan fungsi Sabhara meliputi teknik-teknik antara lain: patroli, penjagaan, pengawalan, pengejaran, penangkapan, dan pemeriksaan tingkat pertama di tempat kejadian perkara, dalam rangka penindakan kepolisian terbatas.

Pada hakekatnya setiap anggota Polri terutama yang berpakaian seragam adalah pengemban tugas Sabhara.



*Seorang Anggota Sabhara memberikan keterangan kepada turis.*

– **Sub Direktorat Lalu Lintas** (sekarang Dit. Lantas), disingkat Subditlantas, mempunyai tugas membina fungsi teknis Lalu Lintas serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat kewilayahan.

Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Subditlantas menyelenggarakan berbagai fungsi antara lain: Membina dan mengembangkan teknis fungsi Lalu Lintas dalam rangka pembinaan fungsi kesamaptaan kepolisian secara menyeluruh termasuk dalam kaitannya dengan fungsi lain; Ikut membina personil pengembangan fungsi Lalu Lintas baik yang menyangkut profesi dan jiwa korsa maupun karier, serta membina peralatan khusus fungsi Lalu Lintas; Menyiapkan rencana dan mengatur penyelenggaraan operasi dan latihan fungsi Lalu Lintas yang

bersifat terpusat; Mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan serta hasil operasi dan latihan baik yang bersifat terpusat maupun yang diselenggarakan oleh tingkat kewilayahan; Melaksanakan administrasi operasional termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi Lalu Lintas; Memberikan bimbingan dan dukungan operasional kepada satuan pengemban fungsi Lalu Lintas pada tingkat kewilayahan, dalam penanggulangan dan pengungkapan kasus kecelakaan Lalu Lintas yang menonjol; Dan mengadakan pengkajian masalah Lalu Lintas baik yang menyangkut masalah manusia, prasarana jalan maupun prasarana angkutan.

Lalu Lintas adalah fungsi teknis operasional Kepolisian. Lantas diselenggarakan dengan tujuan untuk mengusahakan pencegahan, sekaligus penindakan secara penuh terhadap terjadinya kriminalitas/ancaman serta gangguan keamanan dan ketertiban Lalu Lintas di jalan umum (Kamtiblantas).

Penyelenggaraan fungsi Lantas meliputi teknik-teknik antara lain: pengaturan dan pengendalian lalu lintas, patroli, penjagaan, pengawalan, dan penindakan terhadap pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Dengan ruang lingkup fungsi Lantas yang demikian, maka penyelenggaraan Lantas disebut juga fungsi preventif pasif maupun aktif. Sebagai pedoman bertugas bagi anggota Lalu Lintas adalah :

- \* **Courtesy** : sopan santun, sikap hormat dan mengerti perasaan orang lain.
- \* **Service** : selalu siap memberikan pelayanan dan jasa-jasa guna kepentingan umum.
- \* **Protection** : memberikan perlindungan dan keselamatan kepada setiap orang dan benda di jalan umum.

— **Sub Direktorat Kepolisian Perairan**, disingkat Subditpolair bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi teknis Kepolisian perairan serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut baik yang bersifat nasional/terpusat maupun untuk mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat kewilayahan dalam rangka pembinaan Kamtibmas dan penegakan hukum di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia.



*Kapal-kapal penyelundup yang di tangkap Pol Air.*

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Subditpolair melaksanakan berbagai fungsi seperti : Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan teknis fungsi Kepolisian Perairan dalam rangka pembinaan fungsi kesamaptaan kepolisian secara menyeluruh termasuk kaitannya dengan fungsi lain; Ikut membina personil pengemban fungsi kepolisian perairan, baik yang menyangkut profesi dan jiwa korsa maupun karier; Ikut membina peralatan khusus fungsi kepolisian perairan; Menyiapkan rencana dan mengatur penyelenggaraan operasi dan latihan fungsi kepolisian perairan yang bersifat terpusat; Mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan serta hasil operasi dan latihan, baik yang bersifat terpusat maupun yang diselenggarakan oleh tingkat kewilayahan; Melaksanakan administrasi operasional, termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi tentang aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi kepolisian perairan; Dan melaksanakan fungsi kepolisian perairan, baik yang bersifat nasional/terpusat maupun untuk mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat kewilayahan dalam rangka pembinaan Kamtibmas dan penegakan hukum di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia.

Polisi Perairan yang disingkat Polair, merupakan fungsi teknis operasional Kepolisian yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mengusahakan pencegahan sekaligus penindakan terhadap terjadinya kriminalitas/ancaman serta gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di wilayah laut/perairan Nusantara (Kamtiblaut/

perairan).

Dalam hal ini termasuk pula pemberian bantuan pencairan dan pertolongan terhadap setiap peristiwa kecelakaan kapal laut dalam rangka SAR Nasional.

Dengan penyelenggaraan fungsi tersebut, sasaran yang hendak dicapai adalah menghilangkan atau minimal mengurangi adanya faktor **kesempatan** serta **niat** kriminogen, dalam bentuk pelanggaran atau kejahatan/tindak pidana yang menyangkut laut dan perairannya.

Penyelenggaraan fungsi Polair meliputi teknik-teknik, antara lain: patroli, pengawalan, pengejaran, penangkapan, dan penyidikan.

Disamping itu terdapat pula teknik-teknik lain dalam usaha pencarian dan pertolongan (SAR—Search and Rescue).

Melihat pelaksanaan fungsinya yang demikian maka penyelenggaraan fungsi Polair disebut pula fungsi preventif pasif maupun aktif.

Dalam rangka tugas Nasional, khususnya dibidang pemberantasan dan penanggulangan penyelundupan, fungsi Polair tergabung dalam tugas BAKORKAMLA (Badan Koordinasi Keamanan Laut) yang dibentuk Departemen HANKAM.

Adapun Kapal-kapal beserta jenisnya yang dimiliki Polair saat ini adalah: 10 buah tipe A500, 4 buah tipe A900, 9 buah tipe B600, 9 tipe C, dan 189 buah tipe C beroda di kewilayahan.



*Pol Air dan Pol Udara tengah melakukan SAR.*

— **Sub Direktorat Kepolisian Udara**, disingkat Subditpoludara bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi teknis Kepolisian udara serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut baik yang bersifat nasional/terpusat maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat kewilayahan. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Subditpoludara melaksanakan berbagai kegiatan: Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan teknis fungsi Kepolisian udara dalam rangka pembinaan fungsi kesamaptaan kepolisian secara menyeluruh termasuk kaitannya dengan fungsi lain; Ikut serta menyelenggarakan pembinaan personil pengemban fungsi Kepolisian udara, baik yang menyangkut profesi dan jiwa korsa maupun karier; Ikut serta menyelenggarakan pembinaan peralatan khusus fungsi Kepolisian udara, seperti pesawat terbang; Menyiapkan rencana dan mengatur penyelenggaraan operasi dan latihan fungsi Kepolisian udara yang bersifat terpusat; Mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan serta hasil operasi dan latihan, baik yang bersifat terpusat maupun yang diselenggarakan oleh tingkat kewilayahan; Menyelenggarakan dan melaksanakan administrasi operasional termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi Kepolisian udara; Menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi Kepolisian udara baik yang bersifat nasional/terpusat maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat kewilayahan.

Subditpoludara yang merupakan fungsi teknis operasional kepolisian yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mengusahakan pencegahan dan sekaligus penindakan terhadap terjadinya kriminalitas/ancaman serta gangguan terhadap keamanan dan ketertiban diwilayah laut atau perairan nasional.

Dalam hal ini termasuk bantuan pencarian dan pertolongan pada setiap peristiwa kecelakaan kapal laut maupun udara dalam rangka SAR Nasional.

Penyelenggaraan fungsi Poludara meliputi berbagai teknik antara lain : — patroli, — pengawalan, — pengejaran, — penangkapan, — dan teknik-teknik lain dalam usaha SAR.

Dalam rangka bantuan operasional taktis terhadap fungsi-fungsi teknis operasional lainnya, tercatat bentuk-bentuk teknik lainnya seperti :

- Bantuan udara taktis dalam rangka pengaturan lalu lintas dan udara.
- Bantuan udara taktis dalam rangka pengejaran sampai dengan penangkapan peristiwa tindak pidana, misalnya banditsme, pencurian mobil dan lain-lainnya dalam rangka tindakan represif.
- Bantuan angkutan udara dalam rangka kegiatan logistik.

Pesawat terbang dan Helikopter yang dimiliki Poludara saat ini adalah 20 buah yang terdiri dari pesawat bersayap tetap 6 buah, dan Helikopter 14 buah dengan 29 orang penerbang.

- **Pusat Brigade Mobil**, disingkat Pusbrimob, bertugas menyelenggarakan pembinaan kemampuan Brigade mobil serta menyelenggarakan dan melaksanakan pengerahan kekuatan untuk membantu pelaksanaan tugas operasional Polri baik yang bersifat nasional/terpusat maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat kewilayahan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Pusbrimob melakukan :

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan teknis Brigade mobil dalam rangka pembinaan fungsi kesamaptaan kepolisian secara menyeluruh termasuk dalam kaitannya dengan fungsi lain.
- b. Ikut serta membina personil Brigade Mobil, beserta peralatannya.
- c. Merencana dan menyelenggarakan latihan dan bantuan operasi yang bersifat terpusat,
- d. Mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan latihan dan bantuan operasi tersebut.
- e. Menyelenggarakan dan melaksanakan administrasi operasional termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan penggunaan kekuatan Brimob.

- f. Menyiapkan dan mengerahkan kekuatan dalam rangka tugas penjinakan bahan peledak dan tugas perlawanan teror.
- g. Melaksanakan penyiapan dan pengerahan kompi-kompi dalam rangka pemberian bantuan terhadap pelaksanaan tugas operasional Polri dan tugas-tugas lain yang diperlukan.

Pusbrimob dipimpin oleh Komandan Pusat Brigade Mobil, disingkat Danpusbrimob.

Brigade Mobil yang disingkat Brimob merupakan fungsi teknis bantuan operasional taktis yang tujuannya untuk membantu pelaksanaan fungsi teknis operasional Kepolisian lainnya, baik dalam penyelenggaraan fungsi Kesamaptaan dan pembinaan masyarakat (Patrol and Crime Prevention) maupun dalam fungsi penindakan (Crime Investigation).

Bantuan taktis Brimob ini adalah dalam rangka penyelenggaraan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Binkamtibmas) serta operasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Ops Kamtibmas).

Disamping itu Brimob juga berfungsi sebagai bantuan taktis tempur baik dalam rangka operasi Keamanan Dalam Negeri (Ops Kamdagri) maupun operasi Pertahanan (Opshan). Dengan fungsi Brimob yang meliputi preventif pasif/aktif dan represif, maka kemampuan profesional multiguna dan mobilitas yang tinggi, sangat dibutuhkan.

Sesuai dengan fungsinya, Brimob pada setiap saat harus mampu menghadapi segala bentuk ancaman, gangguan dan hambatan, baik dalam rangka Binkamtibmas, Ops Kamtibmas Ops Kamdagri, ataupun dalam rangka penyelenggaraan pola-pola operasi Pertahanan sesuai kebutuhan.

Sesuai dengan situasi dan kebutuhan, organisasi kesatuan Brimob yang dulu ada Resimen dan Batalion, setelah ada reorganisasi dilingkungan Polri, dirobah menjadi Satuan Brimob disingkat Satbrimob dengan pasukan paling tinggi tingkat Kompi.

Adapun dislokasi Satbrimob dan Kompi-Kompi Brimob seluruh Indonesia adalah sebagai berikut :

DISLOKASI SATBRIMOB & KOMPI-KOMPI BRIMOB  
SELURUH INDONESIA

NO.	KESATUAN	KEDUDUKAN DI	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	Satbrimobpus	Kedunghalang Bogor	
	a. Kompi 519	Kedunghalang Bogor	
	b. Kompi 5379	Kedunghalang Bogor	
	c. Kompi 5141	Kedunghalang Bogor	
	d. Kompi 5147	Kedaung Ciputat	
	e. Kompi 5136	Sukasari Bogor	
2.	Detasemen Gegana	Kelapadua Bogor	
3.	Satbrimobda Ist Aceh - Kompi 5164	Banda Aceh Banda Aceh	
4.	Satbrimobda Sumut	Medan	
	a. Kompi 5127	Medan	
	b. Kompi 5129	Tanjung Murawa	
	c. Kompi 514	Pematang Siantar	
5.	Satbrimobda Sumbar - Kompi 5149	Padang Padang Panjang	
6.	Satbrimobda Riau - Kompi 5135	Pekan Baru Pekan Baru	
7.	Satbrimobda Kalbar - Kompi 5169	Pontianak Pontianak	
8.	Satbrimob Subagsel	Palembang	
	a. Kompi 5151	Palembang	
	b. Kompi 5162	Tanjung Karang	
9.	Satbrimobda Metro Jaya	Jakarta	
	a. Kompi 516	Kelapadua Bogor	
	b. Kompi 5145	Kelapadua Bogor	
	c. Kompi 5122	Kelapadua Bogor	
	d. Kompi 5994	Kelapadua Bogor	
	e. Kompi 5995	Pamulang	
	f. Kompi 5113	Cipinang	
10.	Satbrimobda Jabar	Bandung	
	a. Kompi 5118	Cirebon	
	b. Kompi 5119	Serang	
	c. Kompi 5123	Bandung	
	d. Kompi 5125	Bandung	
11.	Satbrimobda Jateng	Semarang	
	a. Kompi 5138	Semarang	
	b. Kompi 5146	Pekalongan	
	c. Kompi 5155	Yogyakarta	
	d. Kompi 5168	Semarang	
12.	Satbrimobda Jatim	Surabaya	
	a. Kompi 502	Surabaya	
	b. Kompi 5126	Surabaya	
	c. Kompi 5111	Malang	
	d. Kompi 5131	Kediri	
13.	Satbrimobda Nusra	Denpasar	
	a. Kompi 518	Denpasar	
	b. Kompi 5124	Kupang	
	c. Kompi 5486	Dilly	

1.	2.	3.	4.
14.	Satbrimobda Kalselteng - Kompi 5163	Banjarmasin Banjarmasin	
15.	Satbrimobda Kaltim - Kompi 5137	Balikpapan Balikpapan	
16.	Satbrimobda Sulselra	Ujung Pandang	
	a. Kompi 5158	Ujung Pandang	
	b. Kompi 5275	Pare - pare	
17.	Satbrimobda Sulutteng - Kompi 5153	Menado Menado	
18.	Satbrimobda Maluku - Kompi 5154	Ambon Ambon	
19.	Satbrimobda Irja	Jayapura	
	a. Kompi 5157	Jayapura	
	b. Kompi 5121	Marauke	
20.	Pusdik Brimob	Watu Kosek	
21.	Komp 5480 Jatim	Porong	



Patroli berkuda

- Sub Direktorat Satwa, disingkat Subdit-satwa, bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi teknis Satwa serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut, baik yang bersifat nasional/terpusat maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat kewilayahan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Subditsatwa melaksanakan :

- Membina dan mengembangkan teknis fungsi Satwa dalam rangka pembinaan fungsi kesamaptaan kepolisian secara menyeluruh termasuk kaitannya dengan fungsi lain.

- b. Ikut membina personil pengemban fungsi Satwa, baik profesi dan jiwa korsa maupun karier.
- c. Ikut membina peralatan khusus fungsi Satwa dalam rangka pembinaan logistik Polri.
- d. Menyiapkan rencana dan mengatur penyelenggaraan operasi dan latihan fungsi Satwa yang bersifat terpusat.
- e. Memonitor, mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan serta hasil operasi dan latihan baik yang bersifat terpusat maupun yang diselenggarakan oleh tingkat kewilayahan.
- f. Melaksanakan administrasi operasional, termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi Satwa.
- g. Melaksanakan pelacakan dan penangkapan dengan satwa, dalam rangka pemberian bantuan operasional kepada satuan kewilayahan.
- h. Menyelenggarakan pendidikan Satwa Polri beserta pawang/aswasadaya sesuai kebijaksanaan dan program Ditdik Polri.

Subdit Satwa Polri adalah salah satu senjata bantuan operasional taktis Polri yang kini makin tampak kegunaannya dan mempunyai prospek baik, yang mempunyai kemampuan untuk membantu tugas - tugas Polri, baik preventif maupun represif.

**Catatan :**

Subdit Lantas mulai tanggal 1 Nopember 1991 resmi menjadi DIREKTORAT LALULINTAS.



*GPK yang tertangkap*

Anjing yang mempunyai daya cium lebih kurang 300 kali lebih tajam daripada manusia dapat segera mengetahui tiap perubahan molekul disekitarnya.

Dalam keadaan terlatih, anjing akan merupakan alat yang efektif untuk menangkap penjahat bahkan juga dapat membinasakan musuh dalam keadaan perang.

Sedangkan satuan kuda dibebani tugas pengawalan, serta pengendalian dan penindakan huru-hara.

Subdit Satwa saat ini memiliki 25 ekor kuda dan 101 ekor anjing pelacak, semuanya terlatih, serta 126 pelatih atau pawang (aswasada untuk pelatih kuda). Di kewilayahan terdapat 173 ekor anjing dan 198 ekor kuda. ◦

# ONE OF THE LARGEST INTEGRATED TEXTILE MANUFACTURER IN INDONESIA

## EXPORTER OF QUALITY YARNS AND FABRICS TO ALL OVER THE WORLD

### Product :

Yarns and Dyed Yarns of 100% Cotton , Blended Polyester/Cotton and Polyester/Rayon - for Woven and Knitted Fabrics.

Shirting and Suiting Fabrics of 100% Cotton , Blended Polyester/Cotton and Polyester/Rayon in Grey , Dyed and Printed.



## PT. ARGO PANTES

Wisma Argo Manunggal , 16th Fl. , Jl. Gatot Subroto No. 95 Kav. 22  
Jakarta Selatan - 12930 , INDONESIA

Phone : 5201652 (24 lines)

Telex : 62568 argotx ia

Fax : 5201647



## Direktorat Bimbingan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia ( DITBIMMAS POLRI )

Direktorat Bimbingan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang disingkat dengan Ditbimmas Polri, adalah badan pelaksana pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di bawah Deputi Operasi Kapolri, disingkat Deops Kapolri.

Ditbimmas Polri bertugas membina fungsi bimbingan masyarakat dan fungsi Hukum bagi pelaksanaan tugas Polri, dan dilaksanakan secara terpusat maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat ke wilayahan.

Bimmas Polri merupakan fungsi teknis operasional Kepolisian yang bersifat preventif aktif, diselenggarakan untuk mencegah terjadinya kriminalitas/ancaman serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), dengan teknik-teknik tertentu, antara lain seperti: penerangan, penyuluhan dan sebagainya.

Sasaran yang ingin dicapai Bimmas Polri antara lain :

- a. Secara aktif merubah faktor "kesempatan" dan "niat" menjadi faktor positif.
- b. Secara aktif menjadi penggerak, pendorong dan tauladan kearah perbuatan positif/konstruktif sesuai azas-azas kepemimpinan dan komunikasi ABRI.
- c. Secara aktif menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Binkamtibmas).

Fungsi Bimmas Polri diterapkan dan dikembangkan menurut kebutuhan dan perkembangan pelaksanaan tugas operasional serta pola kriminalitas, ancaman, gangguan yang terjadi.

Disamping itu disesuaikan pula dengan pola yang menyangkut faktor pelaku, motif, modus operandi dan sebagainya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Ditbimmas Polri menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut :

- Membina dan mengembangkan fungsi bimbingan masyarakat yang meliputi fungsi teknis penyuluhan masyarakat dan bimbingan remaja, anak-anak, pelajar/ mahasiswa/ pemuda serta fungsi Hukum, baik yang menyangkut doktrin maupun sistim dan metoda.
- Menyelenggarakan pembinaan penyuluhan masyarakat secara luas dalam rangka membimbing, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat guna terwujudnya daya tangkal dan daya cegah, tumbuhnya daya perlawanan masyarakat terhadap kriminalitas serta terwujudnya ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat.
- Menyelenggarakan pembinaan potensi masyarakat untuk memelihara serta meningkatkan situasi dan kondisi masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas kepolisian serta mencegah timbulnya faktor kriminogen.
- Menyelenggarakan pembinaan keamanan swakarsa untuk memelihara dan menciptakan suasana aman dan tertib di lingkungan masyarakat melalui usaha pengamanan yang tumbuh dan berkembang atas kehendak dan kemampuan masyarakat itu sendiri.
- Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan terhadap remaja, anak-anak, pelajar, mahasiswa dan pemuda terutama dalam rangka mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja.
- Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama

serta mengawasi dan memberikan bimbingan teknis kepada Kepolisian Khusus, yaitu aparat yang berdasarkan undang-undang atau atas kuasa undang-undang mempunyai kewenangan kepolisian terbatas dalam bidangnya masing-masing.

- Ikut serta membina Hukum Nasional.
- Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum kepada Polri dan warganya.

Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi/badan/instansi di dalam dan di luar Polri dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Serta melaksanakan tugas lainnya yang dibebankan oleh Kapolri.

Direktorat Bimmas Polri dipimpin oleh seorang Direktur dengan pangkat Brigjen Pol. dan dibantu suatu Staf berupa Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris atau disingkat Ses Ditmimmas Polri dengan pangkat Kolonel.

Ses Ditbimmas Polri dibantu atau mempunyai Staf terdiri dari Taud, Bagian Perencanaan (Bagren), Bagian Pembinaan Sistim (Bagbinsis), Bagian Personil (Bagpers) dan bagian Logistik (Baglog).

Pembantu Direktur lainnya adalah berupa pelaksana yang terdiri dari 5 Sub Direktorat, yaitu :

- Sub Direktorat Pembinaan Keamanan Swakarsa, disingkat Subditbinkamsa, yang bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis dan pelaksanaan fungsi teknis bimbingan dan penyuluhan dalam rangka pembinaan keamanan swakarsa yang bersifat nasional/terpusat.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Subditbinkamsa melakukan berbagai upaya, antara lain :

1. Menyusun dan menyiapkan petunjuk-petunjuk teknis dalam upaya peningkatan kemampuan potensi masyarakat terlatih untuk ikut dalam pelaksanaan Binkamtibmas secara Swakarsa, disamping pengerahan kekuatan rakyat terlatih untuk melaksanakan fungsi perlindungan rakyat dalam tugas bantuan operasional Polri.
2. Menyiapkan rencana dan mengatur penyelenggaraan pendidikan/latihan Satuan Pengamanan, rakyat terlatih dan lain-lain dalam rangka keamanan lingkungan.

3. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi/badan/instansi pemerintah/swasta untuk ikut berperan serta dalam upaya pembinaan keamanan swakarsa.



*Bimbingan terhadap remaja oleh Dit. Bimmas*

- Sub Direktorat Pembinaan Ketertiban Masyarakat, disingkat Subditbintibmas, yang bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis dan pelaksanaan fungsi teknis bimbingan dan penyuluhan dalam rangka pembinaan ketertiban masyarakat yang bersifat nasional/terpusat. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Subditbintibmas menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyusun dan menyiapkan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan potensi masyarakat untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam menunjang pelaksanaan Binkamtibmas.
2. Menyiapkan rencana serta petunjuk-petunjuk penyelenggaraan pembinaan tertib sosial untuk mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat, ketegangan sosial, dan penyimpangan-penyimpangan sosial budaya lainnya.
3. Menyiapkan rencana dan petunjuk dalam usaha rehabilitasi untuk menyiapkan lingkungan masyarakat dalam proses resosialisasi, asimilasi, dan integrasi dari tuna tata, tuna susila, tuna wisma, tuna karya dan tuna lainnya.
4. Koordinasi dengan instansi lain dalam upaya pembinaan ketertiban masyarakat.



*Patroli Keamanan Sekolah yang menjadi bimbingan Bimmas Polri.*

— Sub Direktorat Bimbingan Remaja, Anak-anak, Mahasiswa, Pelajar dan Pemuda, disingkat jadi Subditbimramarda, dengan tugas menyelenggarakan pembinaan teknis serta pelaksanaan fungsi teknis penyuluhan dan bimbingan remaja, anak, pelajar, mahasiswa dan pemuda termasuk keluarga Polri yang bersifat nasional/terpusat. Untuk itu Subditbimramarda melakukan hal-hal, antara lain :

1. Menyiapkan petunjuk-petunjuk teknis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan dan kejahatan, anak-anak, mahasiswa, pelajar dan pemuda; mengubah faktor-faktor kriminogen yang ada pada ramarda menjadi potensi positif; dan meningkatkan potensi Ramarda dan remaja Polri untuk ikut berperan dalam pelaksanaan Binkamtibmas.
2. Menyiapkan bahan-bahan dalam mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam rangka menunjang perkembangan pembinaan Ramarda dan remaja Polri.
3. Mengadakan hubungan lintas sektoral dengan instansi pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penanggulangan kenakalan dan kejahatan Ramarda secara terpadu.

— Sub Direktorat Pembinaan Koordinasi Alat Kepolisian Khusus, disingkat Subditbinkorpolsus, dengan tugas menyelenggarakan pembinaan teknis dan pelaksanaan koordinasi serta pengawasan alat kepolisian khusus yang bersifat nasional.

Untuk pelaksanaan tugas tersebut Subditbinkorpolsus melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pembinaan teknis koordinasi dan pengawasan alat kepolisian khusus.
2. Membantu menyelenggarakan pendidikan, latihan, penelitian, pengembangan dan merumuskan peraturan perundangan alat kepolisian khusus.
3. Mengadakan koordinasi dengan pimpinan alat kepolisian khusus pada tingkat pusat dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan alat kepolisian khusus.



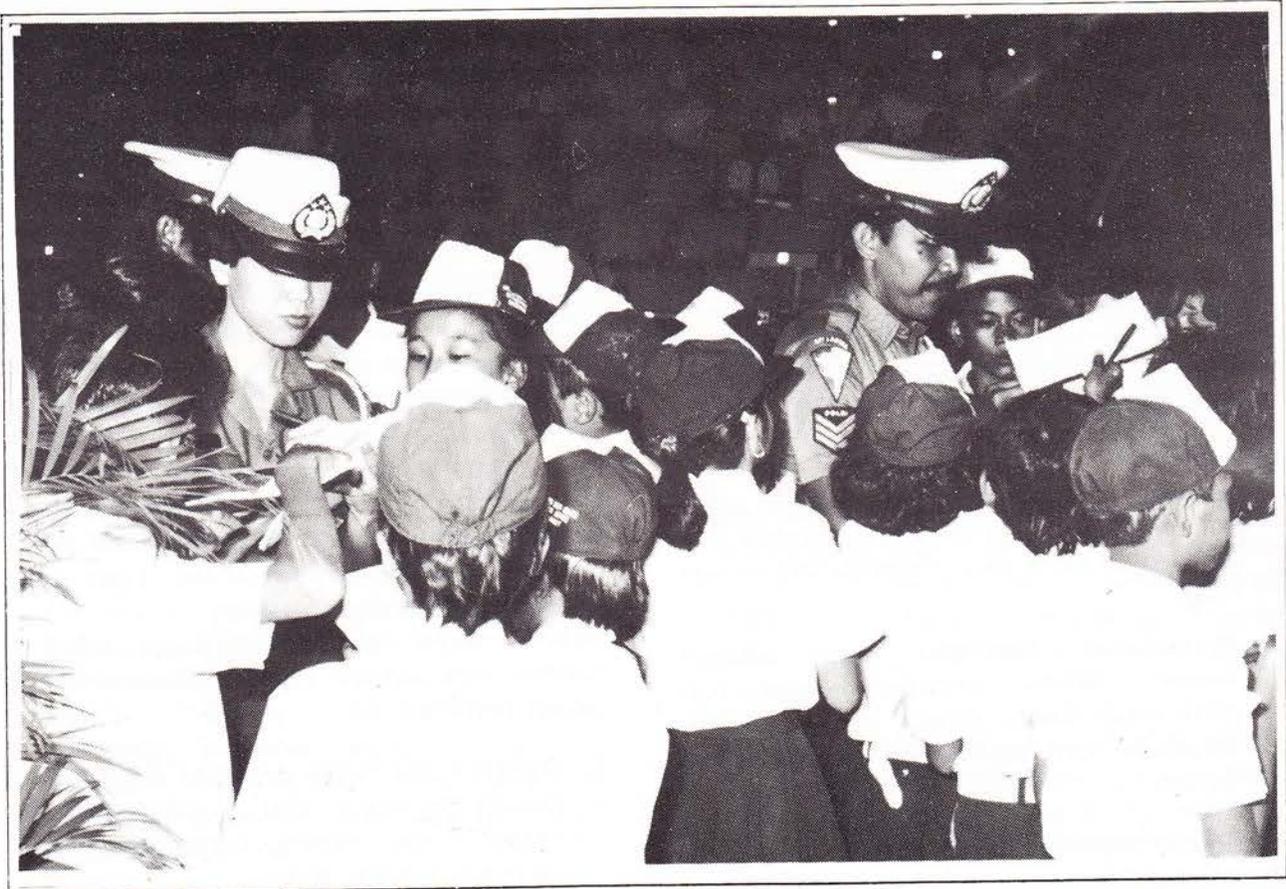
*Satpam merupakan partisipasi masyarakat dalam Kamtibmas*

— Sub Direktorat Pembinaan Hukum, disingkat Subditbinkum, dengan tugas menyelenggarakan pembinaan fungsi hukum serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut, baik yang bersifat nasional/terpusat maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat kewilayahan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Subditbinkum antara lain melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Membina dan mengembangkan teknis fungsi hukum termasuk dalam kaitannya baik dengan fungsi bimbingan masyarakat maupun dengan fungsi lain.
2. Ikut menyelenggarakan pembinaan personil pengembangan fungsi hukum baik yang menyangkut profesi dan jiwa korsa maupun karier.

3. Ikut membina hukum nasional maupun militer.
4. Memberikan dukungan fungsi hukum bagi penyelenggara fungsi kepolisian dalam lingkungan Polri.
5. Memberikan bantuan, nasehat hukum dan konsultasi hukum kepada Polri dan warganya.
6. Mengawasi penggunaan wewenang penyerahan perkara dan penjatuhan hukum hukuman disiplin oleh pejabat dilingkungan Polri.
7. Menyelenggarakan penyuluhan hukum dilingkungan Polri dan dilingkungan masyarakat. ◉



*Polisi sahabat anak*

## Direktorat Personil Kepolisian Negara Republik Indonesia ( DITPERS POLRI )

Direktorat Personil Polri adalah badan pelaksana pada tingkat Markas Besar Polri yang berkedudukan dibawah Deputi Administrasi (Demin Kapolri).

Ditpers Polri mempunyai tugas membina, menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi personil dan fungsi psikologi bagi pelaksanaan tugas Polri.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Ditpers Polri menyelenggarakan berbagai fungsi sebagai berikut :

- a. Membina dan mengembangkan fungsi personil yang meliputi fungsi teknis administrasi personil, termasuk pengendalian karier dan pembinaan Polisi Wanita, serta fungsi teknis pembinaan mental, sejarah, penyaluran dan penyediaan lapangan kerja, pembinaan jasmani, serta psikologi kepolisian dan psikologi personil, baik yang menyangkut doktrin maupun sistim dan metoda.
- b. Menyenggarakan dan pembinaan personil Polri beserta administrasinya yang meliputi penerimaan dan pengerahan, seperti penerimaan personil baru serta seleksi masuk pendidikan, penggunaan dan penempatan, perawatan serta pemisahan personil.
- c. Menyenggarakan pengendalian karier Perwira Polri.
- d. Menyenggarakan fungsi psikologi kepolisian untuk dukungan operasional kepolisian dan fungsi psikologi untuk pembinaan personil Polri, seperti menyeleksi dan mengklasifikasi terhadap calon anggota Polri serta terhadap anggota Polri yang akan mengikuti pendidikan dan yang akan menjalankan tugas atau memangku jabatan tertentu.
- e. Menyenggarakan pembinaan sejarah serta

pembinaan mental, yang meliputi pembinaan rohani, mental idiologi, mental psikologi dan tradisi.

- f. Menyenggarakan pembinaan jasmani personil Polri.
- g. Menyenggarakan pembinaan disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum dalam rangka mengusahakan ketaatan diri setiap personil Polri terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- h. Menyenggarakan pembinaan Polisi Wanita.
- i. Menyenggarakan penyaluran dan menyediakan lapangan kerja bagi anggota Polri yang akan atau telah mengakhiri dinas aktif.
- j. Menyenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan badan atau instansi di dalam dan di luar Polri dalam rangka pelaksanaan tugasnya.  
Disamping itu melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Kapolri.

Direktorat Personil Polri dipimpin oleh seorang Direktur dengan pangkat Brigjen Pol. dan dibantu oleh Staf berupa Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan pangkat Kolonel Pol., serta 8 Sub Direktorat (Subdit) yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala dengan pangkat Kolonel Pol. selaku pelaksana.

Adapun ke 8 Subdit tersebut adalah :

- **Subditminpers**, bertugas membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan teknis serta melaksanakan fungsi teknis administrasi personil yang bersifat nasional/terpusat. Antara lain adalah melaksanakan penerimaan personil-personil baru, menyeleksi masuk pendidikan penggunaan dan penempatan personil

kenaikan pangkat, penggajian, imbalan dan pengakhiran dinas personil serta membina administrasi personil sipil Polri.

– **Subditdalkar**, yaitu kependekan dari Subdit Pengendalian Karier, bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis serta melaksanakan pengendalian karier Perwira Polri termasuk Karyawan, yang bersifat nasional/terpusat. Diantaranya merumuskan dan menyelenggarakan administrasi dan dokumentasi personil, menyeleksi personil yang masuk pendidikan pengembangan dan kejuruan serta mengevaluasi dan seleksi persiapan dalam rangka pengendalian karier.

– **Subdit Psikologi**, disingkat Subditpsi, menyelenggarakan pembinaan serta pelaksanaan fungsi khusus psikologi personil dan psikologi kepolisian, baik yang bersifat nasional, maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat kewilayahan. Sebagai contoh, menyelenggarakan fungsi psikologi terhadap calon anggota Polri, atau terhadap anggota yang akan masuk pendidikan atau akan memangku jabatan, serta melaksanakan bimbingan, penyuluhan dan pengasuhan untuk membantu pembinaan kesejahteraan jiwa anggota Polri dan keluarganya.

– **Subditbintal**, bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis serta melaksanakan fungsi teknis pembinaan mental, baik yang bersifat nasional maupun dalam lingkungan Mabes Polri, untuk personil dan keluarganya. Untuk itu Subditbintal menyelenggarakan pembinaan rokhani, idiologi, tradisi dan kejuangan serta melaksanakan penataran-penataran, semuanya dalam rangka pembinaan mental personil Polri.

– **Subditbinjas**, menyelenggarakan pembinaan serta melaksanakan fungsi teknis pembinaan jasmani, yang bersifat nasional dan dalam lingkungan Mabes Polri.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Subditbinjas ikut menyelenggarakan pembinaan personil pengemban fungsi pembinaan jasmani, yang meliputi karier, profesi dan korsa, serta membina peralatan dan fasilitas lingkungan Mabes Polri.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Subditbinjas ikut menyelenggarakan pembinaan

personil pengemban fungsi pembinaan jasmani, yang meliputi karier, profesi dan korsa, serta membina peralatan dan fasilitas jasmani, disamping langsung melakukan pembinaan jasmani personil dilingkungan Mabes Polri.

– **Subdiprov**, yaitu kependekan dari Subdit Provoost, bertugas menyelenggarakan pembinaan provoost dalam lingkungan Polri.

Untuk itu Subditprov menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan teknis provoost dalam rangka pembinaan fungsi personil secara menyeluruh, termasuk kaitannya dengan fungsi lain.

Disamping itu juga memonitor, mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil operasi dan latihan, baik yang bersifat terpusat maupun yang diselenggarakan oleh tingkat kewilayahan. Menyelenggarakan dan melaksanakan administrasi operasional termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi provoost.

– **Subditjarah**, bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis serta melaksanakan fungsi teknis sejarah Polri.

Dalam rangka tugas tersebut, Subditjarah menyelenggarakan fungsi teknis kesejarahan, yang meliputi dokumentasi penulisan dan penyajian data sejarah serta museum Polri, termasuk perpustakaan sejarah Polri.

Disamping itu melaksanakan pemeliharaan benda-benda sejarah Polri.

– **Subditlurja**, yaitu singkatan dari Subdit Penyaluran tenaga kerja, melaksanakan tugas menyelenggarakan pembinaan teknis serta melaksanakan fungsi penyaluran serta penyediaan lapangan kerja bagi personil Polri yang akan atau telah menjalani masa pensiun.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Subditlurja mengadakan penyusunan rencana dan mengatur penyelenggaraan lapangan kerja bagi personil Polri yang akan atau telah pensiun, baik pada lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta.

Disamping itu juga merencana dan mengatur penyelenggaraan pemukiman/transmigrasi bagi personil Polri yang telah maupun yang akan pensiun. o

## Direktorat Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (DITDIK POLRI)

Direktorat Pendidikan Kepolisian RI yang disingkat Ditdik Polri adalah badan pelaksana pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di bawah Demin Kapolri.

Ditdik Polri bertugas membina, menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi pendidikan dalam lingkungan Polri, yang meliputi pendidikan pembentukan bukan akademik, pendidikan kejuruan / spesialisasi, pendidikan pengembangan umum sampai dengan tingkat menengah serta pendidikan khusus.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Ditdik menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pembinaan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebijaksanaan Dewan Pendidikan/Kurikulum Polri.
- b. Menyelenggarakan pembinaan alat instruksi ( Alins ) dan alat penolong Instruksi (Alingins) pendidikan.
- c. Menyelenggarakan pembinaan metodik dan didaktik pengajaran dalam bidang pendidikan.
- d. Menyelenggarakan pembinaan pendidikan pembentukan tamtama dan Bintara.
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan pendidikan pembentukan perwira serta pendidikan pengembangan umum dan kejuruan/spesialisasi.
- f. Menyelenggarakan pendidikan lain yang dibebankan kepadanya, atau melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Kapolri.

- g. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan badan atau instansi di dalam dan di luar Polri dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- h. Menyelenggarakan administrasi pendidikan.

Direktorat Pendidikan Polri dipimpin oleh seorang Direktur dengan pangkat Brigjen Pol. dan dibantu suatu Staf berupa Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan pangkat Kolonel Polisi, serta oleh 5 Sub Direktorat (Subdit) selaku unsur pembantu Pimpinan dan pelaksana Staf, dan dibantu oleh unsur Pelaksana yang terdiri dari Pusdik-Pusdik, Sekolah Polwan (Sepolwan), Secapa (Sekolah Calon Perwira), Selapa (Sekolah Lanjutan Perwira), dan Dewan Kurikulum (Wankur Ditdik).

Ke 5 Subdit tersebut adalah :

— **Sub Direktorat Pendidikan Pembentukan**, disingkat Subditdiktuk, bertugas menyelenggarakan pembinaan pendidikan pembentukan dalam lingkungan Polri. Siswanya ada yang diambil dari orang umum dan ada dari dalam untuk peningkatan golongan. Calon siswa dari umum meliputi SECATAM, SEBAMILSUK, SEPA POLRI dan AKABRI Bagian Kepolisian. Sedangkan yang siswanya dari dalam adalah SECABA dan SECAPA. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Subditdiktuk menyelenggarakan pembinaan kurikulum pendidikan pembentukan. Menyelenggarakan pembinaan alat-alat instruksi dan alat penolong instruksi, bahan ajaran,

evaluasi dan validasi pendidikan pembentukan. Disamping itu juga membantu menyelenggarakan pembinaan metodik dan didaktik pengajaran. Dan juga tentunya menyelenggarakan administrasi pendidikan.

— **Sub Direktorat Pendidikan Kejuruan Operasional**, disingkat Subditdikjurops, bertugas menyelenggarakan pembinaan kurikulum, alat-alat instruksi dan alat penolong instruksi, bahan ajaran, evaluasi dan validasi pendidikan kejuruan operasional.

Disamping itu membantu menyelenggarakan pembinaan metodik dan didaktik, serta menyelenggarakan administrasi pendidikan kejuruan operasional. Pendidikan yang meliputi berbagai kejuruan ini terdiri dari tingkat Perwira, Bintara dan Tamtama.

— **Sub Direktorat Pendidikan Kejuruan Pembinaan**, disingkat Subditdikjurbin, dengan tugas menyelenggarakan pembinaan pendidikan kejuruan bidang pembinaan dalam lingkungan Polri.

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Subditdikjurbin menyelenggarakan pembinaan kurikulum, alat-alat instruksi dan alat-alat pembantu instruksi, bahan ajaran, evaluasi dan validitas pendidikan kejuruan pembinaan.

Juga membantu menyelenggarakan pembinaan metodik dan didaktik pengajaran pendidikan kejuruan pembinaan, serta menyelenggarakan administrasi pendidikan. Pendidikan ini terdiri dari tingkat Perwira, Bintara dan Tantama.

— **Sub Direktorat Pendidikan Pengembangan**, disingkat Subditdikbang, dengan tugas menyelenggarakan pembinaan pendidikan pengembangan umum dalam lingkungan Polri, seperti SELAPA dan SESPIM. Sedangkan pendidikan pengembangan spesialisasi diselenggarakan oleh PTIK.

Untuk itu Subditdikbang menyelenggarakan pembinaan kurikulum, alat-alat instruksi dan alat penolong instruksi, bahan ajaran, evaluasi dan validitas pendidikan pengembangan.

Disamping itu membantu menyelenggarakan pembinaan metodik dan didaktik serta menyelenggarakan administrasi pendidikan pengembangan.

— **Sub Direktorat Pendidikan Khusus**, disingkat Subditdiksus, yang bertugas menyelenggarakan pembinaan pendidikan khusus bagi kekuatan kepolisian dan Kamtibmas lainnya yang berada dibawah pembinaan Polri yang meliputi Polsus, termasuk PPNS dan satuan-satuan pengamanan lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Subditdiksus menyelenggarakan pembinaan kurikulum, alat-alat instruksi dan alat-alat penolong instruksi, bahan ajaran, evaluasi dan validasi pendidikan khusus. Juga membantu menyelenggarakan pembinaan metodik dan didaktik serta menyelenggarakan administrasi pendidikan khusus.



*Motto Latihan : Lebih baik mandi keringat dari pada bermandi darah.*

Adapun badan pelaksana pada Direktorat Pendidikan adalah sebagai berikut :

— **Pusat Pendidikan**, disingkat Pusdik, yang bertugas melaksanakan pendidikan kejuruan fungsi teknis Polri.

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Pusdik melakukan hal-hal seperti menjabarkan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebijaksanaan Ditdik Polri, menyelenggarakan administrasi alat-alat instruksi/alat-alat penolong instruksi dan fasilitas pendidikan; menyelenggarakan metodik dan didaktik, pembinaan tenaga pengajar dan siswa; serta melaksanakan administrasi pendidikan, program pendidikan dan latihan siswa.

Adapun Lemdik-Lemdik yang ada adalah sebagai berikut :

No.	LEMDIK	DAYA TAMPUNG	L O K A S I
1.	Pusdik Serse	352	Megamendung (Jabar)
2.	Pusdik Lantas	200	Serpong (Jabar)
3.	Pusdik Intel	—	—
4.	Pusdik Bimmas	—	—
5.	Pusdik Sabhara	650	Porong (Jatim)
6.	Pusdik Pers	200	Kelapadua/ Bogor (Jabar)
7.	Pusdik Log	210	Jakarta
8.	Pusdik Komlek	300	Bandung (Jabar)
9.	Pusdik Keuangan	100	Bandung (Jabar)

— Sekolah Polisi Wanita, disingkat Sepolwan, dengan tugas melaksanakan pendidikan pembentukan Bintara Polwan dan Perwira Polwan. Disamping itu Sepa Pria, tempat pendidikan menjadi satu dengan Secapa, sedangkan tempat pendidikan Sepa Wanita menjadi satu dengan Sepolwan.

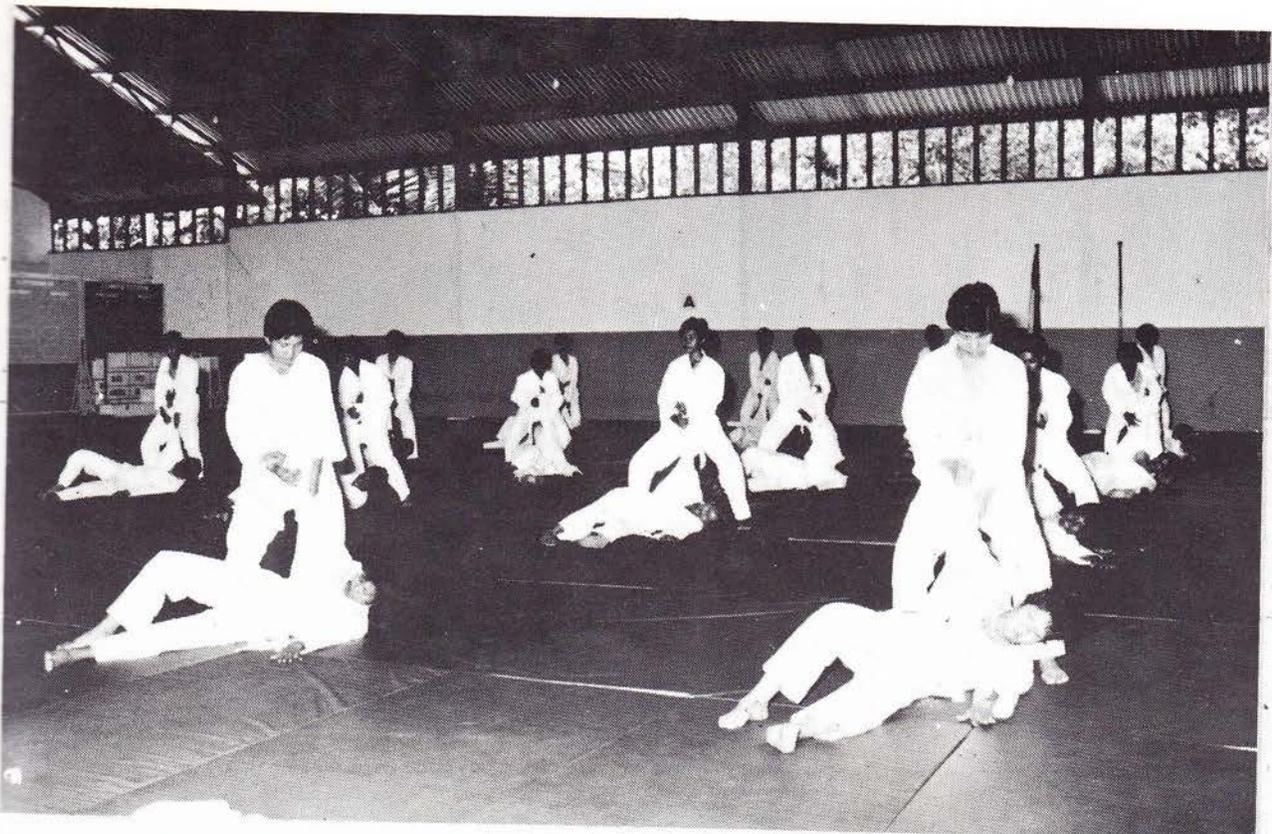
— Sekolah Lanjutan Perwira, disingkat Selapa, yang bertugas melaksanakan pendidikan pengembangan umum perwira tingkat madya, guna menghasilkan tenaga staf dan pelaksana yang memiliki keterampilan dalam bidang pengendalian operasional dan administrasi pada tingkat dasar/menengah.

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya itu, baik Selapa maupun Sepolwan, menyelenggarakan hal yang serupa dengan apa yang dilaksanakan oleh Pusdik, hanya saja disesuaikan dengan bidang masing-masing.

Untuk diketahui, bahwa di setiap Polda terdapat Lembaga Pendidikan yang dikenal Sekolah Polisi Negara (SPN), saat ini digunakan untuk pendidikan pembentukan Bintara Polri, yaitu :

Untuk Pendidikan Pembentukan Tamtama adalah :

- Pusdik Brimob ; daya tampung 1.850 orang  
Tempat pendidikan di Watukosek Jawa Timur
- Pusdik Pol Air ; daya tampung 350 orang  
Tempat pendidikan di Jakarta



*Kualitas anggota sangat ditentukan kualitas pendidikan dan latihan yang mereka terima.*

No.	LEMDIK	DAYA TAMPUNG	LOKASI LEMDIK	
			TEMPAT	POLDA
1.	SPN Seulawah	460	Seulawah	Aceh
2.	SPN Sampali	900	Medan	Sumut
3.	SPN Padangbesi	300	Padang	Sumbar
4.	SPN Pakanbaru	400	Pakanbaru	Riau
5.	SPN Betung	750	Betung	Sumbagsel
6.	SPN Lido	900	L i d o	Metrojaya
7.	SPN Cisarua	960	Cisarua	Jabar
8.	SPN Banyubiru	360	Banyubiru	Jateng
9.	SPN Purwokerto	800	Purwokerto	Jateng
10.	SPN Mojokerto	960	Mojokerto	Jatim
11.	SPN Singaraja	820	Singaraja	Nusra
12.	SPN Kupang	350	K u p a n g	Nusra
13.	SPN Pontianak	400	Pontianak	Kalbar
14.	SPN Banjarbaru	360	Banjarbaru	Kalselteng
15.	SPN Balikpapan	400	Balikpapan	Kaltim
16.	SPN Batua	1.000	Ujung Pandang	Sulselra
17.	SPN Karombasan	500	M a n a d o	Suluteng
18.	SPN Passo	240	P a s s o	Maluku
19.	SPN Jaya Pura	300	Jaya Pura	I r j a
20.	SEPOLWAN	480	Jakarta	Ciputat



*Pelajaran teori di klas*

## Direktorat Logistik Kepolisian Negara Republik Indonesia (DITLOG POLRI)

Direktorat Logistik Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Ditlog Polri, adalah badan pelaksana pada tingkat Mabes Polri yang berkedudukan di bawah Deputi Administrasi Kapolri, disingkat Demin Kapolri.

Ditlog Polri bertugas membina, menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi logistik Polri.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Ditlog Polri melaksanakan berbagai fungsi yaitu :

- a. Membina dan mengembangkan fungsi logistik Polri yang meliputi fungsi teknis peralatan, perbekalan umum, komunikasi dan elektronika, konstruksi dan bangunan, serta angkutan, baik yang menyangkut doktrin maupun sistem dan metoda.
- b. Menyelenggarakan daur pembinaan logistik Polri beserta administrasinya yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan.
- c. Membina pengurusan perbendaharaan materil dalam rangka penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran materil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. Membina, mengembangkan dan mengendalikan sistem inventori logistik Polri.
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan badan atau instansi di dalam maupun di luar Polri dalam rangka pelaksanaan tugasnya, serta melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Kapolri.

Direktorat Logistik Polri dipimpin oleh seorang Direktur, yang disingkat Dir Log, berpangkat Brigjen Pol.

Dir Log Polri dibantu oleh suatu Staf berupa Sekretariat, disingkat Set Ditlog yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, disingkat Ses Ditlog dengan pangkat Kolonel Polisi.

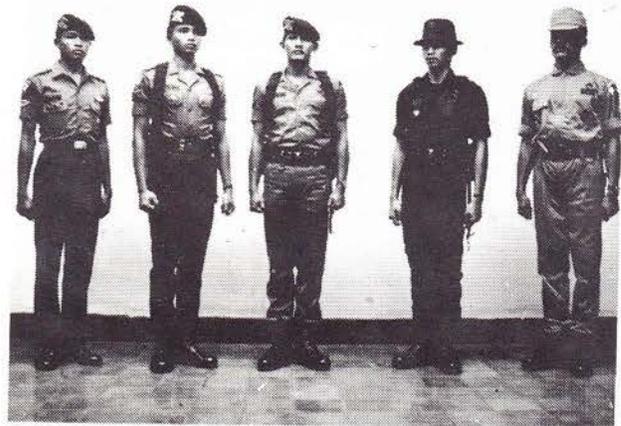
Disamping itu Dir Log dibantu oleh 4 Sub Direktorat sebagai unsur pembantu pimpinan dan pelaksana dan 1 unsur pelaksana, yaitu

Depo Materiil disingkat Domat.

Ke 4 Subdit tersebut adalah sebagai berikut :

— Sub Direktorat Peralatan, disingkat Subditpal, bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis serta pelaksanaan fungsi teknis peralatan serta angkutan yang bersifat nasional/terpusat. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Subditpal melaksanakan berbagai fungsi antara lain : Pembinaan teknis materiil peralatan dalam rangka pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan; membina dan mengembangkan prosedur pelaksanaan fungsi teknis peralatan, yang meliputi materiil peralatan, perlengkapan, perkakas perbengkelan dan satwa, termasuk peralatan khusus pencegahan/penanggulangan kriminalitas serta fungsi teknis angkutan; Dan menyelenggarakan pembekalan materiil peralatan untuk melengkapi personil perorangan dan kesatuan, yang meliputi pelaksanaan pengadaan, distribusi dan penghapusan materiil peralatan serta penyediaan fasilitas dan pemberian jasa, serta melaksanakan inventarisasi material peralatan.

— Sub Direktorat Perbekalan Umum, disingkat Subditbekum yang bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis serta pelaksanaan fungsi



*Seragam Polri yang menjadi urusan Dit. Logistik*

perbekalan umum yang bersifat nasional/terpusat.

Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Subditbekum melaksanakan beberapa fungsi, yaitu: Menyelenggarakan pembinaan teknis materiil perbekalan umum dalam rangka pengadaan, distribusi dan penghapusan; Membina dan mengembangkan prosedur pelaksanaan fungsi teknis perbekalan umum yang meliputi materiil perbekalan yang bersifat umum, yaitu semua bekal berupa bahan baku/pembantu, bekal jadi, serta sarana pemeliharaan yang digunakan/dikonsumsi oleh semua komponen Polri, baik perorangan maupun kesatuan; Menyelenggarakan pembekalan materiil bekal umum untuk melengkapi personil perorangan dan kesatuan, yang meliputi pelaksanaan pengadaan, distribusi dan penghapusan materiil bekal umum serta penyediaan fasilitas dan pemberian jasa serta melaksanakan inventarisasi materiil perbekalan umum.

— Sub Direktorat Komunikasi dan Elektronika, disingkat Subdit Komlet dengan tugas menyelenggarakan pembinaan teknis serta pelaksanaan fungsi teknis komlek yang bersifat nasional/terpusat.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Subdit Komlek melaksanakan berbagai kegiatan, seperti: Membina dan menyelenggarakan sistem Komlek Polri dalam rangka Sistem Komlek Hankam/ABRI, termasuk pembinaan prosedur, sarana dan peralatan, baik untuk dukungan komando dan pengendalian, maupun pembinaan kekuatan Polri; Menyelenggarakan pembekalan Komlek untuk melengkapi personil perorangan dan kesatuan, yang meliputi pelaksanaan pengadaan, distribusi dan penghapusan materiil Komlek serta penyediaan fasilitas dan pemberian jasa; Menyelenggarakan pembinaan teknis materiil Komlek dalam rangka pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan penghapusan, serta melaksanakan inventarisasi materiil Komlek; Menyelenggarakan dukungan kegiatan operasional Polri serta memonitor dan mengadakan observasi dan diteksi pelanggaran hukum dalam lingkup Komlek serta tugas-tugas yang berkaitan dengan pembinaan/bimbingan masyarakat.

— Sub Direktorat Konstruksi dan Bangunan, disingkat Subdit konbang yang bertugas menyelenggarakan pembinaan teknis serta pelak-

sanaan fungsi teknis konstruksi bangunan yang bersifat nasional/terpusat.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Subdit Konbang melakukan kegiatan sebagai berikut: Menyelenggarakan pembinaan teknis konstruksi bangunan dalam rangka pengadaan, mendirikan/membangun, rehabilitasi/pemeliharaan, penghapusan dan tukar menukar (ruilslag); Menyelenggarakan pembinaan teknis penyediaan fasilitas dan pemberian jasa termasuk pengurusan perbendaharaan konbang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; Membina dan mengembangkan prosedur pelaksanaan fungsi teknis konbang yang meliputi: penyediaan tanah dan fasilitas bangunan termasuk peralatan, perlengkapan perkakas dan perbekalan yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas konstruksi Polri; Menyelenggarakan penyediaan fasilitas dan pemberian jasa konstruksi bangunan yang meliputi kegiatan-kegiatan pembuatan, mendirikan/membangun, rehabilitasi/pemeliharaan, penghapusan dan tukar menukar (ruilslag): —konstruksi bangunan gedung, —konstruksi bangunan prasarana dan instalasi, —tanah/pekarangan, —alat-alat konstruksi, semua untuk mencapai kesiapan tugas yang optimal.

Disamping itu menyelenggarakan inventarisasi konstruksi bangunan.

— Depo Materiil, disingkat Domat, sebagai unsur pelaksana bertugas menyelenggarakan penyimpanan, distribusi materiil Polri serta membantu penyelenggaraan penyingkiran dan penghapusan materiil persediaan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Domat menyelenggarakan seperti: Melaksanakan program penyimpanan dan distribusi Materiil Polri; Mengkoordinasikan para kepala Gudang/Bendaharawan materiil dalam pelaksanaan penyimpanan dan distribusi materiil yang meliputi kegiatan penerimaan, penyusunan/penimbunan, pemeliharaan selama dalam penyimpanan dan penyaluran/pengeluaran materiil persediaan; Membantu penyelenggaraan penyingkiran dan penghapusan materiil persediaan yang berada dalam pengurusan Ditlog Polri; Dan menyusun serta mengajukan pertanggungjawaban perbendaharaan materiil dan menyusun laporan tentang keadaan materiil persediaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. e

## Laboratorium Kriminil Kepolisian Negara Republik Indonesia (LABKRIM POLRI)

Labkrim Polri adalah badan pelaksana pada tingkat Markas Besar Polri yang berkedudukan di bawah Kapolri.

Labkrim Polri bertugas membina fungsi khusus kriminalistik, serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas fungsi Reserse Kepolisian dan fungsi-fungsi operasional lainnya serta pelayanan umum Polri, baik pada tingkat pusat maupun kewilayahan.

Untuk itu Labkrim Polri melaksanakan berbagai fungsi seperti :

- Membina dan mengembangkan fungsi kriminalistik baik yang menyangkut doktrin, sistem dan metoda.
- Membina materiil/peralatan khusus kriminalistik sebagai bagian integral dari penyelenggaraan fungsi kriminalistik.
- Menyelenggarakan upaya pembuktian secara ilmiah melalui pemeriksaan teknis laboratorium dengan menggunakan teknologi dan ilmu-ilmu forensik dalam rangka penyidikan, baik lingkup nasional maupun internasional.
- Memberikan dukungan operasional kepada satuan-satuan kewilayahan dan instansi-instansi lain di luar Polri, termasuk pelayanan umum dalam bidang kriminalistik, dan lain-lain sebagainya.

Labkrim Polri dipimpin oleh seorang Kepala, disingkat Kalabkrim Polri dengan pangkat Kolonel Pol.

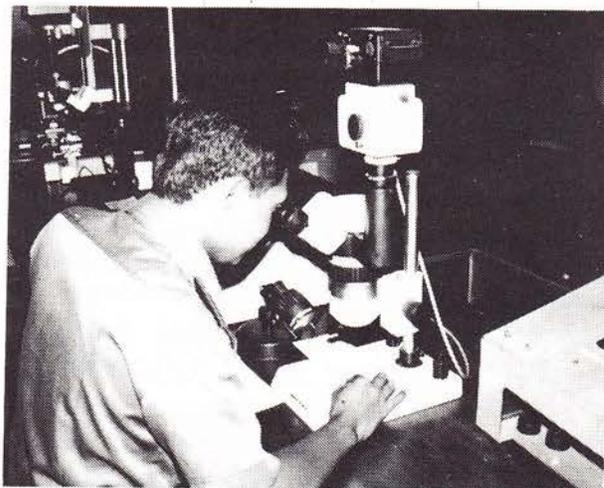
Kalabkrim Polri dibantu oleh suatu Staf berupa Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, disingkat Seslabkrim Polri dengan pangkat Letkol Pol.

Unsur pembantu pimpinan dan pelaksana terdiri dari Departemen I, Departemen II,

Kelompok Ahli dan Laboratorium Kriminil Cabang.

Dep I menangani kegiatan laboratorik yang meliputi: bidang kimia umum dan industri forensik, serologi dan bakterologi forensik, narkotika forensik, obat-obat berbahaya forensik, toksikologi forensik, polusi dan lingkungan forensik, fisika umum forensik, kebakaran dan sabotase forensik, dan instrumen khusus forensik.

Sedangkan Dep II menangani kegiatan laboratorium yang meliputi : bidang tulisan tangan dan tanda tangan forensik, tulisan tik, cetak dan stempel, uang palsu forensik, balistik forensik, metalurgi forensik, dan fotografi forensik. e



*Alat penelitian dokumen-dokumen, apakah asli atau palsu.*

## Dinas Penerangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (DISPEN POLRI)

Dinas Penerangan Polri, disingkat Dispen Polri, adalah badan pelaksana pada tingkat Mabes Polri yang berkedudukan dibawah Kapolri, dengan tugas membina, menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi penerangan Polri.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Dispen Polri melaksanakan berbagai fungsi, yaitu :

- Membina dan mengembangkan fungsi penerangan Polri, baik yang menyangkut doktrin maupun sistem dan metoda.
- Menyelenggarakan penerangan umum tentang Polri berdasarkan kebijaksanaan Kapolri, melalui media massa seperti Pers, radio dan TV.
- Menyelenggarakan penerangan pasukan kedalam lingkungan Polri mengenai segala kebijaksanaan pimpinan dan kegiatan Polri dalam rangka peningkatan kemampuan satuan, organisasi dan personil serta pelaksanaan tugas Polri, melalui berbagai penerbitan dan ceramah-ceramah.
- Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi/ badan/ instansi didalam

dan diluar Polri dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Dispen Polri dipimpin oleh seorang Kepala, disingkat Kadispen Polri dengan pangkat Brigjen Pol.

Kadispen Polri dibantu oleh Staf berupa Sekretariat, disingkat Set Dispen Polri, dan dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang disebut Ses Dispen Polri, dengan pangkat Kolonel Polisi.

Disamping itu Kadispen Polri dibantu oleh 4 unsur pelaksana yang disebut Sub Dinas, masing-masing adalah :

- Sub Dinas (Subdis) Penerangan Umum, sasarannya adalah masyarakat umum.
- Subdis Penerangan Pasukan, sasarannya adalah anggota beserta keluarga.
- Subdis Produksi.
- Subdis Dokumentasi dan Penelitian terhadap pendapat umum dan lain-lain.

Subdis tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Subdis (Kasubdis) dengan pangkat Kolonel.

## Dinas Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Republik Indonesia (DISDOKKES POLRI)

Disdokkes Polri adalah badan pelaksana pada tingkat Mabes Polri yang berkedudukan dibawah Kapolri, dengan tugas membina fungsi kedokteran kepolisian dan kesehatan, menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi kesehatan, serta menyelenggarakan dan melaksanakan kedokteran kepolisian dalam rangka mendukung tugas operasional baik pada tingkat Mabes Polri maupun pada tingkat kewilayahan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Disdokkes melaksanakan berbagai fungsi seperti:

- Membina dan mengembangkan fungsi kedokteran kepolisian dan kesehatan baik yang menyangkut doktrin maupun sistem dan metoda.
- Membina teknis kedokteran kepolisian dan kesehatan dalam rangka membantu fungsi researce kepolisian dan fungsi bimbingan masyarakat, untuk mencegah penyalahgunaan obat, penyalahgunaan tindakan kedokteran (medis), pengendalian maupun pemberantasan penyakit menular, pengawasan dan pengamanan makanan, kesehatan masyarakat veteriner dan hukum kedokteran/kesehatan.
- Membina materiil kesehatan Polri sebagai bagian integral dari penyelenggaraan fungsi kedokteran kepolisian dan kesehatan Polri.
- Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kedokteran kepolisian dalam rangka mendukung baik pelaksanaan tugas operasional pada tingkat Mabes Polri maupun pelaksanaan tugas kedokteran kepolisian pada tingkat kewilayahan.
- Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pembinaan kesehatan yang meliputi kesehatan kesamaptaan dan pelayanan kesehatan pada tingkat Mabes Polri.

- Ikut serta membantu penyelenggaraan pendidikan dan latihan bidang kedokteran kepolisian dan kesehatan sesuai dengan kebutuhan tugas serta ketentuan yang berlaku dalam bidang pendidikan Polri maupun Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

- Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi/badan/instansi di dalam dan di luar Polri dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Disdokkes Polri dipimpin oleh seorang Kepala, disingkat Kadisdokkes, dengan pangkat Brigjen Pol.

Kadisdokkes dibantu Staf berupa Sekretariat, disingkat Set Disdokkes Polri, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, disingkat Ses Disdokkes Polri, dengan pangkat Kolonel Polisi.

Disamping itu Kadisdokkes Polri dibantu oleh unsur pelaksana, yaitu :

- Lembaga Kedokteran Kepolisian, disingkat Ladokpol, bertugas melaksanakan kegiatan kedokteran kepolisian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional kepolisian, baik pada tingkat Mabes maupun pada tingkat kewilayahan.

Untuk itu Ledokpol melakukan seperti :

- a. Membantu menyelenggarakan pembinaan teknis kedokteran kepolisian dalam lingkungan Polri.
- b. Menyelenggarakan kegiatan Patologi Forensik dalam rangka mendukung fungsi penyidikan korban manusia baik hidup atau mati.
- c. Menyelenggarakan kegiatan Odontologi Forensik dalam rangka mendukung fungsi penyidikan dan identifikasi melalui sarana gigi dan mulut.

- d. Menyelenggarakan kegiatan Psikiatri Forensik dalam rangka mendukung fungsi penyidikan pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan kesehatan jiwa.
- e. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan tahanan dalam menentukan apakah seseorang cukup sehat untuk ditahan atau tidak.
- f. Menyelenggarakan kegiatan kedokteran untuk mendukung fungsi lalu lintas meliputi penentuan sebab kecelakaan, persyaratan pengemudi dan keselamatan lalu lintas.
- g. Menyelenggarakan pengamanan medik dalam rangka mendukung fungsi Intelkam melalui pengendalian dan pengawasan makanan, pengamanan nubika, pengamanan kesehatan tahanan tertentu dan pengamanan geomedicine.
- h. Menyelenggarakan bimbingan teknis psikiatri sosial, penyuluhan kesehatan masyarakat veteriner, SAR, bencana dan wabah.
- i. Menyelenggarakan bimbingan teknis dalam penanggulangan penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya serta penyalahgunaan tindakan kedokteran.
- j. Menyelenggarakan fungsi-fungsi teknis yang bersifat ilmiah dalam bidang kedokteran kepolisian.
- k. Melaksanakan penelitian dan pengembangan tentang ilmu, metoda dan sasaran kedokteran kepolisian.
- l. Menyelenggarakan latihan ketrampilan bagi anggota Polri untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang kedokteran kepolisian.

Ladokpol dipimpin oleh Kepala Lembaga Kedokteran Kepolisian, disingkat Kaladokpol, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kadisdokkes Polri.

Ladokpol terdiri dari: —Urusan Tata Usaha; —Unit Kedokteran Forensik; —Unit Kedokteran Lalu Lintas; —Unit Pengamanan Medik; —Unit Bimbingan Kesehatan Masyarakat; —Unit Hukum Kesehatan; —Dan Kelompok Ahli.

— Lembaga Kesehatan Kesamaptan Kepolisian, disingkat Lakesmaptapol bertugas melaksanakan kesehatan kesamaptan dalam rangka mem-

lihara dan meningkatkan kesamaptan anggota baik pada tingkat Mabes Polri maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat Kewilayahan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Lakesmaptapol melaksanakan :

- a. Membantu menyelenggarakan pembinaan teknis kesehatan kesamaptan kepolisian dalam lingkungan Polri.
- b. Menyelenggarakan kegiatan kesehatan lingkungan kerja baik lingkungan fisik maupun psikologis dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit yang timbul dalam pelaksanaan tugas operasional kepolisian.
- c. Menyelenggarakan kegiatan ujian badan dalam rangka seleksi/penerimaan pendidikan, mutasi jabatan dan penugasan khusus.
- d. Menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala untuk mengetahui tingkat kesehatan dan derajat kesamaptan jasmani maupun kesehatan jiwa anggota Polri.
- e. Menyelenggarakan kegiatan kedokteran olahraga (Sport Medicine), dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesamaptan anggota Polri.
- f. Melakukan pemeriksaan status gizi anggota serta nilai gizi ransum Polri, dalam rangka mencapai status gizi yang optimal.
- g. Melaksanakan penelitian dan pengembangan tentang ilmu, metoda dan sarana kesehatan kesamaptan.
- h. Menyelenggarakan latihan keterampilan bagi tenaga kesehatan Polri untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kesehatan kesamaptan.

Lakesmaptapol dipimpin oleh seorang kepala, disingkat Kalakesmaptapol dan bertanggungjawab kepada Kadisdokkes Polri.

Lakesmaptapol terdiri dari : —Urusan Tata Usaha: —Unit Kesehatan Lingkungan; —Unit Pemeriksaan Kesehatan dan Uji Badan; —Unit Kesehatan Olahraga; —Unit Gizi; —Kelompok Ahli.

— Rumah Sakit Kepolisian Pusat, disingkat Rumkitpolpus, yang bertugas melaksanakan

kegiatan pelayanan medik dan dukungan kesehatan dalam bidang klinis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas operasional kepolisian.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut pada butir a. pasal ini, Rumkitpolpus :

- a. Menyelenggarakan kegiatan serta upaya dalam bidang pemeriksaan, pengobatan dan perawatan sampai taraf spesialistik baik yang bersifat pelayanan maupun dukungan kesehatan.
- b. Menyelenggarakan kegiatan dan sarana penunjangnya sebagai rujukan Rumah Sakit Kepolisian tertinggi dalam lingkungan Polri.
- c. Menyelenggarakan kegiatan dan pengembangan ilmu, teknik dan prosedur pelayanan Rumah Sakit.
- d. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan sarana kedokteran kepolisian dan kesehatan serta penunjangnya.
- e. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan latihan sesuai program Ditdik Polri.
- f. Menyelenggarakan kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas Rumah Sakit Kepolisian.

Rumkitpolpus dipimpin oleh Kepala Rumah Sakit Kepolisian Pusat, disingkat Karumkitpolpus.

#### Rumkitpolpus terdiri dari :

- a. Sekretariat, disingkat Set Rumkitpolpus yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, disingkat Ses Rumkitpolpus.
- b. Unit adalah unsur pelaksana Rumkitpolpus yang bertugas melaksanakan pelayanan medik/dukungan kesehatan berdasarkan Keahlian.

Unit dipimpin oleh Kepala Unit, disingkat Kanit, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Karumkitpolpus.

Unit-unit pada Rumkitpolpus, adalah :

- ( 1 ) Unit Bedah
- ( 2 ) Unit Kandungan
- ( 3 ) Unit Kesehatan Anak
- ( 4 ) Unit Penyakit Dalam
- ( 5 ) Unit Kesehatan Gizi dan Mulut
- ( 6 ) Unit Kesehatan Jiwa

- ( 7 ) Unit Kardiologi
- ( 8 ) Unit Syaraf
- ( 9 ) Unit Anestesiologi
- (10) Unit Mata
- (11) Unit Telinga, Hidung & Tenggorokan
- (12) Unit Paru
- (13) Unit Kulit dan Kelamin
- (14) Unit Patologi Forensik
- (15) Unit Patologi Anatomi
- (16) Unit Pelayanan Ambulan
- (17) Unit Perawatan Tahanan
- (18) Unit Gawat Darurat
- (19) Unit Rehabilitasi Medik
- (20) Unit Poliklinik
- (21) Unit Unit Farmasi
- (22) Unit Laboratorium
- (23) Unit Radiologi
- (24) Unit Perawatan
- (25) Unit Pendidikan.

Apabila sangat diperlukan pada tiap unit dapat ditempatkan Perwira Unit/Penata Unit, disingkat Panit.

- c. Kelompok Ahli, yang dipimpin oleh Koordinator Kelompok Ahli, disingkat Korpokahli.

#### Lafipol

- a. Lafipol adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana pada Disdokes Polri yang bertugas melaksanakan kegiatan kefarmasian kepolisian, baik pada tingkat Mabes Polri maupun dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat kewilayahan.
- b. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut pada butir a. pasal ini, Lafipol :
  - 1) Membantu menyelenggarakan pembinaan teknis kefarmasian kepolisian dalam lingkungan Polri.
  - 2) Membantu pelaksanaan deteksi dini terhadap pemalsuan obat - obatan, peredaran obat terlarang dan bahan berbahaya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
  - 3) Menyelenggarakan kegiatan produksi perbekalan kesehatan, perangkat kesehatan, lensa optik, bahan kimia ter-

- tentu dan bahan lain yang diperlukan dalam sistem pembinaan kedokteran kepolisian dan kesehatan Polri.
- 4) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan penentuan standar perbekalan kesehatan dan bahan kimia tertentu serta merumuskan petunjuk teknis yang diperlukan.
  - 5) Melaksanakan kegiatan pengawasan mutu terhadap perbekalan kesehatan, bahan kimia, makanan awet yang diadakan oleh Polri/ABRI.
  - 6) Menyelenggarakan latihan untuk meningkatkan keterampilan dalam hal pengenalan dan identifikasi narkotika, psikotropika, obat keras lainnya dan bahan berbahaya bagi kesehatan.
- c. Lafipol dipimpin oleh Kepala Lembaga Farmasi Kepolisian, disingkat Kalafipol, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kadisdokkes Polri.



*Rumah Sakit Polda Sumut*



*Dokter Forensik Polri tengah memeriksa mayat yang baru digali dari kubur untuk mengetahui sebab-sebab kematiannya.*

## SEKRETARIAT NASIONAL CENTRAL BUREAU/INTERPOL INDONESIA (SET NCB/INTERPOL INDONESIA)

Set NCB/Interpol, adalah badan pelaksana pada tingkat Markas Besar Polri yang berkedudukan di bawah Kapolri, dengan tugas membantu Kapolri, termasuk selaku Kepala NCB, dalam membina, menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi NCB/Interpol di Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Set NCB/Interpol melaksanakan berbagai fungsi sebagai berikut :

- Membina dan mengembangkan fungsi NCB/Interpol Indonesia.
- Menyelenggarakan komunikasi dan korespondensi antar negara anggota Internasional Criminal Police Organization (ICPO)/Interpol.
- Menyelenggarakan pertukaran data dan informasi kriminal antar negara anggota ICPO/Interpol.
- Melaksanakan kerjasama kepolisian dengan negara-negara lain.
- Melaksanakan kerjasama pendidikan dan teknologi dengan badan kepolisian negara-negara lain dalam rangka pembangunan dan peningkatan kemampuan Polri.
- Melaksanakan pembinaan perwira penghubung (Liaison officer) Polri di luar negeri.
- Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan badan atau instansi di dalam dan di luar Polri dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Set NCB/Interpol dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat, yang disingkat dengan Kaset NCB/Interpol dengan pangkat Kolonel Polisi dan seorang Wakil Kaset NCB/Interpol, disingkat Wakaset NCB/Interpol dengan pangkat Letkol Pol.



*Alat-alat canggih yang dimiliki SET NCB Interpol Indonesia.*



*Delegasi Indonesia dalam Sidang Umum ICPO-Interpol ke 58 th 1989 di Lyons, Perancis, yang terdiri dari Mayjen Pol Poedy Syamsoedin (Irjen Polri), Mayjen Pol Ritonga (Kapolda Metro Jaya), Kol. Pol. RS. Toni Sugiarto (Ka Set NCB-Interpol) dan Letkol Pol Drs. Rahardjo (Waka Set CNB-Interpol).*

## Dinas Penelitian dan Pengembangan Kepolisian Republik Indonesia (DISLITBANG POLRI)

Dinas Penelitian dan Pengembangan Kepolisian RI, disingkat Dislitbang Polri, adalah badan pelaksana pada tingkat Mabes Polri yang berkedudukan dibawah Kapolri.

Dislitbang Polri bertugas membina, menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan bagi pelaksanaan tugas Polri.

Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Dislitbang Polri menyelenggarakan berbagai fungsi, seperti:

- Membina dan mengembangkan fungsi penelitian dan pengembangan Polri, baik yang menyangkut doktrin maupun sistem dan metoda.
- Menyelenggarakan penelitian terhadap masalah - masalah lingkungan astagatra, pelanggaran hukum dan komponen sistem Polri.
- Menyelenggarakan penelitian dalam bidang pembinaan dan pembangunan Polri, termasuk penelitian dan uji coba materiil pra pengadaan serta penelitian operasional berdasarkan program Polri.

- Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama ilmiah dengan organisasi/badan/instansi di dalam dan diluar Polri dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Dislitbang Polri dipimpin oleh seorang Kepala, disingkat Kadislitbang Polri, dengan pangkat Brigjen Pol. Kadislitbang dibantu oleh Staf berupa Sekretariat, disingkat Set Dislitbang yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, dan disebut Ses Dislitbang Polri dengan pangkat Kolonel Polisi.

Selain itu Kadislitbang juga dibantu oleh 4 unsur pelaksana, yaitu Sub Dinas (Subdis), yang masing-masing :

- Subdis Penelitian Operasi
- Subdis Penelitian Lingkungan
- Subdis Penelitian Sistim dan Metoda
- Subdis Penelitian Materiil, fasilitas dan Jasa.

Subdis tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Subdis (Kasubdis) dengan pangkat sampai Kolonel Polisi.

## Dinas Pengumpulan dan Pengolahan Data Kepolisian Republik Indonesia (DISPULLAHTA POLRI)

Dinas Pengumpulan dan Pengolahan Data Polri, disingkat Dispullahta Polri, adalah badan pelaksana pada tingkat Markas Besar Polri yang berkedudukan dibawah Kapolri.

Dispullahta Polri bertugas membina, menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi Pengumpulan dan Pengolahan Data, termasuk sistem informasi pembinaan bagi pelaksanaan tugas Polri.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Dispullahta Polri, melakukan berbagai fungsi, yaitu :

- Membina dan mengembangkan fungsi Pengumpulan dan Pengolahan Data, baik yang menyangkut Doktrin maupun sistem dan metoda.
- Merumuskan petunjuk-petunjuk teknis penyusunan sistem informasi pembinaan Polri serta pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, termasuk penentuan pola, sarana dan prasarananya dalam lingkungan Polri.
- Menyelenggarakan pembinaan bank data yang dapat mendukung kebutuhan informasi pada tingkat Mabes Polri, baik untuk

keperluan administrasi maupun operasional.

- Menyelenggarakan pengolahan dan penyajian data untuk kepentingan perumusan kebijaksanaan dan perencanaan strategis, serta penyusunan dan pengendalian program dan anggaran.
- Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan badan atau instansi didalam dan diluar Polri dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Dispullahta dipimpin oleh seorang Kepala, disingkat Kadispullahta dengan pangkat Brigjen Pol.

Kadispullahta dibantu oleh Staf yang disebut Sekretariat Dispullahta Polri, dipimpin oleh seorang Sekretaris, disingkat Ses Dispullahta dengan pangkat Kolonel Polisi.

Disamping itu Kadispullahta dibantu oleh unsur pelaksana yang terdiri dari 3 Sub Dinas (Subdis), yaitu :

- Subdis Informasi Operasi
- Subdis Informasi Administrasi
- Subdis Instalasi Komputer.

Masing-masing Subdis dipimpin oleh Kepala, disingkat Kasubdis dengan pangkat sampai Kolonel Polisi.



Komputerisasi Dis Pullahta Polri.

## Dinas Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (DISKU POLRI)

Dinas Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Disku Polri, adalah badan pelaksana pada tingkat Mabes Polri yang berkedudukan dibawah Kapolri, dengan tugas membina, menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi keuangan Polri.

Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Disku Polri melaksanakan berbagai fungsi yaitu :

- Membina dan mengembangkan fungsi keuangan Polri, baik yang menyangkut doktrin maupun sistem dan metoda.
- Menyelenggarakan usaha penyediaan, perencanaan serta penyaluran dana dan pembinaan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran.
- Mengendalikan keuangan dalam rangka terpeliharanya tertib administrasi keuangan untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penggunaan keuangan.
- Menyelenggarakan administrasi/pembukuan keuangan, pembuatan neraca dan perhitungan anggaran Polri.
- Mencocokkan dan meneliti pertanggungjawaban keuangan dan pembuatan Nota Hasil Pemeriksaan Keuangan.

- Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan badan atau instansi didalam dan diluar Polri dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Disku Polri dipimpin oleh seorang Kepala, disingkat Kadisku Polri, dengan pangkat Brigjen Pol.

Kadisku Polri dibantu oleh suatu Staf yang disebut Sekretariat Disku, disingkat Set Disku, dan dipimpin oleh seorang Sekretaris, disingkat Ses Disku Polri dengan pangkat Kolonel Polisi.

Disamping itu Kadisku Polri dibantu oleh unsur Pelaksana Staf, yang terdiri dari 4 Sub Dinas (Subdis), yaitu :

- Subdis Penganggaran dan pembiayaan
- Subdis Pembukuan Keuangan
- Subdis Pengendalian Keuangan, dan
- Subdis Pencocokan dan Penelitian.

Masing-masing dipimpin oleh Kasubdis dengan pangkat sampai Kolonel Pol.

Selain itu Kadisku Polri dibantu pula oleh 3 unsur pelaksana, yaitu: Keuangan Mabes Polri 1, Keuangan Mabes Polri 2, dan Keuangan Mabes Polri 3.

## Akademi Kepolisian ( AKPOL )

Akpol adalah badan pelaksana pada tingkat Mabes Polri yang berkedudukan dibawah Kapolri, dengan tugas menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan pembentukan perwira sukarela Polri tingkat akademi.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Akpol menyelenggarakan berbagai fungsi, yaitu:

- Menyusun dan mengembangkan sistem pembinaan pendidikan Akpol dengan memperhatikan kebijaksanaan Kapolri dan Dewan Pendidikan/Kurikulum Polri.
- Menyenggarakan pendidikan tingkat Akademi yang meliputi :
  - a. Guna menguasai materi profesional Polri.
  - b. Membentuk kepribadian sehingga menjadi Perwira Polri yang berjiwa, bermoral Pancasila, Saptamarga, Tribrata dan Catur Prasetya.
- Menyenggarakan penelitian dan pengembangan bagi kepentingan pendidikan Akpol.
- Melaksanakan pembinaan lembaga guna mempertinggi kemampuan operasional pendidikan.
- Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan badan atau instansi didalam dan

diluar Polri khususnya dengan Mako Akabri untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya, serta dengan PTIK untuk menjamin keterpaduan pendidikan ilmu kepolisian.

Akpol dipimpin oleh seorang Gubernur, disingkat Gub Akpol, dengan pangkat Mayjen Pol.

Sekretariat Akpol, disingkat Set Akpol adalah unsur pembantu Pimpinan dan Staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Akpol, disingkat Ses Akpol, berpangkat Brigjen Pol.

Unsur pembantu Pimpinan dan Pelaksana adalah sebagai berikut :

- a. Direktorat Pembinaan Pendidikan
- b. Direktorat Pembinaan Personil
- c. Direktorat Pembinaan Logistik
- d. Departemen Keuangan
- e. Departemen Penyidikan
- f. Departemen Kesamaptaan
- g. Departemen Administrasi
- h. Departemen Sosial Hukum
- i. Departemen Pembinaan Jasmani
- j. Operasi Pengajaran dan Latihan
- k. Resimen Taruna
- l. Korps Taruna.

## Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)

PTIK adalah badan pelaksana pada tingkat Mabes Polri yang berkedudukan dibawah Kapolri, dengan tugas menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan pengembangan keahlian Perwira, serta pengkajian, penelitian dan penerbitan bahan pustaka dalam rangka pembangunan dan teknologi kepolisian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, PTIK menyelenggarakan fungsi-fungsi seperti :

- Menyusun dan mengembangkan sistim pembinaan pendidikan PTIK sesuai dengan kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan memperhatikan kebijaksanaan Kapolri dan Dewan Pendidikan/ Kurikulum Polri serta prosedur dalam organisasi Polri.
  - Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang ilmu dan teknologi kepolisian, baik untuk jalur gelar maupun non gelar, yang meliputi :
    - a. Pendidikan dan pengajaran termasuk pembinaan mental kejuangan
    - b. Penelitian dan pengembangan
    - c. Pengabdian masyarakat, dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi.
  - Menyelenggarakan penelitian, pengkajian dan pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian sebagai bahan masukan kepentingan Mabes Polri.
  - Menyelenggarakan dan mengembangkan kepustakaan, baik bagi kepentingan lembaga maupun Mabes Polri.
  - Melaksanakan pembinaan lembaga guna mempertinggi kemampuan operasional pendidikan, pengkajian dan penelitian.
- Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi/badan/instansi didalam dan diluar Polri, khususnya dengan Universitas pembina untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya, serta dengan Akpol untuk menjamin keterpaduan pendidikan ilmu kepolisian, dan melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Kapolri.

PTIK dipimpin oleh seorang Gubernur, disingkat Gub PTIK, dengan pangkat Mayjen Pol. dan dibantu Staf berupa Sekretariat disingkat Set PTIK yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, disingkat Ses PTIK dengan pangkat Brigjen Pol.

Sedangkan sebagai unsur pembantu pimpinan dan pelaksana adalah :

- Fakultas Ilmu Kepolisian, disingkat FIK
- Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian, disingkat PPITK.

Disamping itu terdapat pula unsur pelaksana, yaitu :

- Operasi Pengajaran dan latihan, disingkat Opsjarlat.
- Korps Perwira Mahasiswa, disingkat Korwa.
- Senat Perwira Mahasiswa Ilmu Kepolisian, disingkat Senat PMIK.

Selain itu ada lagi Badan Extra Struktural, yaitu Senat Akademik/Senat Guru Besar, disingkat Senat Akademik.

PTIK yang berdiri sejak tahun 1946 di Mertoyudan sampai tahun 1991 ini telah mewisuda Perwira lulusannya sebanyak 26 angkatan.

## Sekolah Staf dan Pimpinan Polisi Republik Indonesia (SESPIM POLRI)

Sekolah Staf dan Pimpinan Polri, disingkat Sespim Polri, adalah badan pelaksana pada tingkat Mabes Polri yang berkedudukan dibawah Kapolri.

Sespim Polri bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan pengembangan umum tertinggi dalam lingkungan Polri dan pendalaman materi kejuangan serta pengkajian dan pengembangan doktrin kepolisian.

Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Sespim Polri menyelenggarakan berbagai fungsi seperti :

- Menyusun dan mengembangkan sistim pembinaan pendidikan Sespim Polri dengan memperhatikan kebijaksanaan Kapolri dan Dewan Pendidikan/Kurikulum Polri.
- Menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan pengembangan umum tertinggi untuk menghasilkan perwira-perwira calon pimpinan Polri yang memiliki kualifikasi pimpinan dan staf bidang operasional dan bidang administrasi.
- Menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan doktrin kepolisian termasuk manajemen, pendidikan dan latihan serta pendalaman materi kejuangan sebagai bahan masukan bagi kepentingan Mabes Polri.
- Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bagi kepentingan pendidikan Sespim Polri.
- Pelaksanaan pembinaan lembaga guna mem-

pertinggi kemampuan operasional pendidikan.

- Mengadakan Koordinasi dan kerjasama dengan organisasi/badan/instansi didalam dan diluar Polri khususnya dengan Sesko ABRI untuk melaksanakan tugasnya, serta dengan PTIK dan DITDIK untuk menjalin keterpaduan pendidikan.

Sespim dipimpin oleh seorang Kepala, disingkat Kasespim Polri, dengan pangkat Mayjen Pol.

Kasespim dibantu oleh Staf berupa Sekretariat Sespim, disingkat Set Sespim.

Sekretariat Sespim dipimpin oleh seorang Sekretaris, disingkat Ses Sespim, dengan pangkat Brigjen Pol.

Disamping itu ada unsur pembantu pimpinan dan pelaksana, yaitu :

- Direktorat Pendidikan dan Pengajaran
- Direktorat Pengkajian dan Pengembangan
- Departemen Falsafah dan Kejuangan
- Departemen Strategi
- Departemen Operasi
- Departemen Pembinaan dan Latihan
- Departemen Manajemen
- Departemen Pembinaan Sumber Daya
- Departemen Pengetahuan Sosial
- Operasi Pengajaran dan Latihan; -Tenaga Pendidik; -Senat Perwira Siswa, serta badan ekstra struktural, yaitu Dewan Sekolah.

Sejak berdirinya hingga sekarang (1991), Sespim Polri telah melantik 26 angkatan.

## Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA)

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah, disingkat Polda, adalah pelaksana utama kewilayahan Polri, yang berkedudukan langsung di bawah Kapolri.

Polda dalam daerah hukumnya, menyelenggarakan tugas pokok Polri antara lain :

- Memelihara serta meningkatkan tertib hukum, membina ketenteraman masyarakat guna terwujudnya Kamtibmas.
- Memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, serta menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya tugas diatas.
- Ikut aktif berperan serta dibidang sosial politik, serta menjamin keamanan segala usaha dan kegiatan pelaksanaan tugas diatas.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut, Polda menyelenggarakan berbagai fungsi yaitu :

- Membantu Pembina fungsi pada tingkat Mabes Polri dalam rangka membina dan mengembangkan masing-masing fungsi Polri yang meliputi fungsi utama Kepolisian, fungsi organik Polri, fungsi organik pembinaan, fungsi Khusus serta fungsi teknis.
- Menyelenggarakan fungsi perencanaan dengan memperhatikan pula kebijaksanaan Pemerintah Daerah setempat.

- Menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personil logistik, pendidikan dan anggaran/keuangan dengan memperhatikan pula pengarahan dan bimbingan teknis pembina fungsi yang bersangkutan.
- Menyelenggarakan pembinaan kemampuan dan administrasi komponen lain dari kekuatan Hankam negara bidang penertiban dan penyelenggaraan masyarakat.
- Menyelenggarakan latihan-latihan, baik perorangan maupun satuan guna pemeliharaan dan peningkatan kemampuan Kepolisian serta kesiap siagaan satuan-satuan Polda.
- Menyelenggarakan fungsi utama Kepolisian yang meliputi Intelijen dan pengamanan Kepolisian, Reserse Kepolisian, Kesamaptaan Kepolisian, dan Bimbingan Masyarakat dengan memperhatikan pula pengarahan dan bimbingan teknis pembina fungsi yang bersangkutan serta menyelenggarakan fungsi Polri selaku kekuatan sosial dengan memperhatikan pula kebijaksanaan pembina kekuatan sosial ABRI setempat.
- Merencanakan dan/atau menyiapkan/melaksanakan operasi Kepolisian dan operasi Kamtibmas dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya serta partisipasi Polri dalam pertolongan dan penyelamatan (SAR).
- Menyelenggarakan fungsi lain yang mendukung penyelenggaraan fungsi utama maupun fungsi organik dengan memperhatikan pengarahan dan bimbingan teknis pembina fungsi yang bersangkutan.

- Menyelenggarakan fungsi pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas Kepolisian didalam daerah hukumnya, disamping tentunya melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh Kapolri.

## 17 POLDA

Jumlah Polda saat ini sebanyak 17 buah, sebelum diadakan reorganisasi Polri tahun 1984 jumlah Polda mencapai 21 buah, hampir di-setiap Propinsi terdapat Polda waktu itu.

Ke 17 Polda tersebut terdiri dari 3 tipe, yaitu tipe A ada 6 Polda, tipe B 3 Polda dan tipe C sebanyak 8 Polda.

Tipe A adalah Polda yang daerahnya termasuk luas terdiri dari beberapa Propinsi, atau mempunyai penduduk yang banyak, dan mempunyai tingkat ancaman kriminalitas

yang tinggi, yaitu masing-masing Polda Sumbagsel, Polda Metro Jaya, Polda Jabar, Polda Jateng, Polda Jatim dan Polda Nustra. Pangkat dari Kapolda tipe A paling tinggi Mayjen Pol. dan Wakilnya paling tinggi Brigjen Pol.

Polda tipe menengah, yaitu tipe B sebanyak 3 buah, masing-masing Polda Sumut, Polda Sulseira dan Polda Kalselteng. Pangkat Kapolda tipe B adalah Brigjen Pol. dan Waka Polda Polda berpangkat Kolonel Polisi.

Sedangkan Polda tipe C adalah Polda Aceh, Polda Sumbar, Polda Riau, Polda Kalbar, Polda Kaltim, Polda Sulutteng, Polda Maluku dan Polda Irja.

Adapun pangkat dari Kapolda maupun Waka-polda tipe C adalah Kolonel Polisi.

Untuk lengkapnya gambaran dari Polda-Polda tersebut, berikut ini dipaparkan masing-masing Polda secara singkat sebagai berikut :



## Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah ISTIMEWA (POLDA) ACEH

Polda Aceh atau lengkapnya Polda Istimewa Aceh mempunyai wilayah hukum yang mencakup wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan luas 55.350 Km<sup>2</sup> dengan batas-batasnya: sebelah Barat berbatasan dengan Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Lautan Hindia, sebelah Utara dan Timur dengan ZEE di Selat Malaka, dan sebelah Tenggara berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara.

Keadaan wilayah yang lebih 2/3 nya dikelilingi lautan, serta terdapatnya jalur perdagangan yang ramai di Selat Malaka, maka menjadikan wilayah Polda Aceh rawan terhadap penyelundupan dan pencurian ikan oleh nelayan-nelayan asing.

Propinsi Aceh pada tahun 1988 yang lalu berpenduduk 3.200.282 orang dan tahun 1991 ini tentu lebih banyak dari itu, sedangkan anggota Polda Aceh sekarang adalah 5.116 yang terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama. Jadi di Propinsi Aceh 1 orang Polisi harus melayani lebih kurang 600 orang masyarakat.

Polda Aceh dengan Mapoldanya yang beralamat di Jalan Cut Mutia, Banda Aceh, Telp. 0651-21711 mempunyai 9 Polres, masing-masing: Polres Aceh Besar di Banda Aceh, Polres Pidie di Sigli, Polres Aceh Utara di Lhokseumawe, Polres Aceh Timur di Langsa, Polres Aceh Barat di Meulaboh, Polres Aceh Selatan di Tapak Tuan, Polres Aceh Tengah



Markas Polda Istimewa Aceh

di Takengon, Polres Aceh Tenggara di Kutacane, dan Polres Sabang di kota Sabang.

Di Propinsi Aceh terdapat kawasan Pertanian dan kawasan Industri. Kawasan Pertanian mencakup Kabupaten Aceh Besar, Aceh Pidie, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Tengah dan Aceh Tenggara. Sedangkan kawasan Industri terdapat di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur.

Industri penting yang terdapat di kedua Kabupaten tersebut antara lain Tambang Minyak Bumi, Pabrik Pupuk Asean, Pabrik Kertas KRAF dan Pabrik Elpiji. Karenanya daerah ini merupakan Kabupaten yang padat penduduknya. Dari segi keamanan di kedua wilayah ini memerlukan perhatian dan kewaspadaan lebih tinggi.

Masalah Kamtibmas yang menonjol di Aceh, dan telah menjadi masalah Nasional, ialah tentang perberantasan Ganja dan GPK. Ganja di Aceh tumbuh dengan subur yang ditanam oleh segelintir orang didalam hutan lebat di pedalaman Aceh. Menurut informasi, ganja Aceh kualitasnya nomor satu di dunia. Oleh GPK ganja ini mereka manfaatkan untuk membiayai kegiatan pengacauannya. Saat ini GPK tidak punya kekuatan lagi, akibat tindakan tegas ABRI dan bantuan masyarakat telah banyak mereka yang tertangkap, menyerah atau pun tertembak mati.

## SUMBER DAYA

Dilihat dari aspek kepentingan keamanan, baik dilatar belakangi kondisi wilayah, pertumbuhan penduduk serta tersedianya lapangan kerja yang terus meningkat kebutuhannya, hal ini menjadi salah satu unsur yang merupakan titik rawan penyebab terjadinya gangguan keamanan, kondisi awal ini memerlukan upaya untuk mengantisipasi penyebab kerawanan yang dimaksud.

Polda Istimewa Aceh dengan potensi sumber daya yang dimiliki termasuk salah satu bahagian dari unsur yang memikul tanggung jawab di bidang pembinaan keamanan di wilayahnya bersama unsur terkait lainnya, baik kalangan ABRI maupun unsur lintas sektoral.

Upaya untuk mencapai keberhasilan tugas dilakukan dengan cara mengerahkan keseluruhan kekuatan (personil) yang ditunjang dengan peralatan yang dimiliki Komando yang tersedia pada kesatuan-kesatuan dalam jajaran Polda Istimewa Aceh. Dengan alat utama (Alut) tersebut sasaran pelaksanaan tugas harus mampu terselenggaranya dengan hasil maksimal sesuai dengan petunjuk pimpinan.

Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Polda Aceh juga didasari pada upaya awal untuk memperoleh suatu prestasi atau kualitas personil yang handal, antara lain :

### Peningkatan Profesionalisme

Tersedianya personil yang berkwalitas merupakan faktor utama bagi suksesnya suatu beban tugas yang dilaksanakan, dalam hal peningkatan kualitas personil yang mengarah pada profesionalisme merupakan perioritas.

Melalui berbagai penyelenggara pendidikan, baik di daerah maupun diberbagai pusat pendidikan (Pusdik) Polri atau kejuruan, Polda Aceh telah mendirikan Perguruan Silat Merpati Putih. Pembinaannya oleh Kadit Lantas Polda Aceh, usaha ini dalam rangka meningkatkan kemampuan anggota dalam melaksanakan tugas di lapangan.

### Pemanfaatan Sarana/Prasarana

Beberapa sarana penunjang tugas telah dimiliki Polda Aceh diantaranya alut utama komunikasi di Polsek-Polsek sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Sarana komunikasi tersebut merupakan alat vital untuk menerobos daerah terpencil dalam hal penyampaian informasi dan menerima petunjuk dalam pelaksanaan tugas dilapangan.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Polda Aceh dalam rangka peningkatan kesejahteraan anggota ialah; telah dibangun Perumahan KPR BTN sebanyak 120 unit rumah yang terdiri dari : type 21 = 54 unit, type 36 = 23 unit dan type 45 = 23 unit.

Pembangunan rumah KPR BTN ini dikerja-



*KPR-BTN Polri Aceh*

kan oleh Puskopol Polda Istimewa Aceh sebagai Developer. Pembangunannya ditunjang dari dana ASABRI, BTN dan Bukopin Cabang Banda Aceh. Pembangunan Perumahan tersebut terletak tidak jauh dari keramaian kota yaitu dikawasan Keutapang Aceh Besar sekitar 5 Km dari pusat kota Banda Aceh.

Upaya pengarahan kepada masyarakat khususnya menyangkut pembinaan, memberikan nilai tambah, terutama kepada Instansi atau Lembaga Kemasyarakatan lain, LKMD, Organisasi Pemuda hingga Kelompok Pengetua didalam masyarakat. Hasilnya, unsur tersebut diatas telah memberikan partisipasinya dibidang perwujudan Kamtibmas, antara lain telah kelihatan peran aktivitas mereka terutama dalam memelihara Siskamling untuk menangkal setiap ancaman dan gangguan Kamtibmas. Terlihat

bahwa akhir-akhir ini dari kelompok masyarakat telah dapat menangkap dari beberapa orang GPK yang berada didesanya dan kemudian menyerahkan kepada petugas keamanan setempat.

#### **OPERASI**

Secara umum, Polda Istimewa Aceh telah melakukan kegiatan Operasi yang bersifat represif yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang aman dan mantap, diantaranya melakukan operasi nila tahun 1989 dalam upaya pemberantasan Ganja/Narkotika di daerah Istimewa Aceh.

Dalam pelaksanaan operasi tersebut Polda Aceh didukung satuan Opsnal dari Mabes Polri, meliputi Satuan Gegana, Satuan Udara, Pol Air, Pasukan Satwa, Pasukan Sabhara yang didukung

dengan alat Utama dari Dit Samapta Polri yang meliputi 6 Unit Helikopter dan 2 Kapal Pol Air.

Operasi tersebut menghasilkan nilai dengan ditemukannya sejumlah 4.911.893 (Empat juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) pohon Ganja dari 359 (tiga ratus lima puluh sembilan), lokasi yang ditanami diatas areal seluas tujuh puluh (70) hektar, dengan total beratnya 78 (tujuh puluh delapan) ton, operasi ini berhasil menangkap 40 pelaku penanam, penjual dan pengisap Ganja, seluruh pelaku ini telah disidik dan sudah diajukan ke Pengadilan Negeri.

Selain itu, Polda Aceh juga telah melaksanakan Operasi Rimba, sasarannya penertiban pencurian kayu secara besar-besaran yang dilakukan oleh pengusaha HPH maupun masyarakat, hasil yang dicapai berhasil menyita 1.400 batang balok dan kini sudah dilelang.

Pelaksanaan Operasi Jaring II yang sedang dilaksanakan oleh Polda Istimewa Aceh dalam rangka penumpasan GPK dengan sasaran operasi, Aceh Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur, operasi ini mendapat tambahan personil dari Mabes Polri sejumlah 700 orang.

## PERMASALAHAN

Ditinjau dari kultur masyarakat Aceh yang memiliki karakteristik khas dan masyarakatnya yang agamis yang dilandasi oleh tiga ciri keistimewaan daerah, istimewa dibidang agama, adat istiadat dan budaya serta pendidikan, merupakan satu modal dasar yang dimiliki daerah Aceh. Kondisi sosial masyarakatnya memerlukan satu persepsi bagi setiap personil Polri di Aceh untuk bertindak dan bersikap yang relevan dengan kultur masyarakat, khususnya dalam upaya pembinaan masyarakat.

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat terutama dikawasan Zona Industri telah mengalami satu perombakan kehidupan masyarakat didaerah ini yang semula hanya terdiri dari kelompok masyarakat, homogen (satu jenis) kini telah diwarnai dengan kehidupan yang bervariasi dengan kelompok masyarakat Heterogen, yang terdiri berbagai suku bangsa yang

datang kekawasan tersebut dengan berstatus sosial beraneka ragam. Kondisi ini mempengaruhi nilai sosial masyarakat yang bisa menjadi sumber kerawanan.

Data gangguan kamtibmas di Aceh akhir-akhir ini telah mengaktualisasi kondisi perubahan atau gejala peningkatan gangguan keamanan baik secara kuantitas maupun secara kualitas dan dilihat dari total angka kriminalitas yang terinci selama tahun 1990 :

Polres	Crime total	Crime clear
Aceh Besar	1221	508
Aceh Pidie	141	76
Aceh Utara	1252	1007
Aceh Timur	815	468
Aceh Barat	419	287
Aceh Selatan	141	82
Aceh Tengah	155	75
Aceh Tenggara	209	131
S a b a n g	107	59
Total	4460	2.691

Selama periode 1991, sejak Januari hingga Maret tercatat 1.034 kasus yang ditangani Polda Istimewa Aceh dan tercatat 3 daerah yang menonjol gangguan Kamtibmas, Polres Aceh Besar 329 dan selesai 167, Polres Aceh Utara 297 dan selesai 223, Polres Aceh Timur 133 kasus dan selesai 64.

## KOORDINASI

Dibidang pembinaan keamanan, Polda Aceh tetap melakukan koordinasi dengan unsur lintas sektoral terutama unsur ABRI, Korem 011/Lilawangsa di Lhokseumawe dan Korem 012/Teuku Umar di Banda Aceh. Koordinasi tersebut mencakup kaitan dengan upaya perwujudan kebijaksanaan pimpinan, terutama kebijakan Pimpinan ABRI diantaranya kegiatan AMD, operasi bhakti yang mengarah pada upaya pembinaan masyarakat serta upaya penumbuhan Siskam Suakarsa masyarakat dalam hal ikut membela negara dan memelihara ke-

amanan lingkungan, koordinasi dengan BKKBN dan Pemda dibidang KB—Manunggal.

Termasuk koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan, MUI Propinsi Aceh untuk terselenggaranya pembinaan masyarakat yang berwawasan lingkungan telah dilakukan satu perjanjian kerjasama antara Polri dengan MUI, kerjasama ini diharapkan MUI dapat mengaktualisasikan peranannya melalui ceramah kepada masyarakat dengan memperbanyak materi tentang upaya memotivasi masyarakat supaya memberikan partisipasinya secara sadar dan aktif membela negara dan mendukung program pembangunan.

Kerjasama lainnya, juga dilakukan dengan Perumtel Banda Aceh dalam mengamankan

material milik BUMN tersebut, diantaranya material telepon umum dan perangkat lainnya milik Perumtel di Aceh secara umum.

#### PEMBANGUNAN IPK

Dalam membangun infra struktur kriminalitas di Aceh, pemanfaatan semua potensi masyarakat di daerah merupakan satu upaya yang dini dilakukan Polda Aceh sesuai dengan kondisi masyarakatnya, koordinasi dengan institusi masyarakat secara rutin terus dilakukan, antara lain lembaga Pesantren, MUI, dan Ormas lainnya.

Kegiatan ini juga merupakan arahan menuju kepada upaya pembinaan masyarakat, karena potensi tersebut merupakan unsur pembantu yang potensial untuk dimanfaatkan secara maksimal bagi pembinaan keamanan swakarsa.

## Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) SUMATERA UTARA

Polda Sumatera Utara (SUMUT) mempunyai wilayah hukum mencakup seluruh Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas: sebelah Utara dengan Propinsi Aceh, sebelah Timur dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Propinsi Riau dan Propinsi Sumatera Barat, sebelah Barat dengan Zone ZEE di Lautan Hindia.

Polda Sumut yang bermarkas di Jl. Zainul Arifin No.7 Medan mempunyai 11 buah Polres,

1 Poltabes, 1 KP3, 143 Polsek yang terdiri dari 13 Polsektif B, 12 Polsek C dan 14 Sekta. Adapun ke 11 Polres tersebut adalah :

1. Polres Deli Serdang di Tebing Tinggi
2. Polres Langkat di Binjai
3. Polres Tanah Karo di Kaban Jahe
4. Polres Simalungun di Pematang Siantar
5. Polres Asahan di Kisaran
6. Polres Labuhan Batu di Rantau Prapat
7. Polres Tapanuli Utara di Tarutung



*Bangunan Mapolda Sumut I yang terletak di Jalan Jenderal Suprpto No. 2 Medan.*

8. Polres Dairi di Sidikalang
9. Polres Tapanuli Tengah di Sibolga
10. Polres Tapanuli Selatan di Padang Sidempuan
11. Polres Pulau Nias di Gunung Sitoli, ditambah dengan Poltabes Medan dan KP3 Belawan.

Perkembangan dan kemajuan Polda Sumatera Utara sampai dengan April 1991 telah banyak hasil-hasil yang dicapai dalam bidang pembinaan kekuatan maupun penggunaan kekuatan. Seirama dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, berkembang juga modus-modus kriminalitas atau gangguan Kamtibmas yang berdimensi baru. Sehingga dapat diramalkan bahwa modus-modus tersebut akan terus berkembang lebih canggih lagi pada masa depan. Untuk menghadapi tugas masa depan tersebut, Polda Sumatera Utara selalu berupaya meningkatkan kemampuannya baik dibidang pembinaan maupun penggunaan kekuatan.

## SITUASI POLDA SUMUT

### Personil

Kualitas dan kuantitas Personil Polda Sumut sampai dengan April 1991 sejumlah 8.058 anggota. Kuantitas bertambah rata-rata 300 orang pertahun, sedangkan kualitas ditingkatkan melalui pendidikan pengembangan, pendidikan kejuruan dan latihan-latihan. Pendidikan pengembangan melalui pendidikan SESKOGAB, SESPIMPOL, PTIK, SELAPA, SECAPA dan BINTARA REGULER, jumlah kumulatif rata-rata 135 tiap tahun. Pendidikan kejuruan meliputi seluruh fungsi baik Operasional maupun Pembinaan. Pada pendidikan kejuruan yang dilaksanakan MABES POLRI, Polda Sumut telah mengirimkan Personil untuk mengikutinya rata-rata 2 sampai 10 orang pertahun per fungsi. Disamping itu dalam bidang Pendidikan pembentukan setiap tahunnya dapat dididik rata-rata 400 siswa SEBA MILSUK, dalam pendidikan kejuruan untuk tahun 1990/1991 telah didik Bintara Pengamanan Pariwisata sejumlah 154 personil yang ditempatkan pada Polres Sejawaran Polda Sumatera Utara.

### Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang merupakan pendukung kegiatan operasional kondisinya cukup memadai, dari tahun ke tahun ada peningkatan baik kualitas maupun kuantitas. Namun demikian berhubung meningkat pula kebutuhan, sarana yang ada masih dirasakan kurang. Mako Mapolda Sumut seluas 12.780 M2



*Kapoltabes Medan Letkol Pol. Drs. Sofyan Yakob dan Police Di Raja Malaysia mengadakan kerja sama dalam rangka pengungkapan kasus pemalsuan Travel Ceque oleh WNA di wilayah Polda Sumut.*

dan Mapoltabes Medan yang luas bangunannya 3.425 M<sup>2</sup> terletak ditengah Kota Medan, 11 Mapolres terdiri dari 4 standard dan 7 non standard sedangkan 167 Mapolsek yang ada sebesar (80%) merupakan bangunan standard dan sisanya non standard.

Rumah dinas/asrama sampai dengan April 1991 hanya dapat menampung anggota 58%. Tanah kosong seluas 3.677.000 M<sup>2</sup> Milik Polda masih memungkinkan untuk di bangun asrama dan rumah dinas sehingga seluruh anggota dapat di tampung pemondokannya bila di bangun.

Kendaraan roda empat banyaknya 707 buah dengan kondisi baru 16 buah, RR 547, RB 143 dan kendaraan roda dua sejumlah 958 buah dengan kondisi baru 24 buah, rusak ringan 725 buah, dan rusak berat 209 buah.

Senjata api genggam 12.314 kondisi BB 2006, LP 6966, RB 3342. Mesin ketik yang ada 1530 buah, dirasakan masih kurang. Alat

Apung 20 buah, dengan kondisi BB 4, RR 7, RB 9 buah. Sarana lainnya Komputer/PC 28 unit.

Sepeda patroli 2383 buah, RB 1618, RR 765 buah. Dua unit rumah sakit kelas III, 11 unit Poliklinik. Sarana olah raga umum antara lain lapangan sepak bola, lapangan bola volly, Tenis Meja dan Badminton.

#### Geografi dan Demografi

- Luas Daerah Sumatera Utara ± 71.800 Km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 17 Daerah Tingkat II yaitu : 6 Kota Madya, 11 Kabupaten, 209 Kecamatan, 390 Kelurahan dan 5.611 Desa.
- Jumlah penduduk sebesar 10.345.411 Jiwa dengan Skala pertambahan Penduduk 2,12% per tahun, dengan kepadatan penduduk 141/ Km<sup>2</sup>.
- Panjang jalan adalah : 11.688,802 Km<sup>2</sup>. dengan jumlah kendaraan sebanyak : 678,744 Unit.



12 Orang W.N.A. RRC di tangkap Polda Sumut yang masuk ke Medan melalui Pelabuhan Udara Polonia - Medan dengan memakai paspor palsu.

Police Employee Rate pada Tahun 1990 adalah 1 : 1.129, sedangkan potensi masyarakat yang dapat dibina adalah meliputi : Satpam sejumlah 4.362 orang, Polsus : 1.719 orang, Kamra : 33.460 orang, Pos Kamling : 11.418 buah dan Pramuka : 215.065 orang.

#### UPAYA - UPAYA YANG DILAKUKAN

#### Bidang Pembinaan Kekuatan

##### Personil

- 1) Peningkatan kualitas melalui :
  - a) Pendidikan pengembangan; mengirimkan anggota ke Pusat Pendidikan Pengembangan meliputi antara lain SESKOGAB, SESPIM-POL, PTIK, SELAPA, SECABA REGULER.
  - b) Pendidikan kejuruan ; Mengirimkan anggota untuk mengikuti pendidikan kejuruan yang meliputi seluruh fungsi baik bidang pembinaan maupun operasional.
  - c) Melaksanakan latihan-latihan.
  - d) Melaksanakan pembinaan karier.
  - e) Pembinaan mental dan psikik.
- 2) Peningkatan kuantitas melalui pendidikan pembentukan SECABA MILSUK di SPN Sampali.
- 3) Peningkatan kesejahteraan prajurit lewat koperasi dan pembangunan perumahan.

##### Sarana dan Prasarana

Upaya pembangunan Mako, asrama dan alat/alsus, sejak tahun 1986 s/d 1990, Polda Sumut telah dapat membangun bangunan tambahan seluas 26%.

##### Terobosan bidang Pembinaan

- 1) Upaya meningkatkan Mental Kejuangan dan Ethos Kerja :
  - Telah di ciptakan Hymne dan Mars Polda Sumut serta lagu Selamat Datang Polda Sumut oleh Kapolda Sumut Brigjen Pol H. Hadiman.
  - Doa Pengantar dan selesai melaksanakan Tugas yang dibacakan setiap Apel Pagi dan Apel Siang bersama lagu Hymne Polda Sumut.
- 2) Upaya meningkatkan Sarana dan Prasarana.
  - Telah dibangun secara Swadaya Gedung Rumatama dan Puskodal Ops yang berlokasi di Mapolda II Jl. H. Zainul Arifin No. 7 Medan dengan Luas bangunan 1.080 M<sup>2</sup>.
  - Disamping itu telah dibangun pula perumahan seluas 420 M<sup>2</sup>, Gedung Lalu



Kapolda Sumut Brigjen Pol. H. HADIMAN pada tanggal 16-2-1991 bertempat di Rupatama Polda Sumut dihadapan Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Atas se Sumatera Utara menyampaikan ceramah tentang memasyarakatkan Siskamling pendidikan.

Lintas: 360 M2, dan Asrama/Rumah Dinas seluas : 940 M2.

- 3) Telah diadakan lomba Kesamaptaan dan Kebersihan antar Satwil pada setiap Tahun Anggaran dan Kepada Satwil yang dinyatakan terjelek diberikan Kunci oleh Kapolda Sumut, dengan maksud agar Satwil yang menerimanya dapat di pacu menjadi lebih baik.

#### Bidang Operasional

Dalam upaya menanggulangi setiap ancaman dan gangguan Kamtibmas yang terjadi baik berupa Kriminalitas maupun penanggulangannya masalah lalu lintas (Kamtib Car Lintas) Polda Sumut dan jajarannya telah melaksanakan Operasi Rutin dan Operasi Kepolisian Khusus guna memantapkan Stabilitas Kamtibmas di Wilayah Sumatera Utara.

Operasi Kepolisian Khusus yang telah dilaksanakan dalam periode tahun 1990/1991 ada sebagai berikut :

##### 1) Operasi Tameng – 90

– Operasi Khusus Kewilayahan ini dilaksanakan selama 180 hari di wilayah Polda Sumut mulai tanggal 1 Juli s/d 31 Oktober 1990, dengan sasaran penanggulangan setiap bentuk gangguan kamtibmas yang timbul akibat dari penyusupan GPK Aceh ke Wilayah Polda Sumut, mengungkapkan

jaringan dan pemutusan kekuatan dari Wilayah Aceh.

– Dalam Operasi ini telah berhasil di tangkap 72 orang dengan perincian sebanyak 8 orang pendukung. Simpatisan 30 orang, dan sebanyak 10 orang dalam penelitian, serta menyita sejumlah amunisi Senpi.

##### 2) Operasi Curat – 90

– Operasi khusus kewilayahan ini dilaksanakan 60 hari, diseluruh wilayah Polda Sumut mulai tanggal 20 Maret s/d 18 Mei 1990 dengan sasaran pencurian dengan pemberatan yang dapat meresahkan masyarakat.

– Dalam Operasi ini telah diungkapkan sebanyak 27 perkara dan menangkap 35 orang pelaku kejahatan Curat dengan barang bukti antara lain : 6 unit sepeda motor, 4 Tape Recorder dan 8 ton Pupuk.

##### 3) Operasi Jala – 90

– Operasi Jala-90 dilaksanakan selama 60 hari pada daerah tertentu (Medan, Deli Serdang, Langkat, Asahan, Labuhan Batu, dan Belawan) mulai tanggal 31 Maret s/d 29 Mei 1990 dengan sasaran penanggulangan penyelundupan.

– Dalam Operasi ini telah berhasil diungkap 7 perkara dan menangkap 12 orang pelaku dengan barang bukti : 145 bawang

putih, 145 bal pakaian jadi dan 3 unit Ranmor Roda Empat.

4) Operasi Nila – 90

– Operasi ini dilaksanakan selama 60 hari pada wilayah Poltabes Medan, Polres Deli Serdang, Langkat, Tanah Karo, Dairi, Tapsel dan Nias, mulai tanggal 31 Maret s/d 29 Mei 1990 dengan sasaran penyalahgunaan penyelundupan, Narkotik atau Ganja.

– Dalam Operasi ini telah berhasil diungkapkan 44 perkara dan menangkap 25 orang pelaku dengan barang bukti : 6 batang pohon ganja, 5 kg daun ganja, dan 245 amplop daun ganja.

5) Operasi Kepodang – 90

– Operasi ini dilaksanakan selama 60 hari diwilayah Polda Sumut mulai tanggal 29 Desember 1990 s/d 28 Pebruari 1991 dengan sasaran pencurian kendaraan bermotor.

– Dalam Operasi ini telah berhasil diungkap 9 perkara dan menyita barang bukti; dua unit sepeda motor dan 8 unit Ranmor roda empat.

6) Operasi Pipit.

– Operasi ini dilaksanakan selama 60 hari diwilayah Polda Sumut mulai tanggal 29 Desember 1990 s/d 28 Pebruari 1991 dengan sasaran pencurian dengan kekerasan.

– Dalam Operasi ini telah berhasil diungkap 23 perkara dan menangkap 27 orang pelaku dengan barang bukti antara lain : uang kontan Rp.170.000,—, 11 Gram emas, senjata tajam dan gerenda.

7) Operasi Beduk Toba – 90

– Operasi khusus kewilayahan dalam rangka pengamanan bulan suci Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1410 H. ini dilaksanakan selama 40 hari diwilayah Polda Sumut mulai tanggal 27 Maret s/d 4 Mei 1990.

– Operasi ini telah berhasil mengamankan situasi Kamtibmas bulan Puasa dan Lebaran Wilayah Sumut, tanpa ada hambatan yang

berarti.

8) Operasi Patuh Lilin – 90

– Operasi Khusus terpusat dalam rangka pengamanan Natal 1990 dan Tahun Baru 1991 serta menyongsong tahun kunjungan Wisata Indonesia 1991 ini dilaksanakan selama 60 hari di Wilayah Polda Sumut mulai tanggal 22 Desember 1990 s/d 19 Pebruari 1991.

– Operasi ini telah berhasil mengamankan situasi Kamtibmas terutama Kamcar Lantas selama Natal dan Tahun Baru di Wilayah Sumatera Utara.

Dalam Operasi rutin Kepolisian yang telah dilaksanakan pada periode tahun 1990/1991, Polda Sumut berhasil mengungkap kasus-kasus kejahatan menonjol berdimensi baru antara lain :

1) Kasus pemalsuan Travel Cheque Chartered Bank. Kejadian ini terjadi pada bulan Pebruari 1991 yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp.300 Juta pada Bank BPD—SU dan Bank EXIM Medan.

Dalam kasus ini telah ditangkap 7 orang pelakunya yang kesemuanya warga negara Malaysia dan disita pula 819 lembar Visa Travel Cheque Chartered Bank London dengan nilai Nominal \$ 100. Kasus ini telah dapat ditangani secara tuntas dan telah berhasil diungkap jaringan sindikatnya dengan bekerjasama SET NCB Interpol dan Polis Diraja Malaysia.

2) Kasus pemalsuan kredit Card jenis Visa dari Bank Duta, kejadian ini terjadi pada bulan Oktober 1990 yang dilakukan oleh ANITA dengan cara mencuri dan memalsukan tanda tangan pemakai sebenarnya atas nama SARI-MIN yang kemudian dibelanjakan di Medan Plaza dan Deli Plaza dengan kerugian sebesar Rp.1.734.000,—.

Pada Periode tahun sebelumnya telah pula berhasil diungkap kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor yang dipergunakan melengkapi dokumen-dokumen mobil hasil curian yang berasal dari kota besar di Jawa Barat dan Jakarta. Pemalsuan surat-surat kendaraan ini berhasil diungkap pada Nopember 1989 berkat ketelitian pemeriksaan

dokumen mutasi ranmor melalui Cross Check oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Direktorat Reserse Polda Sumut.

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan telah diungkap 16 orang pelaku sindikat kejahatan pencurian ranmor yang mempunyai jaringan di Jakarta dan Jawa Barat. Disamping itu berhasil pula disita barang bukti berupa 51 unit mobil berbagai jenis dengan surat-surat dokumen palsunya.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan guna memantapkan dan mendukung hasil-hasil operasi yang telah dicapai ini, Polda Sumut melakukan berbagai upaya terobosan dengan memantapkan dan memprioritaskan program-program kegiatan tertentu baik dalam upaya penanggulangan lalu lintas maupun kriminalitas.

#### 1) Bidang lalu lintas

a) Upaya penegakan hukum dibidang lalu lintas Represif, Preventif, Regristasi dan identifikasi, Dikmas Lantas dan Perekayasaan lalu lintas telah dilaksanakan secara maksimal dengan mendinamisir segala potensi yang di miliki serta meningkatkan kordinasi lintas sektor.

b) Secara ofensif aktif Polda Sumut telah pula berupaya meningkatkan pengamanan masalah lalu lintas ini, melalui pemantapan program-program kegiatan dibidang lalu-lintas yang diprioritaskan penanganannya secara optimal antara lain :

Program Polisi Sahabat Anak (P.S.A) ;

(1) Kegiatan Polisi Sahabat Anak yang mempunyai nilai strategis hasilnya pada masa yang akan datang adalah upaya Polri untuk mendidik masyarakat berdisiplin lalu lintas pada usia dini, telah dilaksanakan sejak periode bulan Januari 1991, diseluruh jajaran Polda Sumut.

(2) Program P.S.A yang dilaksanakan dengan bekerjasama Aparat Depdikbud dan para Guru-guru Sekolah dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai Sekolah Dasar ini secara periodik dan simultan kegiatannya dilaksanakan dan dikordinasikan oleh Direktorat Lalu lintas Polda Sumut, Poltabes Medan dan seluruh Polres jajaran Polda

Sumut dengan menggunakan buku petunjuk paduan yang telah disiapkan.

(3) Kegiatan ini disamping dilaksanakan pada sekolah-sekolah, juga di pusatkan kegiatannya di Mapolda (Direktorat Lalu Lintas), Mapoltabes Medan dan Polres-Polres dengan cara membuat taman-taman Lalu lintas, mengumpulkan dan mendidik secara langsung anak-anak sekolah guna diberikan pengetahuan-pengetahuan tentang peraturan Lalu lintas dan sopan santun berlalu lintas di jalan raya.

#### 2) Daerah Kawasan Tertib Lalu-lintas

a) Jalur kawasan tertib lalu lintas yang bebas terhadap semua bentuk pelanggaran Lalu-lintas sekecil apapun telah dikembangkan di jajaran Polda Sumut guna mewujudkan secara nyata perobahan situasi lalu-lintas yang aman tertib dan lancar serta dapat dirasakan langsung oleh para pemakai jalan, yang pada akhirnya dapat menghilangkan resiko terjadinya kecelakaan lalu-lintas pada kawasan tersebut serta mendidik masyarakat pemakai jalan untuk mematuhi segala peraturan lalu-lintas yang berlaku.

b) Pusat Pemerintah, perdagangan dan perekonomian Sumut berada dikota Medan demikian pula kepadatan penduduk (rata-rata 6531/Km<sup>2</sup>) dan jumlah kendaraan bermotor (55,27%) berada di kota ini. Dilihat dari segi Kamtibmas lantas maka sebagian besar jumlah kasus kecelakaan lalu-lintas (36,11%) dan pelanggaran lalu-lintas (47,65%) terjadi di Medan. Oleh karena itu Medan adalah merupakan barometer daerah Sumatera Utara dan penanganan masalah lalu-lintas mendapat prioritas pertama dibandingkan kota kota lainnya.

c) Jalan-jalan kawasan tertib lalu-lintas yang telah ditentukan sebagai pilot proyek di Medan pada tahap pertama (Mei s/d Juli 1991) diprioritaskan pada Jalan-jalan Sudirman, Letjen Suprpto, Diponegoro, dan jalan Imam Bonjol telah digarap dan akan dikembangkan pada jalur jalan lainnya pada tahap berikutnya.

d) Keberhasilan demi keberhasilan yang

telah dicapai didapat dengan tidak mudah dan tidak dalam waktu yang singkat, mengingat permasalahan dibidang lalu lintas daerah Sumatera Utara ini sangat khas dan kompleks sifatnya. Tingkat kepedulian masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang sangat rendah, benturan-benturan sosial dan adanya perbedaan kepentingan merupakan tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh petugas dilapangan dalam mewujudkan kawasan tertib lalu lintas ini. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok pengemudi becak ( $\pm$  250 orang) kepada DPRD dan Walikota Madya Medan pada tanggal 6 Mei 1991, akibat larangan daerah bebas becak yang diberlakukan dikawasan tersebut merupakan efek dari pada ketidaksiapan sebagian para pemakai jalan untuk menerima perubahan situasi dalam penertiban ini.

Masalah ini telah dapat diantisipasi dan ditangani secara terpadu oleh aparat keamanan dan instansi terkait, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan sampai terjadi.

3) *Patung-patung Polisi, Monumen Kecelakaan Lalu-lintas dan pembuatan Gardu-gardu Pos penjagaan Lalu-lintas.*

a) Dalam upaya menekan dan mencegah terjadinya kasus kecelakaan lalu-lintas di Wilayah Sumut, secara swadaya telah dibuat pula Monumen-monumen kecelakaan lalu-lintas dan Patung-patung Polisi pada tempat-tempat strategis dijalur jalur rawan kecelakaan dan pelanggaran Lalu-lintas, untuk memperingatkan dan menghibau kepada setiap pemakai jalan agar selalu berhati-hati dan tetap mentaati peraturan lalu-lintas.



Kapoldasu Brigjen Pol. H. Hadiman sedang meresmikan Taman Lalu Lintas di Polres Langkat pada tanggal 11 Mei 1991.

b) Disamping itu juga guna menunjang pelaksanaan tugas Polantas dilapangan telah dibuat pula sebanyak 40 (empat puluh) buah gardu-gardu Pos penjagaan Polantas di kota Medan disamping pembuatan Gardu-gardu Polisi lainnya pada kota-kota diluar kota Medan, yang kesemuanya pengadaannya dilaukan secara swadaya masyarakat.

4) *Komputerisasi pada Kantor Samsat*

a) Guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan memantapkan sistem Registrasi dan Identifikasi surat-surat kendaraan bermotor, Direktorat Lalu-lintas Polda Sumut telah dilengkapi bangunan baru Gedung Samsat di Jalan Putri Hijau 14 Medan dengan Sistem Computerisasi.

b) Dengan adanya Computerisasi ini para wajib pajak yang akan mengurus surat-surat tanda nomor kendaraannya dapat diproses dan dilayani dengan cepat (One Day Service).

5) *Seminar Kasus Kecelakaan Lalu-lintas Tabrak Lari*

Sebagai salah satu upaya menanggulangi kasus kecelakaan lalu-lintas tabrak lari yang sering terjadi di Wilayah Polda Sumut, maka Polda Sumut bekerja sama dengan Universitas Dharma Agung Medan, telah melaksanakan seminar penanggulangan kasus kecelakaan lalu-lints tabrak lari yang dihadiri oleh Kapolda Sumut dan pejabat teras Polda Sumut, para Kasat Lantas, Cendikiawan, Rektor, Dekan, Guru-guru Besar serta perwakilan Senat Mahasiswa dari Universitas, Perguruan Tinggi yang ada di Medan.

6) *Pembentukan Pos-Pos Kotis Terpadu*

a) Pada saat menjelang dan sesudah Lebaran Natal dan Tahun Baru, frekwensi dan volume arus kendaraan dijalur jalan lintas Sumatera (Jalinsum) secara drastis meningkat tajam

Hal ini dikarenakan jalinsum merupakan jalur lintasan arus lalu-lintas kendaraan baik yang menghubungkan antar Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara maupun antar Propinsi di Pulau Sumatera dan Jawa.

b) Situasi ini menuntut adanya pengamanan arus lalu lintas pada jalur tersebut guna mencegah kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang dapat menghambat perjalanan masyarakat yang akan berliburan.

c) Untuk memberikan rasa aman bagi para pemakai jalan, pada saat demikian dibentuk pos-pos Kotis terpadu dan pelayanan bengkel berjalan (Mobile) ditempat-tempat strategis sepanjang jalur tersebut guna memberikan bantuan Kepolisian secara cepat kepada masyarakat bila terjadi kecelakaan lalu lintas, kerusakan kendaraan dan pertolongan lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

d) Penggelaran kekuatan Polri pada Pos-pos Kotis ini, melibatkan pula unsur-unsur Apter/ABRI, Hansip, Kamra, Satpam, Orari/Rapi Pramuka, Dinas Kesehatan (R.S), Dinas Pemadam Kebakaran, Jasa Raharja, DLLAJR, Organisasi Pemuda dan Potensi masyarakat yang ada serta instansi terkait lainnya.

## 7) Bidang Kriminalitas

a) Disamping upaya menegakkan Hukum yang telah dilaksanakan secara tegas dan tuntas (CJS) upaya pembangunan Infra Struktur Penanggulangan Kriminalitas secara bertahap telah pula dilaksanakan oleh satuan Kewilayahan.

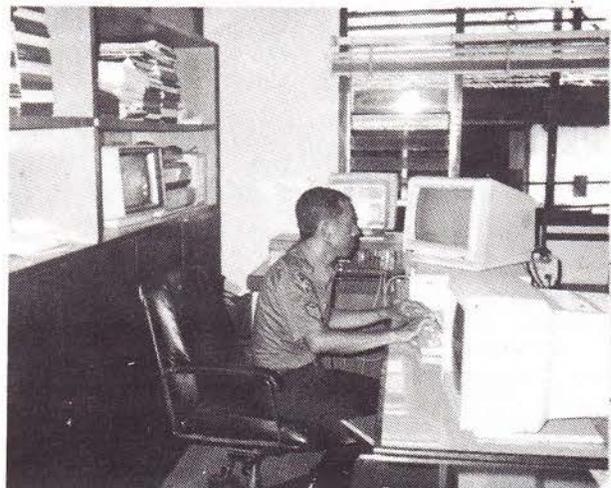
b) Pemanfaatan potensi masyarakat melalui Siskamling, Polsus, Satpam, terus dibina dan ditingkatkan kualitasnya, demikian pula pemanfaatannya pendaya gunaan fungsi PPNS dalam pengungkapan kasus-kasus tertentu antara lain kasus lingkungan hidup, masalah tenaga kerja, pencurian kawat telepon dan perambahan hutan yang terjadi.

c) Upaya-upaya terobosan dalam mendukung keberhasilan pengungkapan kasus-kasus kejahatan telah dilakukan dengan cara antara lain membentuk team-team Buru Sergap yang mampu melakukan pengejaran dan menangani kasus kejahatan yang berintensitas tinggi.

d) Upaya preventif melalui terobosan

pemasangan Sistem Alarm pada kantor-kantor Bank yang berada di Kota Medan melalui kendali Puskodal Ops Polda Sumut, dioperasikan pada bulan Mei 1991. Sistem Alarm ini akan dapat menangkal setiap kejahatan yang terjadi pada kantor-kantor perbankan yang perlu diprioritaskan pengamanannya oleh Polri.

e) Peningkatan kerjasama Kepolisian melalui SET NCB INTERPOL dengan POLIS DIRAJA MALAYSIA cukup baik terutama dalam upaya pengungkapan kasus-kasus kejahatan berdimensi baru dan bertaraf kejahatan Internasional seperti; pemalsuan Travel Cheque yang melibatkan Warga Negara Malaysia.



*Komputer Puskodal Ops.  
Petugas sedang mendatakan laporan gangguan kamtibmas dari satuan wilayah sejawatan Poldasu.*

## HASIL-HASIL YANG DICAPAI

### Bimbingan Masyarakat.

#### a) Pembinaan Jalur Agama

(1) Mengadakan tatap muka Pimpinan Polda Sumut dengan para Pendeta se Kodya Medan dan Binjai dengan Thema "Peranan Para Gerejani / Pendeta Dalam Binkamtibmas".

(2) Pembinaan Alim Ulama (Islam), yang dilaksanakan secara Tatap muka di P. Sidempuan tanggal 10 Mei 1991 pada Musyawarah Kerja Muhammadiyah Wilayah Sumatera Utara.

#### b) Pembinaan Jalur Interpreneur

(1) Mengadakan Tatap muka dengan para

pedegar Film, Pengusaha Bioskop/PHR dan BAPFIDA Sumut tanggal 6 April 1991 di Ruang Kerja Kadit Bimmas Polda Sumatera Utara.

(2) Mengadakan Tatap muka dengan para Pengusaha Palwa Video se Kodya Medan dan Binjai pada tanggal 27 Oktober 1990 di Aula Dit Bimmas Polda Sumut.

(3) Mengadakan Tatap muka dengan para Pengusaha Taxi se Kodya Medan pada tanggal 4 Maret 1991 di Ruang Kerja Kadit Bimmas Polda Sumut.

(4) Mengadakan Tatap muka dengan para Pimpinan Perusahaan Negara/Swasta pada tanggal 23 Maret 1991 di Bina Graha Pemda Sumut Medan.

c) *Pembinaan Jalur Kampus, Mahasiswa dan Pemuda*

(1) Mengadakan Tatap muka antara dengan para Civitas Akademika USU pada tanggal 15 Nopember 1990 di Auditorium Kampus USU Medan.

(2) Mengadakan Tatap muka antara Pimpinan Polda Sumut dengan Mahasiswa APDN pada tanggal 23 Nopember 1990 di Kampus APDN Medan.

(3) Mengadakan tatap muka antara KAPOLDA SUMUT dengan peserta Rakerda KNPI pada tanggal 6 September 1990 di Asrama Haji Pangkalan Mansyur Medan.

(4) Mengadakan Tatap muka antara KAPOLDA SUMUT dengan warga AMPI TK-I Sumut pada latihan Kader AMPI Tk-I Sumut tanggal 4 Mei 1991 di Asrama Haji Pangkalan Mansyur Medan.

(5) Mengadakan Tatap muka antara KAPOLDA SUMUT dengan Mahasiswa Pancasila Sumut pada tanggal 13 September 1990 di Wisma PHI Jl. Gatot Subroto Medan.

d) *Pembinaan Jalur KBA*

(1) Mengadakan Tatap muka dan memberikan Ceramah tentang SOSPOL ABRI dengan para Ibu-ibu Bhayangkari pada tanggal 1 April 1991 di Aula PD Bhayangkari Polda Sumut.

(2) Mengadakan Tatap muka dengan para

Isteri-isteri PNS Polri Polda Sumut dalam rangka pensukseskan PEMILU 92 pada tanggal 15 Mei 1991 di AULA PD Bhayangkari Polda Sumut.

**Pembinaan Kekuatan**

a. *Personil 1981 s/d 1991*

1) Kualitas

a) Pendidikan pengembangan :

– Lemhanas	=	4
– Seskogab	=	2
– Sesko Angkatan/	=	23
– PTIK Sespim	=	66
– Selapa	=	37
– Secapa	=	167
– Secaba Reg	=	917

b) Pendidikan Kejuruan :

– Perwira	=	524
– Bintara	=	1.390
– Tamtama	=	16

2) Kuantitas

a) Pendidikan Pembentukan CABA

– CABA MILSUK	=	4.319
– CATAM	=	650
– POLWAN	=	162

b. Sarana dan Prasarana dari tahun 1986 s/d 1991 telah dibangun sekitar 26% dari sebelumnya.

c. Meningkatnya sikap juang anggota dan kegairahan kerja.

**Bidang Operasional**

a. *Kriminalitas*

1) Crime Total sejak tahun 1986 s/d 1990, grafiknya mengalami penurunan setiap tahunnya, jumlah Crime Total adalah sebagai berikut :

Pada tahun 1986	: 18.047
Pada tahun 1987	: 15.980
Pada tahun 1988	: 13.876
Pada tahun 1989	: 11.065
Pada tahun 1990	: 10.815

2) Crime Clearance mulai tahun 1987 s/d 1990 grafiknya naik setiap tahunnya, dengan prosentase sebagai berikut :

Pada tahun 1987 : 40,55% (6.481)

Pada tahun 1988 : 53,45% (7.418)  
 Pada tahun 1989 : 66,47% (7.356)  
 Pada tahun 1990 : 67,22% (7.270)

3) Crime Rate sejak tahun 1986 sampai dengan 1990 grafiknya mengalami penurunan setiap tahunnya sebagai berikut :

Pada tahun 1986 : 199  
 Pada tahun 1987 : 166  
 Pada tahun 1988 : 144  
 Pada tahun 1989 : 109  
 Pada tahun 1990 : 101

4) Crime Clock mulai tahun 1986 sampai dengan 1990 grafiknya mengalami kenaikan setiap tahunnya sebagai berikut :

Pada tahun 1986 : 0.29 '06"  
 Pada tahun 1987 : 0.32 '53"  
 Pada tahun 1988 : 0.37 '53"  
 Pada tahun 1989 : 0.46 '51"  
 Pada tahun 1990 : 0.48 '36"

#### b. Kamtibcar Lantas

1) Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1990, grafiknya mengalami penurunan setiap tahunnya, jumlah kasus laka lintas tersebut adalah sebagai berikut :

Pada tahun 1986 : 3.352 kasus  
 Pada tahun 1987 : 3.334 kasus  
 Pada tahun 1988 : 2.995 kasus  
 Pada tahun 1989 : 2.191 kasus  
 Pada tahun 1990 : 2.147 kasus

2) Jumlah Kasus Kecelakaan lalu lintas tabrak lari pada tahun 1989 (741 Kasus) dan tahun 1990 (688 Kasus) mengalami penurunan masing-masing 9,6% dan 7,1%.

3) Jumlah Penyelesaian Perkara Kecelakaan lalu-lintas sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1990, grafiknya mengalami kenaikan setiap tahunnya, dengan prosentase sebagai berikut :

Pada tahun 1986 : 35,26% (1.182 perkara)  
 Pada tahun 1987 : 40,40% (1.347 perkara)  
 Pada tahun 1988 : 45,94% (1.376 perkara)  
 Pada tahun 1989 : 57,05% (1.250 perkara)  
 Pada tahun 1990 : 69,77% (1.489 perkara)

4) Jumlah pelanggaran lalu-lintas dengan Tilang pada tahun 1988 sampai dengan 1990

grafiknya mengalami penurunan setiap tahunnya, dengan prosentase sebagai berikut :

Pada tahun 1988 : 10,55 %  
 (129.129 pelanggaran)  
 Pada tahun 1989 : 15,20 %  
 (109.547 pelanggaran)  
 Pada tahun 1990 : 40,30 %  
 (65.392 pelanggaran)

#### Tantangan masa depan Polda Sumut

Berdasarkan perkiraan Intel Polda Sumut untuk tahun 1991/1992, 1992/1993 ancaman faktual yang akan dihadapi sebagai berikut :

##### a. *Kejahatan yang diprioritaskan penanganannya :*

- 1) Pencurian kendaraan bermotor dengan modus operandi menggunakan kunci palsu palsu merubah surat-surat kendaraan, dimutasikan kelain daerah sehingga memperoleh identitas baru dan dijual lewat show room.
- 2) Pencurian dengan kekerasan, modus operandi menggunakan senpi/sajam dan berkelompok.
- 3) Pencurian dengan pemberatan, penganiayaan dan pembunuhan dengan modus operandi tradisional.
- 4) Kejahatan/Pelanggaran Pemilu 1992 baik masa pra, pelaksanaan dan purna Pemilu serta Sidang Umum MPR 1993.

##### b. *Kejahatan dan pelanggaran yang perlu diperhatikan :*

- 1) Kamtibcar lantas, khususnya di kota Medan
- 2) Kemacetan lalu-lintas, laka lintas, tabrak lari dan pelanggaran lalu-lintas.

##### c. *Kejahatan berdimensi baru :*

- 1) Perbankan : Modus Operandi, memalsukan Dokumen untuk memperoleh Kredit.
- 2) Pemalsuan minyak pelumas : Modus Operandi, minyak bekas diolah dengan menggunakan mesin canggih kemudian diberi merk Oli yang terkenal Penjualan di kios-kios kecil.
- 3) Pencemaran lingkungan : Modus Operandi, pembuangan limbah perusahaan dan asap mesin.

## Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) SUMATERA BARAT

Polda Sumatera Barat, disingkat Polda Sumbar yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman no. 55 Padang, mempunyai daerah hukum meliputi Propinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah 42.297 Km<sup>2</sup>.

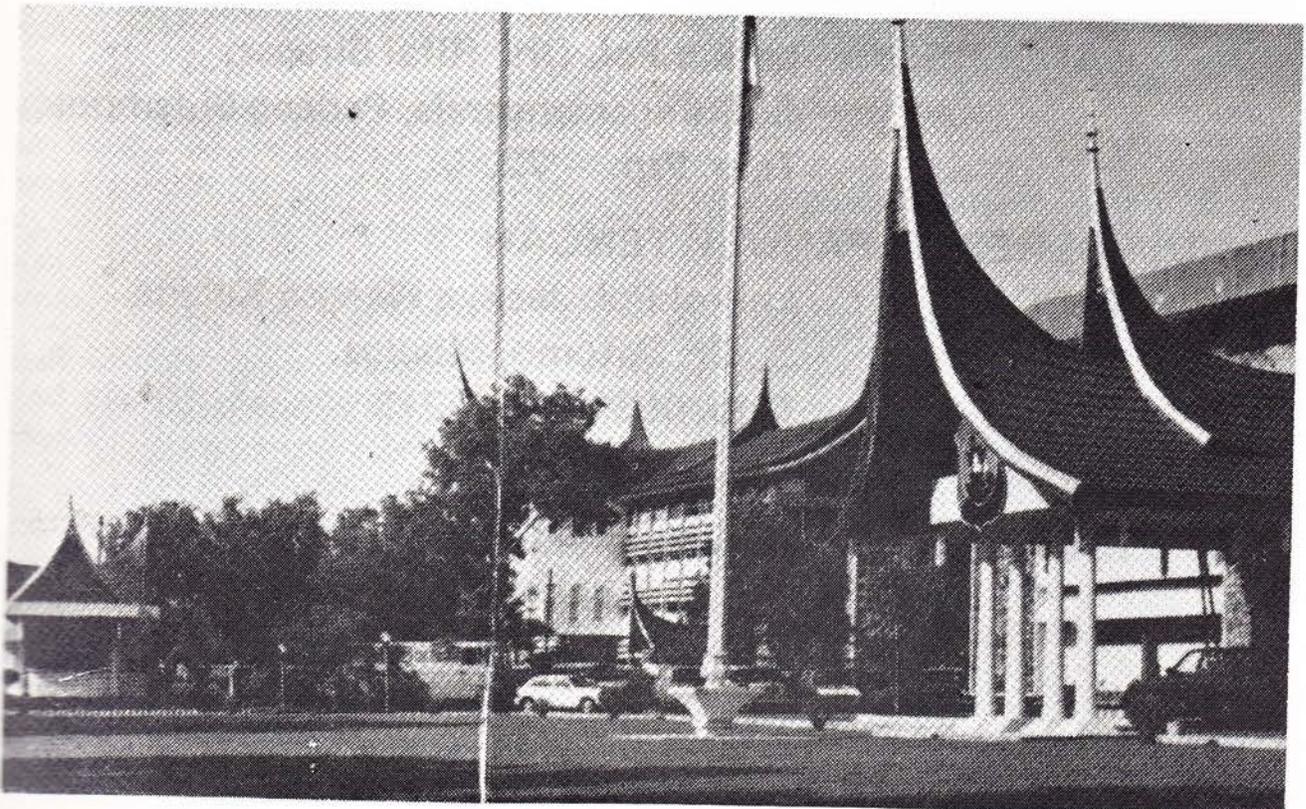
Jumlah penduduk Sumatera Barat pada akhir tahun 1988 sebanyak 4.174.601 juta jiwa. Dengan demikian setiap 1 Km<sup>2</sup> dihuni oleh sekitar 98 orang.

Polda Sumbar mempunyai kekuatan 4.923 orang anggota. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Sumbar maka setiap anggota Polri melayani sekitar 848 orang penduduk.

### GEOGRAFI

Polda Sumbar di sebelah Barat berbatasan dengan ZEE di Samudra Indonesia, dimana juga terdapat Kepulauan Mentawai, yang membujur dari Barat Laut ke Tenggara termasuk wilayah Sumbar.

Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara, sebelah Timur dengan Propinsi Riau, sebelah Selatan dan Tenggara berbatasan dengan Propinsi Bengkulu dan Propinsi Jambi. Memang unik, hanya Polda Sumbar lah satu-satunya Polda di Indonesia yang daerahnya berbatasan langsung dengan 4 buah Propinsi.



*Gedung Mapolda Sumbar dengan ciri-ciri khas daerah Minang.*

Bukit Barisan yang membelah pulau Sumatera, menjadikan wilayah Polda Sumbar terdiri dari dataran rendah dibagian pantai Barat dan dataran tinggi serta pegunungan di bagian Timur. Sehingga di Sumatera Barat terdapat kota-kota sejuk seperti Padang Panjang, Bukit Tinggi dan Alahan Panjang.



*Tugu perjuangan Polri merebut Kemerdekaan R.I. di Sumbar.*

## ORGANISASI

Polda Sumbar memiliki 9 Polres, termasuk 1 Polresta, dan 89 Polsek, termasuk 4 buah Polsekta.

Ke 9 Polres tersebut adalah: Polresta Padang di Jl. Prof. Moch. Yamin, Padang; Polres Pesisir Selatan di Jl. Protokol 1, Painan; Polres Pasaman di Jl. Nusantara, Lubuk Sikaping; Polres Lima Puluh Kota di Jl. Pahlawan, Payakumbuh; Polres Agam di Jl. Jenderal Sudirman, Bukit Tinggi; Polres Padang Pariaman di Jl. Imam Bonjol, Pariaman; Polres Tanah Datar di Jl. Benteng, Batu Sangkar; Polres Sawah Lunto Sijunjung di Jl. Gombak, Sijunjung; Polres Solok di Jl. Aipda KS. Tubun, Solok.

Sedangkan ke 89 Polsek terdiri dari 1 Polsektif B, 5 buah Polsektif C, 7 buah Polsek Standard B dan 76 buah Polsek Standard C.

## SITUASI KAMTIBMAS

Situasi Kamtibmas di Polda Sumbar umumnya mantap dan cukup terkendali guna menunjang gerak laju pembangunan di daerah ini. Sungguhpun demikian perlu adanya peningkatan upaya penanggulangan terhadap berbagai bentuk gangguan Kamtibmas yang ada.

Keadaan Kamtibmas di daerah Polda Sumbar termasuk yang teraman di seluruh Indonesia. Namun demikian tidak berarti tidak terjadi tindak kejahatan dan gangguan Kamtibmas, namun frekuensinya terendah dibanding daerah lain.

Gangguan Kamtibmas yang cukup potensial antara lain :

- kecelakaan lalu lintas
- sengketa tanah
- pencurian hasil hutan
- kebakaran/pembakaran.

Disamping itu terdapat berbagai kejahatan lain, diantaranya adalah :

- pencurian berat
- pencurian dengan kekerasan
- penganiayaan
- pembunuhan
- penipuan
- penggelapan
- pemerasan
- pengrusakan
- perjudian
- pencurian ringan.

Semua kenyataan diatas, ditambah lagi dengan perbandingan anggota Polri dan penduduk 1 : 848, adalah merupakan tantangan berat yang harus mampu untuk diatasi.

## PEMBINAAN SUMBER DAYA

### a. Peningkatan profesionalisme

Dengan mempedomani Rumusan Tugas Polri tahun 1990/1991 dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis serta penilaian bentuk ancaman Kamtibmas yang mungkin terjadi di wilayah hukum Polda Sumbar, maka dilakukan berbagai upaya antara lain :



*Inilah sebahagian ruas jalan dari proyek Manunggal sakato yang diprakarsai oleh Polda Sumbar. Kelihatan Kapolda Sumbar yang waktu itu dijabat Kolpol. Drs. Zahri Amin, Kasatgas Manunggal Letkolpol Drs Sutan Siregar dan Kalakgas Manunggal Mayorpol Drs. Darwizal M. Noer, sedang berada di lokasi Manunggal.*

- Membangun kekuatan Polri di jajaran Polda Sumbar yang dititik beratkan pada pemantapan fungsi operasional yang didukung oleh kemampuan yang handal dari setiap anggota Polri baik secara individu maupun secara kelompok/satuan.
- Melaksanakan pembangunan kekuatan personil untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- Mengembangkan sistem dan methoda guna mencapai efektifitas prosedur dan mekanisme kerja dibidang operasional dan pembinaan.
- Meningkatkan profesionalisme yang mampu mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar pada gilirannya mampu dan handal didalam menanggulangi berbagai bentuk ancaman.
- Dalam kebijaksanaan dibidang personil dan

profesionalisme tetap mengacu pada kebijaksanaan Pimpinan ABRI/Polri yang pembinaannya dilakukan baik secara horisontal maupun vertikal, dengan memperhatikan: jiwa kejuangan, performance, kemampuan profesional, jenjang pendidikan, jenjang dan standarisasi jabatan dan keharmonisan kehidupan keluarga.

Penampilan seorang prajurit Polri akan dinilai dari kadar ketegasan, kesederhanaan, dan disiplinnya yang kesemuanya itu tercermin dalam performancenya secara correct, memegang teguh hierarki dan tradisi.

#### **b. Pemantapan, perekayasaan sarana/prasarana yang tersedia**

- Dibidang pembinaan materiil, sarana/prasarana, fasilitas dan jasa, diupayakan dengan memotivasi setiap anggota agar merasa ikut memiliki setiap peralatan atau sarana/prasarana

yang menjadi tanggungjawabnya.

– Upaya pemanfaatan secara optimal sarana/prasarana yang tersedia, dengan senantiasa mempedomani kebijaksanaan Pimpinan ABRI/Polri.

– Menyadari dengan keterbatasan sumber daya yang ada, maka untuk dapat menguasai situasi dan kondisi Kamtibmas, maka untuk penanggulangan setiap gangguan Kamtibmas mengusahakan keikutsertaan masyarakat secara swakarsa dan swadaya.

– Setiap penggunaan material tidak terlepas dari prinsip efisiensi atau penghematan yang diarahkan untuk terciptanya peningkatan kemampuan dan kekuatan Polri sebagai pejuang prajurit dan prajurit pejuang yang profesional.

#### c. Mendinamisasikan sumber daya

Upaya untuk mewujudkan kemampuan Polri di jajaran Polda Sumbar dalam batas sumber daya yang ada serta menggunakan apa yang ada guna menunjang pelaksanaan tugas pokok Polri diwujudkan dalam bentuk pemekaran kekuatan dalam bentuk peningkatan profesionalisme, penyempurnaan strategi dan taktik yang mampu mengantisipasi berbagai bentuk ancaman dengan menggunakan kekuatan yang ada, efektifitas peralatan serta pemantapan teknik manajemen Polri.

#### PENGUNAAN KEKUATAN

Upaya penggunaan kekuatan berupa operasi rutin maupun khusus Kepolisian baik yang diprogram Mabes Polri maupun operasi-operasi

khusus kewilayahan yang diprogram Polda Sumbar.

Operasi rutin berupa penjagaan dan patroli dilaksanakan terhadap pengaturan lalu-lintas, pengamanan Markas, proyek vital dan lain-lain.

Meningkatkan pelaksanaan latihan-latihan fungsi teknis Kepolisian dalam upaya mendukung tugas operasional Kepolisian terutama dalam mengantisipasi pencapaian tingkat kemampuan dibidang taktik dan teknik penanggulangan jenis-jenis kejahatan tertentu, sesuai dengan pola kriminalitas di jajaran Polda Sumbar.

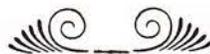
#### UPAYA PEMBANGUNAN IPK

– Di Sumatera Barat ada tiga kelompok Informal Leader yang disebut dengan Tiga Tungku Sejarangan, yaitu Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cadiak Pandai. Ketiga Informal Leader ini sangat berpengaruh dalam masyarakat Sumatera Barat.

Dalam rangka pembangunan IPK Tiga Tungku Sejarangan ini dimanfaatkan guna menggerakkan masyarakat dalam ikut membina Kamtibmas.

– Meningkatkan daya tangkal dan daya cegah masyarakat dalam rangka membangun IPK untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang meresahkan masyarakat.

– Melaksanakan pemantapan Siskamling dan mengadakan penyuluhan terhadap Remaja, Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa serta pembinaan terhadap RBC dan Patroli Keamanan Sekolah.



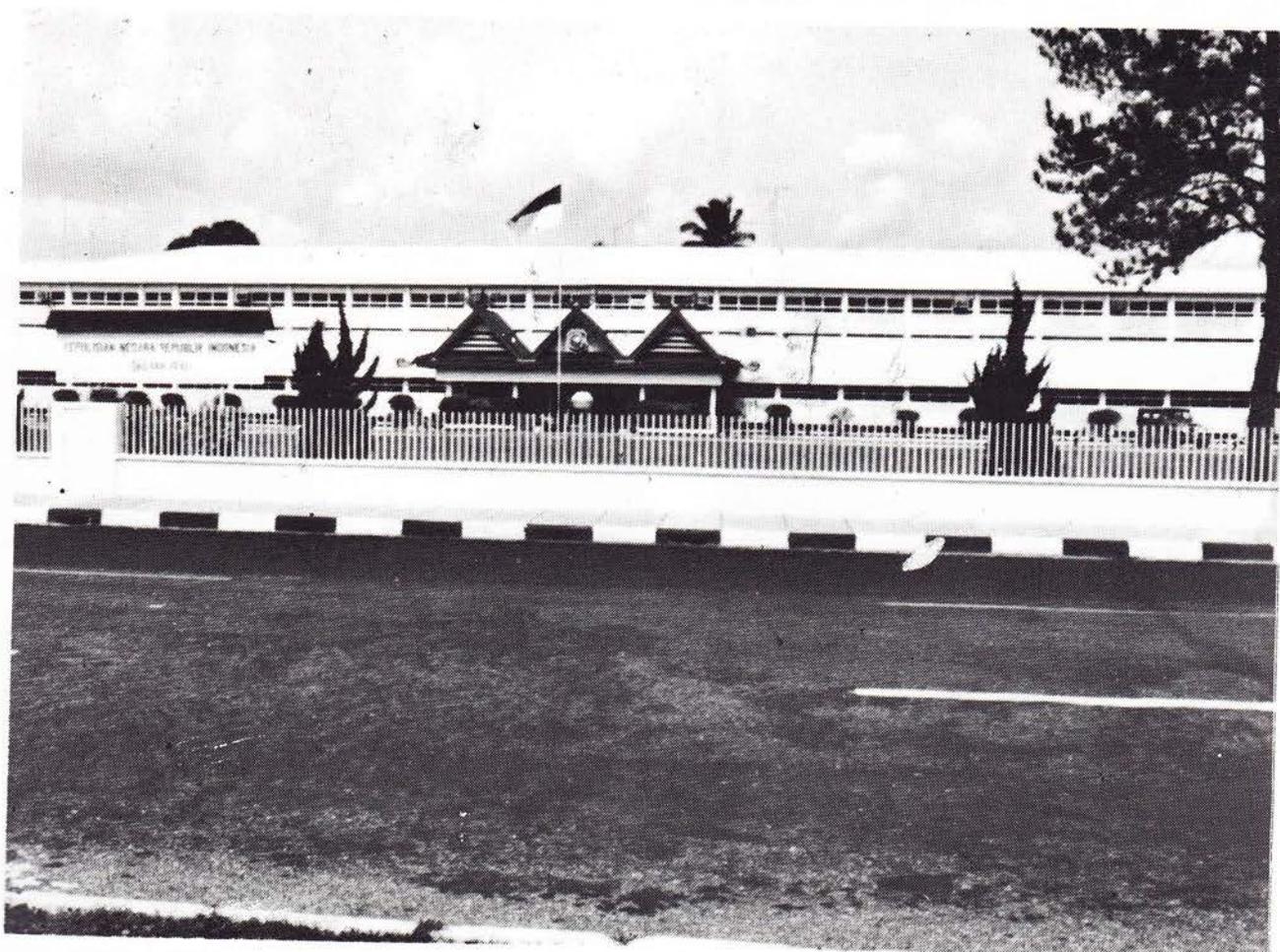
## Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) RIAU

Polda Riau yang bermarkas di Jl. Jen. Sudirman 235 Pekanbaru mempunyai daerah meliputi wilayah Propinsi Riau, sebagian besar daerahnya berada di lautan dengan ribuan pulau yang terbentang hingga Laut Cina Selatan.

Wilayah Propinsi Riau terletak pada posisi  $10^{\circ} 9' \text{ LS } 20^{\circ} 25' \text{ LU}$  dan  $100^{\circ} - 105^{\circ} \text{ BT}$ , dengan luas wilayah : 329.867 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas daratan : 94.561 Km<sup>2</sup> dan luas perairan: 235.306 Km<sup>2</sup> serta luas ZEE : 379.00 Km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk tercatat 3.281.046 jiwa serta jumlah pulau sebanyak 3.214 buah.

Sebelah Utara Propinsi Riau berbatasan dengan negara: Singapura, Malaysia, Thailand, Camboja dan Vietnam yang dibatasi oleh Selat Singapura, Selat Sumatra dan laut Cina Selatan. Sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Jambi, Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Barat dan Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Wilayah Propinsi Riau memiliki kekayaan alam yang potensial antara lain: Minyak bumi, Gas alam, Timah, Batubara, Bauxiet, Batu Granit dan potensi kehutanan dengan areal



*Gedung Markas Polda Riau sebagai pusat tumpuan dan dambaan serta harapan masyarakat Riau akan Kamtibmas yang mantap.*

seluas 7.561.268 Ha yang terdiri dari hutan lindung, hutan suaka alam/wisata, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan konversi.

#### PERSONALIA

Jumlah personil Polda Riau sebanyak 3.805 orang dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pamen : 84 orang
- b. Pama : 253 orang
- c. Bintara : 2401 orang
- d. Tamtama : 1067 orang

Polda Riau membawahi 6 Polres, 1 Polresta, 1 Kompi Sat Brimob, 1 Sat Polair, 64 Polsek, 3 KPPP dan 198 Pos Polisi.

Ke 7 Polres diatas adalah : Polresta Pekanbaru di Pekanbaru, Polres Indragiri Hulu di Rengat, Polres Bengkalis di Dumai, Polres Kep. Riau Timur di Pirang, Polres Kampar di

Bangkinang, Polres Indragiri Hilir di Tembilahan, Polres Kep. Riau Barat di Sekupang.

#### PERMASALAHAN

Pembangunan Nasional yang sedang berkembang di daerah Riau dapat menunjukkan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, disamping dampak positif juga dirasakan adanya dampak negatif berupa kerawanan di bidang Kamtibmas yang apabila tidak segera ditanggulangi akan menimbulkan ancaman faktual yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan dimasa mendatang.

Kerawanan-kerawanan yang diperkirakan akan timbul yaitu :

- a. Masalah tenaga kerja
- b. Masalah lahan pertanian
- c. Masalah lingkungan hidup
- d. Masalah transportasi



*Latma (latihan bersama) Aman Malindo ke X tanggal 24 Juli 1991 secara resmi dibuka oleh Direktur Samapta Polri waktu itu Brigjen Pol. Drs. Moch. HINDARTO dan direktur Internal security and public order PDRM Let Jen Datuk Syeh ATHMAN bin SYEH ALI di dermaga Batu ampar Batam.*

- e. Masalah pariwisata dan
- f. Masalah Perbankan.

## PEMBINAAN KEKUATAN

### Kesiapan Personil

#### a. *Pembinaan sikap mental dan Disiplin*

1) Memelihara dan meningkatkan sikap mental kejuangan yang mampu mewujudkan tingkat kesadaran, dedikasi dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di bidang fungsinya masing-masing yang dilandasi kemampuan dan keterampilan profesional yang dimiliki dengan melaksanakan kegiatan yang bersifat :

- a) Tradisi yakni melaksanakan Napak tilas pada saat peringatan Hari Bhayangkara.
- b) Kejuangan yakni melaksanakan pengucapan Sapta Marga, Tri Brata, Catur Prasetya dan prinsip-prinsip penuntun dalam pelaksanaan tugas.
- c) Keagamaan/rohani.

#### b. *Profesional*

- Melaksanakan penataran secara periodik terhadap setiap jabatan KOD dan Kapolsek.
- Melakukan latihan-latihan dalam rangka operasional maupun peningkatan kemampuan.
- Melaksanakan Test bagi anggota yang akan UKP.

#### c. *Phisik*

- Melaksanakan kegiatan Senam Kesegaran Jasmani seminggu dua kali.
- Test kesamaptan Jasmani sebanyak dua kali dalam setahun.
- Melaksanakan perlombaan/pertandingan olah raga baik secara intern maupun ekstern.

## KESIAPAN MARKAS DAN SARANA/ PRASARANA

Mensosialisasikan kepada seluruh anggota untuk membudayakan kebersihan lingkungan kerja dan lingkungan pemukiman/asrama serta mengupayakan gedung-gedung pertemuan, antara lain :

a. Gedung Pertemuan "Bhayangkara" yang terletak di komplek Brimob Sukajadi Pekanbaru, yang telah menelan biaya sebesar Rp.171.828.150,— yang diperoleh dari swadaya masyarakat.

Pembangunan gedung wisma Bhayangkara yang berukuran 16 x 36 meter dimulai pembangunannya dengan peletakan batu pertama pada tanggal 21 Nopember 1989 oleh Kapolda Riau saat itu, yaitu Kolonel Polisi Drs. Herman S. Sastrowijaya (sekarang Brig Jend) dan diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 Nopember 1990. Selain pembangunan gedung pertemuan juga telah dilaksanakan penambahan ruang kantor, pengadaan Computer dan ruangannya.

b. Pembangunan Pos Polisi Muara Fajar yang terletak di atas tanah sumbangan warga masyarakat desa Muara Fajar seluas 2.000 meter dengan luas bangunan seluas 200 meter dengan menelan biaya swadaya masyarakat sebesar Rp 45 juta.

Gedung tersebut diresmikan pemakaiannya oleh Kapolda Riau Kolonel Polisi Drs. Hartoyo.

Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, telah dibangun Pos Kamling jalan raya dengan memanfaatkan Rumah makan/warung yang ada disepanjang jalan lintas Sumatera, serta pemanfaatan para nelayan dan Kapal motor/perahu sebagai Pos Kamling perairan.



Gedung pertemuan Bhayangkara Polda Riau yang dibangun atas swadaya Masyarakat Riau.

## PENGUNAAN KEKUATAN

Dalam rangka melaksanakan kegiatan operasi rutin Kepolisian, masing-masing fungsi melak-

sanakan kegiatan sebagai berikut :

a. *Dit Intelpampol*

Melaksanakan kegiatan deteksi dini terhadap perkembangan pembangunan fisik dan dampak yang ditimbulkan terutama terhadap pembangunan-pembangunan yang dilakukan secara terpusat seperti :

- 1) Pembangunan di P Batam
- 2) Pembangunan di P Bintan
- 3) Pembangunan di P Natuna
- 4) Daerah/lokasi Transmigrasi dan PIR.

b. *Dit Samapta*

1) Perairan

Melaksanakan patroli perbatasan dengan luar negeri, terutama dengan negara Malaysia dan Singapura guna mencegah terjadinya penyelundupan, Lintas batas dan perampokan terutama di selat philips.

2) Daratan

Mengadakan pengamanan terhadap para pengunjung Vietnam di P Galang serta penjagaan dan pengawalan bahan peledak dari P Momoy ke seluruh Indonesia yang dilaksanakan oleh Sat Brimob Polda Riau.

c. *Dit Lantas*

– Melaksanakan pengamanan jalur lalu lintas antar Propinsi dan jalan raya Trans Sumatera bagian Timur.

– Dalam rangka pelayanan masyarakat terhadap SIM dan STNK dibentuk 8 Samsat pembantu di Polsek-polsek.

– Mengadakan Registrasi terhadap Honda karung (kendaraan roda 2) dengan cara tidak mengeluarkan BPKB, serta mengawasi secara ketat agar kendaraan tersebut tidak keluar dari daerah yang bersangkutan dan tidak di alih namakan.

– Pembentukan Pos Polisi Laka Lantas di jalur lintas Trans Sumatera.

– Mengadakan pemantapan penjagaan registrasi Ranmor roda 4 (empat) yang berada di P Batam yang berasal dari luar negeri agar tidak dapat keluar dari P Batam.

d. *Dit Bimmas*

– Melakukan pembinaan Satpam yang

ada di proyek vital

- Menugaskan Babinkamtibmas
- Membentuk Pos Kamling jalan raya, perairan dan pemukiman
- Pembuatan ruang kantor para Purnawirawan Polri baik di tingkat Polda, Polres maupun Polsek.

e. *Dit Serse*

– Penyelidikan dan penyidikan terhadap uang palsu, terutama terhadap TKI yang ada di negara tetangga (Malaysia dan Singapura) pada saat pulang mudik/kampung menjelang lebaran

– Penanganan/penyidikan kasus limbah

– Penyelidikan/penyidikan kasus penye-robotan tanah yang beralih sebagai kelompok tani

– Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pencurian, pengrusakan di daerah tambang minyak dan hasil perkebunan.

Disamping melaksanakan operasi rutin, Polda Riau juga melaksanakan operasi khusus baik yang bersifat terpusat maupun operasi khusus yang dilaksanakan di jajaran Polda Riau yang dilakukan oleh masing-masing fungsi antara lain :



Salah satu Kapal patroli Polri yang ikut dalam latihan AMAN MALINDO ke X di perairan selat malaka.

a. *Dit Serse*

Dit Serse Polda Riau melakukan operasi khusus kepolisian yang ditujukan untuk mencegah dan sekaligus memberantas segala bentuk kejahatan seperti :



Kapal PDR Malaysia

- 1) Operasi Jala Siak tahun 1988/1989 yang ditujukan untuk pemberantasan penyelundupan.
- 2) Operasi Jala I tahun 1990, yang ditujukan untuk pemberantasan penyelundupan.
- 3) Operasi Jaring tahun 1991 yang ditujukan pada TP4D
- 4) Operasi Balak, guna pemberantasan judi
- 5) Operasi Wana sakti, guna penanggulangan penyelundupan dan penebangan kayu secara liar.

Hasil operasi tersebut adalah sebagai berikut :

- Penyelundupan di bidang import : 26 kasus
- Penyelundupan di bidang ekspor : 2 kasus
- Pelanggaran di bidang perikanan : 9 kasus
- Membawa bahan peledak : 3 kasus
- TKI gelap : 1 kasus
- Perampokan : 1 kasus

#### b. Dit Bimmas

- 1) Operasi Bunga Anggrek, yang ditujukan kepada :
  - Mencegah pengaruh budaya asing melalui mass media
  - Bentuk operasi tersebut adalah : Penyuluhan, penerangan dan penggalangan.
- 2) Operasi Tunas muda, yang ditujukan kepada :
  - Mencegah dan mengurangi pengaruh

oleh golongan tertentu kepada pemuda/pelajar dan mahasiswa untuk kepentingan politiknya.

- Mencegah dan menanggulangi kejahatan/kenakalan atau tindakan A sosial lainnya.
  - Cara bertindak adalah : Ceramah, penyuluhan, penerangan dan menanamkan kesadaran bernegara.
- 3) Operasi Waspada yang ditujukan kepada :
    - Peningkatan kualitas dan kuantitas pos kamling
    - Menimbulkan kesadaran untuk meningkatkan daya cegah dan tangkal terhadap gangguan Kamtibmas secara swakarsa dengan membentuk Pos-kamling daratan/perairan.
  - 4) Operasi Senyum yang ditujukan kepada para pengendara sepeda motor untuk menumbuhkan kesadaran dalam penggunaan Helm.

#### c. Dit Samapta

- 1) Mengadakan operasi guna mendukung operasi Curat
  - Menyusun UKL dalam bentuk PJR sebagai Pos mobil jalan raya
- 2) Operasi guna mendukung operasi Patuh yaitu :
  - Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan patroli, pengawasan, pemeriksaan, Razia bagi pemakai jalan
  - Komunikasi dengan unit operasi Patuh untuk mengarahkan sasaran-sasaran.
- 3) Mengadakan latihan bersama antara Indonesia dengan Malaysia dalam "Aman Malindo ke 10" pada tahun 1991 di P Batam dengan sasaran latihan melaksanakan patroli kapal secara terkoordinir, kemampuan dalam berkomunikasi antar petugas dan pemberian informasi secara cepat tentang adanya suatu bentuk kejahatan.

#### d. Dit Lantas

Operasi khusus yang dilaksanakan Dit Lantas adalah Operasi Patuh II 1989 dan

Operasi Patuh Lilin 1990 dengan sasaran operasi sebagai berikut :

- 1) Pelaku pelanggaran lalu lintas
- 2) Benda atau barang yang berhubungan dengan kasus pelanggaran lalu lintas
- 3) Situasi yaitu tempat yang menjadi penyebab gangguan Kamtibmas.

*e. Dit Intelpampol*

Operasi khusus Dit Intelpampol adalah memback up segala bentuk operasi dari tiap fungsi dengan cara menginventarisir data awal, menganalisa dan evaluasi terhadap gangguan Kamtibmas yang menonjol dan terorganisir serta mendeteksi secara aktif pengungkapan jaringan kejahatan yang terorganisir dan berkadar tinggi.

#### **KOORDINASI LINTAS SEKTORAL**

Dalam rangka Criminal Justice System (CJS) di wilayah kepulauan Riau, dibentuk kepala cabang kejaksaan negeri pada tiap Kecamatan guna memudahkan pelaksanaan

proses penyidikan tindak pidana, sedangkan untuk daerah Riau daratan berlaku sebagai mana layaknya.

Dalam rangka penanggulangan serta penanganan terhadap kasus pencurian kayu, maka dibentuk TKPH dimana Dan Rem/TNI AD bertindak sebagai kepala sedangkan Polri dalam hal ini Kadit Samapta sebagai wakil, sedangkan anggotanya terdiri dari personil Polres, Kodim dan Kehutanan.

Untuk meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara Polri dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) pada tanggal 24 Juli 1991 sampai dengan tanggal 27 Juli 1991 telah dilaksanakan latihan bersama "AMAN MALINDO ke X di P Batam yang dihadiri oleh Kapolda Aceh dan Kapolda Sumatera Utara. Direktur latihan Aman Malindo ke X ini adalah Kolonel Polisi Drs. Harimas A.S. (Waka Polda Riau) menyebutkan bahwa latihan ini diarahkan untuk lebih meningkatkan upaya perencanaan, pengendalian dan koordinasi serta komunikasi antar unsur-unsur operasional Polri dan PDRM di Sepanjang daerah perbatasan terutama di perairan Selat Malaka. •

## Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) SUMATERA BAGIAN SELATAN

Kepolisian Daerah Sumatera Bagian Selatan, disingkat Sumbagsel mempunyai daerah yang luas meliputi 4 Propinsi, yaitu Propinsi Jambi, Propinsi Sumatera Selatan, Propinsi Lampung, dan Propinsi Bengkulu. Luas ke empat Propinsi tersebut mencapai 218.852 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 1988 sebanyak 14.051.546 jiwa, yaitu 64 orang/Km<sup>2</sup>.

Polda Sumbagsel yang bermarkas di Jl. Jenderal Sudirman, Palembang itu memiliki kekuatan 10.119 orang anggota. Bila dibanding-

kan dengan jumlah penduduk maka 1 orang anggota Polri harus melayani 1.388 orang penduduk.

Melihat kenyataan, tingkat kepadatan penduduk yang masih jarang dan jumlah Polisi belum seimbang dengan jumlah penduduk yang tersebar dalam kawasan begitu luas, dapat dirasakan betapa beratnya tugas yang dihadapi Polda Sumbagsel untuk dapat tegaknya hukum dan terciptanya situasi Kamtibmas yang mantap dan dinamis.



*Mapolda Sumbagsel*



*Apel Polisi Cilik di Sumbagsel*

## ORGANISASI

Polda Sumbagsel mempunyai 3 Polwil, 19 Polres, 3 Polresta, 1 Poltabes dan 216 Polsek, termasuk 23 Sekta.

Ke 3 Polwil tersebut adalah : Polwil Lampung terletak di Jl. Bhayangkara, Bandar Lampung; Polwil Bengkulu terletak di Jl. Jenderal A. Yani, Bengkulu, dan Polwil Jambi terletak di Jl. Bhayangkara, Jambi.

Adapun Polres yang ada ialah : Polres Muba di Sekayu; Polres Oki di Kayu Agung; Polres Liot di Muara Enim; Polres Lahat di Lahat; Polres Oku di Baturaja; Polres Mura di Lubuk Linggau, Polres Bangka di Pangkal Pinang; Polres Belitung di Tanjung Pandan; Polresta Bandar Lampung di Jl. Pelopor, Bandar Lampung; Polres Lampung Selatan di Jl. Asrama Polri, Bandar Lampung; Polres Lampung Tengah di Metro; Polres Lampung Utara di Kotabumi;

Polresta Bengkulu di Bengkulu; Polres Bengkulu Utara; Polres Bengkulu Selatan di Manna; Polres Rejang Lebong di Curup; Polresta Jambi, Polres Batanghari di Batanghari, Polres Bungo Tebo di Muara Bungo, Polres Kerinci di Sungai Penuh, Polres Tanjung Jabung di Kuala Tungkal, Polres Sarko di Bangko, dan Poltabes Palembang di Jl. Letkol Iskandar, Palembang.

Sedangkan Polsek yang 216 tersebut diatas dari : 11 buah Polsektif B, 13 buah Polsektif C, 186 buah Polsektif Standard C, dan 6 buah Polsek/KPPP.

## SITUASI KAMTIBMAS

Kerawanan Kamtibmas di daerah hukum Polda Sumbagsel cukup tinggi. Hal ini disebabkan berbagai faktor, antara lain :

— Wilayah Polda Sumbagsel dilalui jalan Trans Sumatera yang ramai dilalui Bis umum

maupun Truk barang yang lalu lalang antar Jawa – Sumatera.

Melalui antar lintas Sumatera – Jawa ini berbagai tindak kejahatan sering terjadi, misalnya pencegahan dan perampokan muatan Truk di daerah hutan yang sepi, pemanfaatan lintas ini untuk membawa barang asal selundupan dari Sumatera ke Jawa, penyelundupan Ganja dari Aceh ke Jawa.

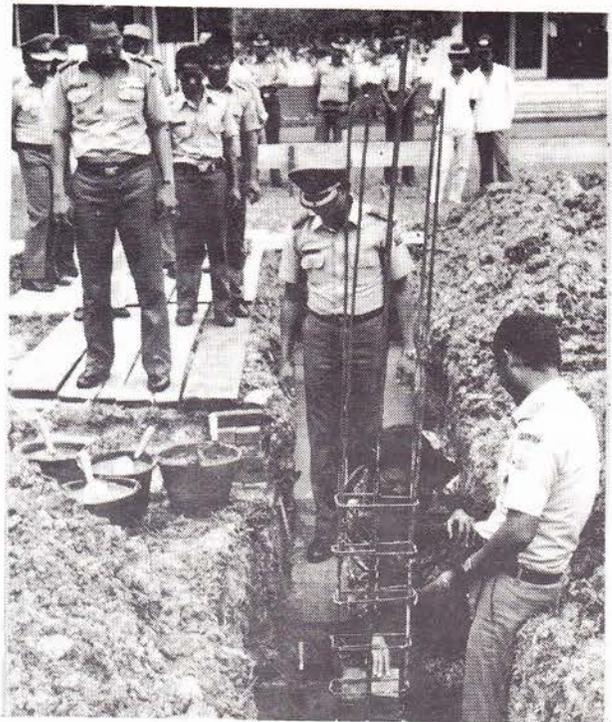


*Kegiatan Kelompok Sadar Kamtibmas di halaman Polres Rejang Lebong Sumbagsel.*

– Wilayah Polda Sumbagsel sebagian besar dikelilingi lautan dan terdapat sungai-sungai yang besar. Dibagian Utara berseberangan dengan negara tetangga Singapura. Keadaan yang demikian rawan terhadap penyelundupan. Jika barang selundupan berhasil didaratkan, selanjutnya dibawa ke Jawa melalui jalan darat.

– Merupakan adat kebiasaan sebagian penduduk Sumbagsel menyelipkan pisau di pinggang jika pergi kemana-mana, dan ini sulit untuk berantas oleh yang berwajib, karena sudah merupakan adat dan kebiasaan sejak dulu kala. Ditambah lagi adanya sebagian masyarakat yang mempunyai temperamen tinggi. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat tersebut sering dimanfaatkan penjahat untuk berbuat tindak kejahatan.

– Disamping itu diperkirakan masih adanya senjata api peninggalan perang kemerdekaan atas bekas pemberontakan dan GPK waktu lalu yang berada ditangan para penjahat setempat, sehingga sering terjadi perampokan-perampokan yang diikuti dengan pembunuhan terhadap korbannya.



*Pembangunan Gedung Catur Sakti di Mapolda Sumbagsel.*

Namun demikian Polda Sumbagsel telah berusaha sekuat tenaga untuk meredam dan menanggulangi berbagai macam tindak kejahatan yang terjadi, baik melalui preventif maupun represif. Sehingga situasi Kamtibmas di Sumbagsel umumnya stabil dan terkendali, dan mampu menunjang kelancaran pembangunan di daerah ini.



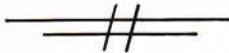
*Kejuaraan Kesamaptaan Tgl. 2 Juni 1991*

## PEMBINAAN SUMBER DAYA

Guna menanggulangi semua tantangan yang

semakin lama semakin berat, Polda Sumbagsel melakukan berbagai upaya, antara lain :

- Membangun kekuatan Polri jajaran Polda Sumbagsel dengan titik berat pada pemantapan fungsi operasional.
- Melaksanakan pembangunan kekuatan personil untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- Upaya peningkatan keterampilan dan kemampuan teknis operasional Kepolisian di bidang Reserse melalui kegiatan penataran dan latihan.
- Mengembangkan sistim dan methoda guna mencapai efektifitas prosedur dan mekanisme kerja dibidang operasional dan pembinaan.
- Meningkatkan profesionalisme yang mampu mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu menanggulangi berbagai bentuk ancaman.
- Mengupayakan keikutsertaan masyarakat secara swakarsa dan swadaya dalam menanggulangi gangguan Kamtibmas.
- Menggunakan secara optimal sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan Polri.



## Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) METROPOLITAN JAKARTA RAYA

Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, disingkat Polda Metro Jaya yang bermarkas di Jl. Jenderal Sudirman no.55, mempunyai daerah hukum meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, ditambah dengan sebagian daerah Propinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang dan Kotamadya Depok, Ketiga daerah tersebut merupakan daerah satelit dan erat kaitannya dengan DKI Jaya. Sebagian besar pegawai pemerintah ataupun karyawan swasta yang bekerja di DKI Jaya mempunyai tempat tinggal di ketiga daerah itu.

Di daerah hukum Polda Metro Jaya terdapat 8 Daerah Tingkat Dua, masing-masing 5 di DKI Jaya, yaitu Daerah Tk.II Jakarta

Barat, Daerah Tk.II Jakarta Utara, Daerah Tk.II Jakarta Timur, Daerah Tk.II Jakarta Selatan, dan Daerah Tk.II Jakarta Pusat, semua Kepala Pemerintahan adalah Walikota. Tiga Daerah Tk.II lagi terdapat di Propinsi Jabar sebagaimana telah disebutkan diatas.

Dibandingkan dengan Polda-Polda lain maka luas daerah hukum Polda Metro Jaya tidak begitu luas. Luas wilayah DKI Jaya saja hanya 656 Km<sup>2</sup>, ditambah dengan luas Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi dan Kodya Depok yang luasnya sekitar 4 atau 5 kali luas DKI Jaya.

Jumlah penduduk di Jaerah hukum Polda Metro Jaya pada akhir tahun 1988 berjumlah 7.830.526 juta jiwa. Cukup padat penduduknya,



*Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan Sekitarnya.  
Kapowil*



Kapolda Metro Jaya dan Direktur Utama PT. Sumarecon Agung menanda tangani Berita Acara serah terima bangunan Kantor Polsek Metro Kelapa Gading Jakarta Utara. Bangunan seluas 600 m<sup>2</sup> berlantai dua ini, merupakan Kantor Polsek termegah dari seluruh Indonesia.

wilayah yang tidak begitu luas didiami oleh manusia yang begitu banyak.

Kekuatan Polda Metro Jaya saat ini sebanyak 16.800 personil. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam wilayah hukumnya, maka seorang anggota Polda Metro Jaya harus melayani 466 orang penduduk.

## ORGANISASI

Polda Metro Jaya mempunyai 9 buah Polres dan 84 buah Polsek beserta ratusan Pos Polisi untuk dapat mengayom dan melayani masyarakat. Ke 9 Polres tersebut adalah : Polres Metro Jakarta Pusat terletak di Jl. Kramat Raya 61, Jakarta Pusat; Polres Metro Jakarta Utara terletak di Jl. Yos Sudarso, Jakarta Utara; Polres Metro Jakarta Barat terletak di Jl. Letjen S. Parman, Jakarta Barat; Polres Metro Jakarta Selatan terletak di Jl. Wijaya 11, Kebayoran Baru Jakarta Selatan; Polres Metro Jakarta Timur terletak di Jl. Matraman Raya 224, Jakarta Timur; Polres Metro Khusus Tanjung Priok terletak di Jl. Raya Pelabuhan, Jakarta Utara; Polres Metro Tangerang terletak di Jl. Daan Mogot, Tangerang; Polres Metro Bekasi terletak di Jl. Pahlawan, Bekasi; Polres Metro Depok terletak di Jl. Margonda

Raya, Depok.

Sedangkan Polsek yang 84 buah tersebut terdiri dari: 38 buah Polsekaktif B, 8 buah Polsektif B, 1 buah Polsektif C, 8 buah Polsek Standard B, dan 29 buah Polsek Standard C. Dari seluruh Polda hanya Polda Metro Jaya yang mempunyai Polsektif tipe B.

## SITUASI KAMTIBMAS

Situasi Kamtibmas di daerah hukum Polda Metro Jaya umumnya mantap dan terkendali berkat kerja keras tanpa lelah dari anggotanya.

Tugas yang diemban Polda Metro Jaya untuk mencapai tegaknya hukum dan terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Ibukota dan sekitarnya amatlah berat, mengingat tingkat kerawanan kamtibmas di daerah hukum Polda Metro Jaya paling tinggi dari Polda-Polda se Indonesia.

Disamping itu di wilayah Ibukota terdapat Pusat Pemerintahan RI, terdapat kantor-kantor penting Pemerintah Pusat, Kantor-kantor Kedutaan negara asing, instalasi-instalasi penting Pemerintah, kantor-kantor pusat perusahaan swasta, pabrik-pabrik besar yang menempati beberapa kawasan industri. Pokoknya Jakarta adalah pusat dari segala-galanya, termasuk juga pusat dari berbagai tindak kejahatan, pelanggaran dan gangguan Kamtibmas yang dapat berpengaruh terhadap keamanan dan stabilitas nasional.



Terlihat seorang Polwan, dengan tegap berdiri diatas mobil Toyota Kijang memegang corong mic, memberi aba-aba tentang peraturan lalu lintas. (Foto: Tobing)



*Kapolda Metro Jaya memberikan piagam penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta membantu tugas Polri. Tampak Endah Wasiatun saat menerima piagam dan Tabanas dari Kapolda Metro Jaya.*

Di wilayah Ibukota berkumpul hampir seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia dengan berbagai maksud dan tujuan, disertai beragam sifat dan watak yang dimiliki setiap suku bangsa tersebut. Disamping itu diramaikan pula oleh berbagai bangsa asing yang datang dengan tujuan yang bermacam-macam pula.

Melihat keadaan yang serba kompleks itu memungkinkan terjadi benturan-benturan kepentingan yang seribu satu macam itu. Sehingga memberi peluang terjadinya pelanggaran, berbagai macam gangguan Kamtibmas, dan berbagai macam tindak kejahatan, baik yang bersifat konvensional, maupun kejahatan berdimensi baru yang memanfaatkan ilmu dan teknologi canggih.

Polda Metro Jaya telah memperlihatkan kemampuannya menanggulangi berbagai macam ancaman kamtibmas yang telah terjadi dan membongkar berbagai kasus yang sulit.

Kemampuan Polda Metro Jaya dalam menanggulangi berbagai ancaman Kamtibmas adalah merupakan indikator kemampuan Polri secara keseluruhan.

#### PEMBINAAN SUMBER DAYA

Menyadari tantangan yang dihadapi Polri semakin lama semakin berat, maka untuk dapat mengantisipasi semuanya itu Polda Metro Jaya melakukan berbagai upaya, antara lain :

- Membangun kekuatan Polri jajaran Polda Metro Jaya dengan titik berat pada pemantapan fungsi operasional.
- Mengembangkan sistim dan methoda guna pencapaian efektifitas prosedur dan mekanisme kerja dibidang operasional dan pembinaan.
- Meningkatkan profesionalisme yang mampu mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu menanggulangi berbagai bentuk ancaman Kamtibmas.
- Mengupayakan keikutsertaan masyarakat secara swakarsa dan swadaya dalam menanggulangi setiap gangguan Kamtibmas.
- Upaya penggunaan secara optimal sarana dan prasarana yang ada dengan mempedomani kebijaksanaan pimpinan ABRI/Polri.
- Upaya peningkatan keterampilan dan kemampuan teknis operasional Kepolisian dibidang profesionalisme reserse melalui kegiatan penataran dan latihan.

## Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) JAWA BARAT

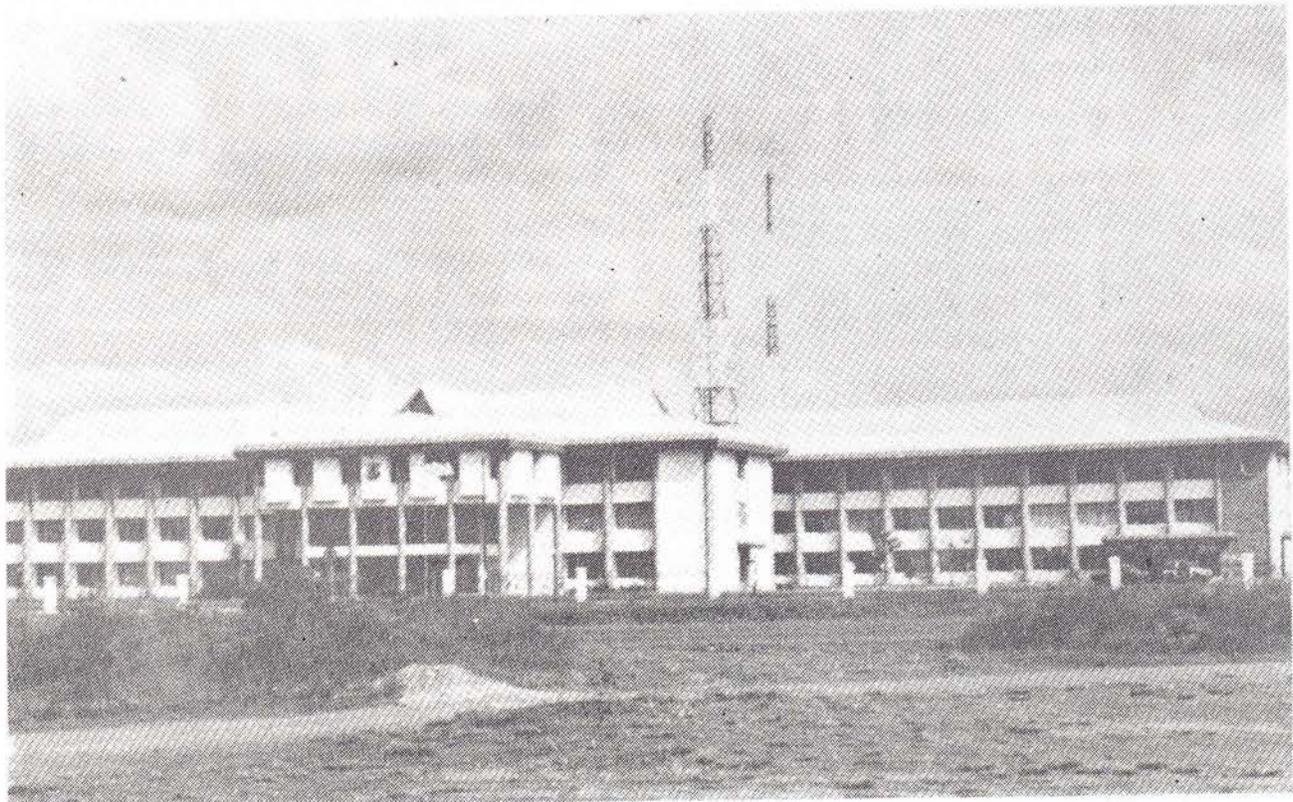
Kepolisian Daerah Jawa Barat, disingkat Polda Jabar mempunyai daerah hukum meliputi Propinsi Jawa Barat minus Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang dan Kotamadya Depok. Kedua Kabupaten dan sebuah Kotamadya tersebut masuk daerah hukum Polda Metro Jaya.

Propinsi Jabar saat ini mempunyai penduduk sekitar 35 juta jiwa dengan luas wilayah 44.176 Km<sup>2</sup>. Ini berarti setiap 1 Km<sup>2</sup> wilayah dihuni oleh 792 orang penduduk. Jabar termasuk daerah yang padat penduduknya disamping Jateng dan Jatim.

Polda Jabar mempunyai kekuatan sebanyak 16.293 anggota. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk maka setiap anggota Polri di Jabar melayani 2.148 penduduk. Dapat dibayangkan betapa sibuknya anggota Polri Jabar dalam melayani masyarakat dan mengusahakan terjaminnya Kamtibmas.

### ORGANISASI

Polda Jabar mempunyai 6 buah Polwil, 24 buah Polres, dan 335 buah Polsek, termasuk 25 buah Sekta.



*Markas Polda Jabar*

Ke 6 Polwil yang ada masing-masing: Polwil-tabes Bandung di Jl. Merdeka Barat, Bandung; Polwil Priangan di Jl. Cicendo 59, Bandung; Polwil Banten di Jl. Kimas Ajeng, Serang; Polwil Bogor di Jl. Kapten Muslihat, Bogor; Polwil Purwakarta di Jl. R.E. Martadinata, Purwakarta; dan Polwil Cirebon di Jl. Karanggetas 23, Cirebon.

Adapun Polres-Polres adalah: Polresta Kodya Bogor, Polresta Cirebon, Polres Serang, Polres Pandeglang, Polres Lebak di Rangkas Bitung, Polres Cilegon, Polres Kab. Bogor di Kedung Halang, Polres Sukabumi, Polres Cianjur, Polres Purwakarta, Polres Karawang, Polres Subang, Polres Sumedang, Polres Garut, Polres Tasikmalaya, Polres Ciarnis, Polres Cirebon, Polres Indramayu, Polres Majalengka, Polres Kuningan, Polresta Bogor, Polres Bandung Timur, Polres Bandung Tengah, dan Polresta Bandung Barat.

Polsek yang 355 buah terdiri dari: 23 buah Polsektif B, 30 buah Polsektif C, 5 buah Polsek Standard B, 294 buah Polsek Standard C, dan 3 buah KPPP.



Mako Polsek Ciawigebang Kuningan hasil swadaya murni dan bantuan masyarakat, luas bangunan + 140 m<sup>2</sup>

### SITUASI KAMTIBMAS

Situasi Kamtibmas di Polda Jabar cukup mantap dan terkendali sehingga mampu menunjang gerak laju pembangunan di daerah ini.

Sebagaimana Polda-Polda di Jawa yang padat penduduknya, di Polda Jabar juga terjadi

tindakan kriminal dan gangguan Kamtibmas yang potensial, mulai dari kejahatan konvensional sampai dengan kejahatan dimensi baru yang berkualitas tinggi dan canggih melalui berbagai modus operandi dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih.

Untuk menanggulangi kejahatan yang semakin canggih, Polda Jabar terus memacu diri mencapai tingkat profesional yang tangguh. Upaya-upaya yang dilakukan Polda Jabar untuk meningkatkan kualitas anggotanya tampak berhasil baik, terbukti dengan kemampuan personil Polda Jabar menanggulangi dan mengungkap berbagai macam tindak kejahatan yang terjadi.



Kapolwil Bogor Kol. Pol. Drs. Pamudji Sutopo bersama Kapolresta Bogor Let Kol Pol. Drs. Didi Widayadi saat menggelar berbagai jenis senjata hasil sitaan dari para pelaku kejahatan kehadapan Kapolda Jabar.

Propinsi Jawa Barat yang menjadi daerah hukum Polda Jabar adalah daerah industri yang tumbuh pesat. Ribuan pabrik besar dan kecil berada dikawasan-kawasan tertentu ataupun masih bertebaran disana sini memerlukan perhatian Polri dalam menjamin keamanannya, karena berbagai gangguan kamtibmas dan tindak kejahatan mempunyai peluang untuk terjadi disini.

Sekitar 3/4 wilayah Jabar berbatasan dengan laut. Sebelah Selatan dengan ZEE di Samudra Indonesia, Selat Sunda di Barat, di Utara berbatasan langsung dengan wilayah Ibu Kota

DKI Jaya dan Laut Jawa, dan di Timur dengan daerah hukum Polda Jateng, yang mempunyai kerawanan cukup tinggi, yaitu nomor dua setelah DKI Jaya (menurut Kapolri Letjen Pol. Drs. Kunarto dalam sambutan tertulisnya waktu serah terima jabatan Kapolda Jateng September 1991).

Keadaan geografi Jabar yang demikian sangat rawan terhadap berbagai tindak kejahatan. Dapat menjadi daerah transit penyelundupan sebelum memasuki ibu kota. Pencurian ikan oleh nelayan asing di zone ekonomi eksklusif (ZEE). Atau tempat pelarian para penjahat setelah mengadakan aksi di Ibu Kota atau di Jawa Tengah. Sebaliknya para penjahat yang melakukan tindak kejahatan di Jabar dalam tempo yang singkat dapat kabur ke Jawa Tengah atau DKI Jaya. Semua ini merupakan tantangan yang harus ditanggulangi Polda Jabar.

#### PEMBINAAN SUMBER DAYA

Untuk mengatasi tantangan yang semakin lama semakin berat, Polda Jabar melakukan berbagai upaya, antara lain :

- Membangun kekuatan Polri jajaran Polda Jabar dengan titik berat pada pemantapan fungsi operasional.
- Upaya peningkatan keterampilan dan kemampuan teknis operasional Kepolisian di-bidang Profesionalisme Reserse melalui kegiatan penataran dan latihan.
- Melaksanakan pembangunan kekuatan personil untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- Mengembangkan sistim dan methoda guna mencapai efektifitas prosedur dan mekanisme kerja dibidang operasional dan pembinaan.
- Meningkatkan profesionalisme yang mampu mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu menanggulangi berbagai bentuk ancaman.
- Upaya menggunakan secara optimal sarana/prasarana yang ada sesuai kebijaksanaan pimpinan Polri.
- Mengupayakan keikutsertaan masyarakat dalam menanggulangi gangguan kamtibmas.



*Para tersangka pelaku perampokan yang dijerat Operasi Fajar Polresta Bogor yang bekerja sama dengan Polres Bogor.*

## Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) JAWA TENGAH

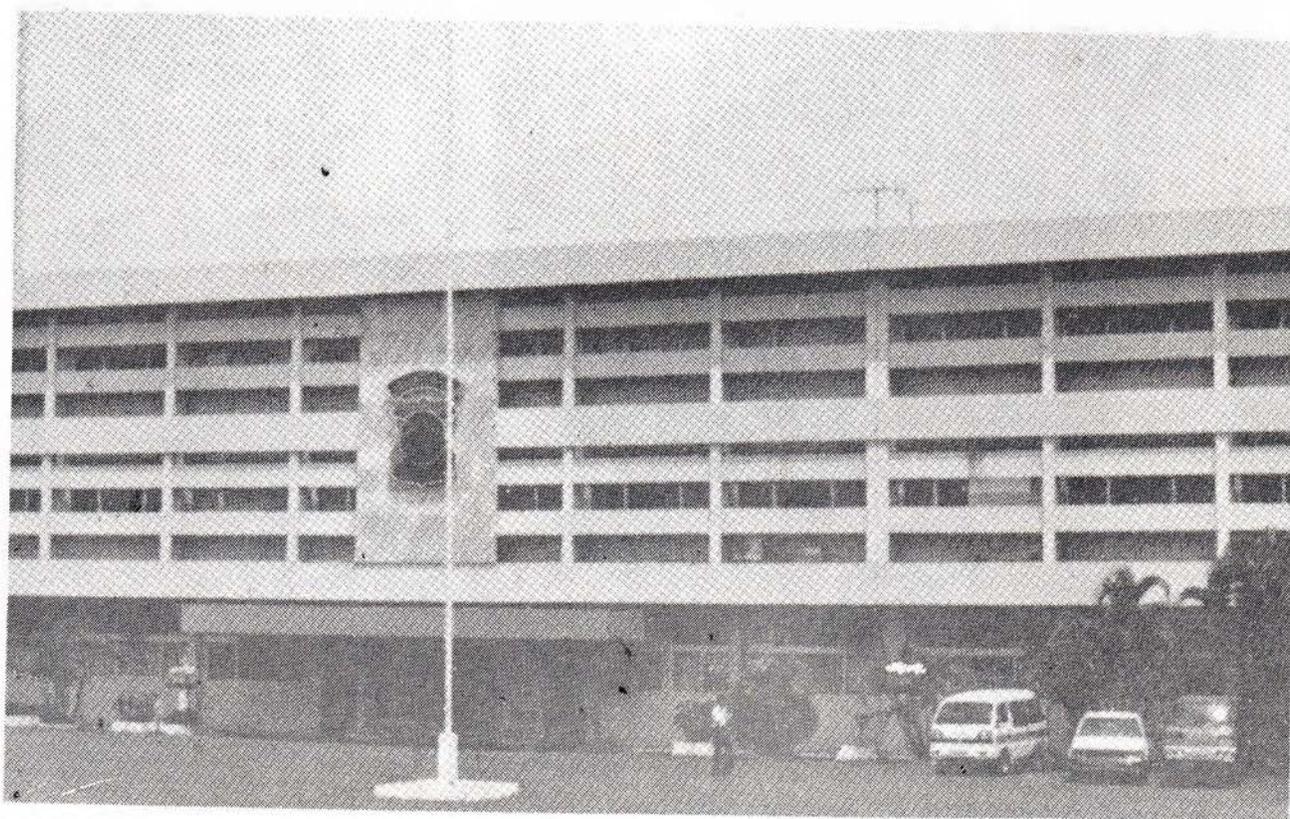
Kepolisian Daerah Jawa Tengah, disingkat Polda Jateng mempunyai daerah hukum meliputi Propinsi Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah mencapai 34.503 Km<sup>2</sup>.

Jumlah penduduk didaerah hukum Polda Jateng pada akhir tahun 1988 sebanyak 34.493.840 jiwa. Dengan demikian kepadatan penduduk Jateng mencapai sekitar 999 orang/Km<sup>2</sup>. Suatu daerah yang cupup padat penduduknya, sebagaimana umumnya Propinsi-Propinsi di Jawa.

Polda Jateng yang bermarkas di Jl. Pahlawan, Semarang mempunyai kekuatan sebanyak 22.087 anggota yang tersebar diseluruh wilayah. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk maka setiap anggota Polri di Jateng harus melayani 1.561 orang penduduk. Dapat dibayangkan betapa sibuk dan beratnya tugas Polri di Jateng dalam rangka penegakan hukum dan menjamin terlaksananya Kamtibmas.

### ORGANISASI

Polda Jateng mempunyai 7 Polwil, dan satu Poltabes Semarang, 38 Polres/Polresta, serta 553 Polsek/Ta



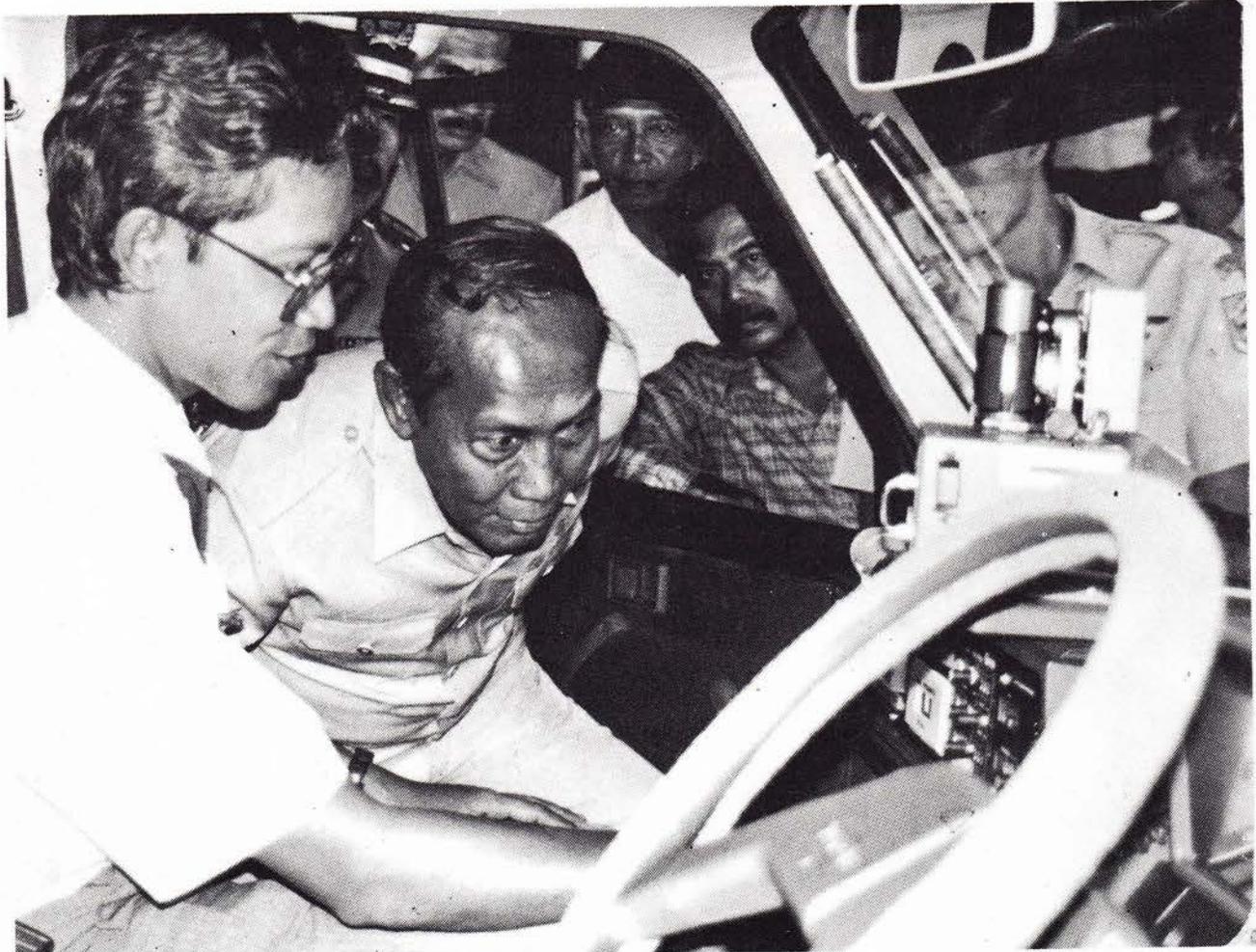
Mapolda Jawa Tengah

Ke 7 Polwil tersebut adalah : Polwil Banyumas di Jl. Gatot Subroto 7, Purwokerto; Polwil Pekalongan di Jl. Diponegoro 8, Pekalongan; Polwil Semarang di Jl. Pemuda 123-125, Semarang; Polwil Pati di Jl. Jenderal Sudirman 73, Pati; Polwil Surakarta di Jl. Slamet 328, Surakarta; Polwil D.I. Yogyakarta di Jl. Malioboro 70, Yogyakarta, Polwil Kedu di Jl. Jenderal A. Yani Magelang.

Polres/Polresta tersebut adalah :

Polresta Tegal di Jl. Pemuda Tegal; Polresta Surakarta di Jl. Hasanuddin 38, Surakarta; Polresta Yogyakarta di Jl. Reksobayan, Yogyakarta; Polres Banyumas di Jl. Bhayangkara, Purwokerto; Polres Cilacap di Jl. Ir. Juanda, Cilacap; Polres Purbalingga di Jl. Jenderal A. Yani, Purbalingga; Polres Banjarnegara di

Jl. Pemuda 39, Banjarnegara; Polres Pekalongan di Jl. Diponegoro 19, Pekalongan; Polres Batang di Jl. Jenderal Sudirman, Batang; Polres Pemalang di Jl. Jenderal A. Yani Selatan, Pemalang; Polres Slawi di Jl. Bhayangkara, Slawi; Polres Brebes di Jl. Diponegoro; Brebes; Polres Salatiga di Jl. Adisucipto, Salatiga; Polres Kendal di Jl. Raya 153, Kendal; Polres Demak di Jl. Kyai Singkil 33, Demak; Polres Grobogan di Jl. Bhayangkara 9, Purwodadi; Polres Pati di Jl. Jenderal Sudirman 212, Pati; Polres Kudus di Jl. Jenderal Sudirman, Kudus; Polres Jepara di Jl. KS Tubun, Jepara; Polres Rembang di Jl. Diponegoro 69, Rembang; Polres Blora di Jl. Pemuda 22, Blora; Polres Sukoharjo di Jl. Suprpto, Sukoharjo; Polres Klaten di Jl. Pramuka 25, Klaten; Polres Boyolali di Jl. Sunggingan I, Boyolali; Polres Sragen di Jl. Bhayangkara I, Sragen; Polres Karang Anyar di Jl.



Gubernur Jateng H.M. Ismail sedang memeriksa Mobil Kadarparan.  
Gubernur memberi bantuan satu unit mobil Kadarparan (Kamera Radar Pengukur Kecepatan Kendaraan) kepada Polda Jateng.

Sawu 3, Karang Anyar; Polres Wonogiri di Jl. Kartini, Wonogiri; Polres Bantul di Jl. Raya Bantul, Bantul; Polres Kulonprogo di Jl. Bhayangkara, Wates; Polres Gunung Kidul di Jl. Bhayangkara, Wonosari; Polres Sleman di Jl. Sleman, Sleman; Polres Magelang di Jl. Jenderal Gatot Subroto, Magelang; Polresta Magelang di Jl. Alun-Alun Selatan 7, Magelang; Polres Purworejo di Jl. Jenderal Gatot Subroto, Purworejo; Polres Kebumen di Jl. Pahlawan 40, Kebumen; Polres Temanggung di Jl. Jenderal Sudirman, Temanggung; Polres Wonosobo di Jl. Bhayangkara 20, Wonosobo.

Sedangkan Polsek yang 553 buah tersebut terdiri dari: 23 buah Polsektif B, 36 buah Polsektif C, 491 buah Polsek Standard C, dan 3 buah KPPP.

### SITUASI KAMTIBMAS

Selama 2 tahun terakhir ini Jawa Tengah dan DI Yogyakarta mengandung kerawanan-kerawanan di bidang Kamtibmas yang cukup tinggi, bahkan menduduki ranking ke dua se Indonesia setelah Jakarta. Hal ini dikatakan Kapolri dalam sambutan tertulisnya pada upacara serah terima jabatan Kapolda Jateng September 1991. Penilaian Kapolri Letjen Pol. Drs. Kunarto diatas tentu berdasarkan data-data yang beliau miliki.

Ditinjau dari segi letak, dimana Jateng terletak antara DKI Jaya serta Jabar dengan Jawa Timur. Jateng menjadi lintasan pulang pergi antara Jakarta — Jatim, antara Jabar — Jatim. Letak Jateng ini termasuk strategis bagi penjahat. Penjahat yang datang dari Ibukota, Jabar atau Jatim ke Jateng, setelah berbuat tindak kejahatan di Jateng, dengan sekejap mereka telah kabur keluar Jateng. Atau penjahat dari Jateng sendiri gampang menghilang meninggalkan Jateng. Sebaliknya Jateng juga bisa dijadikan tempat bersembunyi oleh penjahat dari luar Jateng.

Namun demikian berkat kerja keras tanpa lelah dari jajaran Polda Jateng, situasi Kamtibmas didaerah ini berhasil dikendalikan dan cukup stabil.



*Juara satu Lomba Kantor Berseri tingkat Polwil Polda Jateng (dilihat dari Depan).*

### PEMBINAAN KEKUATAN

Untuk dapat menanggulangi berbagai tantangan yang semakin lama semakin berat Polda Jateng melakukan berbagai upaya antara lain :

- Membangun kekuatan Polri jajaran Polda Jateng, baik untuk memantapkan fungsi operasional maupun pembinaan.
- Upaya peningkatan keterampilan dan kemampuan teknis operasional Kepolisian seperti fungsi Reserse, Sabhara, Lalu-Lintas, Brimob, Pol Air dan lain-lain melalui kegiatan penataran dan latihan.
- Melaksanakan pembangunan kekuatan personil untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- Mengembangkan sistim dan methoda guna mencapai efektivitas prosedur dan mekanisme kerja dibidang operasional dan pembinaan.
- Meningkatkan profesionalisme yang mampu mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu menanggulangi berbagai bentuk ancaman.
- Mengupayakan keikutsertaan masyarakat secara swakarsa dan swadaya dalam menanggulangi gangguan Kamtibmas.

### PENGGUNAAN KEKUATAN

Upaya penggunaan kekuatan guna tegaknya hukum dan terciptanya Kamtibmas antara lain melalui :

**a. Operasi Khusus Kepolisian**

- Melaksanakan Operasi Khusus KURMA CANDI dalam rangka pengamanan Lebaran.
- Melaksanakan Operasi Khusus LILIN CANDI dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru.

**b. Operasi Rutin Kepolisian**

- Pengamanan Borobudur 10 K yaitu lomba lari marathan.
- Pengamanan Perayaan Waisak
- Pengamanan Grebek Demak
- Pengamanan Sekatenan
- Pengamanan Festival Borobudur
- Pengamanan Festival Kraton
- Patroli Jarak Jauh yang dilaksanakan oleh Brimob dalam rangka mengantisipasi pencurian kayu jati, pencurian Bantalan/Rel Kereta Api, pencurian Kawat Telepon/Listrik.
- Patroli Jalan Raya yang dilakukan oleh PJR.
- Patroli Keamanan Laut/perairan yang dilakukan oleh Pol Air.
- Penanganan Tipiring yang dilaksanakan oleh Sabhara.

**c. Koordinasi Lintas Sektoral**

Hal-hal yang menyangkut koordinasi Lintas Sektoral dengan Instansi Pemerintah dan Swasta, antara lain :

- Patroli Jarak Jauh penanggulangan pencurian kayu jati, dengan Perum Perhutani; Patroli Jarak Jauh pengamanan Cengkeh 1 tahun sekali, dengan pihak Swasta; Patroli Jarak Jauh jalur PJKA, dengan pihak Perum PJKA.
- Dengan ABRI yaitu mengikut sertakan anggota Brimob dalam rangka AMD.
- Dengan pihak Bank yaitu mengadakan pengamanan dan pengawalan pengiriman uang dari Bank Indonesia/Bank lain rutin sekali sebulan ke daerah, baik dalam maupun luar Jawa.
- Pengamanan dan pengawalan bagi

Instansi Pemerintah/Swasta yang dilakukan oleh fungsi Sabhara/PJR.

**d. Upaya Pembangunan IPK**

Meningkatkan daya tangkal dan daya cegah masyarakat untuk dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan yang meresahkan masyarakat, penegakan hukum serta menciptakan Kamtibmas, antara lain misalnya Samapta mengadakan Lomba Pertolongan kecelakaan di Pantai/Waduk yang diikuti oleh masyarakat/Satpam sekitar Pantai/Waduk. Dengan sasaran agar masyarakat/Satpam sekitar bisa mengamankan Proyek tersebut dan dapat memberikan bantuan/pertolongan bila ada terjadi kecelakaan di Pantai/Waduk.



*Juara satu lomba kantor berseri tingkat polwil polda Jateng (di lihat dari belakang).*

e. Upaya-upaya yang dilakukan Disdokkes Polda Jateng adalah sebagai berikut :

- Dalam bidang penyidikan Disdokkes berperan dalam penanganan TKP. Telah dibentuk team penanganan TKP dari aspek medik. Selain itu telah diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Kapolda Jateng No.Pol.: Juklak/13/VIII/1990 tanggal 28 Agustus 1990 tentang Pemeriksaan TKP dari Aspek Kedokteran Forensik.
- Program Pengendalian Berat Badan tetap dilaksanakan, bahkan lebih ditingkatkan terutama di bidang penyuluhan dan latihan.
- Setiap tahun Disdokkes Polda Jateng me-

## Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) JAWA TIMUR

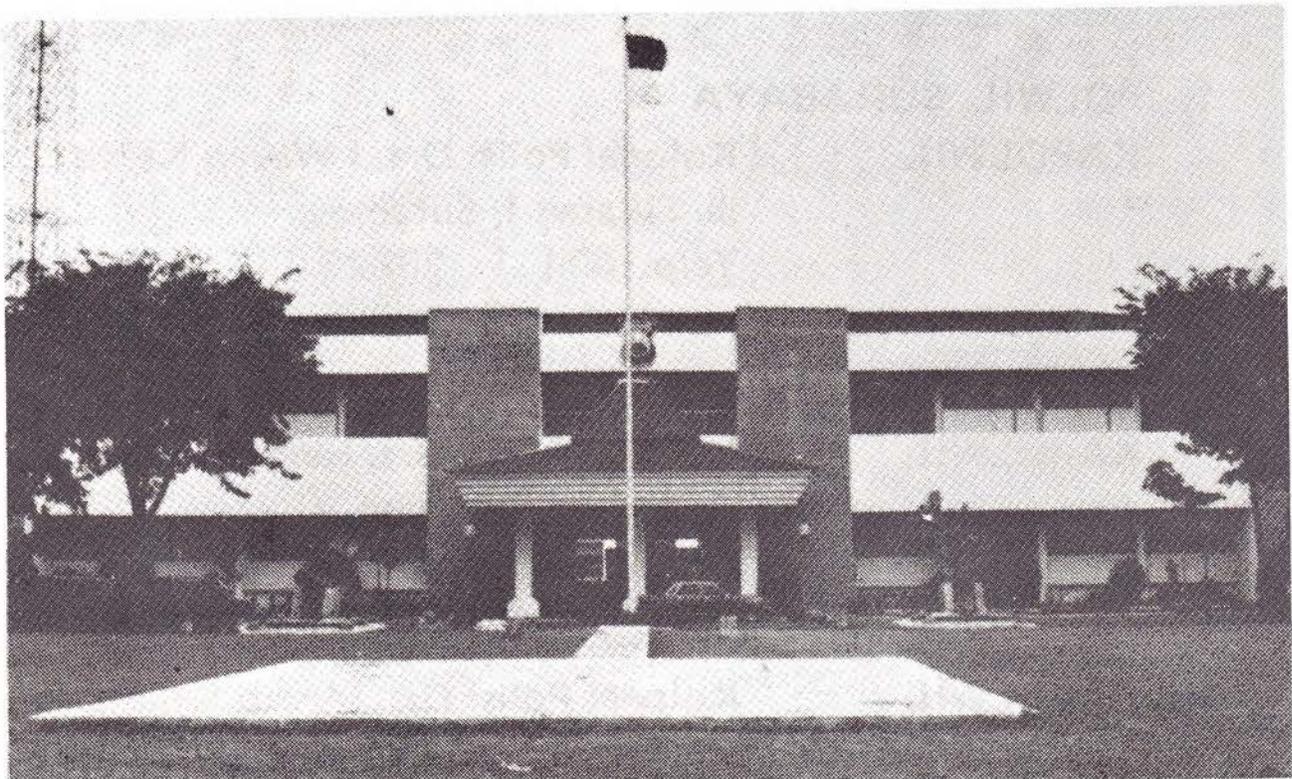
Polda Jawa Timur mempunyai wilayah meliputi Propinsi Jawa Timur dengan luas 47.921 Km<sup>2</sup>. Pada tahun 1990 Propinsi Jawa Timur berpenduduk sebanyak 32.827.638 jiwa. Dengan demikian, stiap 1 Km<sup>2</sup> dihuni oleh 685 orang penduduk. Melihat kenyataan ini penduduk Propinsi Jawa Timur cukup padat, dan mnjadi tantangan bagi Polri Jatim dalam usahanya membina Kamtibmas.

Kekuatan Polda Jatim saat ini sekitar 21.356 orang anggota Polri. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka setiap anggota Polri harus melayani 1.537 orang penduduk, nah cukup berat. Untuk itu diperlukan semangat tinggi dan kemampuan yang profesional bagi setiap anggota Polri, terutama didaerah padat dan rawan kriminalitas seperti di Jatim ini.

### ORGANISASI

Polda Jatim yang bermarkas di Jl. Jenderal A. Yani, Wonocolo, Surabaya mempunyai 8 Polwil, 36 Polres/Ta dan 522 Polsek/Ta yang terdiri dari 36 Polsektif B, 9 Polsektif C, 6 Polsek Standard A, 18 Polsek Standard B dan 453 Polsek Standard C, termasuk 19 Polsekta.

Polwil terdiri dari : Polwiltabes Surabaya di Jl. Sikatan I, Surabaya; Polwil Surabaya di Jl. Ketegan 73, Sidoarjo; Polwil Malang di Jl. Jagung Suprpto, Malang; Polwil Besuki di Jl. Veteran I, Bondowoso; Polwil Kediri di Jl. Kombespol Slamet, Kediri; Polwil Madiun di Jl. Kopol Suroyo 17, Madiun; Polwil Bojonegoro di Jl, Imam Bonjol, Bojonegoro; Polwil Madura di Jl. Jokotole 21, Pamekasan.



*Mapolda Jatim nampak megah berdiri.*

Adapun ke 36 Polres/Ta adalah: Polresta Surabaya Utara, Polresta Surabaya Selatan, Polresta Surabaya Timur, Polresta KPPP Tanjung Perak, Polresta Malang di Malang, Polresta Kediri di Pare, Polres Kediri di Kediri, Polresta Madiun di Madiun, Polres Madiun di Madiun, Polres Malang di Malang, Polres Probolinggo di Probolinggo, Polres Pasuruan, Polres Lumajang, Polres Bondowoso, Polres Situbondo, Polres Jember, Polres Banyuwangi, Polres Blitar, Polres Tulung Agung, Polres Nganjuk di Trenggalek, Polres Ngawi, Polres Magetan, Polres Ponorogo, Polres Pacitan, Polres Bojonegoro, Polres Tuban, Polres Lamongan, Polres Pamekasan, Polres Bangkalan, Polres Sampang, Polres Sumenep, Polres Gresik, Polres Sidoarjo-Polres Mojokerto dan Polres Jombang.

### KRIMINALITAS

a. Gambaran gangguan Kamtibmas dalam bentuk Kriminalitas di Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukan perkembangan (trend) sebagai berikut :

#### 1) *Gelagat perkembangan kriminalitas (Crime Total)*

(a) Dari data kriminalitas tersebut diatas nampak bahwa terjadi penurunan sebesar 4.688 perkara atau sebesar 14.90%.

(b) Hal tersebut diatas menunjukkan atau dapat disimpulkan bahwa tahun 1990 kondisi dan situasi kamtibmas di Jawa Timur nampak semakin mantap dan terken --dali dibanding tahun 1989.

#### 2. *Kemampuan pengungkapan perkara (Clearance Rate)*

(a) Demikian pula perkembangan pengungkapan perkara nampak menunjukkan kenaikan 1,49% (dari tahun 1989 = 61,36% – tahun 1990 = 62,85).

(b) Dengan makin meningkatnya pengungkapan/penyelesaian perkara dari tahun 1989 ke tahun 1990 maka dapat dikatakan bahwa usaha meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok di bidang represip, dalam rangka upaya memberantas kejahatan nampak adanya keberhasilan.

(c) Keberhasilan tersebut dapat dicapai disamping profesional petugas Reserse, juga karena makin mantapnya hubungan kerja sama antara aparat Pemda dan dukungan partisipasi masyarakat dalam menciptakan situasi yang mantap yang diwujudkan dalam kegiatan operasi rutin maupun operasi khusus Kepolisian yang selalu melibatkan unsur-unsur/aparatur keamanan yang lain/masyarakat.

Dengan demikian (memperhatikan data tersebut diatas) maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

(1) Secara umum gangguan kriminalitas di jajaran Polda Jatim nampak menurun yaitu dari tahun 1989 Crime Total sebesar 31.453 perkara dan tahun 1990 menjadi 26.765 perkara atau menurun sebesar 4.688 perkara (menurun 14.90 %).

(2) Demikian pula upaya untuk menekan laju perkembangan/Trand kenaikan angka kriminalitas oleh masing-masing Polwil di daerah nampak adanya keberhasilan yaitu :

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	CRIME TOTAL	CRIME TREND	CRIME CLEAR	CLEARANCE RATE	CRIME RATE PER 100.000 PENDUDUK	CRIME CLOCK
1986	32.787.916	33.323	—	18.857	56,59	102	15' 46'
1987	32.798.137	30.343	— 8,94 %	17.916	59,04	93	17' 19'
1988	32.817.137	34.113	+ 12,42 %	21.047	61,70	104	15' 24'
1989	32.820.388	31.453	— 7,80 %	19.299	61,36	96	16' 42'
1990	32.827.638	26.765	— 14,90 %	16.822	62,85	86	19' 38'

- Polwil Tabes Surabaya menurun 11,83 %
- Polwil Malang " 1,43 %
- Polwil Besuki " 19,78 %
- Polwil Kediri " 8,83 %
- Polwil Madiun " 25,08 %
- Polwil Bojonegoro " 21,63 %
- Polwil Madura " 17,87 %
- Polwil Surabaya " 28,91 %

(3) Dalam upaya pengungkapan dan penyelesaian perkara yang telah terjadi nampak adanya peningkatan dari tahun 1989 ke tahun 1990 sebesar 1,49% (tahun 1989 = 61,36% dan tahun 1990 = 62,85%).

(a) Pada tahun 1990 Polwil yang berhasil dalam pengungkapan perkara antara lain adalah sebagai berikut :

- Polwil Madiun 67,67 %
- Polwil Bojonegoro 77,14 %
- Polwil Madura 68,78 %
- Polwil Surabaya 73,38 %

(b) Sedangkan Polwil yang lain mampu menyelesaikan perkara antara 55% s/d 62%.

(4) Berdasarkan data tersebut diatas, disamping telah ditampilkan beberapa keberhasilan dalam upaya preventif untuk menekan laju perkembangan kriminalitas mau-

pun upaya represif dalam mengungkap dan menyelesaikan perkara, masih perlu disajikan gambaran kerawanan daerah menurut analisa dan evaluasi berdasarkan rumus standart Deviasi sebagai berikut :

Berdasarkan standart Deviasi Crime Rate tahun 1990 dapat diketahui bahwa :

(a) Dalam tahun 1989 :

- Polwil Madiun dan Madura berada pada situasi mantap/terkendali.
- Polwil Bojonegoro dan Kediri berada pada situasi cukup mantap/cukup terkendali.
- Polwil Besuki dan Malang berada pada situasi kurang mantap/kurang terkendali.
- Polwil Tabes Surabaya dan Polwil Surabaya berada pada situasi yang tidak mantap/tidak terkendali.

(b) Dalam tahun 1990 :

- Polwil Surabaya, Madura dan Madiun berada pada situasi mantap/terkendali.
- Polwil Kediri dan Bojonegoro berada pada situasi cukup mantap/cukup terkendali.

NO.	JENIS KEJAHATAN	K E S A T U A N								JUML
		TABES	MLG	BSK	KDR	MDN	BJN	MDR	SRYA	
1.	CURAT	1.215	2.468	1.122	648	273	378	207	757	7066
2.	CUR RANMOR	421	576	152	117	70	30	31	276	1673
3.	CURWATPHON	10	207	62	15	11	25	24	37	391
4.	CUR HEWAN	—	170	249	6	27	25	128	43	648
5.	CURAS	245	128	25	46	8	9	7	25	493
6.	ANIAYA BERAT	294	454	171	72	22	107	117	53	1290
7.	BUNUH	34	59	45	16	7	8	10	11	220
8.	PERKOSAAN	49	31	41	17	5	3	5	18	169
9.	PEMERASAN	45	33	13	18	—	6	4	14	133
10.	PENCULIKAN	2	12	1	4	—	1	4	4	28
JUMLAH		2.315	4.138	1.881	962	423	592	562	1238	12111

CATATAN : MLG = Malang. BSK = Besuki. KDR = Kediri. MDN = Madiun. BJN = Bojonegoro. MDR = Madura  
SRYA = Surabaya

- Polwil Besuki berada pada situasi kurang mantap/kurang terkendali.
- Polwil Tabes Surabaya dan Malang berada pada situasi yang tidak mantap/tidak terkendali.

**b. Kejahatan yang meresahkan masyarakat/ menonjol per Polwil di jajaran Polda Jatim.**

**1. Kejahatan yang meresahkan masyarakat di jajaran Polda Jatim tahun 1990.**

Setelah secara umum digambarkan data kuantitatif kriminalitas di Jawa Timur, apabila lebih diamati lagi terdapat beberapa jenis kejahatan yang dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan yang menonjol (kriminalitas yang membutuhkan perhatian khusus) di Jawa Timur dalam tahun 1990 sebagai berikut :

Kejahatan yang meresahkan masyarakat per Polwil di jajaran Polda Jawa Timur.

Dari data tersebut diatas, maka rangking kerawanan kejahatan yang meresahkan masyarakat yang dinilai cukup meresahkan adalah sebagai berikut :

- (a) Daerah rawan terhadap pencurian dengan pemberatan
  - (1) Rangking I : Polwil Malang
  - (2) Rangking II : Polwil Tabes Surabaya
  - (3) Rangking III : Polwil Besuki
- (b) Daerah rawan terhadap pencurian kendaraan bermotor
  - (1) Rangking I : Polwil Malang
  - (2) Rangking II : Polwil Tabes Surabaya
  - (3) Rangking III : Polwil Surabaya
- (c) Daerah rawan terhadap pencurian kawat telpon
  - (1) Rangking I : Polwil Malang
  - (2) Rangking II : Polwil Besuki
  - (3) Rangking III : Polwil Surabaya
- (d) Daerah rawan terhadap pencurian hewan/ ternak
  - (1) Rangking I : Polwil Besuki
  - (2) Rangking II : Polwil Malang
  - (3) Rangking III : Polwil Madura
- (e) Daerah rawan terhadap pencurian dengan kekerasan
  - (1) Rangking I : Polwil Tabes Surabaya
  - (2) Rangking II : Polwil Malang
  - (3) Rangking III : Polwil Surabaya
- (f) Daerah rawan terhadap penganiayaan berat
  - (1) Rangking I : Polwil Malang
  - (2) Rangking II : Polwil Tabes Surabaya
  - (3) Rangking III : Polwil Besuki
- (g) Daerah rawan terhadap Pembunuhan
  - (1) Rangking I : Polwil Malang
  - (2) Rangking II : Polwil Besuki
  - (3) Rangking III : Polwil Madura
- (h) Daerah rawan terhadap Perkosaan
  - (1) Rangking I : Polwil Tabes Surabaya
  - (2) Rangking II : Polwil Besuki
  - (3) Rangking III : Polwil Malang
- (i) Daerah rawan terhadap Pemasaran
  - (1) Rangking I : Polwil Tabes Surabaya
  - (2) Rangking II : Polwil Malang
  - (3) Rangking III : Polwil Kediri
- (j) Daerah rawan terhadap Penculikan
  - (1) Rangking I : Polwil Malang
  - (2) Rangking II : Polwil Kediri
  - (3) Rangking III : Polwil Surabaya

**SITUASI PERKEMBANGAN KRIMINALITAS YANG AKAN DATANG**

Gelagat perkembangan kriminalitas di daerah Jawa Timur tidak terlepas dari situasi dan kondisi masyarakat yang juga terus berkembang akibat dampak dari Pembangunan Nasional yang sedang dilaksanakan baik yang berdampak positif maupun negatif, adanya situasi dan kondisi masyarakat yang mengalami perubahan dampak laju Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut :

**a. Bidang Politik**

— Perubahan suhu dan kegiatan politik dirasakan meningkat, hal ini disebabkan semakin dekatnya pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1992.

— Perubahan dari hukum kolonial menjadi hukum Nasional dari hukum Pluralistik menjadi

hukum Nasional yang tunggal dan perubahan-perubahan dari hukum Tradisional kearah hukum Modern.

#### b. Bidang Ekonomi

- Perubahan dari tatanan ekonomi domestik dan batas-batas antar negara bergerak menjadi tata ekonomi baru yaitu Perekonomian global.
- Perubahan selera konsumen ke produk-produk yang Customized dan life Cyclenya pendek dalam arti menuntut produk yang sesuai dengan selera dan keinginannya dan di desain khusus buat mereka dengan modal yang bisa bertahan di pasaran relatif tidak lama.
- Tingkat konsumsi semakin tinggi, pemilikan uang dan barang dalam jumlah besar.
- Perubahan dari regulasi dan debirokratisasi menuju deregulasi dan debirokratisasi.
- Penggeseran dari penggunaan uang kartal menjadi penggunaan uang giral dan surat-surat berharga.

#### c. Bidang Sosial Budaya

- Rapuhnya keluarga inti dan mengendornya sosial kontrol serta berkembangnya pergaulan bebas dan sikap toleransi yang berlebihan orang tua/pendidik terhadap kenakalan anak-anak dan remaja.
- Perubahan orientasi nilai-nilai budaya masyarakat agraris tradisional menjadi masyarakat industrialis modern.
- Berkembangnya orientasi kebendaan dan sikap mental menērabas dan menghalalkan segala cara untuk mencapai kesenangan dan kepuasan sesaat.

#### d. Bidang Pertahanan Keamanan

- Perubahan dalam penggelaran kekuatan ABRI dari mengandalkan kuantitas menjadi mengutamakan kekuatan ABRI yang kecil tapi efektif dan bermutu yang ditopang swakarsa masyarakat.
- Berkembangnya kesadaran hukum masyarakat, yang cenderung mengutamakan hak-hak pribadinya dari pada kewajiban-kewajiban sosialnya.

- Tuntutan dan harapan masyarakat untuk memperoleh kualitas pelayanan, perlindungan, pengayoman yang lebih baik dan bermutu dari aparat keamanan dan penegak hukum semakin vokal.

### PELAKSANAAN PROJA POLDA JATIM

#### 1. Bidang Pembinaan

Kemampuan kekuatan Operasional pada hakekatnya didasari oleh Kemampuan operasional yang tinggi, mantap dan mampu menjalin keterpaduan antar fungsi dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan kriminalitas yang terjadi.

Dalam upaya pembinaan kekuatan agar dapat mencapai kemampuan operasional kesatuan yang diharapkan berdaya dan berhasil guna, maka beberapa latihan yang telah dilaksanakan antara lain :

- a. Penataran/latihan fungsi Reserse dalam rangka menyongsong Opdin Reserse pada tahap pematapan, yang diikuti oleh para Kabag/Kasat serse Polwil/Tabes para Kasat Serse Polres/Ta dan para Kapolsek/Ta serta seluruh Kanit Ditserse Polda Jatim.
- b. Latihan komuniti Reserse yang dilaksanakan setiap pagi setelah apel pagi, yang diikuti oleh seluruh personil Ditserse Polda Jatim.
- c. Penataran/latihan peningkatan kemampuan penyidikan Tindak Pidana Ekonomi, yang diikuti oleh para Waka Polres/Kabag/Kasat Polwil/Tabes dan para Kasat Serse Polresta/Polres.
- d. Latihan/lomba oleh TKP yang rutin dilaksanakan setiap perayaan HUT Bhayangkara, yang diikuti oleh perwakilan masing-masing Polwil.
- e. Penataran/latihan unit kecil lengkap yang diikuti oleh Bintara Serse dan dari seluruh jajaran Polda Jatim.
- f. Penataran/latihan interograsi yang diikuti para penyidik pembantu/Bintara seluruh jajaran Polda Jatim.

## 2. Bidang Operasional

Sasaran dan program yang diprioritaskan dibidang operasional, pada upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan, terutama kejahatan yang meresahkan masyarakat dan saling berkaitan, terutama yang termasuk dalam sasaran selektif yang diprioritaskan dengan didukung adanya personil pengembangan fungsi operasional yang terampil, tanggap, tanggon dan trengginas serta berwibawa.

Usaha penanganan kasus yang merupakan sasaran selektif yang diprioritaskan dalam jajaran Polda Jatim dilaksanakan dalam berbagai kegiatan antara lain operasi khusus kepolisian terpusat, operasi mandiri kewilayah-an Polda Jatim dan operasi khusus Kepolisian mandiri kewilayah-an tingkat Polwil, melalui penggelaran berbagai bentuk kegiatan operasi khusus Kepolisian ini diharapkan dapat mewujudkan kemampuan daya tangkal yang mantap dengan hadirnya unsur-unsur kepolisian pada setiap daerah rawan kriminalitas.

## HASIL YANG DICAPAI

### 1. Bidang Pembinaan

a. Penataran/latihan yang ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kondisi fisik, disiplin anggota serta kemampuan Profesionalisme Reserse yang dikatakan dengan hakekat ancaman/gelagat perkembangan kriminalitas telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

b. Upaya peningkatan keterampilan dan kemampuan teknis operasional Kepolisian di-bidang Profesionalisme Reserse melalui kegiatan penataran/latihan tersebut diatas, menghasilkan dampak yang positif antara lain meningkatkan kadar disiplin anggota, menurunnya kasus Praperadilan yang timbul dan semakin berkurangnya tingkat Public Complain serta meningkatnya kemampuan pengungkapan perkara.

### 2. Bidang Operasional

a. Guna memberikan gambaran tentang hasil yang dicapai dalam bidang operasional, maka dibawah ini disajikan data sebagai berikut :

b. Berdasarkan data tersebut diatas terlihat bahwa dari segi crime total selama tahun 1990 dibanding tahun 1989 terdapat penurunan sebesar 4.688 perkara (14,90%), keberhasilan menurunkan sekali menekan laju perkembangan kriminalitas, diimbangi pula dengan kemampuan penyelesaian perkara (Crime Clear) rata-rata diatas 60% berarti masih berada dalam target yang telah ditentukan, hal ini dapat dicapai berkat upaya penggunaan kekuatan operasional dalam periode tahun 1990 telah dilaksanakan secara maksimal.

d. Berdasarkan data tersebut diatas, walaupun nampak bahwa kemampuan penyelesaian perkara (Crime Clearance) Crime Index belum dapat mencapai 60% (target yang ditentukan) tetapi dari segi Crime Total (Crime Index)

Data Crime Total dan Crime Clearance Tahun 1989 dibanding Tahun 1990

NO.	KESATUAN	1989		1990		TREND 1990	
		L	S	L	S	L	S
1.	TABES SURABAYA	7.260	3.747	6.401	3.786	- 11,83 %	+ 10,41 %
2.	MALANG	6.562	3.779	6.468	3.614	- 1,43 %	- 4,37 %
3.	BESUKI	4.474	2.729	3.589	2.205	- 19,78 %	- 19,20 %
4.	KEDIRI	3.002	1.908	2.737	1.714	- 8,83 %	- 10,17 %
5.	MADIUN	1.503	1.006	1.126	762	- 25,08 %	- 25,25 %
6.	BOJONEGORO	2.076	1.779	1.627	1.255	- 21,63 %	- 29,49 %
7.	MADURA	1.287	981	1.057	727	- 17,87 %	- 25,89 %
8.	SURABAYA	5.289	3.370	3.760	2.759	- 28,91 %	- 18,13 %
JUMLAH		31.453	19.299	26.765	16.822	- 14,90 %	- 12,83 %

c. Data Crime Index Tahun 1989 dibandingkan Tahun 1990 Per Polwil dalam Jajaran Polda Jatim

KESATUAN	1989	1990					KET.
	CRIME TOTAL	CRIME TOTAL	CRIME CLEARANCE	CLEARANCE RATE	CRIME TRAND	CRIME RATE	
TABES SBY	2.686	2.315	1.127	48,68 %	- 13,81 %	61	
MALANG	4.489	4.138	1.833	44,30 %	- 7,82 %	75	
BESUKI	2.529	1.881	974	51,78 %	- 25,62 %	39	
KEDIRI	1.234	962	479	49,79 %	- 22,04 %	19	
MADIUN	624	423	143	33,81 %	- 32,21 %	10	
B. NEGORO	871	592	436	73,65 %	- 32,03 %	19	
MADURA	908	562	374	66,55 %	- 38 %	20	
SURABAYA	1.704	1.238	630	50,89 %	- 27,35 %	18	
<b>J U M L A H</b>	<b>15.705</b>	<b>12.111</b>	<b>5.996</b>	<b>49,51 %</b>	<b>- 22,88 %</b>	<b>37</b>	

dari tahun 1989 dibanding tahun 1990 terjadi penurunan sebesar 3.594 perkara (Tahun 1989 sebesar 15.705 perkara menjadi tahun 1990 sebesar 12.111 perkara) atau sebesar 22,88%.

e. Upaya penanganan kasus yang merupakan sasaran selektif diprioritaskan selain dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Operasi Rutin Kepolisian, juga ditunjang dalam bentuk kegiatan Operasi Khusus Kepolisian baik terpusat maupun mandiri kewilayahan.

## HAMBATAN / PERMASALAHAN

### 1. Bidang Operasional

a. Penghayatan dan Penerapan menejemen Opsnal POLRI (Skep Kapolri No.Pol.: Skep/187/IV/1989) baik dalam bentuk kegiatan operasi rutin Kepolisian maupun dalam kegiatan operasi khusus Kepolisian belum dapat dilaksanakan dengan baik.

### 2. Bidang Pembinaan

a. Kualitas personil yang sangat terbatas, khususnya dibidang Reserse jumlah personil yang memiliki Pendidikan kejuruan Reserse belum memadai.

b. Pengetahuan/penguasaan tentang menejemen operasional POLRI oleh para Personil dirasakan masih lemah.

c. Keterbatasan sarana yang mendukung pelaksanaan operasional, antara lain :

b. Pelaksanaan tugas Kring Serse POLRI dan

pendayagunaan Kring Serse swakarsa belum dilaksanakan seoptimal mungkin sehingga belum tercapai hasil guna yang diharapkan.

c. Belum terwujudnya keterpaduan dan sikap bahasa yang sama antara satuan fungsi dalam penanggulangan/pemberantasan Kriminalitas.

1) Kurangnya sarana transportasi menyebabkan mobilitas rendah.

2) Kurangnya sarana komunikasi menyebabkan daya jangkau dan penguasaan wilayah terbatas.

3) Semangat juang, disiplin pribadi serta jiwa karsa para personil dinilai masih perlu peningkatan.

## PEMECAHAN

a. Upaya pemecahan terhadap kualitas personil yang sangat terbatas dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas personil Reserse yang diikuti sertakan dalam Pendidikan kejuruan reserse atau seringnya unsur pimpinan memberikan petunjuk dalam bentuk teori/praktek yang berhubungan tehnik/taktis reserse serta ilmu pengetahuan lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas reserse.

b. Upaya pemecahan terhadap lemahnya pengetahuan/penguasaan MOP, dapat dilakukan melalui dari pemberian penataran kembali kepada personil reserse, dalam pelaksanaan penatarannya lebih ditonjolkan latihan dalam bentuk praktek/Aplicatif.

- c. Upaya pemecahan terhadap kurangnya sarana pendukung pelaksanaan operasional dapat dilakukan melalui peningkatan upaya pemeliharaan dan perawatan sarana yang ada sehingga selalu dalam kondisi siap untuk mendukung kelancaran tugas-tugas operasional.
- d. Upaya pemecahan terhadap lemahnya semangat juang, disiplin pribadi serta jiwa karsa para personil dapat dilakukan melalui pemberian penghargaan bagi anggota yang berprestasi dan tindakan tegoran/hukuman bagi personil yang melakukan pelanggaran dan yang lebih utama adalah sikap tauladan dari unsur pimpinan.
- e. Upaya pemecahan terhadap penghayatan dan penetapan MOP yang dalam pelaksanaan operasi rutin kepolisian dan operasi khusus Kepolisian belum dapat dilaksanakan dengan baik, dapat dilakukan dengan cara mempelajari dan mengetrapkan MOP dengan baik sesuai yang telah digariskan didalam MOP dan penjabarannya, baik dalam operasi rutin Kepolisian dan operasi khusus kepolisian.
- f. Upaya pemecahan terhadap pelaksanaan tugas kring Serse POLRI dan pendayagunaan kring serse swakarsa yang belum optimal, dapat dilakukan dengan cara :
- Adanya pembagian daerah tugas yang jelas dan disesuaikan dengan karakteristik kerawanan daerah dan hakekat ancaman serta memperhatikan prinsip efektif dan efisien.
  - Melakukan penjelasan kepada petugas tentang tugas pokok dan penjabarannya dilapangan, sehingga petugas dapat mengerti tentang tugas yang harus dilaksanakan.
  - Tingkatkan pengawasan dilapangan terhadap pelaksanaan tugas kring serse dan kring serse swakarsa sehingga dapat diketahui tentang hambatan dan kelemahan yang dihadapi petugas.
- g. Upaya pemecahan terhadap keterpaduan antar satuan fungsi, dapat dilakukan dengan cara memberikan latihan/drill berulang kali yang diikuti oleh petugas dari seluruh satuan fungsi, dalam hal pelaksanaan tugas operasi rutin kepolisian dan operasi khusus kepolisian sehingga diharapkan anggota dapat menghayati dan dapat menerapkan dengan baik dilapangan.

## Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) NUSA TENGGARA

Kepolisian Daerah Nusatenggara mempunyai wilayah meliputi 4 Propinsi seluas 110.594 Km<sup>2</sup> dengan perincian sebagai berikut :

- Propinsi Bali seluas 6.525,36 Km<sup>2</sup>
- Propinsi NTB seluas 19.218,50 Km<sup>2</sup>
- Propinsi NTT seluas 64.945,20 Km<sup>2</sup>
- Propinsi Tim-Tim seluas 18.899 Km<sup>2</sup>

Daerah Polda Nusra yang terbentang luas dari Barat menuju ke Timur mempunyai perairan yang luas dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa, Laut Flores dan Kepulauan Maluku.
- Sebelah Barat : Selat Bali



Markas Polda Nusra

- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia dan ZEE
- Sebelah Timur : Laut Timor.

Adapun mengenai letak wilayah Nusra adalah 7°31' – 10°45' Lintang Selatan dan 114°51' – 127°31' Bujur Timur, dan terdiri dari 678 buah pulau yang berjejer kearah Timur sepanjang 1.700 Km. Pulau-pulau besar terdiri dari: Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Timor dan Alor.

Markas Polda Nusra terletak di Jl. W.R. Supratman 7, Denpasar Bali, yaitu paling Barat dari wilayah Nusra. Dengan demikian Mapolda Nusra jauh dari Polwil atau Polres-Polres yang berada dibelakang Timur.

#### DEMOGRAFI

Jumlah penduduk Nusra 10.161.531 jiwa, penyebaran penduduk sebagai berikut :

Daerah Bali .....	2.777.356 jiwa
Daerah NTB .....	3.368.699 jiwa
Daerah NTT .....	3.267.919 jiwa
Daerah Tim Tim .....	747.557 jiwa

Daerah yang paling padat penduduknya ialah Propinsi Bali dan NTB, untuk daerah Tim-Tim sebagian besar penduduknya masih tinggal di daerah terpencil.

Kepadatan penduduk Daerah Nusa Tenggara adalah 85 orang/Km<sup>2</sup>.

Propinsi Bali .....	406 orang/Km <sup>2</sup>
Propinsi NTB .....	160 orang/Km <sup>2</sup>
Propinsi NTT .....	47 orang/Km <sup>2</sup>
Propinsi Tim Tim .....	87 orang/Km <sup>2</sup> .

#### STRUKTUR PEMERINTAHAN

Struktur pemerintahan pada masing-masing Propinsi adalah sebagai berikut :

Propinsi Bali mempunyai :

- 888 Kabupaten
- 1 Kotif
- 51 Kecamatan
- 614 Desa atau kelurahan.

Propinsi NTB mempunyai :

- 8 Kabupaten

- 1 Kotif
- 53 Kecamatan
- 601 Desa/Kelurahan.

Propinsi NTT mempunyai :

- 12 Kabupaten
- 1 Kotif
- 91 Kecamatan
- 1.645 Desa/Kelurahan.

Propinsi Tim Tim mempunyai :

- 13 Kabupaten
- 1 Kotif
- 62 Kecamatan
- 446 Desa/Kelurahan.

#### SITUASI KAMTIBMAS

Situasi Kamtibmas di Polda Nusra cukup mantap dan terkendali, sehingga pembangunan yang sedang di pacu di Indonesia bagian Timur dapat berjalan dengan baik. Namun demikian perlu lebih ditingkatkan lagi upaya-upaya penanggulangan terhadap berbagai bentuk ancaman dan gangguan Kamtibmas yang masih ada.

Apa lagi daerah hukum Polda Nusra merupakan daerah tujuan wisata yang ramai dan potensial.

Masalah-masalah yang selalu mendapat perhatian antara lain adalah :

- Penyelundupan
- Pencurian kekayaan laut
- Penyalahgunaan obat terlarang dan narkotika.
- Pengawasan orang asing
- Sara/unjuk rasa
- Infiltrasi
- Subversi (aspirasi non Pancasila) dan GPK
- Komplik tenaga kerja/TKI
- Pelanggaran Perda tentang perdagangan antar Pulau.

Kasus-kasus yang menjadi pengamatan khusus :

- Berbagai jenis kasus pencurian
- Penganiayaan
- Pembunuhan
- Perkelahian.



*Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mapolda Nusra*

## ORGANISASI

Polda Nusra mempunyai 3 Polwil, 39 Polres dan 257 buah Polsek. Ke tiga Polwil tersebut adalah: Polwil NTB dengan alamat Jl. Gajah Mada, Ampenan; Polwil NTT di Jl. Suharto, Kupang; Polwil Tim Tim di Jl. Formosa, Dili.

Polres yang 39 buah itu 8 buah terdapat di Propinsi Bali yaitu Polres Badung di Denpasar, Polres Buleleng di Singaraja, Polres Tabanan di Tabanan, Polres Gianyar di Gianyar, Polres Klungkung di Klungkung, Polres Bangli di Bangli, Polres Jembrana di Negara, Polres Karang Asem di Amplopura. Sebanyak 6 buah Polres terdapat di Propinsi NTB, yaitu; Polres Lombok Barat di Mataram, Polres Lombok Tengah di Praya, Polres Lombok Timur di Selong, Polres Sumbawa di Sumbawa, Polres Bima di Bima, dan Polres Dompu. Di Propinsi NTT terdapat 12 Polres, yaitu: Polres Kupang

di Kupang, Polres Timur Tengah Selatan di Soe, Polres Timur Tengah Utara di Kefamenanu, Polres Belu di Atambua, Polres Sumba Timur di Waingapu, Polres Sumba Barat di Waikabubak, Polres Ende di Ende, Polres Sikka di Maumere, Polres Flores Timur di Larantuka, Polres Ngada di Bajawa, Polres Manggarai di Ruteng, Polres Alor/Pantar di Kalabahi.

Di Propinsi Timor Timur terdapat 13 Polres, yaitu: Polres Dili di Dili, Polres Manatuto di Manatuto, Polres Suai di Suai, Polres Viqueque, Polres Baucau, Polres Los Palos, Polres Ermera, Polres Bobonaro, Polres Liquicia, Polres Ocussi, Polres Ainaro, Polres Manufahi, dan satu lagi Polres baru. Sedangkan Polsek terdapat 257 buah terdiri dari 12 Polsektif C, 244 Standard dan 1 KPPP.

Ada yang unik di Polda Nusra, yaitu ada 5 Polsek yang masing-masing mempunyai

wilayah hukum 2 Kecamatan, dan 2 buah Polsek masing-masing mempunyai wilayah hukum 3 Kecamatan. Disamping ada lagi 1 Polsek yang mempunyai wilayah hukum terdiri dari 4 Kecamatan. Dapat dibayangkan betapa beratnya tugas Polsek-Polsek yang harus melayani daerah yang begitu luas.

Sebaliknya di NTT terdapat 9 Kecamatan yang masing-masing Kecamatan ditangani oleh 2 Polsek. Rupanya Kecamatan tersebut terlalu luas.

Polda Nusra mempunyai 2 buah Sekolah Polisi Negara (SPN), yaitu SPN Singaraja di Singaraja, Bali dan SPN Kupang NTT.

Jumlah Kie Brimob BS di Polda Nusra ada 3 Kie, masing-masing 1 Kie di Denpasar, Bali; 1 Kie di Kupang NTT; dan 1 Kie lagi di Dilli, Timor Timur.

### PEMBINAAN KEKUATAN

Upaya-upaya yang berkaitan dengan pembinaan kekuatan atau masalah sumber daya yang mengarah pada profesionalisme.

Dibidang ini usaha dan kegiatan pokok dari Polda Nusra yaitu kegiatan pembangunan kekuatan :

- a. Telah melaksanakan penyusunan konsep pembangunan IPK Polda Nusra
- b. Konsep manajemen operasional dan pembinaan.

Kegiatan Personil dengan membuat perencanaan kebutuhan personil, terhadap Perwira, Bintara dan Tamtama. Mengadakan Pendidikan Secaba pada SPN Singaraja dan SPN Kupang.

Membeikan arahan dalam pelaksanaan latihan rutin semua fungsi teknis Kepolisian baik pada tingkat Polda maupun pada tingkat kewilayahan (Polwil dan Polres/Polsek).

Mengeluarkan Juklak Kapolda Nusra No. Pol: Juklak/08/IX/1988 tanggal 23 September 1988 tentang penyelenggaraan latihan rutin di seluruh jajaran Polda Nusra.

Menerbitkan Buku Simulasi Kamtibmas yang memuat pelaksanaan tugas keseluruhan

fungsi teknis baik dibidang Opsnal maupun pembinaan.

Memberikan kesempatan kepada anggota untuk mengikuti pendidikan kejuruan sesuai dengan program Mabes Polri.

### PEMANFAATAN SARANA

Pemanfaatan/Perekayasaan sarana/Prasarana yang tersedia antara lain :

Memanfaatkan SPN Singaraja dan SPN Kupang untuk melaksanakan Pendidikan Seba, baik Polsuk maupun Reguler sesuai dengan Program Dirdik Polri.

Memanfaatkan Sarana dan Prasarana di SPN Singaraja dan SPN Kupang untuk mengadakan latihan-latihan baik fungsi teknis Opsnal guna mendukung pelaksanaan Operasi terpusat maupun kewilayahan serta fungsi pembinaan dan juga untuk melaksanakan latihan-latihan non Polri (Sat Pam, Polsus, PPNS).

Memanfaatkan ruang klas Dit Diklat untuk pelaksanaan kegiatan latihan seluruh fungsi (Opsnal dan Bin) khusus dilingkungan Mapolda.



Anggota Polantas tengah melakukan pengecatan Zebra-Cross di persimpangan Sanur.

## MENDINAMISASIKAN SUMBER DAYA

Mendinamisasikan sumber daya yang ada untuk mendukung tugas-tugas Polri sebagai berikut :

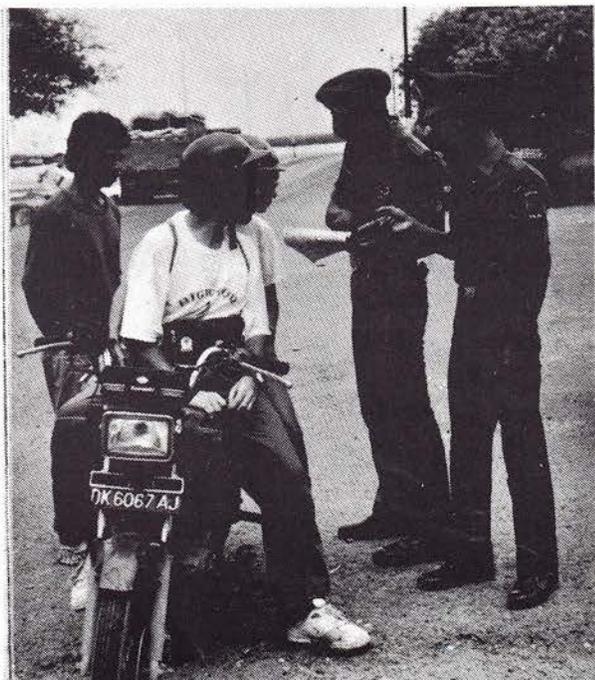
Melaksanakan ujian PBB dan Bela diri bagi Ba/Ta yang akan di UKP kan.

Melaksanakan latihan bagi fungsi tehnik Opsnal khususnya dalam rangka mendukung kegiatan Operasi, baik Operasi Kepolisian terpusat maupun mandiri Kewilayahan.

Melaksanakan lomba Simulasi Kamtibmas secara berjenjang dari tingkat Polsek sampai dengan tingkat Mapolda dengan tujuan meningkatkan penguasaan anggota terhadap pelaksanaan fungsi tehnik Opsnal/pembinaan.

Senantiasa memberikan arahan kepada satuan bawahan guna lebih menyempurnakan pelaksanaan latihan-latihan rutin sesuai dengan Juklak Kapolda Nusra No.Pol.: Juklak/08/IX/1988 tanggal 23 September 1988 tentang penyelenggaraan latihan rutin diseluruh Jajaran Polda Nusra.

Lomba Polsek Basis Deteksi Dini  
Penertiban angkutan Pariwisata



*Dua anggota Polres Badung memberikan penjelasan tentang rute jalan kepada wisatawan.*

## PENGGUNAAN KEKUATAN

Upaya penggunaan kekuatan berupa operasi yang menonjol antara lain :

1. Operasi rutin berupa penjagaan dan patroli dilaksanakan terhadap pengamanan Markas, proyek pital VIP dan Bank dengan hasil penyelesaian kasus tipiring.

2. Operasi khusus Kepolisian :

a. Berupa Operasi mantap tahun 1990 Operasi ini mengambil sasaran dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya Binkamtibmas dan Pembangunan Nasional yang berlangsung selama 60 hari dengan melibatkan Polda Nusra dan Polwil Timor Timur dan Jajarannya. Hasil yang dicapai lewat pembinaan kepada tokoh Agama diwilayah Timor-Timur, adalah: Secara fisik kegiatan dalam bentuk perbaikan jalan, pembersihan dan pengecatan pagar, pembuatan Pos Kamling, pembuatan sarana Olah Raga, Kolam Ikan percontohan, Ceramah-ceramah, pembinaan Seni. Secara Kualitatif Operasi ini menunjukkan perubahan sikap masyarakat menjadi bersifat positif terhadap Pemerintah seperti halnya berkurangnya kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah. Timbul partisipasi masyarakat dalam penjagaan keamanan lewat Pos kamling, berkurangnya demonstrasi anti Pemerintah.

b. Operasi Nila

Semula citra Pulau Bali merupakan sarang Narkotik ternyata hal tersebut tidaklah benar. Dari Operasi Nila yang dilaksanakan selama 2 bulan melibatkan Polres Badung, Gianyar, Buleleng, Karangasem dan Kupang ternyata tidak banyak hasil yang diperoleh. Kasus yang ditangani hanya 2 buah dengan melibatkan 2 orang Asing yaitu Jerman dan Itali dengan barang bukti 38,5 gram Hasis dan Ganja 6,7 gram.

c. Operasi Pesona Agung

Operasi ini bersifat mandiri dengan melibatkan Kesatuan Polda Nusra dan Polres se Bali dalam rangka pengamanan Konperensi PATA 1991 dan pengamanan Presiden R.I di Nusa Dua Bali dari tanggal 6 s/d 16 April 1991.

Kegiatan pengamanan ini dari Delegasi turun di Airport Ngurah Rai sampai pada obyek-obyek yang dikunjungi serta selama berlangsungnya Konpreksi berjalan aman dan lancar.

d. Kegiatan utama penggunaan kekuatan  
Dalam kegiatan ini melibatkan Jajaran Polda Nusra untuk digunakan dalam Proyek Bhakti ABRI/AMD diseluruh Kabupaten Propinsi Bali dan NTB. Dengan hasil yang dicapai Kasus yang diungkap 14 Kasus berupa Curat 6 Kasus kecelakaan Lantas 52 Kasus.

f. Operasi Patuh Lilin

Dengan sasaran masalah Lantas dan Natal menyongsong tahun Kunjungan Wisata Indonesia dengan jangka waktu 99 hari. Hasil yang dicapai penindakan pelanggaran 4.548

Kecelakaan .....	156 Kasus
Penyitaan barang bukti kendaraan roda empat .....	475 buah
Ranmor roda dua .....	2.0182 buah.

g. Operasi "Balak" :

Sasaran Operasi permainan judi yang berlangsung 60 hari dengan membentuk Satuan tugas. Kesatuan kewilayahan hanya memberi Operasi yang bersifat imbanan. Sebagian besar hasil Operasi ini hanya judi Sabungan Ayam di daerah Bali dan NTT.



Barang bukti berupa Mariyuwana kering seberat 102 kg yang disita Dit Serse Polda Nusra Des. 1991.

## MENDINAMISASIKAN SUMBER DAYA

Mendinamisasikan sumber daya yang ada untuk mendukung tugas Polri antara lain :

a. Pembangunan Mapolres Badung.  
Merupakan hasil ruitslag antara Polri/Polda Nusra dengan developer PT Kakim Santausa malang.

Polri melepaskan Mapolres Bandung di Jalan Diponegoro Denpasar kemudian mendapatkan penukaran yang terletak di jalan Gunung Sangyang sebagai berikut :

Tanah : 2 Ha, terdiri dari :

Kantor/Gedung Utama luas 2688 M2 (Lantai 2)

Gedung Pertemuan luas 450 M2

Rumah Jaga luas 54 M2

Ruang tahanan luas 400 M2

Rumdin T 54 – 2 pintu

T 38 – 46 pintu

Kelengkapan fasilitas umum berupa jalan lingkungan. Lapangan Upacara, tempat Parkir, Lapangan Ujian Parkir.

b. Pembangunan Mapolres Tabanan secara swakelola dengan luas 2208 M2 bertingkat 2 yang sedang dalam tarap penyelesaian.

c. Pembangunan Puskodalops Polda Nusra yang merupakan bantuan dari Perancis dengan penyelesaian secara phisik 95% berlantai 2 dengan luas 530 M2.

d. Swadaya dengan mengadakan perluasan Gedung Mapolda Nusra yang terdiri dari :

1) Perluasan Gedung Mapolda dengan luas 4.067 M2 dengan lantai 2 dengan trafe atau ruangan.

2) Pembangunan ruang Rapat Utama (Rupatama) seluas 433 M2 beserta perlengkapannya.

3) Pembangunan Gedung dibelakang Asrma Tehpati seluas 799 M2.

4) Pembangunan Gedung, Logo Stil Bali dengan luas 530 M2.

5) Rehab Gedung untuk Dispullahta 169 M2

6) Pengaspalan dengan aspal Hotnik 3550 M2

7) Pembuatan Tower setinggi 10 M.

### PEMBANGUNAN IPK

Upaya Pembangunan IPK antara lain kegiatan Ba Bin Kamtibmas :

1. Dalam upaya mendukung pelaksanaan pengamanan VIP 1991 dan Tahun Kunjungan Wisata ASEAN 1992 telah diselenggarakan penyiapan para petugas Ba berkwalifikasi Pam Pariwisata, yang diselenggarakan pada bulan Juli–September 1990 di SPN Singaraja sebanyak 155 orang.

2. Penugasan para petugas Ba berkwalifikasi Pam Pariwisata pada berbagai lokasi dan pitalitas wisata pada masing-masing daerah.

Penugasan Ba berkwalifikasi Pam Pariwisata

ini dipadukan dengan pemanfaatan pendirian Pos-Pos Polisi.

Pelayanan wisata, yang sementara ini diprioritaskan pada awasan yang mempunyai prekwensi kunjungan wisatawan yang tinggi :

a. Polres Gianyar (kawasan Batubulan dan Ubud)

b. Polres Karangasem (kawasan Candi Besakih dan Candi Basa).

c. Polres Lombok Barat (kawasan pantai senggigi)

d. Polres Dompu (kawasan La Key Mun).

## Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) KALIMANTAN BARAT

Polda Kalimantan Barat (Polda Kalbar) mempunyai daerah hukum meliputi wilayah Propinsi Kalimantan Barat dengan penduduk sekitar 3.046.894 jiwa pada akhir tahun 1988.

Polda Kalbar yang bermarkas di Jl. Zainuddin, Pontianak mempunyai kekuatan 5.260 orang anggota, dengan wilayah yang begitu luas disamping sarana transportasi masih terbatas.

Melihat perbandingan jumlah penduduk dengan banyaknya anggota Polri, maka rata-

rata setiap anggota Polri harus melayani 579 orang penduduk.

Polda Kalbar yang bermarkas di Jl. Zainuddin, Pontianak mempunyai 7 Polres dan 111 Polsek yang tersebar jauh ke pedalaman. Ke 7 Polres tersebut adalah: Polresta Pontianak di Jl. Jen. Urip Sumoharjo, Pontianak; Polres Pontianak di Jl. Terusan, Pontianak; Polres Sambas di Jl. Terusan Mempawah; Polres Sanggau di Jl. R.E. Martadinata, Sanggau; Polres Sintang di Jl. Bening Sintang; Polres Kapuas di Jl. Merdeka, Putusibau; dan Polres Ketapang di Jl. Radio, Ketapang.



## 10 PINTU LINTAS BATAS

Kondisi geografi daerah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sebagai wilayah potensial rawan Kamtibmas dan berbatasan dengan negara tetangga Malaysia yang terbentang sepanjang 850 Km, memanjang dari Utara ke Selatan, mulai dari Laut Cina Selatan sampai Selat Karimata, yang merupakan pertemuan batas antara wilayah Kalbar, Kaltim dan Sarawak Malaysia Timur.

Melalui wilayah seluas 146.807 Km<sup>2</sup> yang terbagi dalam satu Kepolisian Resort Kota (Polresta) dan Enam Kepolisian Resort (Polres) serta 109 Kepolisian Sektor (Polsek), merupakan satu-satunya Polda di Indonesia yang wilayahnya memiliki pelabuhan darat dengan negara tetangga Malaysia yaitu pintu gerbang pelabuhan pendaratan di Entikong Kabupaten Sanggau kurang lebih 319 Km dari Pontianak Ibukota Propinsi Kalimantan Barat.

Didalam wilayah hukum yang cukup luas ini, ada empat Polres yang langsung berbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan memiliki sepuluh pintu keluar atau masuk yang ditetapkan untuk pelintas batas tradisional yaitu Polres Sambas, memiliki lima lintas batas masing-masing didaerah Paloh atau Liku, daerah Sajingan, Sungai Aruk, Saparan dan Jagoibabang. Kemudian Polres Sanggau memiliki 3 pintu lintas batas masing-masing Siding, Bantan dan Entikong, untuk yang terakhir ini merupakan pintu gerbang pelabuhan darat resmi, yang peresmianya telah dilaksanakan oleh Panglima ABRI Jenderal TNI Try Sutrisno selaku General Border Committee Malaysia – Indonesia, pada 25 Pebruari 1991 yang lalu. Sedangkan Polres Sintang dan Polres Kapuas Hulu masing-masing memiliki satu pintu lintas yaitu lintas batas Merakai Panjang Sintang dan Nanga Badau Kapuas Hulu.

Dari sepuluh pintu batas itu lima diantaranya yaitu Entikong, Jagoibabang, Saparan, Aruk dan Liku telah dimanfaatkan sebagai jalan lintas batas untuk kegiatan penduduk yang berdomisili diluar daerah perbatasan (non tradisional) seperti kunjungan pemerintah,

olah raga, kesenian dan kebudayaan dari kedua daerah atau negeri yaitu Kalbar Indonesia dan Sarawak Malaysia Timur.

## KARAKTERISTIK HUBUNGAN KALBAR – SARAWAK BERCIRI KHAS

Bahwa kegiatan lintas batas antar penduduk didaerah perbatasan Kalbar dan Sarawak pada mulanya hanyalah merupakan kunjungan tradisional yang bersifat kekeluargaan, namun dengan datangnya Kolonial Inggris dan Belanda dikawasan perbatasan Sarawak dan Kalbar, daerah yang semula merupakan satu kawasan sosial ekonomi dan budaya yang secara formal tidak terpisahkan khususnya bagi kepentingan penduduk setempat, walaupun pada saat itu kawasan tersebut telah merupakan bagian dari masing-masing pemerintahan kesultanan setempat. Namun tidak menjadi pemisah antara dua kawasan luas itu dan tidak menjadi penghalang bagi penduduk sekitarnya untuk dengan bebas berkunjung atau saling memasuki kawasan tersebut.

Akan tetapi berdasarkan tujuan-tujuan politik kolonialisme khususnya dalam rangka monopoli sumber-sumber ekonomi dan keamanan teritorial, maka pemerintah kolonial Belanda (Kalbar) dan pemerintah kolonial Inggris (Sarawak) melarang penduduk setempat untuk memasuki atau menyeberang kekawasan lainnya tanpa seijin pemerintah.

Sejak saat itu masyarakat dikedua kawasan yang masih memiliki hubungan darah atau kekeluargaan dan hubungan sosial ekonomi dan budaya satu sama lain telah terpisah secara formal.

Penduduk yang tinggal dikawasan perbatasan kedua belah pihak berasal dari kelompok etnik Melayu dan etnik Dayak, yang mana masyarakat Melayu dikawasan perbatasan Kalbar dan Sarawak Malaysia menganggap diri mereka sebagai seorang Melayu Kalimantan, demikian juga orang-orang Dayak dikedua kawasan walaupun mereka ini bersifat heterogen namun mereka juga menganggap diri mereka sebagai satu orang Dayak (bukan orang Dayak Sarawak

atau orang Dayak Kalbar).

Karakteristik hubungan semacam ini menempatkan hubungan antara Kalbar Indonesia dan Sarawak Malaysia terutamanya sesama penduduk disepanjang daerah perbatasan sebagai suatu hubungan yang unik dan khas, yang tidak ada duanya didalam hubungan negara Asean lainnya, keunikan dan kekhasan hubungan tersebut menunjukkan bahwa masalah perbatasan yang terjadi disepanjang perbatasan Kalbar dan Sarawak dan masalah-masalah etnik yang mungkin timbul disepanjang kawasan perbatasan tersebut, pada hakekatnya berbeda dengan masalah serupa yang terjadi antara Malaysia dengan negara lainnya yang tergabung dalam perhimpunan regional Asean.

Kemudian setelah Sarawak merdeka ke-dalam wilayah Malaysia terjadilah perubahan-perubahan yang antara lain ditandai dengan pembangunan jalan raya disepanjang perbatasan, hingga menjangkau kampung-kampung diperbatasan, sedangkan daerah perbatasan wilayah Indonesia khususnya didaerah Kalimantan Barat, saat sekarang ini belum ada perubahan yang berarti, masih tetap seperti sedia kala yaitu sederhana, terpencil dan jauh dari ibukota kecamatan sehingga setiap ada kunjungan pejabat pemerintah atau dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk-I Kalimantan Barat ada diantara masyarakat perbatasan yang menanyakan kapan Indonesia merdeka, pertanyaan ini memang sederhana tetapi cukup menyentuh relung-relung hati.



*Kegiatan masyarakat perbatasan Kalimantan Barat di Entikong dengan memanfaatkan fasilitas lintas batas 500 dollar Malaysia membawa barang dari Malaysia.*

## KESENJANGAN SOSIAL

Didasari kepada kenyataan itu, terjadilah perbedaan yang menyolok antara kedua daerah perbatasan tersebut, terutama tingkat sosial ekonomi dan komunikasi masyarakat perbatasan Sarawak jauh lebih maju dibandingkan daerah perbatasan Kalimantan Barat, sehingga keadaan demikian ini memaksa rakyat Kalimantan Barat diperbatasan untuk berorientasi ke Sarawak dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena masyarakat kita diperbatasan hanya dalam waktu satu atau dua jam saja sudah dapat menjangkau pasar atau tempat-tempat perbelanjaan di Malaysia, tetapi kalau mau memasarkan hasil buminya ke Kalbar memakan waktu yang cukup lama, dengan biaya yang relatif besar, demikian juga terhadap kebutuhan pokok sehari-hari.

Melihat situasi yang cukup rawan tersebut Pemerintah Indonesia melalui Pemerintah Daerah Kalbar telah membangun daerah perbatasan meliputi wilayah sepanjang 805 Km yang melibatkan empat daerah Tingkat II yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu, yang terdiri dari 20 Kecamatan lini satu dan lini dua, hal ini sebagai usaha untuk mengalihkan orientasi masyarakat dari Sarawak keorientasi nasional.

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan Indonesia—Malaysia, kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang pembangunan sosial ekonomi daerah perbatasan, sebagai perwujudan dari kerjasama sosial ekonomi daerah perbatasan tersebut, kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan penyambungan jalan raya Entikong Kalbar dan Tebedu Sarawak sebagai proyek awal, yang uji coba penggunaannya dimulai tanggal 1 Oktober 1989 hingga peresmian tanggal 25 Februari 1991 yang lalu.

Dengan dibukanya secara resmi pelabuhan pendaratan Entikong Kalbar dan Tebedu Sarawak oleh Panglima ABRI pada tanggal 25 Februari 1991 yang lalu, berbagai ketentuan

untuk mengatur lalu lintas orang antara Kalimantan Barat dengan Sarawak Malaysia diberlakukan berdasarkan pada :

1. Pemufakatan dasar lintas batas antara Indonesia—Malaysia (Basis Agreement on Border Crossing) yang ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1967.
2. Persetujuan mengenai lintas batas antara Indonesia dan Malaysia yang ditanda tangani 26 Mei 1984, kedua perjanjian tersebut diatas adalah khusus mengatur tentang pelintas batas antara lain berbunyi :
  - a. Perdagangan lintas batas hanya boleh dilakukan oleh orang-orang (penduduk) daerah perbatasan yang bertempat tinggal paling jauh 5 (lima) mil dari garis batas di Sarawak.
  - b. Barang-barang yang dibawa nilainya tidak boleh melebihi 600 dolar Malaysia perorang perbulan (lewat darat) atau tidak melebihi 600 dolar Malaysia perkapal sekali pelayaran (lewat laut).
  - c. Jenis barang yang dibawa dari Indonesia adalah hasil pertanian dan lain-lain yang berasal dari perbatasan.
3. Agreement on border crossing 12 Mei 1984 yang ditanda tangani oleh Bapak Jenderal L.B. Murdani dan Datuk Musa Hitam di Medan sebagai usaha pembaharuan/perubahan dari Basic on border crossing tanggal 26 Mei 1967 yang isinya antara lain mengenai pe entuan daerah perbatasan, pos keluar/masuk (point of entry) dan pos lintas batas.
4. Agreement miniatur of Indonesia—Malaysia joint commision on trade, tanggal 2 April 1986 di Jakarta ditanda tangani oleh Dirjen Daglu dan Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan dan Industri Malaysia yang intinya berisikan beberapa kesepakatan yang antara lain :
  - a. Nilai barang yang dibawa oleh pelintas batas yaitu penduduk daerah perbatasan yang bertempat tinggal paling jauh 5 (lima) mil dari garis batas Sarawak, yang semula hanya sebesar 600 dolar Malaysia perorang perbulan ditingkatkan menjadi 3000 dolar Malaysia perkapal sekali pelayaran, namun ketentuan ini saat tulisan ini dibuat belum

diberlakukan di Indonesia, sedangkan di Malaysia sudah diberlakukan.

- b. Keluar masuk barang diperbatasan akan diatur dalam prosedur tersendiri yang akan disepakati kedua belah pihak.



Mayor Pol. Dahlan Syamsudin Kabag Reserse Ekonomi Dit Serse Polda Kalbar saat memeriksa barang-barang hasil selundupan yang akan dimusnahkan.

#### KEMUDAHAN MASYARAKAT PERBATAS-AN DIMANFAATKAN OKNUM

Selama masa uji coba pos lintas batas Entikong tanggal 1 Oktober 1989 hingga tanggal 25 Pebruari 1991, perkembangan lalu lintas orang, barang dan kendaraan baik dari Kalbar ke Malaysia maupun dari Malaysia ke Kalbar semakin hari semakin meningkat, berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa jumlah lalu lintas orang yang melalui pintu gerbang Entikong tercatat ada 44.012 orang, dengan perincian 18.725 orang keluar menggunakan fasilitas poost lintas batas (PLB), demikian juga warga negara Malaysia yang masuk ke Kalbar Indonesia tercatat ada 16.508 orang, dengan menggunakan fasilitas post lintas batas 2.277 orang dan menggunakan pasport Malaysia sebanyak 14.231 orang.

Sementara itu lalu lintas barang berdasarkan data yang ada di Polsek Entikong Polres Sanggau berdasarkan jenis barang adalah sebagai berikut :

- a. Bahan makanan :
 

Roti kaleng	:	6.184 dus
Susu bubuk	:	3.783 dus
Buah-buahan segar	:	243 dus

Minuman kaleng	:	17.785 dus
Daging kaleng	:	1.306 dus
Gula pasir	:	123.856 Kg
Tepung terigu	:	374 Kg
b. Bahan bangunan/pertanian :		
Seng gelombang	:	5.543 keping
Paku logam	:	37 Kg
Paku batangan	:	114 batang
Pupuk lada	:	13.679 Kg

Walaupun lalu lintas orang dari Indonesia ke Malaysia jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan penduduk Malaysia yang berkunjung ke Indonesia melalui lintas batas Entikong, namun ternyata kendaraan yang masuk dari Malaysia ke Indonesia justru lebih banyak, hal ini dapat dilihat dari data yang ada menunjukkan bahwa jumlah kendaraan Malaysia yang berpergian ke Indonesia tercatat ada 1885 kendaraan dari berbagai jenis, sedangkan kendaraan Indonesia yang memasuki Malaysia tercatat ada 1479 kendaraan.

Kalau kita lihat data terutama mengenai masuknya barang selama uji coba Oktober 1989

hingga Pebruari 1991 (17 bulan) tercatat tidak seberapa, namun kenyataan dilapangan terutama dipasaran Pontianak sangat berbeda sekali hampir disetiap toko minuman dan makanan memasarkan produk dari Malaysia, hal ini disebabkan karena ketentuan fiskal yang biasa diberlakukan kepada setiap warga negara Indonesia yang akan berpergian keluar negeri, untuk dikawasan lintas batas Entikong ini tidak dikenakan fiskal, demikian pula barang yang masuk di Kalbar tidak dikenakan bea masuk sepanjang tidak melampaui ketentuan 600 dolar Malaysia perorang perbulan, namun ternyata berbagai fasilitas kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan ini dalam prakteknya dimanfaatkan oleh oknum-oknum pedagang dan pengusaha diluar garis sepadan 5 mil dari Sarawak, yaitu dengan memberikan modal kepada masyarakat yang memiliki fasilitas 600 dolar Malaysia untuk berbelanja ke Malaysia tanpa menghiraukan kepentingan negara.



Bayi-bayi dari Kalbar yang diselundupkan ke Malaysia berhasil digagalkan Polisi Di Raja Malaysia dan Polri, saat akan dideportasikan ke Kalbar (Indonesia) melalui pelabuhan darat Entikong.

### PENYELUNDUPAN TERSELUBUNG

Sebagai akibat dari olah para pengusaha atau pedagang yang hanya memikirkan keuntungan pribadi tanpa menghiraukan kepentingan negara dan bangsa, maka pasaran di Pontianak mulai dari supermarket sampai pedagang eceran dibanjiri oleh barang-barang dari Sarawak Malaysia, terutamanya makanan dan minuman kaleng seperti berbagai jenis roti, coca cola, 7 up, Tim up, fanta dan sejenisnya, buah-buahan segar seperti anggur, apel dll. bawang putih serta barang-barang lain yang berasal dari negara Malaysia.

Barang-barang ini selain masuknya terlepas dari bea masuk sehingga negara banyak dirugikan, juga kualitas barang perlu dipertanyakan, karena pada saat dimasukkan ke Indonesia lewat Entikong oleh para pengamben (barang tentengan bawaan) penduduk perbatasan tanpa melalui pemeriksaan Departemen Kesehatan yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan sehingga dikhawatirkan dapat membahayakan para konsumen (masyarakat Kalbar).

Kalau ditinjau dari aspek Kamtibmas barang-barang tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai barang selundupan, karena walaupun masuknya menggunakan fasilitas penduduk perbatasan, tetapi barang tersebut setelah dikumpulkan dari para pengamben yang telah dimodali oleh para pedagang atau pengusaha, jumlah nilai barang tersebut melebihi 600 dolar Malaysia, sehingga harus dikenakan bea masuk, namun kenyataannya ternyata bebas dari bea masuk dan tanpa dilindungi dengan dokumen yang syah.

Bahkan modus operandi yang dilakukan oleh para oknum pedagang atau pengusaha ini ada yang mendirikan rumah diperbatasan terutama didalam kawasan garis sepadan yang memperoleh fasilitas 600 dolar Malaysia, bahkan tidak segan-segan untuk memperlakokan oknum didaerah tersebut untuk memintakan status kependudukannya (memperoleh KTP), padahal mereka-mereka tidak pernah tinggal di kampung, namun karena kelicikannya sehingga bisa memperoleh Kartu Tanda Penduduk. Padahal maksud mereka membuat rumah dan pura-pura menjadi

penduduk perbatasan ini sebenarnya hanya untuk memperlancar dan mempermudah pengumpulan barang dari para pengamben dan mengelabui petugas, sehingga mereka ini sudah dapat dikategorikan penyelundup terselubung.

### PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dengan diberlakukannya Basic agreement on border crossing yang memuat tentang perdagangan lintas batas hanya boleh dilakukan oleh orang-orang (penduduk) daerah perbatasan yang bertempat tinggal paling jauh 5 (lima) mil dari garis batas Sarawak dan bisa membawa barang-barang (mengambin istilah penduduk perbatasan) dengan nilai tidak lebih dari 600 dolar Malaysia perbulan perorang (lewat darat) atau 600 dolar Malaysia perkapal sekali pelayaran (lewat laut), maka timbullah permasalahan yang sangat kompleks yaitu adanya penumpukan barang-barang produk Malaysia diperbatasan Kalimantan Barat, terutamanya didaerah Kecamatan Balai Karang (17 Km dari pelabuhan darat Entikong).

Permasalahan ini timbul karena fasilitas yang dimiliki oleh penduduk perbatasan dimanfaatkan oleh oknum-oknum pedagang dan pengusaha untuk mengeruk keuntungan pribadi tanpa memikirkan kepentingan negara yaitu dengan cara memberikan modal kepada beberapa penduduk perbatasan untuk memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah, melakukan belanja barang-barang yang diinginkan oleh para pedagang yang memberi modal ke Malaysia, setelah barang-barang ini terkumpul cukup banyak didaerah perbatasan (Balai Karang dan sekitarnya), para pedagang ini seolah-olah membeli barang-barang dari masyarakat Kalimantan Barat diperbatasan, dimana dalam jual beli tersebut juga dilengkapi dengan dokumen yang syah berupa kwitansi pembelian.

Karena barang-barang produk Malaysia itu masuk wilayah Indonesia (Kalbar) secara syah yaitu melalui fasilitas lintas batas, maka sulit apabila aparat Kepolisian menangkap para pedagang yang memberikan modal kepada penduduk perbatasan ini dikategorikan sebagai

penyelundup.

Sebagai akibat dari itu situasi pasar di Pontianak dan kota-kota lain di wilayah Kalimantan Barat banyak dibanjiri barang-barang Malaysia terutamanya makanan dan minuman kaleng serta buah-buahan segar seperti apel, anggur, buah pear, buah sankis, lengkung dan lain-lain, hal demikian ini bilamana dibiarkan terus, tidak menutup kemungkinan akan merusak pasaran terutama barang dalam negeri, karena harganya lebih murah dari pada barang-barang yang berasal dari Jakarta.

### UPAYA-UPAYA POLRI

Melihat ancaman terhadap keamanan di wilayah perbatasan terutama masalah tindak pidana penyelundupan, uang palsu serta ancaman-ancaman lainnya terhadap pengembangan potensi daerah Kalimantan Barat sebagai bagian dari potensi nasional, jelas merupakan wilayah yang cukup rawan dan merupakan spektrum ancaman terujung yang menuntut kecepatan dan ketepatan dalam penanganannya oleh Polri bersama-sama dengan segenap kekuatan pertahanan keamanan lainnya, sehingga tetap merupakan sasaran selektif yang diprioritaskan dalam kiprah operasional Polri.

Menghadapi anatomi kondisi Kamtibmas makro sebagaimana disebutkan diatas, maka setiap anggota Polri harus mampu meningkatkan kesamaptan fungsi teknis Kepolisian agar dapat diwujudkan postur Polri sebagai penegak hukum dan pembina Kamtibmas yang mahir, trampil, bersih dan berwibawa serta mampu mengendalikan dan menuntaskan masalah-masalah Kamtibmas diwilayahnya secara terpadu dalam kaitannya dengan seluruh upaya pemeliharaan stabilitas nasional bagi suksesnya pembangunan nasional.

Dalam kedudukan seperti itu, maka Kapolda Kalbar Kolonel Polisi Drs. H. Haryoso telah menempuh beberapa upaya untuk mengantisipasi diantaranya :

#### 1. Bidang personil

Agar dinamika operasional Polda Kalbar

tetap meningkat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutamanya Polres yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Polsek yang wilayahnya dilalui kendaraan dari Malaysia maupun kendaraan yang akan menuju Malaysia, maka selain pada setiap 6 (enam) bulan sekali para personil di daerah tersebut dilakukan penyegaran atau mutasi, juga para personil ini dituntut untuk memiliki ketajaman dalam pengawasan terhadap lalu lintas barang, orang maupun kendaraan yang datang dari Malaysia maupun sebaliknya.

Demikian juga didalam penempatan anggota di daerah tersebut selain secara selektif juga dipilih anggota-anggota yang memiliki kemampuan lebih.

Para personil yang akan bertugas di daerah perbatasan ini sebelum ditempatkan pada wilayah tersebut, diberikan bekal keterampilan dibidang Kepolisian melalui pendidikan atau kursus di Sekolah Polisi Negara (SPN) Pontianak, sehingga diharapkan dengan bekal yang dimiliki para anggota ini mampu melaksanakan tugas dengan baik, tanpa ragu-ragu, karena yang dihadapi para anggota di daerah tersebut bukan saja warga negara Indonesia saja, tetapi warga negara manca negara yang masuk Indonesia melalui pelabuhan darat Entikong, oleh karenanya selain dituntut untuk memiliki keterampilan bidang Kepolisian juga dituntut untuk memiliki pengetahuan bahasa asing pada tingkat elementary (dasar), kemampuan mengemudikan kendaraan bermotor dan kemampuan menggunakan dan melakukan teskit.

#### 2. Dibidang materiil

Untuk mendukung tugas-tugas operasional Polri dilapangan, pimpinan Polri berusaha untuk memenuhi semaksimal mungkin kebutuhan materiil dan logistik yang diperlukan seperti kendaraan bermotor roda empat, dimana Polsek lainnya belum dilengkapi, Polsek di Entikong sudah dilengkapi dengan 2 (dua) buah kendaraan roda empat, demikian juga alat perlengkapan perorangan berupa jaket

gaya baru, personil lain di jajaran Polda Kalbar termasuk di Mapolda belum memperoleh alat perlengkapan tersebut, personil Polsek Entikong sudah memperoleh, perlengkapan kesatuan juga memiliki nilai lebih, demikian juga fasilitas asrama dan kelengkapan sarana dan prasarana untuk mendukung tugas-tugas Polri dilapangan semuanya telah tersedia.

### 3. Koordinasi lintas sektoral

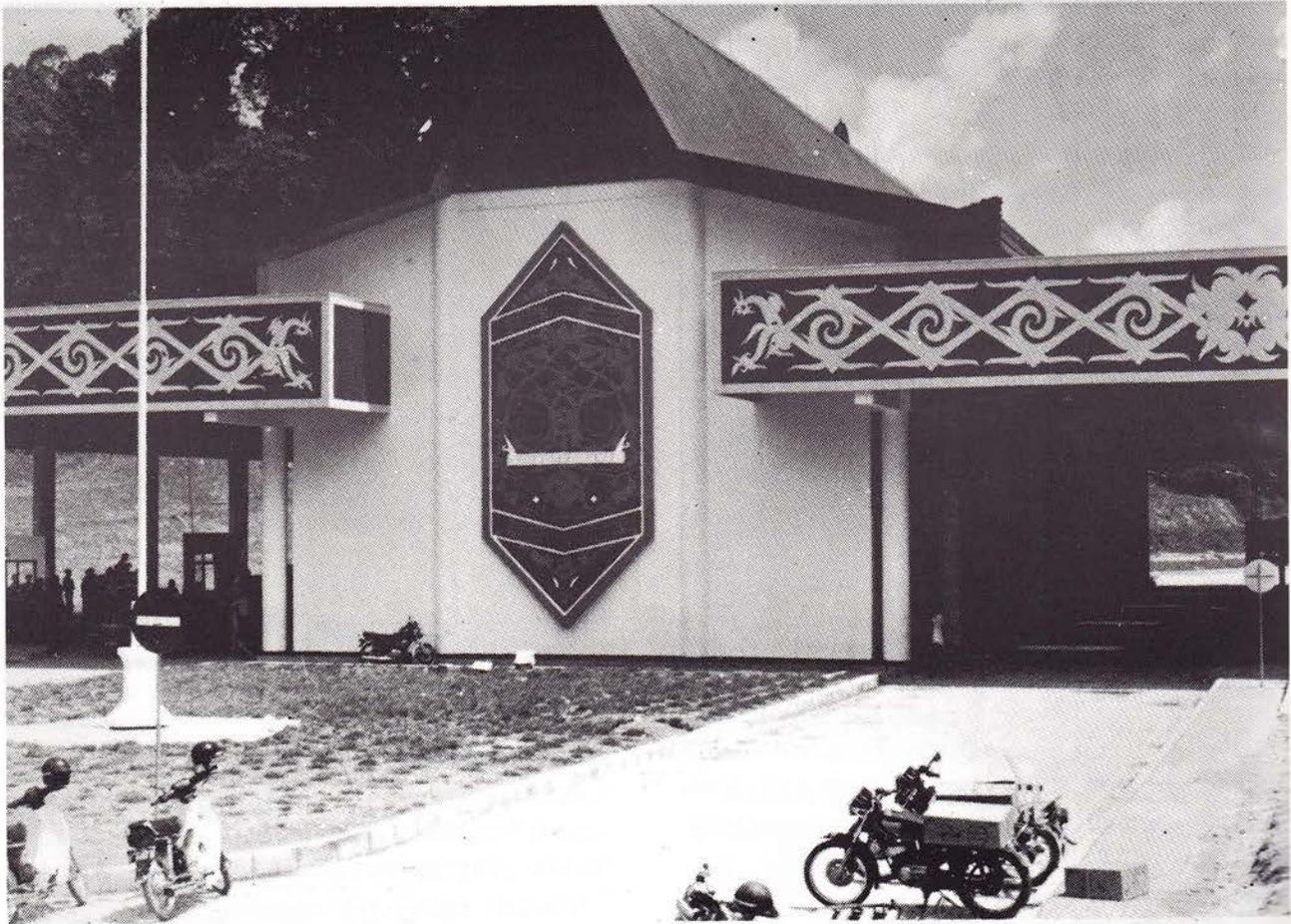
Untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di perbatasan terutamanya dipelabuhan darat Entikong, Polri telah berupaya melakukan koordinasi dengan instansi terkait terutamanya yang tergabung dalam kelompok kerja sosial

ekonomi Malaysia—Indonesia tingkat daerah Kalimantan Barat.

Setiap melakukan rapat koordinasi, aparat Kepolisian yang diwakili oleh Letkol Pol. H. Syamsir Alam Loebis, SH selaku anggota Kelompok Kerja Sosek Malindo, menyarankan:

a. Barang-barang dari Malaysia yang dibawa oleh penduduk perbatasan melalui fasilitas lintas batas 600 dolar Malaysia, supaya tidak dibenarkan keluar dari kecamatan perbatasan Entikong (daerah lini satu).

b. Untuk menghindari adanya penyelundupan terselubung telah diusulkan untuk dikeluarkan peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang ketentuan perdagangan barang-barang produk Malaysia.



*Pelabuhan darat Entikong Kalbar sebagai pintu masuk ke Malaysia.*

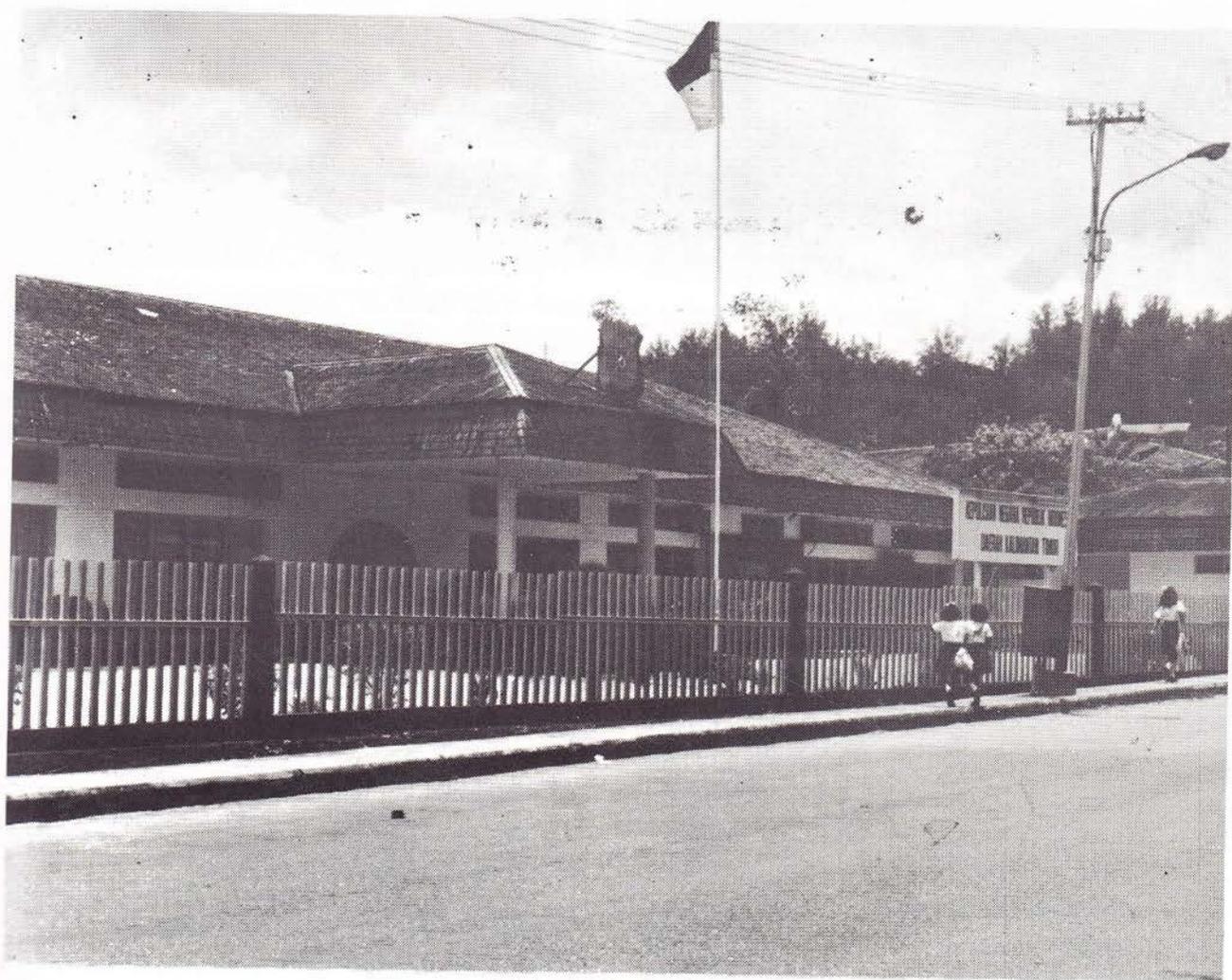
## Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) KALIMANTAN TIMUR

Polda Kalimantan Timur mempunyai wilayah meliputi Propinsi Kalimantan Timur, dengan 8 Polres, termasuk 2 Polresta, dan 77 Polsek yang terdiri dari 6 Polsektif B, 1 Polsektif C, 69 Polsek Standard dan 1 KPPP.

Adapun Polres-Polres tersebut adalah : Polresta Samarinda di Samarinda, Polresta Balikpapan di Balikpapan, Polres Bulongan, Polres Tarakan, Polres Berau di Tanjung Redep, Polres Kutai di Tenggarong, Polres Bontang di Bontang dan Polres Pasir di Tanah Gerogat.

Berbagai kemajuan yang dicapai Polda Kalimantan Timur dalam ikut menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur adalah merupakan hasil kerja keras segenap aparatur Kepolisian di daerah ini didukung oleh semangat membangun di seluruh lapisan masyarakat.

Ungkapan yang mengatakan bahwa "Kalimantan adalah pulau masa depan" menuntut kepada setiap aparatur pemerintahan dan



Markas Polda Kaltim



*Pertemuan Polri dengan Alim Ulama dan Wartawan merupakan wujud operasional dalam pembangunan IPK.*

segenap warga masyarakat di pulau ini untuk tetap kerja keras dengan keyakinan bahwa tujuan pasti tercapai.

Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai masyarakat Kalimantan Timur saat ini hendaknya tidak membuat masyarakat cepat puas, karena pada gilirannya nanti manakala kegiatan pembangunan tersebut tidak dipacu akan menjadi semakin lamban sehingga hasil yang dicapaipun semakin menurun.

Kekayaan alam pulau Kalimantan dan khususnya yang ada di wilayah yuridiksi Polda Kaltim telah banyak mengundang berbagai pihak untuk datang mengelolanya. Persaingan antar kepentingan inilah yang perlu diwaspadai agar gejolak sosial yang timbul tidak berpengaruh pada stabilitas kamtibmas di daerah ini.

Sejauh mana peran Polda Kaltim pada masa "Empat Setengah Dasawarsa Usia Polri" dalam upaya menjaga stabilitas kamtibmas di daerah Kalimantan Timur perlu kiranya diketahui oleh semua pihak.

Karena dengan mengetahui hasil yang dicapai dan tantangan yang dihadapi di masa yang akan datang sangat merangsang kesadaran masyarakat bahwa upaya menjaga stabilitas kamtibmas adalah benar-benar menjadi tanggung jawab bersama.

#### KONDISI KALIMANTAN TIMUR

Kondisi Kalimantan Timur yang akan diuraikan dalam tulisan ini antara lain adalah :

##### 1. Aspek alamiahnya

a. Kalimantan Timur dengan luas wilayah

211.440 Km<sup>2</sup>, suhu udara berkisar antara 24 s/d 32 derajat Celcius dan dengan hutan tropisnya yang selalu menjadi perhatian dunia, akan selalu dihadapkan pada adanya kerawanan di bidang pengelolaan hasil hutan. Lebih-lebih lagi sebagai daerah yang berbatasan dengan negara lain dan dengan pantai panjang (500 mil) yang terbuka, memerlukan kewaspadaan tersendiri di bidang kegiatan lintas batas serta penyelundupan baik yang melalui daratan maupun perairan.

b. Perbandingan antara luas wilayah dan jumlah penduduk yang tercatat  $\pm$  1,8 juta jiwa (rata-rata pertumbuhan 7%) menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk di Kalimantan Timur relatif masih rendah. Tingginya angka rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh tingginya tingkat kelahiran, melainkan oleh tingginya laju/ arus perpindahan (migrasi) dari daerah luar Kalimantan Timur. Keadaan tersebut adalah wajar, karena memang ada faktor lain yang mendorongnya yaitu banyaknya pengembangan daerah industri yang mengundang hadirnya para investor maupun pencari kerja yang kadang-kadang mengakibatkan munculnya konflik sosial di bidang ketenaga kerjaan.

c. Pengelolaan sumber daya alam baik yang berskala kecil maupun besar cukup berkembang secara pesat karena memang kekayaan alam yang berupa bahan tambang dan hasil hutan yang ada sangat mendukung. Pengembangan teknologi industri yang senantiasa menuntut persyaratan kemampuan khusus, kadang-kadang merupakan permasalahan tersendiri di daerah ini khususnya di bidang tenaga kerja. Untuk mendapatkan tenaga kerja lokal yang berasal dari penduduk setempat yang usianya cukup produktif selalu dihadapkan pada masih rendahnya tingkat kemampuan yang dipersyaratkan oleh penerima tenaga kerja.

## 2. Aspek Sosial

Aspek sosial yang perlu ditonjolkan dalam tulisan ini kiranya cukup dibatasi pada uraian tentang keadaan sosial ekonomi dan keadaan kamtibmasnya.

### a. Sosial ekonomi

1) Perkembangan perekonomian di Kalimantan Timur saat ini cukup menggembirakan, hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya wilayah usaha perdagangan di setiap kota besar yang ada di Kalimantan Timur.

2) Tingkat pendapatan penduduk relatif masih rendah bila dibandingkan dengan tingginya tingkat biaya hidup yang dihadapi masyarakat di daerah ini. Keadaan tersebut disebabkan oleh kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok masih tergantung pada daerah lain, karena pengembangan produksi sembilan bahan pokok di Kalimantan Timur biayanya relatif tinggi dibanding dengan daerah lain.

3) Intensifikasi bidang pertanian yang memerlukan biaya tinggi masih merupakan salah satu kendala yang dihadapi para transmigran yang berasal dari daerah yang tanahnya subur.

### b. Keadaan Kamtibmas

1) Keamanan dan ketertiban masyarakat Kalimantan Timur sampai saat ini dirasakan cukup mantap bagi menunjang terlaksananya pembangunan di daerah ini. Guna menjaga kesinambungan pembangunan dikaitkan dengan kondisi daerah dan program industrialisasi perlu adanya upaya penanggulangan terhadap berbagai bentuk gangguan kamtibmas secara optimal.

Bentuk dan kualitas gangguan kamtibmas yang dipengaruhi oleh ciri dan kondisi alamiah Kalimantan Timur yang cukup potensial diantaranya adalah :

- a) Kebakaran
- b) Kecelakaan laut dan sungai
- c) Pelanggaran lintas batas
- d) Sengketa tanah
- e) Penyelundupan
- f) Pencurian hasil hutan
- g) Ketenaga kerjaan
- h) Uang palsu, pemalsuan dll.

2) Perkembangan kriminalitas dan gangguan kamtibmas lain yang terjadi akhir-akhir ini dapat digambarkan :

a) Crime Total, Crime Rate, Crime Clearance dan Clearance Rate

Tahun	C.T	C.R	C.C	CL. RATE (%)
1986	4.684	271,91	2.578	55,04
1987	4.749	259,95	2.890	60,85
1988	4.978	310,33	3.114	62,56
1989	5.378	317,75	3.743	68,67
1990	4.545	268,53	2.968	65,30

b) Gangguan kamtibmas yang menonjol ( 3 tahun terakhir )

Jenis gangguan	Jumlah kejadian
Kebakaran	627 (selama 5 th terakhir)
Laka.laut/sungai	125 (selama 3 th terakhir)
Laka. Lintas	4.596 (selama 5 th terakhir)
Laka. kerja	66 (selama 3 th terakhir)
Laka. pesawat	6 (selama 3 th terakhir)

c) Bentuk/jenis kriminalitas (Crime patern) yang ada, sepuluh diantaranya adalah :

- (1) Pencurian berat
- (2) Penganiayaan
- (3) Penipuan
- (4) Penggelapan
- (5) Perjudian
- (6) Kebakaran/pembakaran
- (7) Pengrusakan
- (8) Pencurian dengan kekerasan
- (9) Pemerasan
- (10) Pencurian ringan



Salah satu hasil operasi terhadap penebangan hutan secara liar.

## EKSISTENSI POLDA KALIMANTAN TIMUR

Keberadaan (eksistensi) Polri di daerah Kalimantan Timur dalam memerankan diri sebagai pembina kamtibmas di daerah keberhasilannya akan dapat dilihat melalui kondisinya saat ini, upaya-upaya yang ditempuh dalam kegiatan pembinaan maupun operasional serta hasil nyata yang telah diraihinya.

### 1. Kondisi Polda Kaltim

#### a. Personil

1) Jumlah personil Polda Kaltim (s/d April 1991) dibandingkan dengan jumlah penduduk dan wilayah tugas adalah :

- Polri : 4.700 orang
- Penduduk : ± 1,8 juta (1 Polri: 383 penduduk).
- Wil. tugas : 211.440 Km<sup>2</sup> (1 Polri untuk 45 Km<sup>2</sup>).

2) Penambahan kekuatan rata-rata pertahun selama lima tahun terakhir adalah 180 personil (4,42%).

#### b. Fasilitas Markas dan Rumah Dinas

1) Markas Kesatuan Polda maupun Polres sampai saat ini pada umumnya belum memenuhi standart yang diharapkan.

2) Rumah dinas yang tersedia baru mampu menampung 35% dari kekuatan personil yang ada.

#### c. Sarana pendukung operasional

Kondisi geografis Kalimantan Timur yang ditandai oleh wilayah hutan yang luas, perairan pantai yang panjang dan perairan pedalaman (perairan dalam) yang merata ada di setiap jajaran kewilayahan Polda Kaltim masih sangat memerlukan sarana angkutan air yang memadai.

### 2. Upaya-upaya Kesatuan

Berbagai upaya kesatuan yang telah dan sedang dilaksanakan dalam rangka memantapkan peran sebagai pembina kamtibmas di daerah dapat dilihat pada penonjolan kegiatan baik yang bersifat pembinaan maupun operasional kesatuan.

### a. Pembinaan Kesatuan

Kegiatan pembinaan yang dilakukan Polda Kaltim tetap dititik beratkan pada dua aspek yang satu sama lain saling menunjang yaitu peningkatan kesejahteraan prajurit bagi memacu semangat pengabdian dan memupuk jiwa korsa, peningkatan profesionalisme bagi memacu keberhasilan tugas.

Peningkatan kesejahteraan, antara lain :

a) Pemasangan instalasi listrik atas partisipasi masyarakat untuk Markas Polres dan Asrama (Gambar 15).

b) Pengaspalan jalan dalam kompleks / asrama (Gambar 28).

c) Pembuatan barak bujangan dengan daya tampung 40 anggota secara swadaya anggota dan partisipasi masyarakat (Gambar 17).

d) Peningkatan gizi keluarga melalui pengembangan peternakan itik dan ikan (Gambar 25).



*Pembuatan jalan di asrama (hasil Parmas)*

e) Pembangunan sarana pribadatan (Masjid) melalui partisipasi masyarakat dan swadaya anggota (Gambar 31).

f) Pencarian dan penyediaan lahan baik melalui koordinasi lintas sektoral maupun partisipasi masyarakat (hibah) bagi menunjang pengembangan kesatuan (dari 76 Polsek menjadi 78 Polsek).

g) Dan lain-lain.



*Peragaan hasil pemantapan Sat Brimob bagi kesiagaan Kesatuan dalam menghadapi kejahatan intensitas tinggi dan bantuan SAR.*

Peningkatan profesionalisme, antara lain :

- a) Penyelenggaraan pendidikan / latihan Bintara Sandi lokal.
- b) Penataran bidang Keimigrasian
- c) Pelatihan/penataran calon Ba Bin Kamtibmas.
- d) Penugasan belajar calon paramedis.



*Pembuatan kolam ikan bagi kesejahteraan anggota*

### b. Bidang Operasional

Kegiatan-kegiatan operasional baik yang bersifat bimbingan masyarakat, pencegahan

gangguan kamtibmas maupun penegakan hukum serta tugas-tugas kekaryaan dan Bhakti ABRI dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Yang bersifat bimbingan masyarakat antara lain :

a) Kerjasama antara Kapolda Kaltim dan Gubernur Kepala Daerah Tk-I Kaltim dibidang pembinaan Pos Kamling terpadu (Gambar 3,4).

b) Safari pembinaan Satpam melalui program rapat koordinasi berkala dengan tempat dan penyelenggaranya secara bergilir antara instansi pengguna Satpam.

c) Pemberian pelayanan penyelenggaraan pendidikan atau pelatihan bagi kekuatan kamtibmas binaan Polri (Satpam, PPNS) dan seleksi kesamaptaan terhadap calon karyawan instansi.

d) Pemasyarakatan penggunaan alat pemadam kebakaran tradisional.

2) Yang bersifat penanggulangan gangguan kamtibmas, antara lain :

a) Pemasyarakatan pola pembangunan IPK dikalangan anggota Polri dan contoh pengoperasiannya (Gambar 6,7).

b) Mengefektifkan peran Pamen kontrol dalam memantau kesiagaan satuan bawah.

c) Memantapkan sistem BKO Sat Brimob bagi daerah-daerah perbatasan yang rawan.

d) Pemantapan KP3 Udara bagi menghadapi pengembangan Bandara Sepinggan di Balikpapan.

3) Yang bersifat penegakan hukum, antara lain :

a) Pencegahan pelanggaran lintas batas melalui koordinasi dengan satuan-satuan Kepolisian negara tetangga.

b) Penangkapan imigran gelap bersama-sama dinas imigrasi setempat.

c) Penindakan tugas terhadap penebangan hutan secara liar baik secara mandiri maupun ikatan team TKPH. (Gambar 35).

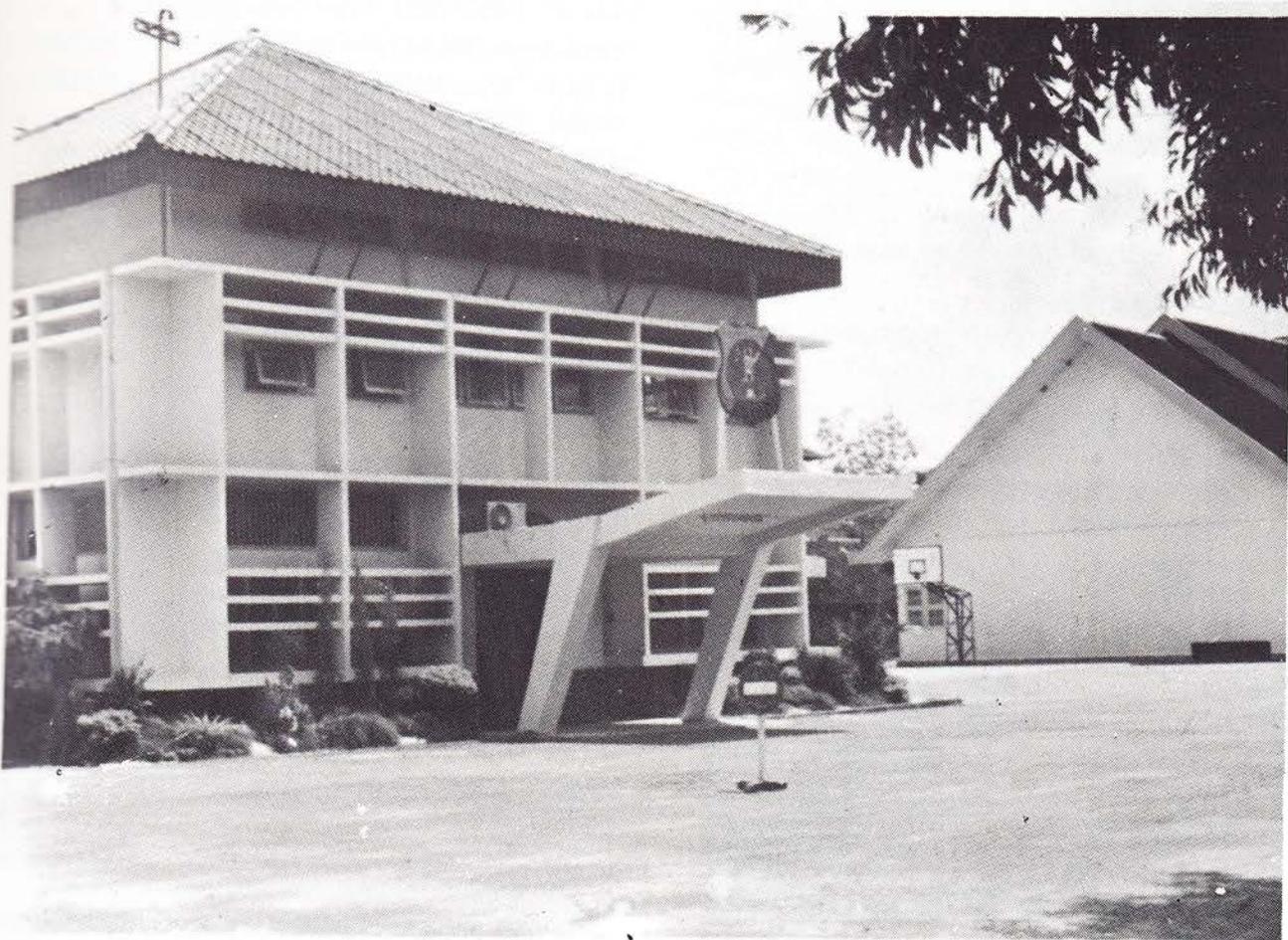
## Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH

Polda Kalselteng mempunyai wilayah meliputi Propinsi Kalimantan Selatan dan Propinsi Kalimantan Tengah. Jumlah penduduk kedua Propinsi tersebut pada akhir 1988 saja sebanyak 3.704.621 jiwa, sekarang tentu lebih dari itu.

Luas wilayah Polda Kalselteng adalah nomor tiga setelah Polda Irja dan Polda Kaltim, yaitu seluas 190.785 Km<sup>2</sup>, dengan kepadatan penduduk rata-rata 20 orang/Km<sup>2</sup>. Dibanding Propinsi Kalimantan Tengah dengan luas 153.800 Km<sup>2</sup>, Propinsi Kalimantan Selatan memiliki penduduk lebih padat dengan luas wilayah hanya 36.985 Km<sup>2</sup>.

Salah satu problem yang dihadapi Polri di daerah ini adalah terpecahnya penduduk yang berjauhan dipedalaman, dengan kondisi alam berhutan lebat, rawa-rawa dan jalan darat yang masih terbatas, sehingga menyulitkan transportasi untuk menjangkau mereka. Untuk ke pedalaman Kalimantan, umumnya hanya menggunakan perahu melalui sungai-sungai yang memakan waktu cukup lama.

Polda Kalselteng mempunyai kekuatan 5.406 orang anggota yang bertugas pada : 156 buah Polsek, termasuk sebuah KPPP; 16 Polres, termasuk sebuah Polresta; dan sebuah



Markas Polda Kalselteng di Jln. D.I. Panjaitan 37 Banjarmasin

Polwil yang berkedudukan di Palangka Raya Jl. Cilik Riwut, ibu kota Propinsi Kalimantan Tengah.

Adapun Polres-Polresnya adalah sebagai berikut :

Polresta Banjarmasin di Jl. Jenderal A. Yani; Polres Banjar di Jl. Jenderal A. Yani Km. 38; Polres Hulu Sungai Selatan di Kandangan; Polres Hulu Sungai Tengah di Barabai; Polres Hulu Sungai Utara di Amuntai; Polres Pulau laut di Kotabaru; Polres Tabalong di Tanjung; Polres Tapin di Rantau; Polres Tanah Laut di Pleihari; Polres Barito di Marabahan; Polres Palangkaraya di Palangkaraya; Polres Kuala Kapuas di Kuala Kapuas; Polres Barito selatan di Buntok; Polres Barito Utara di Muaratewe; Polresta Waringin Timur di Sampit; Polresta Waringin Barat di Pangkalan Bun.

### SITUASI KAMTIBMAS

Situasi Kamtibmas di Polda Kalselteng umumnya mantap dan cukup terkendali dalam menunjang gerak laju pembangunan didaerah ini. Namun demikian guna menjaga kesinambungan pembangunan dikaitkan dengan kondisi daerah dan program industrialisasi maka perlu adanya peningkatan upaya penanggulangan terhadap berbagai bentuk gangguan Kamtibmas yang ada.

Gangguan Kamtibmas yang cukup potensial terutama yang dipengaruhi oleh ciri dan kondisi alamiah Kalselteng antara lain :

- kebakaran
- kecelakaan sungai dan laut
- sengketa tanah
- pencurian hasil hutan, dan lain-lain.

Disamping itu terdapat berbagai kejahatan yang menonjol, diantaranya adalah :

- Pencurian Berat
- Penganiayaan
- Penipuan
- Penggelapan
- Perjudian
- Kebakaran/pembakaran
- Pengrusakan
- Pencurian dengan kekerasan

- Pemerasan
- Pencurian ringan, dan lain-lain.

Melihat perbandingan jumlah penduduk dengan kekuatan anggota Polri yang ada di Polda Kalselteng, berarti 1 orang anggota Polri harus melayani 685 orang masyarakat. Kenyataan lain ialah luasnya wilayah, dan terpencarnya penduduk dalam jumlah yang kecil dipedalaman, disamping transportasi yang sulit.

Semua kenyataan diatas merupakan tantangan berat yang harus dihadapi dan diatasi oleh Polri daerah ini dalam membina Kamtibmas.

### PEMBINAAN SUMBER DAYA

a. Yang mengarah kepada peningkatan profesionalisme dilakukan berbagai upaya antara lain :

1) Dengan mempedomani Rumusan Tugas Polri tahun 1990/1991 dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis serta penilaian bentuk ancaman Kamtibmas yang mungkin terjadi di wilayah hukum Polda Kalselteng, maka salah satu upaya yang dilaksanakan dari waktu ke waktu adalah :



*Satu peleton anggota Sat Brimob Dit Samapta Polda Kalselteng mendapat tugas operasi penumpasan GPK di Aceh. Tampak mereka naik pesawat yang mengangkutnya dari Bandara Syamsudin Noor.*

(1) Membangun kekuatan Polri jajaran Polda Kalselteng dengan titik berat pada peman-tapan fungsi operasional yang didukung dengan kemampuan yang handal dari setiap

anggota Polri baik secara individu maupun secara kelompok/satuan.

(2) Melaksanakan pembangunan Kekuatan Personil untuk mencapai sasaran Tahun Kedua Renstra IV Polda Kalselteng.

(3) Mengembangkan sistem dan Methode guna mencapai efektivitas prosedur dan mekanisme kerja dibidang operasional dan pembinaan.

(4) Menciptakan kemampuan baru, yaitu kemampuan untuk mewujudkan kemampuan Polri dalam batas sumber daya yang tersedia atau dapat disediakan, guna menunjang pelaksanaan tugas pokok Polri. Oleh karena itu peningkatan kemampuan Polri di jajaran Polda Kalselteng akan senantiasa diwujudkan bukan dalam bentuk pemekaran kekuatan akan tetapi dalam bentuk peningkatan profesionalisme, yang mampu mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi agar pada gilirannya memiliki kemampuan yang handal didalam menanggulangi berbagai bentuk ancaman dengan menggunakan kekuatan yang ada dengan ditunjang efektivitas peralatan serta pemantapan teknik manajemen Polri.

(5) Dalam kebijaksanaan dibidang personil dan profesionalisme tetap mengacu pada kebijaksanaan Pimpinan ABRI/Polri yang pembinaannya dilaksanakan baik secara horisontal maupun vertikal, dengan memperhatikan :

- Jiwa kejuangan
- Performance
- Kemampuan profesional
- Jenjang pendidikan
- Jenjang dan standarisasi jabatan
- Keharmonisan kehidupan keluarga.

Disadari bahwa penampilan seorang prajurit ABRI/Polri akan dinilai dari kadar ketegasannya, kesederhanaannya, disiplinnya yang kesemuanya itu tercermin dalam performancenya secara correct, memegang teguh hierarki dan tradisi.

**b. Pemantapan/perekayasaan sarana/prasarana yang tersedia dilakukan berbagai upaya antara lain :**

1) Dibidang pembinaan materiil, sarana/prasarana, vasilitas dan jasa diupayakan dengan memotivasi setiap anggota apapun pangkatnya agar merasa ikut memiliki setiap material atau peralatan atau sarana/prasarana yang dipertanggung jawabkan kepadanya.

2) Upaya pemanfaatan secara optimal sarana/prasarana yang tersedia pada dasarnya dilakukan melalui penertiban pelaksanaan administrasi material dengan senantiasa memedomani kebijaksanaan Pimpinan ABRI/Polri.

3) Pemanfaatan sarana/prasarana juga diarahkan untuk dapatnya mendukung penggunaan kekuatan yang tertuang dalam pola penggunaan kekuatan Kamtibmas dalam upaya penanggulangan terhadap gangguan stabilitas Kamtibmas yang pada hakikatnya merupakan upaya dan daya yang tak kenal menyerah disetiap gerak operasional Polri.

4) Sejalan dengan upaya-upaya tersebut diatas, dengan memperhatikan berbagai faktor keterbatasan sumber daya yang tersedia maupun yang potensial, untuk dapat menguasai situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, maka upaya penanggulangan terhadap setiap bentuk dan pola gangguan Kamtibmas tetap bertumpu atas dasar kemampuan seluruh lapisan masyarakat untuk secara swakarsa dan swadaya berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pembinaan Kamtibmas.



*Asrama Polri yang kondisinya sudah tua dimakan usia. Bangunan ini dibangun sekitar tahun 60-an, di kompleks Bina Brata, Jln. A. Yani Km. 4½ Banjarmasin.*

5) Setiap penggunaan material tidak terlepas dari prinsip efisiensi atau penghematan secara menyeluruh dan pengelolaannya pun dengan azas "Ambeg Parama Arta" yang ditetapkan disemua tingkat/unit kesatuan yang diarahkan kepada terciptanya peningkatan kemampuan dan kekuatan Polri sebagai prajurit pejuang dan pejuang prajurit yang profesional.

**c. Mendinamisasikan sumber daya yang ada untuk mendukung tugas-tugas Polri sbb. :**

1) Sarana utama dari pada upaya ini adalah terciptanya kualitas manusia (individu Polri) yang ditujukan agar semakin mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

2) Dalam rangka inilah strategi kebijaksanaan opdin yang dicanangkan oleh Pimpinan Polri untuk dapat mengacu pemantapan jiwa kejuangan, identitas dan kepribadian Polri serta terbentuknya kesatuan sikap dari seluruh perangkat organisasi Polda Kalselteng, sehingga timbul dorongan dari dalam untuk mendinamisasikan diri dan sumber daya yang ada serta mengoptimasikan seluruh potensi yang ada pada jajaran Polda Kalselteng.

3) Upaya untuk mewujudkan kemampuan Polri di jajaran Polda Kalselteng dalam batas sumber daya yang tersedia atau dapat disediakan serta menggunakan apa yang ada guna menunjang pelaksanaan tugas pokok Polri diwujudkan dalam bentuk pemekaran kekuatan dalam bentuk peningkatan profesionalisme, penyempurnaan strategi dan taktik yang mampu mengantisipasi berbagai bentuk ancaman dengan menggunakan kekuatan yang ada, efektivitas peralatan serta pemantapan teknik manajemen Polri.

**Mengenai upaya-upaya penggunaan kekuatan yang berupa operasi Rutin Kepolisian, Operasi Khusus Kepolisian baik yang terpusat maupun mandiri dengan segala keberhasilannya yang perlu ditonjolkan :**

1) Dengan meningkatkan pelaksanaan latihan-latihan fungsi teknis kepolisian guna meningkatkan kemampuan/keterampilan perorangan maupun satuan dalam upaya mendukung tugas

operasional kepolisian terutama didalam mengantisipasi pencapaian tingkat kemampuan di bidang taktik dan teknik penanggulangan jenis-jenis kejahatan tertentu, sesuai dengan pola kriminalitas di jajaran Polda Kalselteng, baik yang terpusat maupun yang mandiri di masing-masing kesatuan.

2) Memantapkan terus pelaksanaan latihan dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi-operasi khusus kepolisian baik di programkan Mabes Polri maupun operasi-operasi Khusus kewilayahan yang di programkan Polda Kalselteng.

**Permasalahan-permasalahan yang khas/khusus sesuai dengan keadaan dan budaya daerah yang menonjol dengan segala pemecahan dan penanganannya utamanya yang menyangkut Crime Total dan Crime Clearance :**

1) Meningkatkan kemampuan taktik dan teknis Reserse disemua tingkatan jajaran Polda Kalselteng melalui latihan-latihan yang intensif dan drill-drill secara berlanjut, terutama diarahkan untuk tercapainya kemampuan pengungkapan perkara terhadap 10 jenis kejahatan yang menonjol yang menjadi Crime Indeks di wilayah Polda Kalselteng, yang sekaligus dalam upaya menekan Crime Total dan Crime Clearance.

2) Melanjutkan pemantapan Unit-Unit Operasional Reserse agar mampu melakukan pemantauan dan penyergapan terhadap berbagai bentuk tindak pidana yang terjadi.

3) Mewujudkan kewaspadaan dan kesiap siagaan serta ketanggapan segenap jajaran Polda Kalselteng dalam menghadapi kontijensi gangguan kamtibmas khususnya yang menyangkut Crime Total dan Crime Clearance dengan meningkatkan deteksi dini terhadap setiap perkembangan situasi di wilayah Polda Kalselteng.

4) Menekan laju Crime Total, khususnya untuk jenis-jenis kejahatan tertentu yang ditetapkan sebagai Crime Indeks di wilayah Hukum Polda Kalselteng.



*Latihan Pemantapan Sat Brimob Dit Samapta Polda Kalselteng tahun 1990. Tampak Kapolda Kalselteng ketika memeriksa pasukan pada saat penutupan program latihan pemantapan.*

5) Meningkatkan bimbingan terhadap masyarakat dalam upaya menumbuhkan dan kepatuhan terhadap norma hukum serta norma-norma sosial lainnya dan sekaligus mengantisipasi kebijaksanaan-kebijaksanaan dari pada masyarakat membawa senjata tajam yang seakan-akan sebagai budaya daerah setempat.

**Upaya-upaya pembangunan IPK, antara lain kegiatan Babin Kamtibmas :**

1) Mengupayakan pengarahannya potensi-potensi masyarakat dengan memantapkan pemanfaatan mekanisme IPK (Infra Struktur Penanggulangan Kriminalitas) diwilayah Polda Kalselteng.

2) Pembinaan 4 jalur sosial ABRI, Kampus/Cendekiawan, Enterpreneur dan agama dalam rangka Binkamtibmas.

3) Meningkatkan daya tangkal dan daya cegah masyarakat dalam rangka membangun IPK untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang timbul yang dapat mengganggu existensi kehidupan masyarakat.

4) Pembinaan integrasi siskamling dalam wadah LKMD dalam rangka pemantapan pelaksanaan siskamling serta melaksanakan lomba Kamtibmas seluruh jajaran Polda Kalselteng.

5) Penyuluhan terhadap Remaja, Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa serta pembinaan terhadap Remaja Bhayangkara Club (RBC) dan Patroli Keamanan Sekolah.

## Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) SULAWESI SELATAN DAN TENGGARA

Daerah hukum Polisi Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara, disingkat Polda Sulselra meliputi 2 Propinsi, yaitu Propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Sulawesi Tenggara. Luas kedua Propinsi mencapai 100.622 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sekitar 8.586.033 pada akhir tahun 1988.

Polda Sulselra yang bermarkas di Jl. Jenderal A. Yani 9, Ujung Pandang memiliki 5 Polwil; 28 Polres; dan 214 Polsek yang terdiri dari

10 Polsektif B, 5 Polsektif C, 1 Polsek Standard A, 2 Polsek Standard B, 195 Polsek Standard C, dan 1 KPPP.

Ke 5 Polwil yang ada masing-masing: Polwil Ujung Pandang di Jl. Sultan Hasanuddin 3, Ujung Pandang; Polwil Pare-Pare di Pare-Pare; Polwil Palopo di Palopo; Polwil Bone di Watampone; dan Polwil Kendari di Kendari.

Sedangkan Polresnya adalah : Poltabes Ujung Pandang, Polres Goa di Sungguminasa,



MARKAS POLDA SULSELRA



Kapolri ketika berkunjung ke Polres Bulukumba, memperhatikan papan nama anggota.

nal security) khususnya terhadap penyusupan Eka/Eki dan G.30.S/PKI kedalam tubuh Polri, serta kerawanan-kerawanan dibidang personil, materil dan operasi-operasi kepolisian baik operasi khusus maupun rutin yang dilaksanakan Polda Sulsel serta melaksanakan operasi bersih sesuai petunjuk pimpinan.

Bidang Reserse, dibidang penegakan Hukum setiap 3 (tiga) bulan sekali didalam rapat koordinasi antara penegak hukum guna membahas masalah-masalah yang dihadapi.

Bidang Samapta, penggunaan tenaga Brimob dalam penanganan kriminal berintensitas tinggi di dalam nem Back-Up operasi khusus, disamping tugas lain seperti Sar, Pam, penggunaan tenaga dan fasilitas Sabhara dan PJR sesuai tugas pokoknya diarahkan untuk nem Back-Up operasi rutin dan penanganan tipiring.

Bidang lintas, melaksanakan Dikmas lintas terhadap remaja/pelajar/mahasiswa maupun masyarakat. Melaksanakan kegiatan terjawali, penanganan penyelesaian kasus laka lintas dan perekayasaan lintas lainnya.

Bidang Bimmas, mengadakan pembinaan kamtibmas dalam bentuk siskamling, Satpam/ penertiban agen penjualan SDSB, pembinaan remaja/Pramuka, mengantisipasi pembangunan industri pariwisata dan melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi dengan instansi terkait,

menyusun piranti lunak, mendidik Bintara Pariwisata.

#### – Operasi Khusus Kepolisian

Mulai tanggal 1 April s/d 30 April 1991 telah dilaksanakan operasi khusus kepolisian antara lain :

Operasi Manasik – 90 melalui 2 tahap yaitu tahap embarkasih (24 Mei s/d 24 Juni 1990) tahap Debarkasih (6 Juli s/d 6 Agustus 1990) operasi bersifat mandiri kewilayahan.

Operasi Ketupat Hasanuddin 1990 (29 Maret s/d 28 April 1990) bersifat mandiri kewilayahan dengan sasaran Pam, Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Operasi Mandiri tib lintas (1 s/d 16 Juli 1990) dengan sasaran Ranmor, Becak.

Operasi Patuh Lilin-90 (22 Desember 1990 s/d 19 Pebruari 1991) dengan sasaran kasus tabrak lari, Ruas jalan rawan pada 9 Satwil.

#### – Rencana Pam Pemilu 1992

Sasaran, secara umum menjamin keamanan seluruh pelaksanaan kegiatan pemilu dalam pra pemilu, pelaksanaan pemilu, purna pemilu 1992 serta Sidang MPR 93 agar dapat terselenggara dengan aman, tertib, lancar sesuai rencana.

### PERMASALAHAN KHAS / KHUSUS

a. Faktor Sosial budaya yang berpengaruh terhadap gangguan Kamtibmas disebabkan oleh :

– Penyesuaian diri atau adaptasi terhadap penggunaan tehnologi yang membawa pergeseran nilai didalam tata kehidupan masyarakat, lingkungan keluarga, sekolah, kampus, kurang efektif ditinjau dari peranannya sebagai institusi atau lembaga penegak norma-norma ketertiban.

– Adat kebiasaan penduduk, khususnya masyarakat Bugis dan Makasar ialah kebiasaan membekali/mempersenjatai dirinya dengan membawa senjata tajam berupa Badik bila berpergian keluar rumah.

Masalah "Siri" (mempertahankan harkat harga diri rasa malu/dipermalukan terutama dalam hal :

Menghina orang dimuka umum  
Menampar muka didepan umum  
Menggangu wanita/Isteri orang  
Menghamili wanita diluar pernikahan  
Membawa lari wanita/Isteri orang lain (Silariang).

b. Faktor Pendidikan, banyaknya lulusan SLTA, Perguruan Tinggi yang belum memperoleh pekerjaan.

c. Masalah penyakit masyarakat seperti perjudian/sabung ayam masih sulit diberantas, karena masih erat kaitannya dengan adat istiadat daerah tertentu.

d. Masalah minuman keras (Ballo) dan prostitusi gelap cukup berkembang walaupun secara jelas Daerah ini tidak ada lokalisasi WTS.

e. Faktor psikologis emosional penduduk asli terhadap WNI terutama Asing (Cina), didukung oleh adanya rasa solidaritas kesukuan yang masih tinggi, serta perbedaan sosial ekonomi, merangsang timbulnya rasa antipati (Sara) perlu diwaspadai.

### SITUASI KAMTIBMAS / PARMAS

#### a. Situasi Kamtibmas Periode 1986 s/d Mei 1991

Untuk mengamati dan mengetahui pelaksanaan tugas Polda Sulselra, berikut ini disampaikan situasi kamtibmas periode tahun 1986 s/d Mei 1991 yang meliputi bidang kriminalitas, kecelakaan lalu lintas dan partisipasi masyarakat sebagai berikut :

No.	Tahun	Jml Kasus/lapor	Selesai	%	Ket.
1.	1986	12.571	6.759	54.05%	Januari s/d Mei 1991
2.	1987	11.784	7.473	62.93%	
3.	1988	9.588	6.277	65.46%	
4.	1989	10.453	7.023	67.18%	
5.	1990	8.929	5.455	61.09%	
6.	1991	4.005	2.426	60.57%	

#### Data Kriminalitas

Melihat dari tabel tersebut diatas, maka

terlihat jumlah kasus dari tahun ke tahun, (1986—1991) menunjuk penurunan yang cukup menggembirakan, termasuk dengan penyelesaian perkara yang rata-rata pertahun mulai tahun 1986 s/d 1990 sebesar : 62,14%, sedangkan kasus tahun 1991 (Januari s/d Mei 1991) : 60,57%.

#### Data Laka Lintas

No.	Tahun	Jml Laka Lintas	MD	LB	LR	Ket.
1.	1986	2.786	539	1.163	1.907	Januari s/d Mei 1991
2.	1987	2.582	692	1.263	1.904	
3.	1988	2.392	656	864	1.969	
4.	1989	2.224	677	1.745	1.745	
5.	1990	2.247	670	1.192	1.408	
6.	1991	688	258	381	583	

Untuk data kecelakaan lalu lintas selama periode tersebut diatas, jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi juga menunjukkan penurunan yang relatif baik, namun demikian korban yang meninggal dunia ada peningkatan sedikit, hal tersebut diperkirakan karena adanya kemajuan-kemajuan dan mobilitas yang cukup besar dari tahun ketahun, hal ini tentunya masih diupayakan adanya peningkatan dan pembinaan kesadaran tertib dan sopan santun di jalan raya atau kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas lainnya, sedangkan untuk korban luka beratpun demikian, hanya pada tahun 1988 menurun, yaitu terdata 864 korban luka berat dan tahun berikutnya relatif naik sedikit, tetapi untuk korban luka ringan menunjukkan penurunan yang cukup menggembirakan.

Dari data-data periode tersebut diatas, maka secara keseluruhan kondisi kecelakaan lalu lintas dan pengendalian serta penanganan oleh pihak kepolisian Polda Sulselra, masih menunjukkan situasi yang terkendali dan berlangsung lancar, aman dan tertib.

#### b. Partisipasi masyarakat (Parmas)

Partisipasi masyarakat terhadap kamtibmas, hubungan kerjasama yang harmonis dan adanya

saling pengertian serta saling hormat menghormati antara masyarakat dan Polri, semakin menunjukkan suatu kenyataan yang menggembarakan. Partisipasi masyarakat tersebut tidak saja terwujud dalam bentuk moril dan fisik, namun juga materil seperti bangunan-bangunan dan peralatan kelengkapan kantor lainnya yang dilaksanakan secara swadaya dan swakarsa meliputi :



Kapolda Sulseira bersama Ny. Win Soedjatmiko anjangan ke rumah jompo "Theodora dan Panti Asuhan Al-Hidayah".

— Bangunan-bangunan yang dibangun secara swadaya adalah :

- 1) Satu Unit Mapolsek : Polsek Tempe (Wajo)
- 2) Polres Kolaka: Aspol 200 M2, Pagar Mapolres 300 M, Gudang 12 M2, 1 Unit WC 24 M2
- 3) Penyelesaian satu buah Mesjid Mapolda ukuran 248 M2.
- 4) Kantor Sat Lantas, Polres Bone ukuran, 210 M2, Renov Toko Bhayangkari, Renov Polsek Tanete Riattang Lapangan Volley.
- 5) Renovasi ruangan auditorium Mapolda I.
- 6) Renovasi ruangan ADC Kapolda.
- 7) Bangunan Polsek Latihan di SPN Batua.
- 8) Pengaspalan jalan/pekarangan Mapolda I seluas 3200 M2 senilai Rp. 17.310.392,—
- 9) Satu ruangan Komputer Srena Polda.
- 10) Pembuatan ruangan Perpustakaan Polda Sulseira.
- 11) Polres Luwu: Ruang/gedung pertemuan permanen dengan ukuran 15 - 21 M dan Mako 187 M2.
- 12) Polres Maros: 5 Pintu Rumdin, 16 kamar WC Aspol, satu gudang beras, pompa air

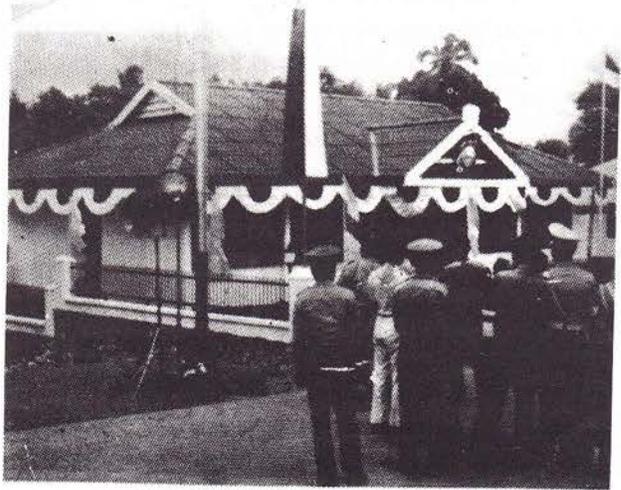
rutan, Rehab gudang Senpi/Aula/TK/Rumah jabatan Kapolres.

- 13) Polres Sidrap: Mesjid dan pagar Aspol/Kapolres.
- 14) Polres Pangkep: Perluasan Mesjid 286 M2, Mushola 16 M2.
- 15) Polres Soppeng: Mako 54 M2, Pospol 54 M2, Lapangan Tennes, Pagar Mapolres.
- 16) Polres Takalar: Mako 36 M2, Rumdin 32M2, Pagar Polres 125 M, Taman Mapolres dan Pos Yandu.
- 17) Polres Bantaeng : Ruang penjagaan.
- 18) Polres Bulukumba: Mako 308 M2, Rehab Rumdin, Aula 123 M2, Aspol 16 M2, Kantor Bhayangkari 32 M2, TK 204 M2, WC 21 M2.
- 19) Polres Jeneponto : Kantor Bhayangkari 18 M2, WC 6 kamar, Pengaspalan Mapolres, Rehab Rumjab KA.
- 20) Polres Selayar: Mako 72 M2, Rumdin 96 M2, Kantor Bhayangkari 72 M2, TK 105 M2, 1 Polsek 224 M2.
- 21) Polres Pare-Pare : Koperasi 61 M2.
- 22) Polres Barru : Rehab Rumjab KA.
- 23) Polres Pinrang: 10 kamar WC, Rehab Mapolres, Pagar TK.
- 24) Polres Majene: Koperasi 25 M2, TK 70 M2, Pagar 96 M, Rehab Lapangan Tennis.
- 25) Polres Polmas: Rehab Mako/Aula/Aspol Kantor Bhayangkari, Pagar 22 M, Jembatan 10 x 3 M.
- 26) Polres Mamuju : Rehab Runjam KA.
- 27) Polres Tator : Rehab Aula.
- 28) Polres Enrekang: TK 24 M2, Gudang 24 M2.
- 29) Polres Soppeng: Mako 54 M2, Pospol 54 M2, Ruang jaga, Pagar Mapolres, Lapangan Tennis.
- 30) Polres Sinjai: Mako 90 M2, Pagar 37 M, Rehab Rumdis/Aula.
- 31) Polres Buton : Koperasi 80 M2, Mako 750 M2, Garasi Mobil 160 M2; Polsek 75 — 45 M = 3.375 M2.

— Pengadaan secara swadaya sebagai berikut :

- 1) Kursi untuk Aula Mapolda II dan Kadenma sebanyak : 480 buah.

- 2) Tiga Unit AC untuk Mapolda II.
- 3) Ranmor Roda 4 sebanyak 5 buah untuk Sat Lantas dan Sabhara Poltabes.
- 4) Meubelair satu unit untuk Polsek Tempe (Wajo)
- 5) Kursi Lipat untuk SPN Batua: 500 buah.
- 6) Kursi Lipat untuk Polwil Ujung Pandang : 50 buah.
- 7) Kursi Lipat untuk Polwil Bone : 150 buah.
- 8) Kursi Lipat untuk Polwil Palopo: 150 buah.
- 9) Kursi Lipat untuk Polwil Pare-pare: 150 buah.
- 10) Meja tulis sebanyak 45 buah untuk Denma, Auditorium dan Rupasama Polda.



*Gedung baru Polsek Tempe Wojo saat upacara peresmian Gedung merupakan hasil Swadaya dan bantuan Pemda.*

## Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) SULAWESI UTARA DAN TENGAH

Polda Sulawesi Utara dan Tengah, disingkat Sulutteng mempunyai wilayah meliputi 2 Propinsi, yaitu Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Sulawesi Tengah. Bentuk wilayahnya melukliku, mulai dari Timur Laut menjulur ke Barat Daya, membelok ke Barat, kemudian membelok lagi ke Selatan dan semakin melebar, seterusnya menyimpang ke Timur Laut lagi dan ke Tenggara.

Hampir seluruh Sulawesi Utara dan Tengah dikelilingi laut kecuali sebelah Selatan yang berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Sulawesi Tenggara, di Utara ber-

batasan dengan negara Philipina.

Polda Sulutteng menguasai wilayah seluas 85.819 Km<sup>2</sup> dengan penduduk pada tahun 1988 sebanyak 4.147.605 jiwa, dengan demikian rata-rata 1 Km<sup>2</sup> dihuni oleh 48 jiwa penduduk.

Kekuatan Polda Sulutteng sebanyak 6.143 anggota Polri. Dibandingkan dengan jumlah penduduk maka 1 orang anggota Polri melayani 675 orang penduduk.

Polda Sulutteng mempunyai 1 Polwil dengan wilayahnya meliputi Propinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan di Jalan S. Ratulangi 76 Palu;



*Markas Polda Sulutteng*

10 Polres, termasuk 2 Polresta; 146 Polsek yang terdiri dari 5 Polsektif B, 5 Polsektif C, 9 Sekta, 2 KPPP dan 115 Polsek Standard.

Adapun Polres-Polres tersebut adalah: Polresta Manado di Manado, Polresta Gorontalo di Gorontalo, Polres Minahasa di Tondano, Polres Sangihe Talaud di Tahuna, Polres Bolaang Mangondow di Kotamobagu, Polres Gorontalo di Limboto, Polres Donggala di Palu, Polres Buol Toli-Toli di Toli-Toli, Polres Poso di Poso, dan Polres Luwuk Banggai di Poso.

Sedangkan Markas Polda Sulutteng sendiri beralamat di Jl. Bethesda 62, Manado.

#### UPAYA-UPAYA YANG BERKAITAN DENGAN BINKUAT

1. Peningkatan Profesionalisme dilakukan antara lain melalui :

##### a. Latihan-Latihan, yaitu :

- Latihan Rutin pengembangan Beladiri Polri tanggal 22 Agustus 1988 s/d 4 September 1988.
- Latihan Ops Balak, peserta 48 orang tanggal 14 Desember 1989 s/d 19 Desember 1989.
- Latihan Babin Kamtibmas, peserta 87 orang tanggal 8 Maret 1990 s/d 22 Maret 1990.
- Latihan Ops Sus Kewilayahan Lancar 90 Sam Rat peserta 59 orang, tanggal 25 Oktober 1990 s/d 3 Maret 1991.
- Latihan Ops Sus Tindak Pidana Hak Cipta, peserta 24 orang tanggal 2 Nopember 1990 s/d 3 Nopember 1990.
- Latihan Mengemudi, peserta 48 orang, tanggal 30 Maret 1991 s/d 8 April 1991.



Penyerahan HT dari Dirut Merpati kepada Kapolda Sulutteng di ruang Opsroom Mapolda

*b. Penataran, yaitu :*

- Penataran Unit Opsnal Reserse/Intel, peserta 33 orang tanggal 22 Agustus 1988 s/d 27 Agustus 1988.
- Penataran Unit Opsnal Lantas/Sabhara, peserta 31 orang tanggal 5 September 1988 s/d 10 September 1988.
- Penataran Tutor, peserta 9 orang tanggal 26 Oktober 1989 s/d 29 Oktober 1989.
- Penataran Gadik, peserta 80 orang tanggal 25 Juni 1990 s/d 30 Juni 1990.
- Penataran Kapolsek, peserta 72 orang tanggal 20 Agustus 1990 s/d 25 Agustus 1990.
- Penataran BA Sandi Lokal, peserta 24 orang tanggal 5 Nopember 1990 s/d 16 Nopember 1990.
- Penataran BA Pam Pariwisata, peserta 35 orang di SPN Batua Ujung Pandang tanggal 5 Januari 1991 s/d 5 Maret 1991.

*c. Pendidikan Kejuruan, yaitu :*

- Dikjur Intel bagi :
  - PAMEN : 1 orang
  - PAMA : 14 orang
  - BINTARA : 48 orang
- Dikjur Reserse bagi :
  - PAMEN : 2 orang
  - PAMA : 67 orang
  - BINTARA : 130 orang
- Dikjur Sabhara bagi :
  - PAMA : 5 orang
  - BINTARA : 56 orang
- Dikjur Lantas bagi :
  - PAMEN : 1 orang
  - PAMA : 43 orang
  - BINTARA : 30 orang
- Dikjur Binmas bagi :
  - PAMEN : 1 orang
  - PAMA : 8 orang
  - BINTARA : 24 orang
- Dikjur Polair bagi :
  - BINTARA : 13 orang
  - TAMTAMA : 19 orang

- Dikjur Puskodal Ops bagi :
  - PAMA : 2 orang
  - BINTARA : 9 orang
- Dikjur Brimob bagi :
  - PAMA : 2 orang
- Dikjur Non Opsnal bagi :
  - PAMEN : 17 orang
  - PAMA : 55 orang
  - BINTARA : 172 orang
  - TAMTAMA : 7 orang.

**2. Untuk pemanfaatan, perekrutan sarana dan prasarana yang ada dilaksanakan berbagai kegiatan seperti :**

*a. Pembangunan dan penambahan yang dilaksanakan pada :*

- Markas di Mapolda, Polres Satal, Polres Minahasa, Polres Gorontalo dan Polres Lubang.
- Musholah di Mapolda, Polres Gorontalo, dan Polresta Gorontalo.



*Pesawat Merpati yang jatuh di Sulut beberapa waktu lalu.*

- Asrama di Mapolda Sulutteng, Polres Gorontalo dan Polres Poso.
- Penggunaan mobil Patroli Bersehati bantuan dari Walikota Madya Manado.
- Penggunaan dua buah mobil Pick Up Kijang bantuan dari Pemda Kodya Bitung.
- Penggunaan Mobil Jeep Suzuki Jimny untuk Patroli Lantas Polwan dari PT Asuransi Jasa Raharja.

- Penggunaan HT bantuan dari IMBI (Ikatan Motor Besar Indonesia) Manado.

*b. Mendinamisasikan sumber daya yang ada untuk mendukung tugas Polri, antara lain :*

- Penggunaan Repiter untuk pengoperasian HT dalam rangka mendukung tugas Opsnal.
- Penggunaan ranmor roda dua dan roda empat dinas, kapal laut Sat Polair untuk mendukung tugas opsnal.



Bagi Polda Sulutteng yang berbatasan dengan negara asing, patroli laut merupakan keharusan yang harus dilaksanakan.

**UPAYA-UPAYA PENGGUNAAN KEKUATAN**

**1. Melakukan operasi-operasi rutin antara lain:**

*a. Tindakan Preventif*

- Kegiatan Sabhara/PJR

Patroli di daerah rawan penganiayaan kenakalan remaja, rawan laka lintas, rawan pemabukan.

Penjagaan pada tempat-tempat keramaian, pasar dan tempat hiburan.

Pengaturan pada tempat-tempat rawan kemacetan dan kepadatan lalu lintas terutama pada jam-jam berangkat dan pulang kerja kantor, dan sekolah-sekolah.

Pengawalan tamu-tamu / VIP, Bank-Bank yang meminta pengawalan uang.

- Kegiatan Lalu Lintas

Penjagaan pada persimpangan jalan, tempat tempat rawan kemacetan lalu-lintas dan tempat rawan pelanggaran-rambu lalu lintas.

Pengaturan pada tempat-tempat rawan kemacetan dan kepadatan lalu lintas sepanjang jalan Sam Ratulangi, Jalan Yos Sudarso, Stasiun 45.

Pengawalan tamu - tamu penting / VIP pengawalan Pawai/Karnaval, malam Takbiran.

Patroli pada tempat-tempat rawan kecelakaan lalu-lintas, rawan pelanggaran dan lain-lain.

- Kegiatan Sat Polair

Patroli perairan didaerah rawan penyelundupan dan rawan pelanggaran lalu-lintas batas negara, rawan pencurian ikan oleh kapal-kapal asing diperbatasan dengan Negara Philipina.

*b. Kegiatan Deteksi Intel Pampol*

- Pengawasan dan pengamanan orang asing meliputi tamu-tamu asing dan turis-turis yang berkunjung ke Indonesia - ke Wilayah Polda Sulutteng.

- Pengamanan terhadap masyarakat dan Pembangunan Daerah di wilayah Polda Sulutteng.

- Deteksi dini terhadap kriminalitas yang terjadi di wilayah Polda Sulutteng dan penyelidikan dalam upaya mengungkap kasus yang terjadi.

- Penyelidikan stemming beld/kisaran suara yang terdapat di masyarakat maupun anggota Polri.

- Pengamanan/pengawasan personil, materil dan bahan keterangan dalam menghadapi ancaman dari luar dan dalam tubuh Polri.

- Pengawasan terhadap senjata api dan bahan peledak yang beredar di masyarakat.

*c. Tindakan Represif*

- Kegiatan Reserse/Sabhara dalam penangkapan terhadap pelaku Kriminalitas.

- Pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan, pemberkasan dan pelimpahan ke Penuntut Umum.

- Kegiatan penertiban terhadap pelanggaran peraturan lalu-lintas dan menyidik setiap kasus kecelakaan lalu-lintas.

- Penertiban terhadap penjual dan pengedar minuman keras tanpa ijin.

#### d. Tindakan Preventif Aktif

##### – Kegiatan Binmas antara lain :

Pembinaan Keamanan Swakarsa dengan membentuk organisasi Siskamling di desa-desa/kelurahan.

Membina Satpam pada Instansi-Instansi.

Membina Pramuka dengan mengadakan PERTIKARA (Perkemahan Bhakti Bhayangkara) yang diadakan secara berpindah-pindah antar Kabupaten.

Membina Kelompok Polisi dan anak-anak, PKS (Patroli Keamanan Sekolah) di tiap-tiap sekolah dengan berbagai kegiatan-kegiatannya.

Membina Polsus yang ada di beberapa Instansi yang memiliki Polsus.

– Pembinaan sadar hukum oleh Diskum Polda Sulutteng dengan koordinasi Kanwil Kehakiman, Kejaksaan Tinggi, Kanwil BPN dan Biro Hukum Pemda Tk-I Propinsi Sulut mengadakan penyuluhan tentang sadar hukum di desa-desa pada tanggal 22 September s/d 14 Oktober 1990.

## 2. Operasi Khusus Kepolisian

### a. Ops Sus Curat I – 90 Samrat

Daerah Operasi Polresta Manado, Polres Minahasa dan Polres Donggala adalah sebagai berikut :

#### – Polresta Manado

Hasil yang diperoleh :

- |   |            |
|---|------------|
| a) Jumlah kasus                         | : 12 kasus |
| b) Kasus yang diungkap                  | : 12 kasus |
| c) Tersangka yang ditangkap dan ditahan | : 12 orang |
| d) Perkara yang dilimpahkan             | : 8 kasus  |

Barang bukti yang disita :

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| a) Uang tunai sebesar         | : Rp.1.800.000,— |
| b) Barang-barang elektronik : |                  |
| – 5 buah tape Recorder        |                  |
| – 1 buah Video                |                  |
| – 2 buah HT                   |                  |
| – 1 buah loud speaker         |                  |
| – 4 buah jam tangan           |                  |
| – 1 gulung kabel listrik      |                  |

#### c) Logam Mulia

- |               |            |
|---------------|------------|
| – kalung emas | : 50 gram  |
| – gelang emas | : 5 gram   |
| – cincin emas | : 1,2 gram |

#### d) Kendaraan Bermotor

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| – 3 (tiga) buah sepeda motor |  |
|------------------------------|--|

#### – Polres Minahasa

Hasil yang diperoleh :

- |  |            |
|--|------------|
| a) Jumlah kasus                            | : 8 kasus  |
| b) Yang diungkap                           | : 8 kasus  |
| c) Tersangka yang ditangkap/ditahan        | : 16 orang |
| d) BAP yang dilimpahkan ke Pengadilan Umum | : 8 orang  |

Barang bukti yang disita :

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| a) 1 (satu) buah ranmor Cold Truck  |  |
| b) Uang Tunai sebesar Rp. 240.000,— |  |
| c) ayam 5 (lima) ekor.              |  |

#### – Polres Donggala

Hasil yang diperoleh :

- |   |            |
|---|------------|
| a) Jumlah kasus                             | : 24 kasus |
| b) Kasus yang diungkap                      | : 8 kasus  |
| c) Kasus dalam penyidikan                   | : 16 kasus |
| d) Perkara yang diajukan ke Pengadilan Umum | : 8 kasus  |
| e) Tersangka yang ditahan                   | : 14 orang |
| f) Barang bukti yang disita :               |            |
| – 1 (satu) Tape Recorder                    |            |
| – 1 (satu) buah ranmor roda dua             |            |
| – 1 (satu) koli rokok dan barang campuran   |            |
| – 1 (satu) koli rangka sepeda motor.        |            |

### b. Ops Sus Wana Samsat

#### – Polda Bolaang Mongondow

Kasus yang diungkap 7 (tujuh) kasus  
Barang bukti : 7 buah cincin Chain Saw dan kayu hitam.

#### – Polres Donggala

Kasus yang diungkap 14 kasus  
Barang bukti : kayu hitam 66 meter kubik.  
Kasus yang diajukan ke Pengadilan Umum 8 kasus, dalam penyidikan 6 kasus.

### c. Ops Sus Minkers – 90

Daerah Operasi di Polresta Manado, Polres Minahasa dan Polres Sangir Talaud (Satal).

Hasil yang dicapai :

- 1) Tersangka : 151 orang
- 2) Diteruskan ke Pengadilan Umum : 61 orang
- 3) Barang bukti :
  - Whisky : 893 botol
  - Kesegaran : 1156 botol
  - Cap tikus : 1978 botol
  - Pinaraci : 168 botol
  - A n g g u r : 261 botol
  - Lain-lain : 689 botol

#### d. Ops Patuh LILIN SAMRAT – 90

Hasil yang diperoleh :

- 1) Kecelakaan lantasi : 132 kali
- 2) Tilang : 5959 kali
- 3) Barang bukti berupa kendaraan
  - roda dua : 616 buah dan
  - roda empat : 351 buah.

## PERMASALAHAN YANG KHAS

### 1. Penganiayaan

Masalah kasus penganiayaan sebagai akibat temperamen masyarakat yang tinggi dan kegemaran minum-minuman keras yang dapat mengakibatkan seseorang mabuk sehingga mudah tersinggung dan melakukan penganiayaan terhadap orang lain.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengantisipasi penganiayaan ini antara lain dengan penyuluhan hukum serta operasi minuman keras. Dampaknya memang turun dalam waktu dilaksanakan kegiatan operasi namun apabila kegiatan operasi berhenti akan muncul lagi sehingga menjadi kasus yang tertinggi di wilayah Polda Sulutteng.

### 2. Masalah Lintas Batas

Sehubungan dengan wilayah Polda Sulutteng berbatasan dengan Negara Philipina, maka sering terjadi pelanggaran lintas batas Negara Philipina masuk kewilayah Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen yang syah dengan alasan kerusakan kapal, musibah atau terbawa arus.

Dikaitkan dengan situasi Negara Philipina yang masih menghadapi gerombolan Komunis dan Moro serta masalah lain dalam negaranya sehingga perlu perhatian khusus terhadap masalah ini terutama penyusupan/infiltrasi ke wilayah Indonesia khususnya kabupaten Sangihe Talaud.

Kasus yang terjadi tahun 1989 sebanyak 8 (delapan) kali setelah diadakan pemeriksaan dengan alasan kerusakan mesin kapal dan terdampar di wilayah Polres Sangihe Talaud. Pada tahun 1990 terjadi lima kali kasus, empat milik Philipina dan satu milik Australia. Dan kasus pencurian ikan terjadi 5 kali pada tahun 1990 dan satu kali pada tahun 1991 yang dilakukan oleh 4 (empat) buah kapal Philipina.

Pada tanggal 28 Nopember 1990 jam 15.00 Wita sebuah pesawat Helikopter bernama NAVI HSL 43 warna abu-abu terbang pada ketinggian 10 s/d 20 meter diatas pulau dan perairan di wilayah Namesa Sangir Talaud, diduga milik Amerika Serikat yang berpangkalan di Philipina.

Penyelesaian kapal-kapal yang terdampar, setelah diadakan pertolongan dan pemeriksaan yang berkoordinasi dengan kantor Imigrasi Klas I Manado untuk pemulangan ke Negara asal. Untuk kasus pencurian ikan di sidik oleh Team Kelompok GUSKAMLA Bitung (Sat Trol Tas, Lantamal Bitung, Kejari Bitung, Cabang Dinas Perikanan Bitung).



Kapolda Sulutteng Kol. Pol. Drs. Ign Alit Sanjaya memberikan ucapan selamat kepada Pilot Hely BO-105 Let tu Pol. Putut atas keberhasilannya mengevaluasi para Ex. Penumpang pesawat Merpati 212 yang jatuh.

Untuk mengantisipasi terhadap kasus ini maka Polres Satal menempatkan Pos Polri, Pos BCA yang terdapat dipulau Marore dan Miangas wilayah Polres Satal.

### 3. Masalah Penambangan Emas Tanpa Izin

Terjadi di wilayah Polres Bolmong, Polres Minahasa dan Polres Satal. Banyaknya penambang liar ini diakibatkan oleh orang luar daerah tersebut yang ingin mengeruk keuntungan penambangan emas tersebut. Para pendulang berasal dari Sangihe Talaud, Minahasa, Bolaang Mangondow, Tasik Malaya dan Sulawesi Selatan. Penanganannya koordinasi dengan Pemda Tk-I Sulut yang membentuk Team Penertiban PETI di wilayah Kabupaten yang terdapat penambang emas liar.

Upaya Polda Sulutteng untuk mengatasinya dengan memberikan petunjuk kepada Polres Bolmong, Minahasa dan Polres Satal untuk mengumpulkan alat pemroses guna mendapat emas murni (istilah tromol) yang terdapat di wilayah penambangan tersebut.

Dengan adanya penambangan emas liar ini memberi dampak kerugian kepada Pemerintah dan pertambangan yang syah dan sekaligus memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sebagai akibat pembuangan air raksa yang dipergunakan mengolah emas murni, penggalian-penggalian pada kawasan hutan lindung dan naiknya endapan sungai serta faktor keselamatan pribadi akibat tanah longsor. Kemudian pada lokasi-lokasi tersebut rawan terhadap penganiayaan, perkelahian, pembunuhan, pelacuran dan bencana alam.

### 4. Masalah Kayu Hitam

Dengan semakin baiknya harga pasaran kayu hitam baik di dalam maupun di luar negeri, maka minat para investor dalam bidang kayu hitam ini makin tinggi, sehingga menimbulkan penebangan liar, pencurian dan penyelundupan kayu hitam, khususnya di wilayah Sulteng yang merupakan penghasil kayu hitam oleh sekelompok orang tertentu.

Upaya yang telah dilakukan dengan koordinasi Pemda Tk-I Sulteng dan Kehutanan membentuk Team Penertiban terhadap kayu hitam terhadap para pelanggar hukum diproses dan dilimpahkan ke Penuntut Umum.

### 5. Bencana Alam

Wilayah Polda Sulawesi Utara dan Tengah sering dilanda gempa bumi, tanah longsor dan gunung meletus. Gempa bumi sering terjadi di wilayah Kodya Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolmong dan Kabupaten Gorontalo.

Pada tahun 1988 tercatat dua kali dan tahun 1990 tercatat 19 kali, sedangkan tanah longsor tahun 1988 tercatat 7 kali, tahun 1989 10 kali, tahun 1990 tercatat 6 kali.

Gunung meletus di Sulawesi Utara yaitu :

Di Polres Minahasa

- Gunung Soputan, tinggi 1800 meter, letusan terakhir tahun 1984.
- Gunung Lokon, tinggi 1.689 meter, letusan terakhir tahun 1987.
- Gunung Mahawu, tinggi 1311 meter, letusan terakhir tahun 1958.
- Gunung Tangkoko, tinggi 1149 meter, letusan terakhir tahun 1880.

Di Polres Sangir Talaud

- Gunung Awu, tinggi 1.784 meter, letusan terakhir tahun 1966.
- Gunung Karangetan, tinggi 1.320 meter, letusan terakhir tahun 1987.
- Gunung Banua Wuhu berada dibawah permukaan laut, letusan terakhir tahun 1919.
- Gunung Sub Makini berada dibawah permukaan laut, letusan terakhir tahun 1922.

Di Polres Balaan Mongondow.

- Gunung Ambang, tinggi 1.689 meter, letusan terakhir tahun 1939.

Di Wilayah Sulawesi Tengah yaitu di Polres Poso

- Gunung Calo, tinggi 1300 meter, letusan terakhir tahun 1984.

Gempa bumi yang membawa kerusakan besar terjadi di Kabupaten/Kodya Gorontalo pada tanggal 18 April 1990 jam 21.45 Wita yang berkekuatan 4,5 skala richter.

### KOORDINASI LINTAS SEKTORAL

Dalam rangka pemecahan masalah terhadap kasus-kasus yang penanganannya diperlukan secara terpadu, Polda Sulutteng senantiasa koordinasi dengan instansi terkait antara lain : Pemda Tk-I Propinsi Sulawesi Utara, Pemda Tk-I Propinsi Sulawesi Tengah, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, Korem 131/Santiago, Korem 132/Tadulako, Lantamal Bitung, LANUD SAMRATULANGI, BEA CUKAI.

Hal-hal yang menyangkut koordinasi Lintas Sektoral antara lain :

1. Penanganan masalah minuman keras yang menyangkut beberapa instansi.
2. Penyelesaian kasus tanah yang melibatkan beberapa instansi.
3. Kasus perkelahian antar ABRI.
4. Rencana perubahan jalur Lalu Lintas dan jalur Trayek angkutan Kota.
5. Rencana penyambutan Tamu dari Pusat, Presiden/Wapres RI ke propinsi Sulawesi Utara dan Tengah.
6. Lain-lain masalah yang memerlukan pemecahan masalah secara terpadu.
7. Masalah lintas Batas penduduk warga Philipina yang sering datang ke wilayah Sangir Talaud karena ada hubungan keluarga

### UPAYA PEMBANGUNAN IPK

Polda Sulutteng dalam rangka upaya pembangunan IPK melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Latihan Satpam Instansi 24 orang, tanggal 10 Oktober 1988 s/d 5 Nopember 1988.
2. Latihan Satpam BKKBN peserta 22 orang dari tanggal 22 Mei 1988 s/d 28 Mei 1988.
3. Penataran PPNS peserta 50 orang, tanggal 5 Juni 1989 s/d 4 Juli 1989.
4. Latihan Satpam Instansi peserta 42 orang, tanggal 22 Juli 1989 s/d Agustus 1989.
5. Latihan Babin Kamtibmas Des/Kel peserta 87 orang, tanggal 8 Maret 1990 s/d 22 Maret 1990.
6. Penataran unit Polda Sulutteng peserta 34 orang, tanggal 3 Desember 1990 s/d 6 Desember 1990.
7. Penataran/Pendidikan PPNS peserta 30 - orang, tanggal 5 Desember 1990 s/d 4 Maret 1991.
8. Penataran Pengemudi Angkutan Umum oleh Polresta Manado, Polres Minahasa.
9. Penataran Pengemudi/Sais Bendi oleh Polresta Manado dan Polres-Polres se Polda Sulutteng.

## Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) MALUKU

Polda Maluku yang Markasnya beralamat di Jl. Jenderal A. Yani, Ambon, mempunyai wilayah meliputi Propinsi Maluku dengan ibu kota Ambon.

Propinsi Maluku terdiri dari 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Maluku Utara dengan ibu kota Ternate, Kabupaten Maluku Tengah dengan ibu kota Masohi, Kabupaten Maluku Tenggara dengan ibu kota Tual. Disamping itu terdapat satu Kotamadya yaitu Kotamadya Ambon.

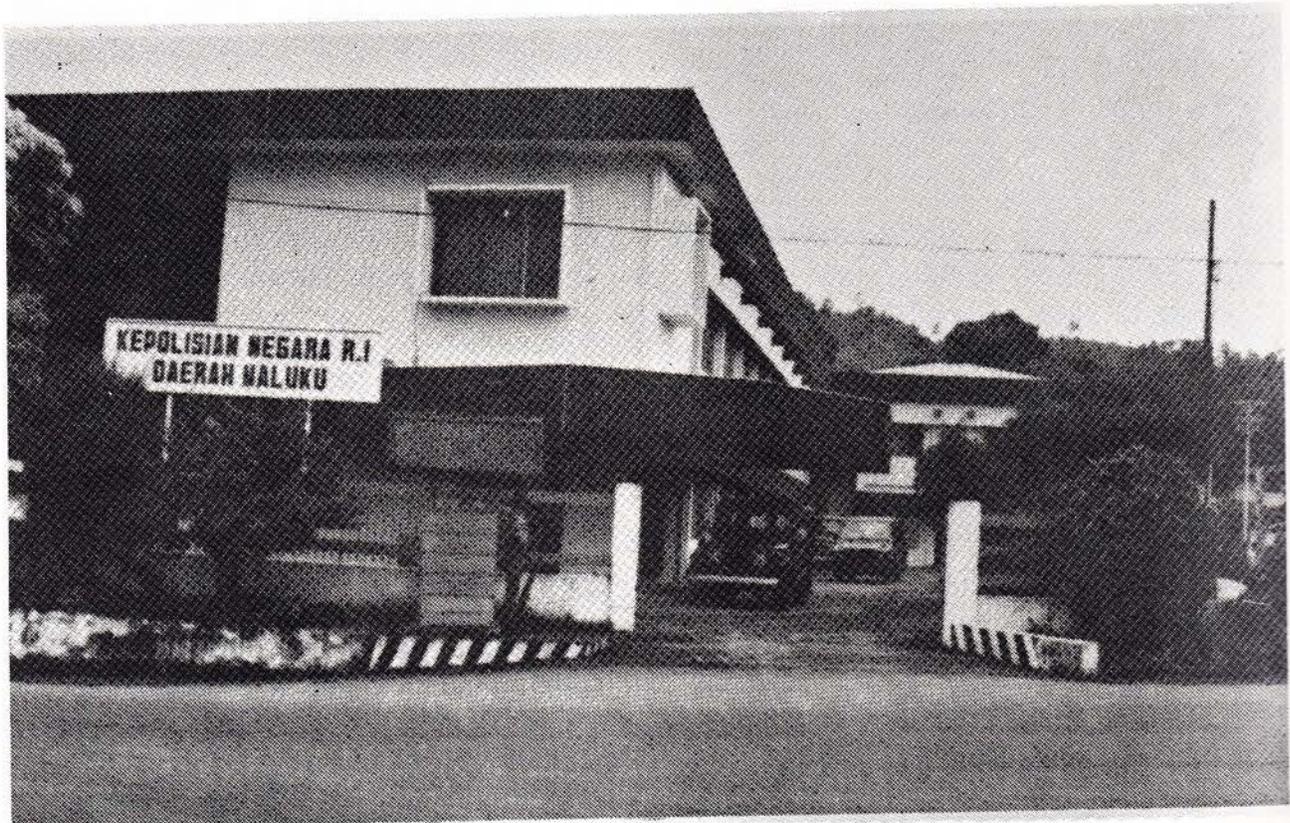
Luas Propinsi Maluku mencapai 85.728 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk pada tahun 1988 1.726.533 jiwa. Dengan demikian 1 Km<sup>2</sup> wilayah di diami oleh 20 jiwa penduduk. Masih jarang penduduk Propinsi ini dibanding Propinsi-Propinsi di Jawa dan Sumatera.

Polda Maluku mempunyai kekuatan sekitar 3.000 orang anggota untuk menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Propinsi tersebut. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk maka 1 orang anggota Polri harus melayani 575 orang.

Melihat kenyataan diatas, tugas dari Polda Maluku untuk menjamin tegaknya hukum dan terjaminnya Kamtibmas di wilayah hukumnya cukup berat.

### G E O G R A F I

Memperhatikan Peta Kepulauan Maluku maka jelas sekali bahwa Propinsi ini terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, tersebar luas diantara Laut Sulawesi di Utara, Laut Banda dan Laut Arafuru di Selatan.



Markas Polda Maluku

Propinsi Maluku di sebelah Utara berbatasan dengan Negara Philipina dan ZEE di Samudra Pasifik, sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Irja; sebelah Tenggara dengan Australia, sebelah Selatan dengan Propinsi Timor Timur, sebelah Barat dengan Propinsi Sulawesi Tenggara, Propinsi Sulawesi Tengah, dan Propinsi Sulawesi Utara. Kalau Polda Sumbar dikelilingi oleh 4 buah Propinsi maka Polda Maluku dikelilingi oleh 5 Propinsi dan 2 negara tetangga.

Dari ribuan pulau terdapat beberapa pulau besar seperti Pulau Halmahera, Pulau Buru, Pulau Seram, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Pulau Wetar dan lain-lain.

Sebagaimana diketahui Laut Banda adalah laut yang terdalam didunia, dan di P. Halmahera terdapat gunung api yang masih aktif. Baru-baru ini Gunung Siaw di Halmahera meletus dan memaksa penduduk sekitarnya mengungsi ke daerah yang aman. Umumnya Maluku Utara rawan gempa yang disebabkan letusan gunung api dan tektonik.

## ORGANISASI

Polda Maluku walaupun luas namun daratannya tidak begitu luas dibanding lautnya. Daratan mungkin seperenam saja dari luas laut. Karena itu Polda Maluku hanya mempunyai 4 Polres dan 54 Polsek.

Polres yang ada yaitu: Polres Ambon dan PP. Lease di Jl. Dr. Latumenten, Ambon; Polres Maluku Utara di Jl. Hasan Esa, Ternate; Polres Maluku Tenggara di Jl. Taar Atas, Tual; dan Polres Maluku Tengah di Ksatriaian Polri, Masohi.

Adapun Polsek yang 54 buah tersebut terdiri dari 3 Polsektif B, 5 buah Polsektif C, 45 buah Polsek Standard C, dan 1 KPPP.

## SITUASI KAMTIBMAS

Umumnya situasi Kamtibmas di Polda Maluku cukup mantap dan terkendali, sehingga dapat menunjang bagi kelancaran pembangunan di daerah ini. Namun demikian bukan berarti tidak terjadi pelanggaran dan tindak kejahatan, karena itu perlu adanya peningkatan upaya penanggulangan terhadap berbagai bentuk pelanggaran dan gangguan Kamtibmas yang ada.

Keadaan wilayah Polda Maluku yang sebagian besar terdiri dari perairan, dan terdapat laut lepas di sebelah Utara dan Selatannya, menjadikan daerah ini rawan terhadap pelanggaran wilayah kapal asing pencurian ikan oleh nelayan asing, penyelundupan, terutama dijadikan tempat transit Narkotika yang akan diselundupkan ke Australia, baik melalui laut maupun udara.

Gangguan Kamtibmas yang cukup potensial antara lain kecelakaan Perahu atau Kapal di laut, dan letusan gunung berapi, umumnya di Maluku Utara.

## PEMBINAAN SUMBER DAYA

Menyadari bahwa tugas dan tantangan Polri semakin lama semakin berat di Polda Maluku, maka untuk dapat mengatasi tantangan tersebut diperlukan upaya-upaya antara lain :

- Membangun kekuatan Polri jajaran Polda Maluku dengan titik berat pada pemantapan fungsi operasional yang didukung dengan kemampuan yang handal dari setiap anggota Polri.
- Upaya peningkatan keterampilan dan kemampuan teknis operasional Kepolisian di bidang Profesionalisme Reserse melalui kegiatan penataran/latihan.
- Melaksanakan pembangunan kekuatan personil untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- Mengembangkan sistem dan methoda guna mencapai efektifitas prosedur dan mekanisme kerja dibidang operasional dan pembinaan.
- Meningkatkan profesionalisme yang mampu mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar pada gilirannya mampu menanggulangi berbagai bentuk ancaman.
- Di bidang pembinaan materil, sarana/prasarana, fasilitas dan jasa diupayakan dengan memotifasi setiap anggota agar merasa ikut memiliki setiap peralatan atau sarana/prasarana yang menjadi tanggungjawabnya.
- Upaya menggunakan secara optimal sarana/prasarana yang ada dengan mempedomani kebijaksanaan Pimpinan ABRI/Polri.
- Mengupayakan keikutsertaan masyarakat secara swakarsa dan swadaya dalam menanggulangi setiap gangguan Kamtibmas.

## Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) IRIAN JAYA

Kepolisian Daerah Irian Jaya, disingkat Polda Irja bermarkas di Jl. Samratulangi, Jayapura. Wilayah Polda Irja meliputi Propinsi Irian Jaya dengan ibu kota Jayapura, mempunyai 8 buah Kabupaten, masing-masing : Kabupaten Jayapura di Jayapura; Kabupaten Teluk Cenderawasih di Biak; Kabupaten Manokwari; Kabupaten Sorong di Sorong; Kabupaten Fak-Fak di Fak-Fak; Kabupaten Merauke di Merauke; Kabupaten Jayawijaya di Wamena, dan Kabupaten Paniai di Nabire.

Propinsi Irja mempunyai luas 419.660 Km<sup>2</sup>, adalah Propinsi yang paling luas di Indonesia,

dengan penduduk akhir tahun 1988 berjumlah 1.496.259 jiwa. Berarti 1 Km<sup>2</sup> di Irian Jaya dihuni oleh 3 Jiwa manusia.

Penduduk pulau yang terbesar didunia ini masih jarang sekali. Penduduknya terdiri dari berpuluh-puluh suku, masing-masing mempunyai bahasa yang berbeda dan saling tidak mengerti bahasa-suku lain.

Polda Irja mempunyai kekuatan 4.736 orang anggota yang bertugas menjamin tegaknya hukum dan terlaksananya Kamtibmas dengan baik di Irja. Dibanding dengan jumlah penduduk maka setiap anggota Polri di Irja harus melayani 314 orang penduduk.



*Mapolda Irian Jaya berdiri dengan megahnya.*

## GEOGRAFI

"Propinsi Irian Jaya penuh dengan tantangan namun juga penuh dengan harapan", demikian gubernur Irian Jaya Bernabas Suebu selalu berucap pada setiap kesempatan dalam rangka memacu motivasi dan dedikasi setiap aparatur pemerintah untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan semangat pengabdian yang tinggi.

Kondisi geografis Propinsi Irian Jaya yang begitu luas, penuh dengan hutan belantara dan rawa-rawa di pesisir, terutama di bagian Selatan, masih penuh dengan keterisolasian antara desa-desa ataupun kota.

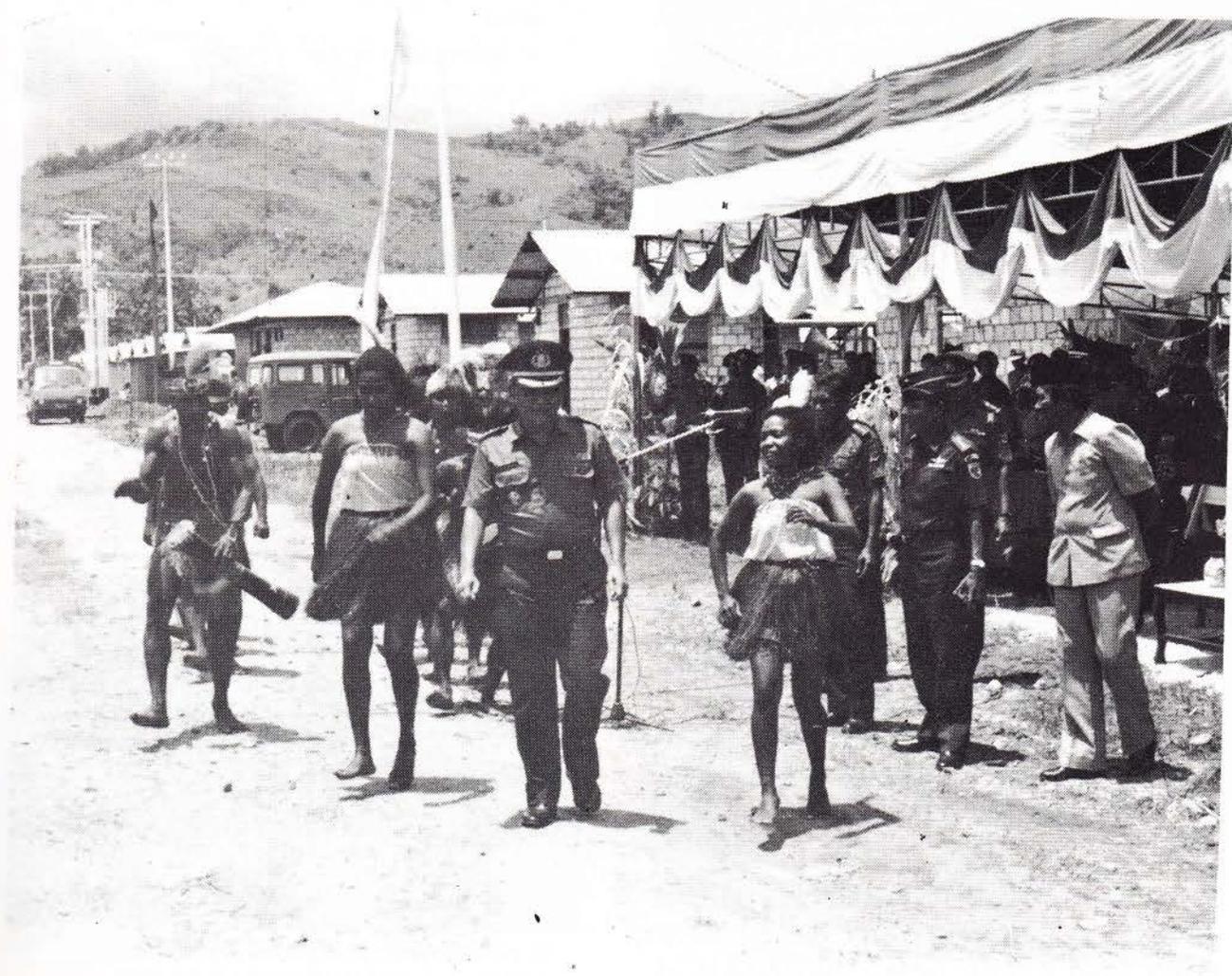
Kadaan ini disebabkan belum tersedianya infrastruktur sosial, belum tersedianya sarana transportasi yang memadai, terutama di daerah pedalaman. Alat transportasi utama di Propinsi

ini adalah pesawat udara, sedangkan jalan raya hanya terbatas disekitar kota saja, umumnya di pesisir.

Propinsi Irian Jaya di sebelah Utara berbatas dengan ZEE di Samudra Pasifik, di sebelah Barat dengan laut daerah hukum Polda Maluku, di Selatan berbatasan dengan perairan Australia, sedangkan di Sebelah Timur berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea.

## KONDISI MASYARAKAT

Kondisi sosial masyarakat Irian Jaya, terutama di daerah pedalaman, masih jauh terbelakang dibandingkan dengan Propinsi-Propinsi lain, baik dibidang idiologi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama dan lain-lain.



*Acara penghijauan di Komlek Perumahan murah agar menjadi lingkungan yang teduh.*

Kehadiran seorang Bintara Binkamtibmas Desa (BABINKAMTIBMAS DES) di tengah-tengah masyarakat yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang keamanan dan ketertiban, ketaatan hukum, kewajiban-kewajiban seorang warga negara dan sebagainya, menjadi kurang berarti bagi masyarakat desa tersebut, karena bukan hal itu yang mereka butuhkan dari kehadiran seorang petugas Polri di tengah-tengah mereka.

Masyarakat desa Irja lebih membutuhkan tentang bagaimana bercocok tanam, bagaimana berternak, bagaimana bertukang membuat rumah, bagaimana membuat peralatan rumah tangga, bagaimana memelihara lingkungan yang sehat, dan bagaimana agar anak-anak mereka bisa mendapat tambahan guru di sekolahnya.



*Ketrampilan bercocok tanam dengan sistim "Bedeng" dikenalkan kepada masyarakat oleh Babinkamtibmasdes (hasil latram pionir)*

Mengantisipasi tantangan tugas dan tuntutan kebutuhan masyarakat dari kehadiran Polri ditengah masyarakat yang demikian, maka sejak tahun 1990 yang lalu Polda Irja mengembangkan program latihan keterampilan pionir yang diberi nama "Keterampilan Pionir Kerta Raharja".

Maksudnya adalah untuk meningkatkan ketahanan Kamtibmas melalui pendekatan ke-sejahteraan.

Program latihan tersebut sebelum dimasyarakatkan hanya diikuti oleh Bintara-Bintara Polsek yang ditunjuk sebagai BABINKAMTIB-

MAS DES, selanjutnya dikembangkan terhadap siswa-siswa Bintara Milsuk dan reguler, para Capa, maupun yang baru tamat AKPOL, karena merekalah yang akan ditunjuk menjadi Kapolsek di daerah pedalaman, yang selanjutnya akan menularkan ilmu dan kepandaian mereka itu kepada masyarakat.

Sampai dengan Mei 1991 dari 122 Kapolsek di jajaran Polda Irja, 67 diantaranya telah mengikuti latihan keterampilan pionir tersebut, dan untuk Bintara dan Tamtama telah dilatih sebanyak 558 orang.

Adapun jenis-jenis latihan yang diberikan antara lain :

- Keterampilan pertukangan kayu
- Keterampilan pembudidayaan tanaman
- Keterampilan budidaya ikan dan ternak
- Keterampilan pemeliharaan lingkungan yang sehat
- Keterampilan belajar mengajar
- Keterampilan pengolahan sagu sebagai makanan yang sehat dan bergizi.

Pada akhir 1990 Polda Irja telah mendirikan pusat latihan keterampilan pionir tersebut di lokasi Translok Polda Irja di daerah Kec. Arso Kab. Jayapura. Dalam penyelenggaraan latihan mendapat bantuan Instruktur dari instansi pemerintah terkait.



*Ketrampilan pionir ditularkan kepada masyarakat desa pedalaman Babinkamtibmasdes berperanan.*



*Instruktur membimbing peserta Latram pionir mengolah sagu yang diikuti dengan seksama oleh peserta.*

## ORGANISASI

Polda Irja memiliki 9 buah Polres, masing-masing yaitu: Polres Jayapura di Jl. Jen. A. Yani, Jayapura; Polres Jayawijaya di Komplek Polres Wawena; Polres Teluk Cenderawasih di Jl. Diponegoro 3, Biak; Polres Manokwari di Jl. Bhayangkara, Manokwari; Polres Fak-Fak di Jl. Sukapura, Fak-Fak; Polres Merauke di Jl. Mandala, Merauke; Polres Sorong di Jl. A. Yani, Sorong; Polres Paniai di Jl. Sisingamangaraja, Nabire; dan Polres Japen Waropen di Jl. Bhayangkara, Serui.

Sedangkan Polsek terdapat sebanyak 122 buah yang terdiri dari: 1 Polsektif B, 6 Polsektif C, dan 115 Polsek Standard C.



*Latihan pertukangan dimulai dari fondasi, kocok mesin, potong dan sekap kayu merupakan materi yang dilatihkan.*

## SITUASI KAMTIBMAS

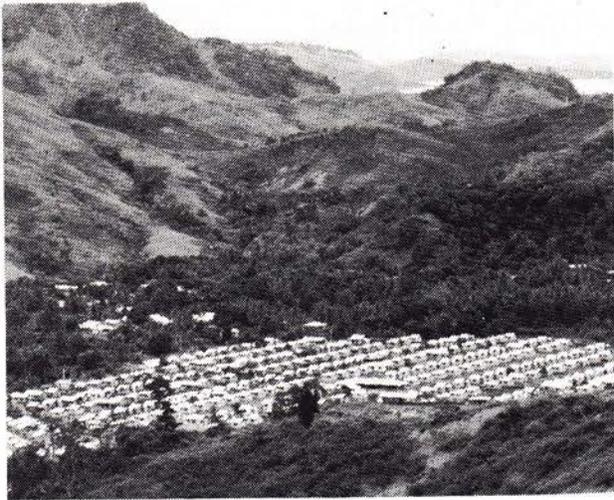
Pada umumnya situasi Kamtibmas di Polda Irja cukup mantap dan terkendali hingga dapat mendukung laju pembangunan di Propinsi ini. Hal ini bukan berarti tidak terjadi tindak kriminal dan gangguan Kamtibmas, karena itu perlu adanya peningkatan upaya penanggulangan terhadap berbagai bentuk pelanggaran dan gangguan Kamtibmas yang ada.

Gangguan Kamtibmas yang menonjol dan aktual di Irja antara lain pelanggaran wilayah oleh orang asing, seperti pelanggaran lintas batas diperbatasan dengan Papua New Guinea, pencurian ikan oleh nelayan asing dan masih adanya GPK. Sekalipun GPK ini tidak berarti lagi dari segi militer, karena telah dapat diatasi oleh ABRI bersama masyarakat, namun sebagaimana yang dinyatakan Pangab pada Simposium Nasional Teknologi Militer di ITB Bandung 25 September 1991, GPK masih merupakan ancaman yang aktual. Disamping itu terdapat pula gangguan Kamtibmas yang bersifat tradisional yang berhubungan dengan kondisi dan kebiasaan masyarakat seperti perkelahian yang disebabkan kebiasaan minum minuman keras dan perkelahian antar suku yang sekarang sudah jarang terjadi berkat binaan dari Polri dan berbagai pihak, namun tetap laten.

Gangguan lain yang sering terjadi adalah gempa bumi sehingga telah banyak menelan korban jiwa, dan kecelakaan pesawat terbang.



*Barak bujang, bangunan tambahan pada Polsek Jiwika di Kabupaten Jaya Wijaya dikerjakan dengan swadaya. (turut berkiprah . . . ndan).*



*Perumahan murah Polda Irja di lembah Furia Indah Kota Raja – Jayapura.*

### KESEJAHTERAAN PRAJURIT

Untuk membantu anggota dan para pur-nawirawan serta warakawuri Polri dalam memenuhi kebutuhan akan rumah, Polda Irja dalam tahap pertama telah selesai membangun 300 unit rumah murah. Perumahan yang berlokasi di Lembah Furia Indah, Kota Raja Jayapura itu mulai dibangun sejak awal tahun 1990 dan telah diresmikan penggunaannya tanggal 11 Juni 1990 oleh Deops Kapolri. Setelah

bangunan rumah diresmikan pemakaiannya dibangun pula beberapa fasilitas umum seperti Mesjid, Gereja, Sekolah TK, gedung olah raga

Yudo untuk para penghuni.

Dalam waktu dekat akan dibangun pula rumah di Sorong sebanyak 60 unit, selanjutnya di kota Nabire, Manokwari dan Merauke. Rumah murah ini dibangun dengan pola KPR-BPD dan Puskopol Polda Irja bertindak selaku developernya.

Kebutuhan akan rumah bagi anggota Polda Irja memang sangat mendesak karena bangunan ex Belanda yang dipinjam dari Pemda untuk perumahan akan ditarik kembali oleh Pemda, sedangkan penambahan personil Polda Irja meningkat pesat. Dilain pihak sejak penyerahan Irja kepada RI tahun 1963 sampai tahun 1978 perhatian Polda Irja tertuju kepada pemantapan situasi Kamtibmas, sehingga masalah perumahan untuk anggota kurang terpikirkan secara serius. Hai-hal tersebutlah menyebabkan Polda Irja segera melakukan terobosan membangun rumah murah dengan pola KPR bekerja sama dengan BPD Irian Jaya.

# Perkembangan Hingga Kini

## (Hasil Yang Dicapai)

Untuk dapat mengoptimalkan bidang pembinaan dalam mendukung operasional Polri, maka dituntut adanya penyesuaian dan kesinambungan konsepsi-konsepsi sebagai berikut :

- 1) Konsepsi penyiapan kekuatan dan kemampuan yang tergelar dalam penyelenggaraan Sisdik Polri dan penataan lapis-lapis kekuatan dan kemampuan yang lebih mehati beratkan pada segi kualitas.
- 2) Konsepsi kesiap-siagaan Polri yang tergelar dalam penyelenggaraan Sisbinlat Polri dengan memperhatikan karakteristik bobot \_ancaman yang dihadapi oleh masing-masing jajaran kesatuan kewilayahan Polri.
- 3) Konsepsi pendaya-gunaan dukungan logistik Polri.

Arah dan sasaran Pembangunan Polri dalam Renstra Hankamneg IV, masih tetap bertumpu kepada pemberian bobot peranan yang lebih besar pada kesatuan-kesatuan kewilayahan terutama kesatuan kewilayahan tingkat Polres/ Polsek, serta satuan-satuan fungsional yang didukung dengan kekuatan personil yang profesional dan dukungan kekuatan logistik yang cukup memadai.

Penggelaran tugas-tugas operasional jelas menuntut pula digelarkannya kemantapan dan ketepatan upaya pembinaan dalam mendukung bagi terpeliharanya kondisi siap operasional dari segenap jajaran Polri. Karena itulah upaya-upaya pembinaan lebih diarahkan untuk menjadikan sumber daya Polri terutama para personilnya agar semakin berkualitas baik di dalam menjalankan profesinya maupun jiwa kejuangan. Hal ini di karenakan oleh menonjolnya sifat personal heavy dari pelaksanaan manajemen Polri, dimana kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat tidak dapat seluruhnya digantikan

dengan teknologi. Dengan ciri seperti ini maka betapapun canggihnya teknologi yang dimiliki namun "THE MAN BEHIND THE TECHNOLOGI" tetap akan merupakan kunci utama bagi keberhasilan tugas pokok Polri.

Dalam rangka itulah pertama-tama dilakukan upaya untuk menjawab kebutuhan tugas selaku aparat penyidik tunggal dan penyidik utama seperti yang ditentukan dalam undang-undang No: 8 tahun 1981 (KUHAP). Sampai saat ini Polri telah memiliki personil penyidik/penyidik pembantu sebanyak 19.184 orang yang telah dididik secara khusus di pusdik Reserse maupun di luar Negeri. Dengan demikian beban tugas selaku aparat penyidik lebih-lebih dalam mengkoordinasikan dan mengawasi aparat penyidik pegawai Negeri sipil, Polri telah cukup mampu.

Adapun hasil-hasil yang telah dicapai, baik kekuatan personil maupun logistik adalah sebagai berikut :

### Bidang Personil

Pada awal memasuki Renstra Hankam Neg IV, kekuatan personil yang hendak dicapai mengalami revisi melalui upaya pembulatan dan penajaman sasaran pembangunan kekuatan yaitu dari 215.295 prajurit Polri menjadi 172.116 orang dan PNS tetap 25.835 orang, dengan perincian :

- 1) Prajurit Polri :
  - a) Perwira, termasuk Capa : 20.505 orang
  - b) Bintara : 112.293 orang
  - c) Tamtama : 39.318 orang
- 2) PNS Polri :
  - a) Golongan IV : 8 orang
  - b) Golongan III : 1.403 orang
  - c) Golongan II : 9.301 orang
  - d) Golongan I : 15.123 orang

Dalam kenyataan hasil yang dicapai pada akhir Renstra Hankam III dalam posisi bulan April 1989 dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Prajurit Polri sejumlah 169.981 orang dengan perincian :

- a) Perwira, termasuk Capa : 18.447 orang
- b) Bintara : 103.984 orang
- c) Tamtama : 47.550 orang

2) Dislokasi kekuatan prajurit Polri tersebar ditingkat Polda dan Mabes Polri dengan perincian sebagai berikut :

- a) Polda Aceh : 5.116 orang
- b) Polda Sumut : 8.635 orang
- c) Polda Sumbar : 4.923 orang
- d) Polda Riau : 3.692 orang
- e) Polda Kalbar : 5.260 orang
- f) Polda Sumbagsel : 10.119 orang
- g) Polda Metro Jaya : 16.800 orang
- h) Polda Jabar : 16.293 orang
- j) Polda Jateng : 22.087 orang
- k) Polda Jatim : 21.356 orang
- l) Polda Nusra : 12.527 orang
- m) Polda Kaltim : 4.197 orang
- n) Polda Kalselteng : 5.406 orang
- o) Polda Sulselra : 10.606 orang
- p) Polda Sulutteng : 6.143 orang
- q) Polda Maluku : 3.001 orang
- r) Polda Irja : 4.736 orang
- s) Mabes Polri : 9.088 orang

3) Kekuatan PNS Polri sebesar 18.691 orang dengan perincian :

- a) Golongan IV : 6 orang
- b) Golongan III : 435 orang
- c) Golongan II : 8.957 orang
- d) Golongan I : 9.293 orang

### Bidang Pendidikan

a. Sehubungan dengan kecilnya pencapaian sasaran kekuatan personil melalui pendidikan pembentukan, maka telah diutamakan upaya untuk meningkatkan kualitas prajurit Polri melalui pendidikan dengan hasil yang dicapai, sebagai berikut :

1) Pendidikan In Service :

- a) Pendidikan pengembangan : 794 orang
- b) Pendidikan kejuruan : 16.364 orang
- c) Pendidikan Keahlian : 566 orang
- d) Pendidikan alih golongan : 15.509 orang

2) Peningkatan kualitas Tenaga Pendidik :

a) Pendidikan Bintara Instruktur Beladiri, Permildas dan menembak 252 orang.

b) Pendidikan Tutorial dalam rangka manajemen Training yang meliputi New TOT, Senior Tutor, Tutor, Asisten Tutor dan evaluator sejumlah 152 orang.

c) Pendidikan Akta III dan Akta IV sejumlah 414 orang dalam rangka kerjasama dengan IKIP Bandung, Ujung Pandang dan ITB Bandung.

3) Pendidikan di luar negeri dalam rangka kerjasama dengan :

- a) Jerman : 27 orang
- b) Belanda : 20 orang
- c) Inggris : 24 orang
- d) Jepang : 1 orang

b. Untuk melengkapi kurikulum pendidikan kejuruan pembinaan dan kurikulum kejuruan operasional telah disusun dan diselesaikan 36 buku Sillabi untuk pendidikan kejuruan pembinaan dan 50 buku Sillabi untuk pendidikan kejuruan operasional.

c. Telah ditingkatkan dan diadakan penyesuaian program kurikulum pendidikan untuk Seba Polri dari waktu 9 bulan menjadi 11 bulan dengan sistem 3 : 7 : 1

d. Telah dirumuskan dan disusun bahan-bahan ajaran untuk Seba Polri 37 buku dan untuk pendidikan kejuruan operasional dan pembinaan 1.394 buku.

e) Dalam rangka meningkatkan kemampuan lembaga pendidikan Polri untuk menghasilkan hasil didik yang handal dan profesional di bidangnya, masih perlu ditingkatkan pula dukungan fasilitas pendidikan maupun sarana dan prasarana pendidikan.

f. Badan penyelenggara fungsi latihan belum tertata secara struktural dan hierarchis di dalam menangani program-program latihan. Hal tersebut disebabkan belum terlaksananya secara mantap karena Sisbinlat Polri belum dijabarkan dalam prosedur dan metoda yang jelas. Karena keadaan tersebut diatas mengakibatkan timbulnya kesan bahwa penanganan dan penyelenggaraan latihan berjalan sekedar formalitas

sehingga belum merupakan program latihan yang berdasarkan pola yang dibakukan.

### Bidang Logistik

a. Meskipun asset Polri di bidang logistik secara rutin mengalami penambahan dan secara optimal diupayakan agar mampu menunjang pelaksanaan yang telah ditetapkan, akan tetapi penambahan tersebut dalam kenyataan hanya dapat memenuhi kebutuhan 45% untuk mendukung tugas-tugas operasional di lapangan.

b. Program pengadaan peralatan utama dan peralatan khusus diprioritaskan pada peralatan yang benar-benar diperlukan oleh satuan operasional termasuk upaya pemeliharannya, antara lain pengadaan 2.878 unit ranmor dari sasaran 7.600 unit atau 25,57%, pengadaan 7 buah Helikopter (6 realisasi anggaran On Top dari Depku) serta pengadaan 1.622 unit alsus dari sasaran 6.135 unit atau hanya 26,44%.

c. Kondisi materiil Polri selalu secara kuantitatif belum dapat memenuhi kebutuhan minimal operasi kepolisian, upaya pemeliharaan/perawatannya guna memperpanjang usia pakai juga belum mencapai kebutuhan minimal, antara lain disebabkan :

- 1) Keterbatasan anggaran yang tersedia.
- 2) Kondisi materiil yang dimiliki sebelumnya sudah semakin tua, sementara anggaran pemeliharaan semakin dipersempit serta fasilitas pemeliharaan dan suku cadang yang kurang. Keadaan tersebut semakin diperburuk dengan kurangnya perhatian pemakai dalam upaya pemeliharaan, sehingga mengakibatkan tingkat kerusakan yang semakin parah dan tingkat penyusutan semakin tinggi.

d. Arah pembinaan manajemen terutama dalam pemeliharaan materiil diupayakan untuk memperpanjang usia pakai, menumbuhkan rasa memiliki yang kuat serta pendayagunaan dan pendistribusian materiil secara cepat.

### Bidang Penegakan Hukum dan Kamtibmas

Hasil-hasil yang telah dicapai dibidang operasional penegakan hukum dan pembinaan Kamtibmas dapat digambarkan sebagai berikut:

Selama 5 tahun (1986/tahun 1990) laju perkembangan kriminalitas secara umum berhasil ditekan. Angka tertinggi pada tahun 1989 sebesar 215.660 sedang angka terendah pada tahun 1990 sebanyak 194.792 kejadian.

Penyelesaian perkara rata-rata pertahun adalah 58%, dengan prosentase ini bila dilihat grafik penyelesaian perkara menunjukkan angka presentasi yang meningkat sebagai berikut :

Tahun 1986 – 52%, tahun 1987 - 55%, tahun 1988 – 63%, tahun 1989 – 61%, tahun 1990 – 64%.

Sedangkan untuk Crime rate, selama lima tahun ini rata-rata dalam setiap tahunnya terdapat 113 orang dari 100.000 penduduk yang terlibat kejahatan.

Namun demikian, harus diakui bahwa perkembangan pola kriminalitas dengan pengamatan terhadap beberapa jenis kejahatan tertentu seperti : pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pembunuhan, pemerkosaan, kenakalan remaja, kesemuanya menunjukkan kecenderungan yang meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Adanya kecenderungan meningkatnya berbagai jenis kejahatan tertentu yang secara kuantitatif maupun kualitatif tersebut, adalah merupakan cerminan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat yang dirangsang oleh dinamika pembangunan bangsa dalam segala aspeknya maupun pengaruh gejala globalisasi terhadap kehidupan bangsa.

Perlu diketahui bahwa keberhasilan yang dapat dicapai Polri untuk menekan laju pertumbuhan kriminalitas tersebut adalah sesuai dengan arah yang telah ditetapkan dalam strategi OPDIN bidang operasional, dimana Polri telah menggelar kekuatan dan kemampuan operasionalnya. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, disamping telah menggiatkan operasi-operasi rutin juga dilancarkan operasi-operasi khusus kepolisian yang diarahkan secara selektif, seperti operasi terhadap kejahatan pencurian ranmor, perjudian, penyalahgunaan narkoba, pembajakan kaset audio/video dan operasi tertib lalu lintas dan lain-lain.

## Kasus Menonjol

Dari penggelaran operasional seperti ini berbagai kasus menonjol telah berhasil diselesaikan penanganannya oleh Polri seperti :

- a. Pemberantasan penyelundupan, pelanggaran undang-undang pelayaran di wilayah perairan kepulauan Riau dan operasi SAR terhadap bencana alam banjir di pantai timur Sumatera. Selama 5 tahun telah di tangani 1062 perkara dan dapat diselesaikan sebanyak 403 perkara.
- b. Pemberantasan kultivasi ganja gelap di wilayah Aceh selama tiga tahun berturut-turut sehingga telah berhasil menghambat jalur perdagangan gelap narkoba.
- c. Pemberantasan sindikat pencurian kendaraan bermotor telah berhasil membongkar kelompok-kelompok penjahat yang beroperasi di wilayah Jakarta, Jawa Barat/Bandung, Bogor, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumbagsel, Sumut dan Sulselra serta Sumbar. Kejahatan pencurian ranmor ini, bila diamati telah berkembang semakin canggih modus operandinya dan luas jaringannya.
- d. Kasus-kasus pembunuhan yang memerlukan penanganan penyidikan secara khas kepolisian dengan menerapkan teknik-teknik kriminalistik yang didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kepolisian seperti: pembunuhan bermotifkan asuransi di Maluku tahun 1988, kasus mayat terpotong-potong di Jakarta, Sukabumi, Sumbar dan Jatim.
- e. Penanganan kasus penggelapan, penipuan dan pembobolan Bank yang memanfaatkan teknologi komputer dan teknik-teknik percetakan yang canggih yang terjadi di luar Negeri atau melibatkan orang-orang asing telah berhasil diselesaikan penyidikannya dengan baik, bahkan telah diputus perkaranya di Pengadilan, kasus-kasus tersebut adalah :
 

Kasus pembobolan uang Bank BNI di New York, kasus perdagangan platina palsu ke luar negeri dengan korban orang Australia, kasus pemalsuan identitas anggota INTERPOL AMERIKA dan obligasi Bank Swiss, kasus pemalsuan Promissory nota Bank di Amerika, kasus penipuan di Bank, dan lain-lain.
- f. Kasus-kasus yang bersifat khusus dan dapat

digolongkan sebagai bentuk kejahatan korporasi seperti kasus biscuit beracun, kasus Pembuangan limbah luar negeri di kepulauan Riau, Jawa Timur, limbah sungai Citarum dan lain-lain, penyelundupan kayu secara besar-besaran di Palembang.

g. Kasus-kasus korupsi yang telah ditangani : yang terjadi di lingkungan Bank pemerintah, PT. Krakatau Steel, kasus YKAM, dan lain-lain. Dalam bidang ini selama 5 tahun telah di tangani sebanyak 292 perkara korupsi dan diselesaikan 250 perkara.

Sementara itu dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas khusus yang berlingkup nasional seperti pengamanan pemilu 1987 telah diselesaikan dengan baik, dan dalam tahun 1991 ini Polri mendapat kepercayaan untuk mengamankan tahun kunjungan Indonesia 1991 dan pengamanan pemilu tahun mendatang.

## Gambaran Tentang Lalu-Lintas

Upaya-upaya operasional Polri yang telah digelar dalam menegakkan disiplin berlalu-lintas selama lima tahun terakhir di wujudkan melalui operasi rutin dan operasi-operasi khusus dimana dalam pelaksanaannya telah berhasil menekan angka kecelakaan lalu-lintas. Namun jumlah korban mati akibat kecelakaan masih cukup tinggi. Dapat diamati bahwa faktor manusia masih merupakan faktor utama penyebab kecelakaan.

Gambaran angka-angka masalah lalu-lintas adalah sebagai berikut :

- a. Kecelakaan lalu-lintas tahun 1986— 1990.  
Tahun 1986 : 41638, tahun 1987 : 36756, tahun 1988 : 30388, tahun 1989 : 26984, tahun 1990 :/1 : 13070.
- b. Korban mati :  
Tahun 1986 : 10.692, tahun 1987 : 10.809, tahun 1988 : 10.456, tahun 1989 : 10.725, tahun 1990 / 1 : 5.356.
- c. Korban luka berat :  
Tahun 1986 : 22.184, tahun 1987 : 20.987, tahun 1988 : 17.946, tahun 1989 : 16.420, tahun 1990 : 8.428.
- d. Korban luka ringan :  
Tahun 1986 : 28.395, tahun 1987 : 26.528,

## Bidang Peningkatan Kemampuan Laboratorium Polri

Dalam menjawab tantangan KUHAP yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia di depan hukum, Polri juga meningkatkan kemampuan laboratorium Polri yang tergelar sejak dari Mabes Polri, sampai ke cabang-cabangnya di 4 Polda (Sumut, Jateng, Jatim dan Ujung Pandang) dimana kesemuanya telah memiliki peralatan teknologi yang cukup canggih.

### Pembangunan Fasilitas :

Sementara itu pembangunan fisik, perbaikan maupun pembangunan markas, pangkalan, asrama anggota dan fasilitas Rumah Sakit, Pusdik, telah dapat dilaksanakan sesuai petunjuk kebijaksanaan pimpinan ABRI dengan prioritas-prioritas tertentu.

Sedangkan dalam upaya bagi peningkatan kesejahteraan prajurit dan keluarganya sampai saat ini telah dapat di bangun fasilitas gedung untuk Yatim Piatu Polri, gedung untuk menampung kegiatan Purnawirawan Polri di Jakarta dan fasilitas-fasilitas lain seperti olah raga dan lain-lain.

## Bidang Kesehatan/Rumah Sakit

Adapun Rumah Sakit atau Tempat Perawatan Sementara (TPS) yang dimiliki Polri saat ini di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut :

1. RS Kepolisian Pusat di Kramat Jati Jakarta. Kualitasnya adalah tingkat II yang memiliki dokter spesialis yang lengkap serta didukung peralatan canggih. RS ini memiliki 220 tempat tidur dan dibina oleh Disdokkes Polri.
2. Dua buah RS Polda Sumut, masing-masing di Medan, kualitasnya tingkat III dengan 145 tempat tidur, dan mempunyai dokter spesialis, dan satu lagi di Tebingtinggi, tingkat IV dengan 40 tempat tidur. Kedua RS ini dibina oleh Disdokkes Polda Sumut.
3. RS Polda Sumbar di Padang, tingkat IV dengan 30 tempat tidur, dibina oleh Disdokkes Polda Sumbar.
4. RS Polda Riau di Pakan Baru, tingkat IV dengan 32 tempat tidur, dan dibina oleh Dis Dokkes Polda Riau.

5. Dua buah RS Polda Sumbagsel, masing-masing di Palembang, tingkat IV dengan 30 tempat tidur, dan di Jambi, tingkat IV dengan 30 tempat tidur. Keduanya dibina oleh Disdokkes Polda Sumbagsel.
6. RS Polda Jabar di Bandung, tingkat III dengan 75 tempat tidur, dibina oleh Disdokkes Polda Jabar.
7. Tiga buah RS Polda Jatim, masing-masing di Kediri, tingkat III dengan 200 tempat tidur, di Surabaya, tingkat IV dengan 52 tempat tidur, di Tulungagung, tingkat IV dengan 29 tempat tidur. Ketiganya dibina oleh Disdokkes Polda Jatim.
8. RS Polda Nusra di Kupang, tingkat IV dengan 40 tempat tidur, dan dibina oleh Disdokkes Polda Nusra.
9. Dua RS Polda Sulselra, masing-masing di Ujung Pandang, kelas III dengan 200 tempat tidur, dan di Kendari, tingkat IV dengan 30 tempat tidur. Keduanya dibina oleh Disdokkes Polda Sulselra.
10. Dua RS Polda Maluku, masing-masing di Ambon, tingkat IV dengan 26 tempat tidur, dan di Ternate, tingkat IV dengan 28 tempat tidur. Keduanya dibina oleh Disdokkes Polda Maluku.
11. RS Kepolisian Bhayangkara Porong, tingkat IV dengan 42 tempat tidur, dan dibina oleh Pusdik Sabhara Polri di Porong.
12. RS Kepolisian Secapa Polri, tingkat IV dengan 25 tempat tidur, dan dibina oleh Secapa Polri di Sukabumi.
13. RS Kepolisian AKPOL di Semarang, tingkat IV dengan 50 tempat tidur, dan dibina oleh AKPOL Semarang.

Selain Rumah Sakit, ada lagi Tempat Perawatan Sementara (TPS) yang terdapat di beberapa Polda sebagai berikut :

1. Dua TPS milik Polda Jatim, masing-masing di Lumajang dengan 20 tempat tidur, dan di Nganjuk dengan 20 tempat tidur. Semuanya dibina oleh Disdokkes Polda Jatim.

2. Dua TPS milik Polda Nusra, masing-masing di Singaraja dengan 10 tempat tidur, dan di Mataram dengan 10 tempat tidur. Semua dibina oleh Disdokkes Polda Nusra.
3. TPS Polda Sulselra di Bau-Bau dengan 15 tempat tidur, dan dibina oleh Disdokkes Polda Sulselra.
4. TPS Polda Sulutteng di Manado dengan 15 tempat tidur, dibina oleh Disdokkes Polda Sulutteng.
5. TPS Polda Maluku di Ambon dengan 20 tempat tidur, dan dibina oleh Disdokkes Maluku.

### **Bidang Kerjasama Pendidikan Luar Negeri**

Sementara itu kerjasama luar negeri dalam rangka penyiapan tenaga-tenaga profesional di bidang penyidikan, lalu-lintas, manajemen, komplek dan sejenisnya telah dilakukan atas bantuan dari FBI di Amerika, Bramshil Police

College di Inggris, Bundes Kriminal AMT dari Jerman Barat. Serta dari Perancis dan Belanda serta negara-negara lain melalui proyek-proyek bantuan luar negeri. Sejalan dengan itu upaya peningkatan keterampilan dan kejuruan bagi Bintara Polri terus ditingkatkan mengingat golongan Bintara merupakan ujung tombak dari penampilan Polri di masyarakat.

Selanjutnya dalam tingkatan kesatuan telah pula dimantapkan kemampuan-kemampuan penegakan hukum, penertiban masyarakat, penindakan gangguan keamanan, penyelamatan masyarakat dan pelayanan masyarakat di seluruh jajaran Polri, sehingga unit-unit operasional dalam berbagai fungsi teknis yang jumlahnya hampir 9.000 unit telah berada dalam kondisi siaga operasional. Begitu pula kemantapan satuan-satuan kewilayahan dalam penyelenggaraan manajemen Polri telah pula dilakukan melalui penataan piranti-piranti lunak serta program-program penataran bagi eselon pimpinan diberbagai tingkatan.



# Tantangan Masa Depan

Tantangan yang dihadapi Polri dalam bidang Kamtibmas masa mendatang ada dua hal. Pertama, bagaimana mengatasi meningkatnya gelagat perkembangan ancaman Kamtibmas yang semakin kompleks dan canggih.

Adapun bentuk-bentuk ancaman Kamtibmas dimasa mendatang adalah sebagai berikut :

- Gangguan Kamtibmas konvensional, dalam arti merupakan gejala patologis sosial yang selalu melekat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat secara universal.
- Gangguan Kamtibmas konvensional berdimensi baru, dimana pola dasar/pattern yang bersifat dasar adalah perilaku menyimpang yang konvensional, namun dalam perkembangannya telah menonjolkan intensitas yang meningkat, seperti dalam hal modus operandi, mobilitas, sasaran, jumlah pelaku dan peralatan yang dipakai.
- Gangguan Kamtibmas sebagai dampak pembangunan nasional yang menunjukkan ciri-ciri yang berbeda dengan gangguan-gangguan tersebut diatas, baik dari segi motivasinya, bentuk fluktuasi ancaman serta locus delictinya, maupun dari segi bidangnya.

Yang Kedua, adalah bagaimana mengatasi keterbatasan sumber daya yang mendukung segenap penyelenggaraan kegiatan Polri.

Kedua tantangan diatas paradoksal, dalam arti seharusnya untuk mengatasi ancaman Kamtibmas yang semakin meningkat dalam segala segi, diperlukan dukungan sumber daya yang cukup memadai, seimbang dengan peningkatan beban kerjanya.

Keterbatasan Sumber Daya Anggaran Negara, tentu akan membuat anggaran Polri menjadi terbatas pula. Dengan demikian, pelaksanaan tugas Polri baik dibidang pembinaan maupun Opsnal akan dihadapkan pada keterbatasan-keterbatasan Sumber Daya itu.

Keterbatasan Sumber Daya ini jelas dirasakan akibatnya, yaitu kurangnya tenaga personil, baik kuantitas maupun kualitasnya, serta kurangnya sarana-sarana lain yang dibutuhkan dalam bidang Opsnal dan pembinaan.

Namun demikian tidaklah berarti Polri hanya akan bekerja seadanya saja, namun harus mampu mengoptimasikan Sumber Daya yang ada sehingga sanggup mengatasi intensitas gelagat perkembangan ancaman Kamtibmas itu. Inilah suatu tantangan yang harus dihadapi dan harus di atasi. ♦

# Perkembangan Kriminalitas

Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah saat ini telah membawa berbagai perubahan dan menimbulkan bermacam kegiatan masyarakat dalam semua segi kehidupan, bernegara, berbangsa maupun kehidupan bermasyarakat itu sendiri.

Perubahan tersebut mencakup semua aspek, diantaranya perubahan dalam tatanan struktur sosial masyarakat termasuk tatanan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut dan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Didesak oleh tuntutan kebutuhan yang semakin tinggi dan kompleks serta kondisi diri yang belum siap, akan terjadi konflik nilai-nilai kehidupan yang tercetus dalam sikap dan tingkah laku menyimpang berwujud tindakan kejahatan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dewasa ini tidak saja membawa manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga menimbulkan berbagai akibat sampingan (side effect) yang negatif, diantaranya timbul kriminalitas secara kualitatif.

Peningkatan kriminalitas secara kualitatif ini antara lain terlihat dari subyeknya (pelaku), metodenya yang meliputi modus operandinya (cara kerja, teknik, waktu), sasaran, alat yang digunakan, ruang gerak, dan motivasi dari pada pelaku (subyeknya).

Pentas kejahatan yang dahulu didominasi oleh kejahatan yang bersifat tradisional, dewasa ini telah mengalami pergeseran, digantikan oleh kejahatan yang lebih maju, hal ini dapat dibedakan bila ditinjau dari segi subyek/pelaku, metoda/modus operandi dan obyek/korban.

## a. Dari segi subyek (pelakunya).

Semula kejahatan pada umumnya dilakukan secara perorangan, dewasa ini kejahatan cenderung dilakukan oleh kelompok-kelompok,

badan hukum bahkan mengarah kepada organisasi crime. Disamping itu juga para pelakunya mempunyai keahlian khusus dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan motivasinya tidak hanya semata-mata bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya secara pribadi atau kelompok (keuntungan ekonomi), tetapi mengarah kepada tujuan politis dalam arti merongrong kewibawaan pemerintah.

## b. Dari segi metodenya (modus operandi).

Semula kejahatan hanya dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang sederhana, sekarang berkembang dengan menggunakan alat-alat teknologi tinggi seperti senjata api, mobilitas tinggi, komunikasi radio, bahan-bahan kimia dan lain-lain.

Tindakan kekerasan yang semula dilakukan apabila terpaksa sekali atau dalam rangka mempertahankan diri, sekarang tindakan kekerasan lebih cenderung bersifat sadisme, begitu juga yang semula kejahatan dilakukan pada malam hari sekarang berkembang dengan tidak mengenal waktu serta menghilangkan jejak (Awaloedin Djamin, 1984, p.545). Namun disisi lain terdapat juga kejahatan yang dilakukan dengan menghindarkan sejauh mungkin terjadinya kekerasan fisik (non violence) dan terjadinya korban langsung (non Victim Crime).

## c. Dari segi obyek (korban/sasaran).

Yang menjadi korban/sasaran dari tindakan kejahatan yang dilakukan, semula adalah masyarakat biasa dalam arti perorangan (pada umumnya), sekarang menjadi berkembang terhadap perusahaan-perusahaan, bahkan terhadap ketertiban umum dan keamanan lingkungan hidup.

## Kejahatan Dimensi Baru

Dari keseluruhan uraian mengenai perkembangan kriminalitas tersebut diatas, khususnya ditinjau dari sudut subyek/pelaku yang meliputi bentuk dan motivasinya, dari sudut metoda yang meliputi modus operandinya yaitu cara kerja atau teknik-teknik dilakukannya kejahatan, waktu, ruang gerak, dan sarana (alat) yang digunakan, serta dari sudut obyek yaitu sasaran atau korban, maka dapat dirumuskan pengertian tentang Kejahatan Dimensi Baru, yaitu bahwa Kejahatan Demensi Baru adalah kejahatan yang dilakukan oleh kaum intelektual maupun terkemuka (pejabat) atau setidaknya oleh mereka yang mempunyai keahlian khusus baik secara perorangan (individu),

kelompok atau badan hukum dengan menggunakan cara-cara tertentu (pada umumnya menghilangkan jejak dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi) sehingga sulit pembuktiannya, dilakukan dengan kekerasan atau tanpa kekerasan, dengan tidak mengenal batas wilayah dan waktu serta mengarah kepada kepentingan ekonomis atau politis.

Kejahatan Dimensi Baru diatas adalah jelas merupakan produk dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, tentunya dalam hal ini akan mempunyai karakteristik-karakteristik atau ciri-ciri khusus tersendiri bila dibandingkan dengan kejahatan konvensional.

Perbedaan mendasar antara kejahatan konvensional dengan Kejahatan Demensi Baru adalah :

KEJAH. KONVENSIONAL	ANATOMI	KEJAH. DIMENSI BARU
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perorangan, kelompok kecil.</li> </ul>	Pelaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat pemerintah/swasta</li> <li>- Kelompok dengan organisasi sederhana, badan hukum.</li> <li>- Memiliki kemampuan intelektual tinggi dengan ilmu pengetahuan dan keahlian khusus.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebutuhan hidup</li> <li>- Balas dendam</li> </ul>	Motif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk kepentingan pribadi</li> <li>- Untuk kepentingan suatu badan.</li> <li>- Mission politis, merongrong kewibawaan pemerintah.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sederhana</li> </ul>	Alat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknologi canggih/ilmu pengetahuan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Siang/malam hari</li> </ul>	Waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap saat.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kekerasan</li> </ul>	Sifat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non Violence lebih besar</li> <li>- Secara diam dan tanpa meninggalkan bekas.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perorangan</li> <li>- Regional, Nasional</li> </ul>	Korban Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan, Negara, perorangan.</li> <li>- Nasional, Internasional.</li> </ul>

# Penggolongan Kejahatan Dimensi Baru

Pada umumnya Kejahatan Dimensi Baru selalu bergerak dalam kelompok kejahatan yang disebut "White Collar Crime, Corporated Crime, Computer Crime dan International Crime", meliputi berbagai jenis kejahatan yang selama ini telah ada atau jenis kejahatan yang baru.

Untuk itu semua kita dapat melihat uraian dibawah ini :

## a. White Collar Crime

White Collar Crime menurut Sutherland adalah "a violation of criminal law by the person of the upper socio economic class in the course of his occupational activities". Dalam perkembangan selanjutnya terhadap batasan ini perlu ditambahkan "violation of trust". Dengan demikian maka "White Collar Crime" tersebut dapat dilihat ciri-cirinya sebagai berikut :

### Dari Sudut Subyeknya (Pelaku)

Kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang intelek, orang-orang terkemuka dalam jabatannya pada suatu organisasi pemerintah maupun swasta/perusahaan. Dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, dengan motivasi untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya.

### Dari Sudut Metodanya

Modus operandi (cara/kerja/teknik) pelaku dalam kejahatan ini antara lain: memalsukan tanda tangan, tulisan tangan dan dokumen. Memberikan hadiah, upeti dan komisi yang dilaksanakan dengan kerjasama pihak ketiga serta menghapus bukti-bukti dengan rapi. Alat yang digunakan antara lain: alat pemalsu tanda tangan, tulisan tangan dan dokumen yang mutakhir. Sedangkan waktu yang digunakan dalam kejahatan ini adalah tidak mengenal waktu, serta mempunyai ruang gerak secara lokal, regional maupun nasional.

### Dari Sudut Obyeknya (Korban/Sasaran)

Yang menjadi korban/sasaran dari kejahatan ini antara lain negara (pemerintah), perusahaan (swasta), dibidang keuangannya (merupakan keuangan negara/perusahaan).

## b. Corporated Crime

Organisasi berbadan hukum semula timbul dalam hukum perdata, sebagai upaya untuk menjalankan perusahaan-perusahaan dengan harapan dapat memberikan keuntungan lebih baik lagi, seperti: Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, BUMN, dan lain-lain.

Pada akhir-akhir ini terjadi kerjasama antara pemilik-pemilik modal dengan jalan bergantung (bahkan sampai mencapai jumlah yang sangat besar). Penggabungan ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan, terhimpunnya modal yang lebih banyak, tergabungnya keterampilan-keterampilan tertentu dalam usaha yang sama, mempunyai daya saing yang lebih besar, adanya perkiraan kemungkinan terjadinya resiko kerugian, dan untuk pembagian tugas (pekerjaan) yang lebih tepat.

Dari perkembangan badan hukum diatas kemudian timbul istilah kejahatan korporasi (corporate crime) yaitu kejahatan yang dilakukan oleh suatu organisasi yang berbentuk badan hukum sebagai suatu perusahaan yang besar, bonafide, mempunyai jangkauan yang luas, memiliki modal dan kapital yang besar baik PMA maupun PMDN, dan keberadaannya sangat dominan dalam sistem perekonomian di Indonesia (Dr. Rudi Prasetyo, SH).

Jenis kejahatan ini apabila tidak ditangani secara cepat dapat menimbulkan gejala keresahan dalam masyarakat, karena akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi ini disamping individu juga masyarakat dan negara dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis semata-mata dan menghalalkan segala cara (B. Mardjono Reksodiputra SH, MA).

Adapun mengenai ciri-ciri dari kejahatan korporasi (corporated crime) ini adalah sebagai berikut :

#### **Dari Sudut Subyeknya (Pelaku)**

Kejahatan ini dilakukan oleh suatu badan hukum, dalam hal ini adalah "Pengurus Badan Hukum" tersebut, termasuk "Pemberi Perintah" untuk melakukan kejahatan, antara lain bisa pemegang saham, pemilik modal atau orang luar dari suatu perkumpulan (Dr. Rudi Prasetyo, SH), dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar - besarnya dalam bidang ekonomi.

#### **Dari Sudut Methodanya**

Modus operandi (cara kerja/teknik) pelaku dalam kejahatan ini adalah dengan menghalalkan segala cara, seperti antara lain: menghindarkan pajak dan pungutan-pungutan lain yang diwajibkan oleh negara, mengiklankan secara menyesatkan (merugikan konsumen), memalsukan produk-produk industri, melakukan usaha Bank dalam Bank tanpa ijin Menteri Keuangan, menggunakan dokumen palsu untuk proyek fiktif sehingga mendapatkan kredit dari Bank serta penyalahgunaan pemakaian kredit, memalsu surat perintah pemindah bukuan atau surat perintah transfer, menarik cek kontan yang dananya tidak cukup, menarik cek/bilyet giro yang rekeningnya telah ditutup, melakukan pembakaran/kebakaran (untuk mendapatkan asuransi, menghilangkan bukti-bukti terjadinya tindak pidana korupsi) tidak memperdulikan keselamatan kerja dan kesehatan buruh, membuang limbah industri secara sembarangan (tanpa dinetralisir lebih dahulu), memalsu dokumen dan mendaftarkan barang-barang produksi tidak sebagaimana mestinya dalam menyelenggarakan perdagangan internasional. Kejahatan ini dilakukan dengan tidak mengenal waktu dan mempunyai ruang gerak baik nasional maupun internasional.

Sedangkan alat yang digunakan dalam kejahatan ini antara lain: Alat-alat pemalsu dokumen yang mutahir, bahan-bahan kimia, sarana angkutan laut dan udara.

#### **Dari Sudut Obyeknya**

Yang menjadi korban/sasaran dari kejahatan

ini antara lain: perorangan (nasabah), masyarakat dan negara (pemerintah).

#### **c. Kejahatan Komputer (Computer Crime)**

Dengan terjadinya kemajuan dibidang teknologi dewasa ini maka muncul suatu tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan komputer (Computer Crime). Seorang yang menguasai "Rahasia" penggunaan komputer akan sangat potensial untuk merusak efisiensi dan merampas data-data perusahaan yang disentralisasi pada komputer.

Orang-orang tersebut sering dinamakan "Penetrators" programmer, consumer, analyst, accountant, repairman, cashier, director, manajer, operator dan orang-orang luar yang mempunyai hubungan dengan kecakapan teknologi tinggi (Dr. Susetio Pramusinto, 1988).

Adapun ciri-ciri dari pada kejahatan ini antara lain adalah sebagai berikut :

#### **Dari Sudut Subyeknya (Pelaku)**

Kejahatan ini dapat dilakukan secara perorangan kelompok atau oleh suatu badan hukum dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau untuk membuka rahasia perusahaan/negara dalam rangka menggoyahkan perusahaan/negara.

#### **Dari Sudut Methodanya**

Modus operandi (cara kerja/teknik) pelaku dalam kejahatan ini antara lain : merusak efisiensi data atau merampas atau mencuri data-data yang disentralisasi dalam komputer (termasuk menghapus, menambah, mengcopy dan menggunakan data secara illegal serta illegal transfer). Kejahatan ini dilakukan dengan tidak mengenal waktu dan mempunyai ruang gerak baik nasional, regional, maupun internasional. Sedangkan alat yang digunakan dalam kejahatan ini adalah komputer (alat teknologi tinggi).

#### **Dari Sudut Obyeknya (Korban/Sasaran)**

Yang menjadi korban/sasaran dari kejahatan ini antara lain adalah negara (pemerintah), perusahaan-perusahaan termasuk Bank.

#### d. International Crime

Kejahatan internasional (International Crime) yaitu kejahatan yang pada umumnya telah ditetapkan dalam konvensi internasional meliputi ; kejahatan narkotika, kejahatan uang palsu, kejahatan pembajakan laut (sea hijacking), kejahatan pembajakan udara (air hijacking), terorisme dan kejahatan hak ciptaa/paten/merek.

##### 1) Kejahatan Narkotika

Narkotika adalah uat/obat yang dapat menimbulkan pingsan kehilangan kesadaran sama sekali atau tidur (Incyclopaedy Americana.p.75) Ada dua golongan narkotika yaitu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti candu/opium, Cannabis/ganja, cocain, dan Belladonea (menimbulkan mabuk, illusi/bayangan dan dellinium), dan yang berasal dari sinthetis seperti : Heroin dari morphine, Methadone. Dikatakan sebagai kejahatan narkotika yaitu apabila narkotika tersebut diusahakan secara illegal.

Ada empat golongan pelaku dalam hal ini yaitu: golongan penanam, golongan yang memproduksi (Producers), golongan trafickers/pushers (pedegar/pegecer = memperdagangkan) dan golongan pemakai/pecandu (user/addict).

Adapun ciri-ciri daripada kejahatan narkotika tersebut adalah sebagai berikut :

##### Dari Sudut Subyeknya (Pelaku)

Kejahatan ini dapat dilakukan baik oleh perorangan, kelompok maupun Badan Hukum dalam hal menanam, memproduksi, memperdagangkan (mengedar/mengecer) dan memakai dengan motivasi untuk tujuan ekonomis dan politis.

##### Dari Sudut Methodanya

Modus operandi (cara kerja/taktis) pelaku dalam kejahatan ini antara lain : menanam, memproduksi, melakukan perdagangan, mengedarkan/mengecerkan dan memakai secara illegal. Dilakukan dalam ikatan jaringan yang luas secara terselubung dan selalu berubah-ubah sesuai sikon yang dilakukan dengan cara tutup mulut.

Menggunakan transportasi secara berpindah-pindah dan beranting. Menggunakan travel cargo dan jasa pos. Memanfaatkan fasilitas ekspor/impor. Melakukan tindak pidana apabila jaringan sudah mulai terungkap dan bagi golongan pemakai/pecandu dalam stadium I dan II cenderung melakukan tindak pidana. Kejahatan ini dilakukan dengan tidak mengenal waktu dan mempunyai ruang gerak baik nasional, regional maupun internasional.

Adapun mengenai alat yang digunakan dalam kejahatan ini antara lain; alat-alat laboratorium dan bahan-bahan kimia untuk membuat Narkotika Sintetis, alat suntik dan lain-lain.

##### Dari sudut Obyeknya (korban/sasaran)

Yang menjadi korban/sasaran dari kejahatan ini antara lain negara (pemerintah), masyarakat (bangsa) dan perorangan.

##### 2) Kejahatan Uang Palsu (Mata Uang)

Dengan adanya perkembangan teknologi yang membuat jarak semakin dekat dan saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya semakin terasa, maka beberapa kepentingan tertentu sangat dirasakan oleh negara-negara sebagai kepentingan bersama yang harus ditanggulangi secara bersama pula. Untuk itu maka dibuatlah perjanjian agar dapat menggarap suatu kejahatan tertentu walaupun kejahatan itu relatif tidak merugikan negara yang bersangkutan, atau setidaknya tidak ditujukan kepada negara yang bersangkutan serta kejahatan tersebut tidak terjadi di negara tersebut.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional tersebut bagi negara-negara yang menyetujui supaya menangkalnya dalam perundang-undangan masing-masing untuk memberantas kejahatan-kejahatan seperti "Kejahatan Mata Uang", "Pembajakan di Laut" dan Pembajakan Pesawat Terbang".

Dengan tidak mempersoalkan locus delicti dan kewarganegaraan pelaku (S.R. Sianturi, SH. 1986) P.111).

Disamping itu negara RI yang berdaulat adalah wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya. Adapun kepentingan nasional Indonesia yang ditentukan harus

dilindungi antara lain adalah tentang "Keamanan Uang Negara" (S.R. Sianturi, SH, 1986, P.108).

Mengenai ciri-ciri dari pada kejahatan Uang Palsu (Mata Uang) tersebut adalah sebagai berikut :

#### **Dari sudut Subyeknya (pelaku)**

Kejahatan uang palsu dapat dilakukan baik oleh perorangan, kelompok maupun oleh badan hukum dengan motivasi secara ekonomis adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, disisi lain secara politis adalah untuk mengacaukan atau menghancurkan perekonomian dan keuangan negara.

#### **Dari sudut metodanya**

Modus operandi (cara kerja/teknik) pelaku dalam kejahatan ini antara lain : baik untuk uang giral maupun uang chartal RI/Asing dilakukan dengan mencetak secara offset multi colour/separation yang dilakukan secara rapi sehingga sulit untuk mengidentifikasi kepalsuannya.

Disisi lain dalam mengedarkan uang palsu tersebut dilakukan dalam skala besar melalui transaksi bisnis dengan kerjasama pihak bank negara lain dan dilaksanakan dengan "cut out system". Dalam melakukan kejahatan adalah tidak mengenal waktu dan mempunyai ruang gerak baik nasional, regional maupun internasional.

Sedangkan alat yang digunakan dalam kejahatan ini antara lain; alat cetak grafis mutahir, alat cetak offset multi colour/separation dan bahan-bahan kimia.

#### **Dari sudut obyeknya (korban/sasaran)**

Yang menjadi korban/sasaran dari kejahatan ini antara lain adalah negara (pemerintah) karena dapat mengacaukan/menghancurkan perekonomian/keuangan negara dan perusahaan-perusahaan termasuk bank.

### **3) Kejahatan Pembajakan di Laut (Sea hijacking)**

Menurut konvensi internasional, antara lain ; Konvensi Tokyo (14 September 1963), Konvensi The Haque (16 Desember 1970) dan Konvensi Montreal (23 September 1971) telah disepakati bahwa "Tidak melindungi para Pembajak (Pembajak di laut dan pesawat terbang)". Mereka dapat diadili dimana mereka

tertangkap, bahkan jika tertangkap di lautan lepas yang kemudian diseret ke negara yang menangkapnya, diadili di negara tersebut (S.R. Sianturi, SH, 1986, P.112).

Yang dimaksud "Pembajakan di Laut" adalah melakukan tindakan kekerasan dengan menggunakan perahu terhadap suatu perahu lainnya, termasuk kepada orang-orang atau barang yang ada di perahu tersebut secara melawan hukum. (S.R. Sianturi, SH. P.431). Kejahatan ini dapat dilakukan di Perairan daratan (coastal waters, seperti sungai termasuk muaranya, danau, teluk), d perairan wilayah, perairan kedalaman (internal seas) dan perairan bebas/lautan bebas (high seas).

Mengenai ciri-ciri dari kejahatan pembajakan di laut tersebut adalah sebagai berikut :

#### **Dari sudut subyeknya (pelaku)**

Kejahatan pembajakan di laut dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun oleh kelompok dengan motivasi secara ekonomis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya (pada umumnya).

#### **Dari sudut metodanya**

Modus operandi (cara kerja/teknik) pelaku dalam kejahatan ini antara lain ; melakukan kekerasan terhadap perahu, orang dan barang yang ada diperahu/kapal.

Kejahatan ini dilakukan dengan tidak mengenal waktu dan mempunyai ruang gerak baik nasional, regional maupun internasional. Sedangkan alat yang digunakan dalam kejahatan ini antara lain ; perahu, kapal dan senjata api.

#### **Dari sudut obyeknya (korban/sasaran)**

Yang menjadi korban/sasaran dari kejahatan ini antara lain adalah negara (pemerintah), perusahaan pelayaran dan perorangan.

### **4) Kejahatan Pembajakan Udara (Air hijacking)**

Kejahatan pembajakan udara sebagaimana pembajak di laut sudah diklasifikasikan oleh Konvensi Internasional sebagai kejahatan internasional (lihat penjelasan International Crime ad. 4 sub c). Adapun mengenai ciri-ciri dari kejahatan pembajakan udara adalah sebagai berikut :

**Dari sudut subyeknya (pelaku)**

Kejahatan ini dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun oleh kelompok dengan motivasinya adalah untuk kepentingan politik kelompoknya (melaksanakan kehendak kepada pengusaha dan atau untuk mendapatkan uang tambahan).

**Dari sudut metodenya**

Modus operandi (cara kerja/teknik) pelaku dalam kejahatan ini antara lain ; melakukan tindakan kekerasan atau ancaman kekuasaan atau mengancam orang lain dalam pesawat, merampas, menguasai pesawat dalam penerbangan. Menempatkan dalam pesawat suatu alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara atau kerusakan pesawat udara. Kejahatan ini dilakukan dengan tidak mengenal waktu dan mempunyai ruang gerak baik nasional, regional maupun internasional. Sedangkan alat yang digunakan dalam kejahatan ini adalah ; senjata api, bahan-bahan peledak dan lain-lain.

**Dari sudut obyeknya (korban/sasaran)**

Yang menjadi korban/sasaran dari kejahatan ini antara lain adalah negara (pemerintah), perusahaan penerbangan dan perorangan.

**5). Kejahatan Terorisme**

"Terorisme" menurut kamus diartikan sebagai "tindakan perbuatan atau kegiatan yang dapat menimbulkan rasa takut kepada pihak lain". Sedangkan menurut David Fromkin dalam bukunya yang berjudul "The Strategy of Terrorism", terorisme diartikan sebagai "Kekuasaan yang dipergunakan untuk menimbulkan ketakutan dengan tujuan agar ketakutan ini membawa seseorang pada suatu program kegiatan yang sangat berlainan dari pada yang dimilikinya dan memenuhi apa yang diinginkan Terorisme". Terorisme ditampilkan untuk menarik perhatian melalui kejutan, penciptaan situasi yang mencekam dan apa saja yang tidak dapat dibayangkan yang akibat-akibat fisiknya secara langsung tidak diinginkan dengan tanpa maaf dan tanpa menyesal (Drs. H. Soebroto, SH, 1988, p.13.15).

Adapun mengenai ciri-ciri dari kejahatan Terorisme ini adalah sebagai berikut :

**Dari sudut subyeknya (pelakunya)**

Kejahatan ini dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun oleh kelompok dengan motivasi baik langsung atau tidak langsung untuk menggoyahkan pemerintah atau untuk mengadakan perpecahan dalam masyarakat.

**Dari sudut metodenya**

Modus operandi (cara kerja/teknik) pelaku dalam kejahatan ini antara lain ; untuk tindakan penculikan, penyanderaan, pemboman, penyerangan bersenjata, pembajakan (pesawat udara, Kapal, K.A, Bis dan alat transportasi lainnya), pembakaran, peracunan, pembunuhan, pengotoran (dengan bahan-bahan kimia, kuman-kuman, radiologi) dilakukan dengan taktik hit and run, memilih sasaran yang memberi resiko paling sedikit tetapi mempunyai daya tarik politis yang memuaskan, memilih kota sebagai tempat operasi karena lebih banyak sasaran dan lebih banyak sarana pendukung, memilih skala prioritas jenis aksi (tindakan) yang akan dilakukan dari yang sederhana sampai dengan yang canggih.

Kejahatan ini dilakukan dengan tidak mengenal waktu dan mempunyai ruang gerak baik nasional, regional maupun internasional. Sedangkan alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan ini antara lain ; senjata api dengan telescoop dan alat peredam, bahan-bahan kimia, bahan-bahan peledak, bom, remote controle, booby trap dan lain-lain.

**Dari sudut obyeknya (korban/sasaran)**

Yang menjadi korban/sasaran dari kejahatan ini antara lain adalah pemerintah, masyarakat dan perorangan.

**6) Kejahatan Hak Cipta/Merek**

Mengenai ciri-ciri dari pada kejahatan ini adalah sebagai berikut :

**Dari sudut subyeknya (pelaku)**

Kejahatan ini dapat dilakukan secara perorangan, kelompok atau oleh suatu badan hukum dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, menghindari pajak atau untuk menjatuhkan suatu perusahaan

pemegang hak merk karena dianggap sebagai saingan.

**Dari sudut metodenya**

Modus operandi (cara kerja/teknik) pelaku dalam kejahatan ini antara lain : memproduksi/mengadakan/memasarkan barang yang merupakan hak cipta/patent/desain pihak lain dengan tidak sah.

Kejahatan ini dilakukan dengan tidak mengenal waktu dan mempunyai ruang gerak baik nasional, regional maupun internasional. Sedangkan

alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan ini antara lain alat mutahir untuk meniru merk suatu barang, alat mutahir untuk membuat barang yang diciptakan pihak lain, alat-alat cetak, rekaman yang mutahir untuk memproduksi barang hasil karya cipta pihak lain dan lain-lain.

**Dari sudut obyeknya (korban/sasaran)**

Yang menjadi korban/sasaran dari kejahatan ini antara lain adalah negara (pemerintah), perusahaan dan perorangan. ~



## Langkah–Langkah Penanggulangan

Menilai gelagat perkembangan kondisi lingkungan strategis dalam dan luar negeri, serta pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesemuanya mengisyaratkan kepada kita, bahwa tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi menjelang tahap tinggal landas nanti, pasti akan semakin berat dan kompleks.

Terjadinya dinamika sosial dan kemajuan-kemajuan dalam segala sendi kehidupan dalam suatu interaksi sosial, disatu sisi menghasilkan hal yang positif, namun disisi lain dapat menimbulkan dampak sampingan negatif, yang menuntut kemampuan antisipasi Polri secara akurat dan berkesinambungan.

Berbagai bentuk kerawanan maupun ancaman, yang potensial maupun aktual sebagai akibat keadaan tersebut, pada hakikatnya dapat merupakan ancaman, terhadap jalannya pembangunan nasional, yang pada akhirnya dapat merupakan ancaman terhadap keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD '45.

Dari apa yang telah diuraikan diatas, jelaslah bahwa semakin beratnya tantangan yang harus dihadapi Polri sebagai alat negara penegak hukum, maupun sebagai pembina Kamtibmas, antara lain disebabkan oleh :

- Adanya kecenderungan semakin meningkatnya tindak kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitas, dalam wujud kejahatan-kejahatan dimensi baru, sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun pengaruh deras arus informasi dan globalisasi, dalam hal ini Polri akan dihadapkan pada subyek pelaku yang semakin profesional, motif dan sasaran yang semakin kompleks, serta

modus operandi yang semakin canggih, yang mampu melintasi batas wilayah dan negara.

- Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi, baik dalam kehidupan kenegaraan maupun kemasyarakatan, sebagai akibat kemajuan dan perkembangan disegala bidang kehidupan, serta semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan hidup, dan ketatnya persaingan antar individu maupun kelompok, diberbagai segi kehidupan masyarakat.

### Perlu Terobosan Secara Konsepsional

Dengan melakukan evaluasi analisis secara cermat terhadap kondisi nyata serta berbagai usaha pembenahan, yang telah dan akan terus dilakukan dalam jajaran Polri, dihadapkan kepada semakin berat dan kompleksnya tantangan masa depan, maka semakin tergambar dengan jelas, bahwa tantangan tersebut tidak akan dapat diatasi, hanya dengan mengandalkan cara-cara konvensional semata, namun perlu pula diimbangi oleh usaha-usaha dan terobosan secara lebih konsepsional, profesional dan proporsional, antara lain sebagai berikut :

1. Mengutamakan tindakan pencegahan disamping upaya penindakan dengan cara memanfaatkan segala potensi penanggulangan yang ada dan melekat di dalam masyarakat itu sendiri, guna memerangi kejahatan secara swakarsa, untuk itu diperlukan upaya peningkatan kemampuan peran serta masyarakat, dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang tertib, aman, tenteram dan teratur, sebagai realisasi dari amanat GBHN tentang sistem Kamtibmas yang bersifat swakarsa.
2. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan

semangat kepejuangan aparat Polri, dalam memelopori penataan segenap pranata sosial, yang diarahkan untuk mengurangi kerawanan serta dampak negatif yang timbul di dalam masyarakat, sebagai akibat kemajuan pembangunan disegala bidang.

3. Mengembangkan pengetahuan dan daya analisis, serta profesionalisme setiap aparat Kepolisian terhadap pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kriminalitas, dengan memanfaatkan semua disiplin ilmu yang relevan.
4. Menata dan memantapkan mekanisme anti kejahatan, yang telah melekat dalam berbagai pranata kehidupan kemasyarakatan, untuk benar-benar mampu berperan menjadi mitra Polri, dalam arti yang luas.
5. Meningkatkan kualitas kemampuan manajerial dan kepemimpinan Polri sehingga mampu meningkatkan dan mengefektifkan kiprah dibidang pembinaan dan operasional, baik melalui upaya-upaya yang bersifat konvensional, namun melalui berbagai terobosan inovatif.
6. Bertumpu pada strategi bottom-up dengan mengutamakan Polsek sebagai ujung tombak operasional Polri dan pembangunan fungsi-fungsi operasional sesuai lapis kemampuan dalam bentuknya berupa unit-unit kecil lengkap (UKL).
7. Menanggulangi kejahatan berkadar tinggi yang meresahkan masyarakat dan menghambat pembangunan nasional, secara tuntas dan sedini mungkin.
8. Melakukan inventarisasi dan analisa terhadap Police Hazard dan faktor-faktor korelatif kriminogen disetiap segi kehidupan jalur-jalur sosial seperti ABRI, Kampus,

entrepreneur dan pemuka agama, guna merumuskan pola-pola dan methoda operasional yang lebih akomodatif.

9. Pembenahan secara terus menerus disetiap jalur operasional yang mampu melembagakan sikap keterpaduan dan kebersamaan antar komuniti operasional dan komuniti pendukungnya dalam mewujudkan sistim operasional Polri yang mantap.

Disamping itu Polri dalam kehidupan bermasyarakat, maupun dalam pelaksanaan tugasnya haruslah berupaya meningkatkan disiplin pribadi serta solidaritas sosial.

Dengan penuh disiplin dan solidaritas sosial, kelak dapat diharapkan, masyarakat tidak membiarkan Polisi dalam kesendirian untuk memecahkan masalah Kamtibmas yang justru melekat dalam batang tubuh masyarakat itu sendiri. Apalagi memandang Polisi hanya dengan kaca mata sebelah yaitu dari kaca mata negatif saja, bahkan dengan sisi negatif ini malah di-besar-besarkan tanpa kehendak untuk ikut memberikan saran pemecahan yang terbaik kepada Polri. Sikap pandangan seperti ini apabila tetap berkembang barangkali akan menimbulkan sikap APRIORI sehingga masyarakat cenderung untuk menutup kenyataan terhadap pengorbanan para anggota Polri yang tetap hidup pas-pasan di tengah-tengah glamornya kemilau yang ditampilkan oleh sesama dan sebangsa disekelilingnya, serta ditengah-tengah hujan dan gelapnya malam dengan bekal kebanggaan pada Sapta Marga dan Tri Brata.

Dengan usaha-usaha dan terobosan seperti itulah berbagai ragam tantangan dalam bentuk apapun akan dapat diatasi dengan baik, sehingga peran Polri akan dapat ditingkatkan, serta diterima dengan penuh gairah dan ketulusan oleh seluruh lapisan masyarakat yang harus dilindungi dan diayomi. (Sari amanat Pangab pada acara serahterima Kapolri kepada Letjen Pol. Drs. Kunarto).

# Analisa Sumber Daya

Sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya logistik adalah sangat menentukan atas keberhasilan Polri dalam melaksanakan tugasnya.

Sebagaimana telah disinggung pada awal buku ini, bahwa oleh karena situasi dan kondisi global negara, maka Polri saat ini masih mengalami keterbatasan sumber daya, sekalipun tantangan yang dihadapi Polri semakin lama semakin berat.

Untuk itu tidak ada jalan lain kecuali melakukan pendayagunaan seoptimal mungkin semua sumber daya yang dimiliki, disamping meningkatkan kualitas dan penambahan kuantitas dari yang sudah ada.

## Sumber Daya Personil Polri

1. Pembinaan sumber daya personil Polri merupakan upaya yang menduduki posisi kunci bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peranan Polri dalam menegakkan Kamtibmas dengan segenap tantangannya yang semakin kompleks sejalan dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Personil Polri sebagai obyek pembinaan sumber daya Polri tersebut merupakan titik sentral yang sangat fundamental dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas yang diembannya, karena keberadaan dan peranannya ditengah-tengah masyarakat tidak dapat digantikan dengan peralatan teknologi betapapun canggihnya. Oleh karena itu pembinaan terhadap sumber daya manusia senantiasa merupakan proses berlanjut baik di bidang peningkatan ke-trampilan teknis profesionalnya maupun bidang kesejahteraan moril dan materiil prajurit sesuai dengan hak-haknya, agar dalam menjalankan tugasnya ditengah masyarakat dapat menampilkan citra Bhayangkara yang handal.
3. Kekuatan personil Polri pada keadaan bulan Nopember 1990 adalah sebesar 166.830 prajurit Polri dan 20.352 PNS Polri yang akan terus dikembangkan untuk mencapai suatu kekuatan yang mampu beroperasi pada 17 wilayah Kepolisian dengan berbagai suku bangsa dan budaya serta kekhasan masing-masing daerah serta tingkat kemajuan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam kekuatan Polri.
4. Pembinaan sumber daya personil Polri meliputi :
  - 1) Proses pembinaan personil perorangan yang seluruh kegiatannya mengupayakan untuk menyiapkan prajurit yang mampu mandiri serta memenuhi kualifikasi kemampuan profesional kepolisian serta sesuai dengan prinsip menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat.
  - 2) Proses pembinaan kesejahteraan moril dan materiil sesuai dengan kebutuhan dan hak prajurit.
5. Rangkaian kegiatan utama dalam pembinaan personil perorangan meliputi :
  - 1) Penyediaan tenaga :
    - a) Mencakup kegiatan pengklasifikasian penyalangan dan usaha untuk memperoleh personil Polri yang sesuai dengan batas minimal kualifikasi kemampuan yang telah ditentukan.
    - b) Penentuan kriteria calon peserta didik untuk dapat diterima pada masing-masing jenjang pendidikan Polri harus memenuhi kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan tugas.
    - c) Komponen pendidikan pada tiap jenjang dan jenis pendidikan harus mengacu pada Sisdik ABRI yang juga merupakan penjabaran Sisdiknas dan

bertujuan mewujudkan kemampuan profesional kepolisian yang dilandasi jiwa kejuangan dan daya penalaran kecakapan intelektual guna penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kepolisian, sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditentukan.

d) Tujuan penyelenggaraan pendidikan bagi masing-masing jenjang maupun spesialisasi dalam pendidikan Polri dijabarkan dari kebutuhan akan kualitas dan kapasitas kemampuan bagi pelaksanaan tugas, dan kebutuhan tersebut dijadikan pedoman untuk menentukan materi bahan ajaran dalam upaya mewujudkan kemampuan profesional kepolisian yang harus dicapai.

e) Penyelenggaraan pendidikan dan latihan yang sedemikian ini untuk dapat mengawaki pelaksanaan tugas pokok Polri, mengisi jenjang jabatan di Kesatuan Kewilayahan maupun kesatuan fungsi sesuai dengan lapis-lapis kemampuan yang telah ditentukan.

## 2) Penggunaan personil

a) Merupakan bagian dari tahapan proses pendayagunaan potensi dan kemampuan personil yang memerlukan pembinaan kesamaptaannya maupun kesejahteraan agar dapat mencapai efektifitas maupun efisiensi yang maksimal dalam pemanfaatan keterampilan kemampuan individu selama masa pengabdian.

b) Pendayagunaan personil dapat mencapai efektivitas dan efisiensi yang maksimal melalui proses pembinaan yang mengacu pada klasifikasi personil yang terukur derajat kemampuan profesional kepolisiannya dan norma-norma yang mengaturnya, sehingga untuk penggunaan dan penempatannya dapat dipilih personil yang tepat.

c) Norma-norma yang mengatur penggunaan personil meliputi penempatan dalam jabatan yang tepat, variasi dalam penugasan yang didukung oleh kualifikasi pendidikan dan tingkat kepangkatan

serta variasi giliran daerah penugasan.

d) Prestasi individual umumnya dapat dicapai dengan baik selain berdasarkan pendidikan dan latihan yang dialaminya dikombinasikan dengan pengalaman serta dibarengi dengan bimbingan, dorongan, teladan, dan perangsang dari atasannya (mutu kepemimpinan dalam organisasi sangat berpengaruh terhadap prestasi kerja personil perorangan).

e) Pangkat dan jabatan bukanlah insentif atas dedikasi dan prestasi perorangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, melainkan juga merupakan kelengkapan jabatan organik, oleh karena itu untuk mencapai jabatan ataupun pangkat yang lebih tinggi harus melalui seleksi untuk memilih personil yang terbaik dan "The Right man" bagi suatu jabatan setelah melalui pendidikan pengembangan dapat dilakukan pula seleksi melalui ujian jabatan dan ujian kepangkatan.

f) Pengaturan disposisi personil dikaitkan dengan sasaran pelaksanaan tugas, cara bertindak yang akan dikembangkan dalam pelaksanaan operasional Polri di lapangan, jenjang jabatan dan lapis-lapis kemampuan yang telah ditentukan.

## 3) Perawatan Personil.

a) Perawatan personil Polri diselenggarakan untuk mewujudkan pemenuhan hak prajurit di bidang kesejahteraan setiap personil Polri beserta keluarganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kemampuan dukungan sumber daya yang tersedia.

b) Perawatan personil yang ditangani dengan cermat dan baik akan menjadi daya dorong efektif bagi prajurit untuk berprestasi, sekaligus dapat menjadi sarana bagi pembinaan kebanggaan korps (termasuk jiwa Korps) yang pada gilirannya dapat memelihara kemantapan dedikasi perorangan yang amat diperlukan bagi keandalan organisasi.

## 4) Pemisahan Personil.

a) Pemisahan personil Polri dilaksana-

kan baik berdasarkan batasan alamiah maupun demi menjaga keseimbangan komposisi personil baik ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitas, dan memberikan kesempatan bagi personil untuk meneruskan bhaktinya dalam masyarakat.

b) Pemisahan personil Polri bukan berarti berakhirnya pengabdian personil perorangan Polri sebagai prajurit pejuang dan Warga Keluarga Besar Polri, namun pemisahan personil tersebut dilakukan secara cermat dan rasional berdasarkan pertimbangan lebih mengutamakan kepentingan organisasi tanpa mengabaikan kepentingan perorangan.

### Sumber Daya Logistik

1. Pembinaan sumber daya logistik dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas operasional. Keberhasilan dan kualitas operasional yang baik dan efisien akan sangat ditentukan oleh kemampuan pembinaan sumber daya logistik yang dapat memberi dukungan minimal bagi kebutuhan operasional di lapangan.
2. Kemampuan sumber daya logistik Polri pada kurun waktu Renstra Hankamneg IV 1989—1993 dalam mendukung tugas-tugas operasional, diupayakan dapat lebih ditingkatkan secara optimal, sehingga keberhasilan di bidang operasional dapat tercapai secara maksimal.
3. Perkembangan dan kemajuan teknologi semakin terasa dampaknya dimana dilingkungan Polri-pun telah mulai banyak tergelar peralatan yang berteknologi canggih. Sifat peralatan yang semakin canggih tersebut memerlukan pula dukungan suku cadang yang semakin banyak ragamnya, sehingga diperlukan sistem pengelolaan yang baik dan profesional. Oleh karena itu walaupun dihadapkan kepada kendala keterbatasan tersebut diatas perlu dilakukan pilihan teknologi yang amat selektif agar tepat bagi Polri dengan mempertimbangkan kemampuan baik anggaran maupun pelayanan.
4. Dengan terbatasnya alokasi anggaran bagi Polri, maka upaya dalam pengadaan dan

pemeliharaan-pun akan terbatas sehingga untuk mengatasi keterbatasan anggaran tersebut diperlukan prioritas :

1) Pengadaan peralatan baik utama maupun khusus, diarahkan kepada peralatan yang benar-benar menunjang kemampuan pelaksanaan tugas-tugas operasional Polri di lapangan.

2) Pemeliharaan sebagai upaya dalam memperpanjang usia pakai bagi peralatan kepolisian yang belum mungkin diganti dan peralatan yang baru, dilakukan melalui revisi, rehabilitasi.

5. Rangkaian kegiatan utama dalam pembinaan logistik meliputi :

1) Perencanaan kebutuhan

a) Merupakan suatu rencana mengenai adanya kebutuhan atau permintaan peralatan, perbekalan atau fasilitas dan jasa lainnya dalam kualitas tertentu, jumlah tertentu dan harus dilaksanakan untuk suatu waktu yang tertentu. Penentuan kebutuhan aktual ini tidak terlepas dan berdasarkan kepada DSPP.

b) Dalam keadaan dimana masalah logistik semakin hari semakin kompleks karena semakin meningkatnya tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok Polri dan semakin pesatnya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka penyediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan suatu hal yang mutlak.

Dalam kaitan inipun sejauh mungkin harus dapat memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan yang sudah disepadankan dengan kebutuhan nyata Polri.

c) Kebutuhan dapat dibedakan menurut hirarkinya atau dibatasi dengan pendekatan prosedur dan mekanisme perencanaan yang berlaku, baik dalam kaitannya sebagai bagian integral rencana strategis maupun rencana taktis dan operasional :

- (1) Kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas rutin.
  - (2) Kebutuhan untuk menunjang tugas perkembangan dalam rangka mencapai tingkat kekuatan dan kemampuan tertentu.
  - (3) Kebutuhan untuk mendukung tugas-tugas operasi.
  - (4) Kebutuhan untuk menghadapi keadaan darurat.
- 2) Pengadaan.
- a) Menjamin terpenuhinya kebutuhan materiil agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas secara maksimal baik dibidang pembinaan maupun operasional.
  - b) Pengadaan materiil dilakukan dengan memberikan prioritas utama pada produksi-produksi dalam negeri melalui hasil penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan Polri.
  - c) Pola pengadaan adalah desentralisasi yang dikombinasikan dengan pola sentralisasi untuk pengadaan beberapa jenis kebutuhan berdasarkan ketentuan kebina-tunggalan materiil/logistik.
  - d) Pengadaan materiil didukung dengan pengembangan standarisasi dalam bentuk kajian dan uji coba yang berlanjut dengan unsur-unsur operasional, pengembangan materiil, pelatihan dan unsur pemakai di lapangan.
- 3) Distribusi.
- a) Kegiatan distribusi materiil meliputi penerimaan, penyimpanan, pemindahan, pengeluaran dan pengambilan.
  - b) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, distribusi dilakukan dalam bentuk bekal (barang jadi atau bahan) atau berupa anggaran untuk pengadaan lokal.
  - c) Mengutamakan keamanan dan keselamatan baik personil (petugas) maupun bekal.
- 4) Pemeliharaan.
- a) Untuk mencapai daya guna yang optimal harus selalu diadakan peninjauan dan penilaian secara periodik terhadap kegiatan pemeliharaan materiil.
  - b) Memelihara materiil adalah mempertahankan kondisi siap pakai materiil serta memperpanjang usia pakai sehingga dapat dipergunakan sewaktu-waktu secara cepat dan tepat.
  - c) Pelaksanaan pemeliharaan meliputi tiga kategori dan 5 eselon yaitu :
- (1) Pemeliharaan Organik - Eselon I dan II.
    - (a) Pemeliharaan pencegahan yang dilaksanakan oleh pemakai secara perorangan atau operator yang menggunakan suatu materiil serta bertanggungjawab atas pemeliharaan pencegahan pada masa sebelum, selama dan sesudah materiil digunakan, termasuk melakukan perbaikan secara terbatas atau pembetulan kecil.
    - (b) Pemeliharaan Satuan yang dilaksanakan oleh organisasi pemakai materiil untuk membantu kegiatan pemeliharaan pencegahan oleh pemakai.
  - (2) Pemeliharaan Bantuan atau Pemeliharaan Lapangan — Eselon III dan IV.
    - (a) Bantuan langsung baik yang bersifat mobil atau tetap dalam bentuk perbaikan, bantuan teknis dan alat/suku cadang kepada satuan-satuan organik dalam jajaran Kotama masing-masing.
    - (b) Bantuan umum untuk mendukung satuan-satuan pemeliharaan atau satuan-satuan pemakai

lainnya dalam rangka pelayanan kewilayahan.

(c) Untuk efisiensi, kegiatan-kegiatan pemeliharaan bantuan langsung dan bantuan umum dapat digabungkan ke dalam satu satuan pemeliharaan lapangan.

(3) Pemeliharaan Depot atau Pemeliharaan dan Tingkat Pangkalan — Eselon V.

(a) Rebuild dilakukan bila barang tidak dapat dikembalikan dalam keadaan siap pakai melalui overhaul.

(b) Overhaul mencakup pekerjaan untuk mengembalikan materiil kepada kondisi dapat dipakai dengan menggunakan bagian dan alat baru atau alat yang di-rebuild.

(c) Modifikasi materiil mencakup perubahan bentuk dan perakitan.

(d) Pembaharuan (renovasi) biasanya mencakup penggantian komponen.

(e) Pembuatan barang - barang tertentu yang mungkin tidak terdapat pada jalur perbekalan Polri atau distribusi umum.

d) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, pelaksanaan pemeliharaan dalam batas-batas tertentu dapat dilakukan melalui suatu ikatan antara pihak Polri dengan pihak ketiga secara hukum, dengan memperhatikan faktor keselamatan dan keamanan.

e) Walaupun selalu dihadapkan kepada masalah kendala anggaran, setiap pimpinan atau kepala kesatuan wajib untuk mempertahankan kondisi siap pakai

setiap materiil yang ada dibawah penguasaannya, sehingga selalu dalam keadaan terawat baik dan mampu digunakan secara benar dan tepat.

5) Penghapusan.

a) Penghapusan merupakan salah satu tahap kegiatan yang perlu diatur secara cermat dan tepat, mengingat bahwa materiil mempunyai nilai ekonomi yang berkaitan dengan usia barang.

b) Tujuan penghapusan adalah untuk membebaskan bendaharawan atau pengurus perlengkapan dari pertanggungjawaban atas materiil yang bersangkutan, memanfaatkan materiil yang bersangkutan dalam bentuk lain, dan mencegah timbulnya pengaruh-pengaruh negatif/bahaya/kerugian terhadap lingkungan serta menjadi sumber penerimaan keuangan negara.

c) Materiil yang dinyatakan dihapuskan dari pertanggungjawaban administrasi oleh ordonatur dapat dimusnahkan, dihibahkan atau dijual kepada pihak lain dimana hasil penjualan merupakan kekayaan negara yang harus disetor kepada Kas Negara.

6) Pengendalian inventory.

a) Merupakan inti dalam pembinaan materiil yang melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian materiil.

b) Merupakan kegiatan menghitung serta mencatat segenap materiil yang berstatus milik negara yang disusun dalam bentuk daftar tertentu untuk keperluan pengurusan dan pengawasan tata usaha keuangan negara.

c) Setiap Pimpinan Satker/Satminkal wajib memelihara daftar inventaris materiil milik negara sesuai dengan kedudukannya sebagai Comptabel Amtenaar (ICW).

## Kebijaksanaan Pembinaan Kekuatan Dan Kemampuan

Untuk menjadikan Polri selalu siap dalam menghadapi setiap ancaman dan gangguan Kamtibmas, kapan dan dimana saja di tanah air ini, maka pembinaan secara berkesinambungan terhadap kekuatan dan kemampuan Polri itu harus dilaksanakan.

Kebijaksanaan dalam pembinaan kekuatan dan kemampuan Polri tersebut, tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi, kebutuhan dan prioritas tertentu.

Adapun kebijaksanaan pembinaan kekuatan dan kemampuan Polri dimaksud adalah sebagai berikut :

### Arah Kebijakan Strategi

1. Sebagai salah satu unsur ABRI, maka pengembangan kemampuan Polri dalam jangka panjang, tetap diletakkan dalam kerangka pengembangan kemampuan Hankamneg, yaitu mengacu kepada politik dan strategi ABRI dalam bentuk strategi penangkalan yang diabdikan kepada kepentingan pembangunan nasional.

2. Pengembangan kemampuan Hankamneg tersebut diarahkan pada pembentukan kemampuan yang efektif dalam menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri, yaitu berupa suatu kekuatan yang kuantitatif kecil tetapi kualitatif tinggi. Bagi Polri, kemampuan efektif yang diharapkan mampu menghadapi berbagai gangguan Kamtibmas adalah berupa suatu kekuatan dengan jumlah sepadan dengan dislokasi kewilayahan disertai kemampuan profesional yang dapat diandalkan.

3. Penjabaran strategi penangkalan tersebut dalam kaitan pengembangan kemampuan Polri

menghasilkan rumusan strategi pengembangan kemampuan sebagai berikut :

1) Mengembangkan kemampuan dan kekuatan Polri baik kewilayahan maupun fungsi yang efektif dalam menanggulangi gangguan kamtibmas yang cenderung meningkat, dengan mengutamakan upaya pencegahan/Preventif sedangkan upaya represif senantiasa ditujukan pula untuk dan dalam rangka pencegahan/preventif. Dalam kaitannya dengan usaha preventif tersebut lebih dititik beratkan pada pencegahan secara dini (preventif aktif).

2) Kemampuan penginderaan dini, yaitu kemampuan untuk melakukan deteksi, identifikasi dan assesment dengan cermat dan teliti setiap perubahan keadaan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan umum dan ketertiban masyarakat.

3) Kemampuan penertiban masyarakat , yaitu kemampuan untuk melakukan pemeliharaan kemampuan umum dengan melaksanakan tindakan-tindakan preventif dan represif terpadu dan proporsional sesuai perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan pemeliharaan ketertiban masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan norma hukum yang berlaku dan berkembang terutama dengan mendasarkan pada kesadaran masyarakat sendiri.

4) Kemampuan penegak hukum, yaitu kemampuan untuk melakukan deteksi faktor-faktor penyebab kejahatan dengan penyelidikan sifat dan ciri pelanggaran dan kejahatan dalam mengatur dan memberikan pelayanan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat melakukan penindakan pelanggaran dan kejahatan dalam mengatasi setiap gangguan keamanan umum dan ketertiban masyarakat, melakukan penindak-

an kejahatan yang berkualitas tinggi dalam mengatasi bentuk-bentuk kejahatan yang meresahkan dan berkadar ancaman yang tinggi, melakukan tindakan lawan kejahatan khusus dalam menanggulangi kejatan yang diatur berdasarkan ketentuan khusus acara pidana, serta melakukan penyidikan ilmiah dan pembuktian kejahatan yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi dan tuntutan Hukum Acara Pidana.

Dalam hal pencegahan dan penindakan kejahatan yang berlingkup Internasional, penanganannya dibantu oleh NCB/Interpol.

5) Kemampuan penyelamatan masyarakat, yaitu kemampuan untuk melakukan perlindungan masyarakat dalam menyelamatkan jiwa raga dan harta benda warga masyarakat dengan melaksanakan penanggulangan bencana kebakaran, bencana alam, bencana perang dan musibah kecelakaan darat, laut dan udara, berupa pertolongan pertama pada kecelakaan, pengungsian serta usaha pencarian dan pertolongan (SAR).

(6) Kemampuan penindakan gangguan keamanan, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan lawan kejahatan dan gangguan keamanan tertentu di seluruh wilayah yuridiksi Nasional termasuk wilayah perairan Indonesia yaitu dengan melakukan tindakan lawan teror dalam mencegah dan menindak cepat dan efektif segala bentuk terror, melakukan lawan kerusuhan massal dalam mencegah dan memadamkan kerusuhan dengan cepat disertai kewaspadaan terhadap kemungkinan penunggang oleh subversi pihak tertentu, melakukan tindakan lawan pemberontakan dalam menumpas kekuatan bersenjata yang melakukan gangguan keamanan untuk tujuan politik tertentu, serta melakukan tindakan lawan gerilya dalam menumpas kekuatan bersenjata yang melakukan kegiatan gerilya untuk tujuan politik tertentu yang menimbulkan keresahan dan ketidak tenteraman masyarakat serta merongrong kewibawaan Pemerintah dan aparaturnya keamanan.

7) Kemampuan bimbingan masyarakat dengan melaksanakan upaya preventif (penangkalan), yaitu kemampuan untuk

menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan masyarakat guna terwujudnya kesadaran hukum, terbinanya peran serta masyarakat dalam sistim keamanan swakarsa dan terwujudnya kondisi astagatra untuk memperkecil terjadinya atau menghilangkan faktor kriminogen, termasuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

8) Kemampuan pembinaan potensi dan kekuatan penertiban, perlindungan dan penyelamatan masyarakat, yaitu kemampuan untuk membina mengkoordinir dan mengerahkan potensi dan kekuatan penertiban, perlindungan dan penyelamatan yang dimiliki oleh masyarakat dalam mendukung upaya-upaya pembinaan keamanan, khususnya dalam rangka Binkamtibmas sebagai perwujudan dari Siskam Swakarsa.

9) Kemampuan pelayanan masyarakat, yaitu kemampuan menerima, menanggapi, memberikan bantuan atau perlindungan dan memberikan petunjuk atau pengarahan kepada masyarakat atas segala laporan, pengaduan dan permintaan bantuan Polisi yang disampaikan oleh masyarakat, yang dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenang yang ada secara cepat, tepat dan etis.

10) Kemampuan pendukung :

a) Kemampuan pembinaan komando dan pengendalian (sebagai bagian dari kemampuan pembinaan kendali komando pada Hankam/ABRI).

b) Kemampuan pembinaan Polri dan Potensi Kamtibmas (sebagai bagian dari kemampuan pembinaan tenaga manusia di bidang Hankam dan Kamtibmas).

c) Kemampuan pembinaan sarana dan prasarana Polri (sebagai bagian dari kemampuan sarana dan prasarana Hankam/ABRI).

d) Kemampuan pembinaan manajemen Polri dari kemampuan pembinaan manajemen Hankam/ABRI).

### Sasaran Program Pembinaan

Dengan memperhatikan arah strategi umum pengembangan Kemampuan Polri jangka panjang

dan dengan berpedoman kepada penekanan Pangab pada Rapim ABRI tanggal 17 Agustus 1989 dan tanggal 1 – 3 November 1990 serta laporan kesatuan Kapolri pada Rapim ABRI tersebut, maka kebijaksanaan dibidang pembinaan kekuatan dan kemampuan Polri pada Renstra IV (1989–1993) sebagai berikut :

### 1. Bidang Personil

Memantapkan jiwa kejuangan personil Polri pada setiap sisi dalam pelaksanaan tugasnya sehingga kehadirannya ditengah-tengah masyarakat dapat dirasakan sebagai pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat.

Memanfaatkan kerangka landasan dalam mewujudkan kapasitas pembangunan kekuatan dan kemampuan Polri dalam Renstra IV :

a) Memperhatikan hasil pembangunan kekuatan personil yang telah dicapai selama Renstra III serta pencapaian sasaran kekuatan personil dalam Renstra IV, yang meliputi :

(1) Kekuatan Personil Polri Sebesar -- 173.753 orang dengan komposisi 13.607 Pa, 121.298 Ba dan 38.84 Ta, melalui pelaksanaan program pendidikan pembentukan Perwira, dengan program pendidikan alih golongan Pa 2.500 orang dan Bintara 10.068 orang.

(2) Kekuatan personil Sipil sebesar 28.956 orang dengan komposisi 24 Goll. IV, 1.397 Gol. III, 15.914 Gol. II dan 11.621 Gol. I melalui program pengangkatan personil Sipil baru sebanyak 10.477 orang.

b) Pencapaian sasaran kekuatan personil dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan pentahapan dalam Renstra IV :

- (1) 1989/1990 = 173.045 Polri 22.281 PNS
- (2) 1990/1991 = 172.592 Polri 23.945 PNS
- (3) 1991/1992 = 172.199 Polri 25.625 PNS
- (4) 1992/1993 = 172.273 Polri 27.285 PNS
- (5) 1993/1994 = 173.753 Polri 28.956 PNS

c) Mengatasi kekurangan kebutuhan personil dengan memberikan prioritas pada tugas-tugas operasional, sedangkan kekurangannya menunggu penambahan personil secara bertahap.

d) Penempatan personil disesuaikan dengan beban tugas dan kerawanan yang dihadapi, dengan memberikan prioritas pada satuan kewilayahan terdepan/Polsek sebagai ujung tombak operasional Polri.

e) Pemantapan pengembangan kemampuan satuan operasional dengan prioritas pada upaya peningkatan kemampuan penegakan hukum dan penertiban lalu-lintas, yang tergelar pada satuan kewilayahan serta pengembangan kemampuan bantuan tehnik pembuktian kriminalistik (identifikasi, Lab-krim dan Dok Kepol).

f) Pengembangan kemampuan satuan fungsi operasional lainnya, dilaksanakan secara selektif untuk mendukung operasional fungsi reserse dan lalu-lintas, dalam rangka mewujudkan totalitas kekuatan Polri dalam penegakan hukum dan penertiban lalu-lintas.

Memanfaatkan setiap obyek, subyek dan metode pembinaan personil yang telah dicapai sebelumnya agar mampu meningkatkan motivasi pengabdian dalam mencapai prestasi tugas secara optimal.

a) Memperketat dan mengutamakan segi kualitas pada setiap pelaksanaan program werving dan seleksi, dengan menitik beratkan pada pemenuhan persyaratan umum di samping persyaratan tambahan kemampuan keterampilan tertentu :

(1) Memperpanjang batas waktu penyerahan sampul D sampai dengan saat ujian tertulis dalam usaha peningkatan ketelitian persyaratan bersih diri dan bersih lingkungan bagi para calon.

(2) Pemantapan kerjasama lintas sektoral dengan Kanwil Depdikbud dalam penelitian keabsahan ijazah serta dengan Kanwil Depnaker dalam pemenuhan prosedur penyediaan lapangan kerja bagi para calon.

(3) Agar mendapatkan Postur Anggota Polri sebagaimana yang diharapkan, dilanjutkan pemantapan pelaksanaan penentuan :

(a) Persyaratan tinggi badan bagi calon anggota Polri pria 165 cm dan wanita 160 cm.

(b) Persyaratan tambahan adalah sebagai berikut :

- i. Prestasi di bidang olah raga beladiri.
- ii. Prestasi dalam kegiatan pengalaman remaja para calon.
- iii. Kepramukaan.
- iv. Memiliki ijazah tertinggi di atas persyaratan yang ditentukan

(c) Persyaratan ijazah dengan SLTA/ sederajat bagi para calon Diktuk Bintara serta materi seleksi bagi para calon Diktuk Tamtama disetarakan dengan SLTP.

(4) Sejalan dengan tuntutan dan tantangan tugas Polri, pengadaan personil diarahkan pada tumpuan kekuatan Bintara, sedangkan Tamtama semakin dikurangi dan dibatasi dalam bidang-bidang tugas tertentu.

(5) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dalam membatasi berkembangnya kerawanan-kerawanan pada setiap sisi penyelenggaraan program werving dan seleksi dengan mengikutsertakan unsur Intel dan Wasrik.

b) Memantapkan penyelenggaraan pembinaan pendidikan dan sarana pendukungnya, dalam upaya meningkatkan out put kemampuan hasil didik dengan memberikan ketajaman orientasi sosiologis dan hukum melalui :

(1) Pemantapan program dan pola pendidikan pembentukan Bintara selama 11 bulan dengan ratio 3 : 7 : 1.

(2) Peningkatan kemampuan tenaga pendidik, kurikulum, alins/alongins dan fasdik secara bertahap.

(3) Penyelenggaraan pendidikan kejuruan dan kursus jabatan dengan prioritas pada fungsi operasional reserse dan lalu-lintas.

c) Memantapkan pelaksanaan pola dan prosedur pembinaan karier khususnya perwira, melalui sistem observasi dan scouting secara cermat dan intensif.

d) Pemantapan pelaksanaan penempatan Bintara pada satuan kewilayahan terdepan/ Polsek rawan kriminalitas dengan tetap berpedoman pada penerapan prinsip Good boy for local job.

f) Pemantapan pelaksanaan perawatan personil di bidang kesamaptaan jasmani, pemeliharaan kesehatan dan penegakkan disiplin secara berlanjut, yang berorientasi pada peningkatan kualitas pribadi dan profesionalisme.

g) Pemantapan pendayagunaan fungsi dan peranan psikologi kepolisian dan Dokkes Kepolisian, baik dalam rangka penerimaan, pendidikan maupun penempatan dan penggunaan personil.

h) Pemantapan pelaksanaan mekanisme dan prosedur penyelesaian administrasi personil menjelang saat pengakhiran dinas serta pengembangan upaya penyediaan lapangan kerja melalui kegiatan pemukiman dan keterampilan bagi purnawirawan Polri.

j) Pemantapan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan personil melalui pemenuhan hak-hak prajurit secara struktural terutama di bidang perumahan/Asrama dengan tertib, cermat dan berlanjut serta extra struktural (koperasi dan Yayasan) melalui bantuan pengadaan uang muka KPR-BTN oleh ASABRI, yang dipadukan dengan pelaksanaan Tabungan Wajib Perumahan untuk membantu angsurannya.

k) Mengembangkan dan melanjutkan kebijaksanaan Kapolri tentang Tabungan Wajib Perumahan (TWP) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/267/VI/1989, sebagai usaha memupuk nilai kegotong-royongan, terutama dalam mengatasi masalah perumahan.

l) Pemantapan pembinaan personil Sipil, yang pembinaannya diarahkan untuk mewujudkan PNS sebagai komplement kekuatan Polri yang dapat diandalkan, yaitu

sebagai tenaga yang dapat mengisi jabatan/ melakukan pekerjaan tertentu yang tidak memerlukan kecakapan kepolisian.

m) Memantapkan pelaksanaan mekanisme dan prosedur penyampaian laporan kekuatan personil secara berkala, dalam rangka kelancaran dan ketertiban dalam melaksanakan analisa personil sesuai dengan instruksi Pangab Nomor : Ins/05/XII/1986 tanggal 30 Desember 1986 dan Instruksi Kapolri No. Pol.: Ins/03/IX/1987.

## 2. Bidang Pendidikan

Tenaga pendidik

a) Pembinaan tenaga pendidik diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tugas yang seimbang dengan beban tugas yang dihadapi, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dengan berpedoman pada Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/351/X/1985 dan Juklak Kapolri No.Pol.: Juklak/21/XI/1985.

b) Memanfaatkan tenaga pendidik yang bertugas di kewilayahan, baik untuk memenuhi kebutuhan sebagai tenaga pendidik non organik lemdik maupun sebagai Gadik dalam pelaksanaan latihan rutin.

c) Penugasan diarahkan untuk memberikan pengalaman pekerjaan dan pementapan kemampuan sebagai bekal selanjutnya dengan berpedoman pada ketentuan pembinaan tenaga pendidik.

**Kurikulum.** Mengadakan pengkajian dan penyempurnaan pendidikan, baik pendidikan pembentukan, pendidikan kejuruan untuk tingkat Perwira, Bintara dan Tamtama serta pendidikan pengembangan tingkat Perwira dengan berpedoman pada metoda strata kemampuan hasil didik.

**Bahan ajaran.** Mengadakan pengkajian maupun penyiapan bahan ajaran untuk pendidikan pembentukan, pendidikan kejuruan dan pendidikan pengembangan sesuai dengan kurikulum/Sillabi, guna sebagai pegangan pokok bagi Gadik di dalam mengajar.

**Alins/Alongins.**

a) Menyusun standarisasi alins / alongins

yang dikaitkan dengan alat utama yang ada di lapangan sesuai dengan tingkat, jenis pendidikan, sehingga dapat direncanakan kebutuhan alins/along ins pada lemdik guna program pengadaan.

b) Mengkaji data alins/alongins untuk menyiapkan data kekuatan nyata untuk mendukung program pendidikan selanjutnya.

Fasilitas pendidikan (Fasdik).

a) Pembangunan dan penyiapan fasilitas pendidikan terutama Pusdik Lantas dan Pusdik Serse.

b) Renovasi dan rehabilitasi Secapa Polri dan Pusdik Komlek.

c) Menyiapkan pendapatan materiil pendidikan secara akurat.

Kerjasama dengan Universitas Negeri. Melanjutkan kerjasama yang telah ada dengan IKIP Bandung, IKIP Ujung Pandang dan ITB Bandung dalam menyiapkan tenaga pendidikan Polri dan calon Perwira Komlek Polri.

Kerjasama dengan luar negeri. Memantapkan dan melanjutkan program kerjasama Kepolisian di bidang pendidikan dengan negara lain (Inggris, USA, R.F. Jerman, Belanda dan Jepang), diarahkan untuk meningkatkan kemampuan personil Polri yang pada akhirnya dapat dikembangkan di Lembaga Pendidikan Polri.

## 3. Bidang Latihan

Program latihan Kewilayahan dilaksanakan dalam rangka :

a) Memelihara dan meningkatkan kemampuan teknis fungsi-fungsi dan antar fungsi operasional.

b) Meningkatkan kemampuan taktik dan tehnik penanggulangan jenis-jenis kejahatan tertentu, sesuai pola kriminalitas dan karakteristik kerawanan masing-masing wilayah.

c) Menunjang keberhasilan pelaksanaan operasi khusus Kepolisian kewilayahan, dengan meningkatkan kemampuan perorangan dan kemampuan kesatuan dalam bentuk unit-unit operasional kecil yang mempunyai kemampuan dan mobilitas tinggi.

Program latihan terpusat dilaksanakan dalam rangka :

- a) Menunjang keberhasilan pelaksanaan operasi khusus kepolisian terpusat.
- b) Meningkatkan kemampuan manajemen operasional.
- c) Meningkatkan kemampuan fungsi-fungsi dan fungsi operasional serta antar satuan.
- d) Keikutsertaan Polri selaku komponen kekuatan Hankamneg.
- e) Meningkatkan kemampuan operasional bersama dengan negara sahabat.

#### 4. Bidang Logistik

Pengadaan peralatan kepolisian di tingkat kewilayahan diarahkan untuk memantapkan satuan-satuan fungsi operasional dengan dititik beratkan kepada pengadaan materiil untuk dukungan logistik operasional pada Polsek-Polsek. Di tingkat pusat pengadaan peralatan diarahkan untuk memantapkan unit-unit operasional antara lain: Intel, Sabhara, Reserse, Lantas dan Satwa.

Melanjutkan pembangunan fungsi identifikasi (proyek Afis) di seluruh Polda kecuali Polda Metro Jaya, Jateng dan Jatim.

Peningkatan fasilitas pangkalan dilaksanakan secara selektif dengan prioritas pangkalan yang berkaitan dengan dukungan untuk kesiapan operasional meliputi: Pemantapan Polsek Standard dan Rumahnya yang sudah tidak layak pakai, Mapolres/Ta, Mapolwil/Tabes dan Mapolda. Sedangkan di tingkat pusat telah selesai pembangunan Gedung Set NCB/Interpol,

dan melanjutkan pembangunan Pangkalan Pol Udara, Pol Air dan Pangkalan Satwa.

Pengadaan senjata api dan amunisi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas (pelaksanaannya dipusatkan di Mabes ABRI).

Melanjutkan pembangunan Pusdik Lantas, Pusdik Serse, Puskodalops serta sarana dan prasarana Lemdik -Lemdik yang masih kurang memadai.

Di tingkat pusat akan dimantapkan fasilitas kesehatan Rumah Sakit Pusat Kramatjati, Pembangunan Lembaga Farmasi Polri (Lafipol), sedang di satuan Kewilayahan akan dimanfaatkan fasilitas-fasilitas Rumah Sakit yang sudah ada.

Memelihara peralatan Kepolisian tetap mendapatkan prioritas dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran, yang diarahkan pada pemeliharaan peralatan baru dan peralatan lama yang mempunyai nilai guna tinggi dan masih dioperasikan.

Peralatan lama yang nilai gunanya tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan harus dihapuskan, dengan demikian anggaran pemeliharaan yang relatif sedikit dapat digunakan untuk pemeliharaan materiil yang mempunyai prioritas operasional.

"Inventory Control" semua peralatan dan suku cadangnya dilaksanakan dengan teliti dan seksama, di samping pelaksanaan pelaporannya ditingkatkan ketepatannya.

Meningkatkan upaya penghematan penggunaan telepon, listrik, air dan gas secara lebih ketat. ◉

## Pola Penanggulangan Kejahatan Dimensi Baru

Kejahatan dimensi baru yang telah dipaparkan sebelumnya, termasuk tantangan berat bagi Polri, dan untuk menanggulangnya memerlukan ketelitian, keahlian diberbagai bidang, peralatan canggih dan hubungan koordinasi yang luas dengan berbagai pihak.

Dalam menunjang penanggulangan gangguan kriminalitas khususnya "Kejahatan Dimensi Baru" dilaksanakan melalui upaya-upaya pembinaan kekuatan dan kegiatan operasional Polri, yang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan peta kerawanan kriminalitas yang dihadapi.

### Bidang Pembinaan Kekuatan

a. Menetapkan program peningkatan kemampuan teknis dan taktis reserse secara periodik, konsisten difokuskan kepada proses penyidikan dalam kaitan mengumpulkan alat pembuktian yang akurat dengan prioritas pada tingkat satuan pusat, Polda dan Polwil/Polwiltabes diberikan kemampuan disamping kemampuan untuk penanggulangan kejahatan yang bersifat konvensional (secara selektif) juga kemampuan penanggulangan terhadap Kejahatan Dimensi Baru.

b. Pembentukan unit-unit operasional pada Polda-Polda tertentu (Polda-Polda Sumatera Utara, Sumbagsel, Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusra) dan Resort Selektif yang diberi kemampuan spesialisasi untuk penanggulangan kejahatan dimensi baru. Secara bertahap dan berlanjut pada Polda-Polda lainnya dibentuk juga unit-unit operasional tersebut sesuai dengan kebutuhan.

c. Peningkatan kemampuan, dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Pendidikan kejuruan reserse lanjutan dan spesialisasi (khususnya bagi unit-unit operasional Polda-Polda yang telah disebutkan diatas). Pelaksanaan pendidikan tersebut perlu dikaitkan dengan tema/pendekatan pra kiraan ancaman (misal : prakiraan tahun 1991-1992 adalah kejahatan perbankan maka Susjur Spesialisasi Serse Ek adalah Perbankan dst.).

2) Coaching clinic dibidang spesialisasi reserse (umum, ekonomi, Udpal dan narkoba) khususnya yang berhubungan dengan Kejahatan Dimensi Baru.

3) Memberikan teori-teori, drill, simulasi dan latihan-latihan rutin guna memelihara dan meningkatkan pengetahuan anggota dalam hal penanggulangan terhadap kejahatan dimensi baru.

d. Kerjasama pengiriman anggota untuk mengikuti pendidikan/latihan dan pertukaran informasi dengan Kepolisian Negara-Negara Asing melalui jalur NCB/Interpol.

### Bidang Operasional

a. Secara umum pola operasional Polri dalam menanggulangi gangguan Kamtibmas, khususnya kriminalitas ditempuh melalui pentahapan upaya-upaya yang bersifat pre-emptif, preventif dan represif. Upaya pre-emptif dititik beratkan pada pengkondisian dan peningkatan keikutsertaan masyarakat atas kesadaran dan kekuasaannya sendiri agar dapat menangkal setiap kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana, sedang upaya preventif dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya kejahatan yang akan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada.

Apabila upaya-upaya tersebut kurang berhasil, maka penanggulangan dilaksanakan dengan menempuh upaya represif yaitu menindak kejahatan tersebut berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku. Setiap upaya selalu mendasari pada hasil penginderaan dini (early warning detection), sehingga sasaran penanggulangan diharapkan dapat dicapai dengan optimal.

b. Pola penanggulangan oleh Reserse Polri (bersifat represif yustisiil) ditempuh melalui :

1) Pendayagunaan seluruh data yang masuk khususnya data yang menyangkut kasus-kasus tindak pidana, khususnya tindak pidana yang memperlihatkan tendensi terhadap terjadinya kejahatan dimensi baru. Dengan memanfaatkan data tersebut akan dapat diketahui gelagat perkembangan kriminalitas yang akan datang, baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga upaya-upaya antisipasi dan penanggulangannya dapat dilaksanakan secara tepat dan cepat. Disamping hal tersebut diupayakan pula adanya masukan-masukan informasi dari fungsi operasional lainnya sebagai bahan pelaksanaan penyelidikan/penyidikan.

2) Penggelaran kekuatan reserse (unit-unit operasional khususnya untuk mengatasi kejahatan dimensi baru) pada Polda-Polda di Jawa, Sumatera Bagian Selatan, Sumatera Utara, Nusa Tenggara dan Resort Selektif. Penggelaran kekuatan pada Polda-Polda tersebut diprioritaskan, karena beberapa jenis kejahatan dimensi baru telah mulai berkembang serta kecenderungan kejadian selanjutnya diperkirakan akan terus bertambah.

Secara bertahap penggelaran kekuatan unit-unit operasional sejenis akan terus dilanjutkan pada Polda-Polda lain sesuai dengan perkembangan Trend kriminalitasnya.

3) Guna mengadakan langkah-langkah antisipasi secara cepat dan tepat, melalui kegiatan Kring Reserse yang dapat meliputi seluruh daerah mulai dari Polsek, diharapkan akan mampu menginventarisir semua kegiatan masyarakat serta segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek ASTAGATRA

yang ada di daerah penugasan masing-masing, sebagai salah satu organ reserse dalam memanfaatkan IPK (Infrastruktur Penanggulangan Kriminalitas). Dalam hal ini pemanfaatan potensi masyarakat dapat diarahkan guna menangkal, mencegah atau membantu pelaksanaan penyidikan.

4) Dalam menghadapi kejahatan dimensi baru selalu diterapkan metoda penanganan yang bersifat opensif, mengejar dan menyelesaikan setiap kasus dengan aktif dan cepat yang disertai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memanfaatkan Scientific Crime Investigation guna memperoleh pembuktian yang akurat.

5) Penanganan setiap kasus kejahatan dimensi baru secara tepat dan tuntas. Diharapkan dengan penyelesaian yang demikian, korban/kerugian yang lebih besar dapat dihindari, mengingat bahwa akibat kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan dimensi baru dapat berpengaruh luas pada segi kehidupan masyarakat atau merugikan negara disamping perkembangan selanjutnya dari jenis-jenis kejahatan ini.

6) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan aparat CJS (Criminal Justisi System) dalam hal :

a) Memperlancar jalannya/proses peradilan tindak pidana sejak mulai dari kegiatan penyidikan sampai dengan penyidangan.

b) Pelaksanaan Gelar Perkara untuk menyamakan persepsi, sehingga setiap kasus kejahatan dimensi baru tidak akan lepas dari tuntutan hukuman bahkan akan dikenakan dengan sanksi hukuman yang maksimal.

c) Merumuskan langkah dan upaya-upaya yang dapat dilaksanakan terhadap hal-hal yang belum diatur secara tegas/nyata dalam perangkat perundang-undangan yang ada.

7) Dalam kaitannya dengan penanggulangan kejahatan dimensi baru yang berhubungan dengan negara lain khususnya kejahatan

internasional, mengadakan dan meningkatkan kerjasama dengan badan-badan kepolisian negara asing melalui NCB/Interpol Indonesia, terutama dengan negara-negara ASEAN, sehubungan dengan lebih seringnya kasus-kasus kejahatan yang terjadi berlingkup pada wawasan ASEAN.

8) Mengedepankan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) untuk jenis-jenis tindak pidana tertentu yang termasuk golongan kejahatan dimensi baru.

a) Pelaksanaan penyidikan sesuai dengan kewenangan.

b) Apabila tindak pidana tersebut ternyata menyangkut lingkup lebih dari satu kewenangan PPNS, maka penyidikan akan diambil alih oleh penyidik Polri.

c) Penyidikan dilaksanakan berdasarkan wawasan lingkungan, artinya sepanjang menyangkut lingkungan hidup tindak pidana apapun yang terjadi akan diarahkan kepada pelanggaran Undang-Undang Lingkungan Hidup (UU No. 4/82). Dengan demikian penanganan akan dilaksanakan oleh Penyidik Polri karena PPNS tidak berwenang terhadap Undang-Undang No. 4/82.

d) Mekanisme penyidikan oleh PPNS, sesuai aturan KUHAP yaitu berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

e) Prinsip mengedepankan PPNS tersebut tetap dengan koordinasi dan pengawasan dari Penyidik Polri sesuai ketentuan dalam pasal-pasal 7 (2), 107 dan 109 (3) KUHAP.

f) Mengamankan fatwa Mahkamah Agung No. KMA/114/IV/1990 yakni penyerahan berkas oleh PPNS, baik yang menyangkut tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus harus terlebih dahulu melalui Penyidik Polri.

9) Koordinasi dengan Pejabat Penyidik lain:

a) Bahwa tujuan penyusunan KUHAP adalah untuk tercapainya kodifikasi dan

unifikasi hukum acara pidana di Indonesia. Hal ini mengandung pengertian bahwa cita-cita hukum nasional kita antara lain terwujudnya satu hukum acara yang berlaku di Indonesia yaitu KUHAP (UU No.8/1981). Dengan adanya hukum acara yang tunggal tersebut, maka fungsionaris Penyidik Polri adalah penyidik utama dan PPNS berada dibawah tanggung jawab Korwas Penyidik Polri.

b) Pada kenyataannya hingga saat ini terdapat fungsionaris penyidik lain selain Polri dan PPNS yaitu Jaksa dan Pa TNI-AL.

Arah strategi dalam menghadapi masalah ini adalah tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang ada, dengan mengupayakan peningkatan kemampuan secara optimal dalam hal profesionalisme penyidik dan tetap meningkatkan pelaksanaan penyidikan terhadap berbagai tindakan pidana termasuk tindak pidana khusus, baik bobot maupun frekuensinya, disamping tetap melakukan koordinasi fungsional dengan penyidik-penyidik lain yang memiliki kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana khusus.

## Kesimpulan

a. Kejahatan Dimensi Baru adalah kejahatan yang dilakukan oleh kaum intelektual maupun orang terkemuka (pejabat) atau setidak-tidaknya oleh mereka yang mempunyai keahlian khusus baik secara perorangan (individu), kelompok, atau badan hukum dengan menggunakan cara-cara tertentu (pada umumnya menghilangkan jejak dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi) sehingga sulit pembuktiannya, dilakukan dengan kekerasan atau tanpa kekerasan dengan tidak mengenal batas wilayah dan waktu serta mengarah kepada kepentingan ekonomis atau politis.

b. Munculnya kejahatan dimensi baru merupakan sisi negatif dari proses modernisasi perkembangan budaya manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak mungkin terelakkan.

Strategi penanggulangannya adalah dengan meningkatkan kemampuan dan memanfaatkan peralatan teknik ilmiah dalam suatu proses Scientific Crime Investigation.

Dengan menggunakan metode ini maka tiap kejahatan dimensi baru yang bagaimanapun kualitasnya tetap akan dapat diungkapkan karena memungkinkan tercapainya derajat kepastian yang tinggi (High degree of certainty) dalam proses pembuktian dan memungkinkan tercapainya derajat keadilan yang tinggi.

c. Dalam rangka menanggulangi tindak pidana tertentu khususnya tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan dimensi baru, operasional penyidikannya akan berkaitan dengan fungsionaris penyidik lain. Hal ini perlu menjadi perhatian Polri secara sungguh-sungguh, karena akan menyangkut masalah mekanisme baik dalam bidang koordinasi, pengawasan maupun dalam rangka meningkatkan kemampuannya sendiri.

### Perhatian

a. Dalam menghadapi ancaman faktual berupa tindak pidana tertentu khususnya kejahatan dimensi baru, kiranya kemampuan Polri ditingkatkan terutama dalam pemahamannya terhadap berbagai perundang-undangan yang berlaku dan peralatan teknis ilmiah dalam suatu proses Scientific Crime Investigation. Untuk itu perlu meningkatkan frekuensi pendidikan reserse, baik yang bersifat kejuruan lanjutan, maupun pendidikan spesialisasi dan pendidikan di luar negeri khususnya untuk meningkatkan kemampuan penanggulangan terhadap kejahatan dimensi baru.

b. Dalam rangka menanggulangi tindak pidana tertentu khususnya tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan dimensi baru, apabila PPNS ditampilkan peranannya, kiranya haruslah disertai kemampuan pada jajaran reserse dibidang mekanisme koordinasi dan pengawasan. Selain itu kemampuan PPNS juga perlu ditingkatkan, sehingga selain PPNS dapat memenuhi persyaratan "Speed and Mobility" juga kiprah operasionalnya akan

sangat berperan didalam menekan laju Crime Total dan meningkatkan Crime Clearance secara nasional.

Dalam hal ini kiranya untuk sementara perlu diselenggarakan suatu Coaching Clinic terhadap PPNS yang menyangkut tindak pidana tertentu khususnya kejahatan dimensi baru serta masalah-masalah penanggulangannya.

c. Untuk mengatasi berbagai masalah dibidang penyidikan yang berkaitan dengan fungsionaris lain dalam sistim peradilan pidana, maka Polri dalam hal ini harus meningkatkan bobot frekuensi penanganan tindak pidana baik Kejahatan Konvensional maupun Kejahatan Dimensi Baru (termasuk didalamnya tindak pidana khusus) sehingga pada gilirannya nanti pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya akan menaruh kepercayaan penuh kepada Polri.

d. Dari segi lain sangat diperlukan penyempurnaan hukum dan pengadaan perangkat-perangkat hukum yang baru, agar ancaman faktual yang berupa kejahatan dimensi baru tersebut dapat terjangkau secara sempurna oleh aturan hukum yang ada.

Dalam hubungan tersebut, maka pendekatan Polri terhadap lembaga negara pembuat Undang-Undang merupakan langkah yang perlu dirintis dan dilaksanakan secara proporsional. Disamping itu tindak lanjut tersebut diatas juga diperlukan untuk mencari jalan keluar agar hanya ada satu hukum acara yang berlaku di negara Indonesia, sehingga fungsionaris Penyidik Polri benar-benar merupakan penyidik utama.

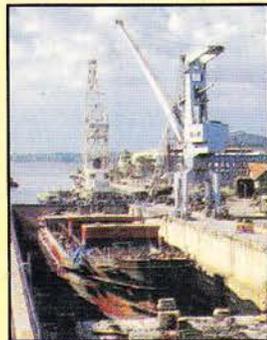
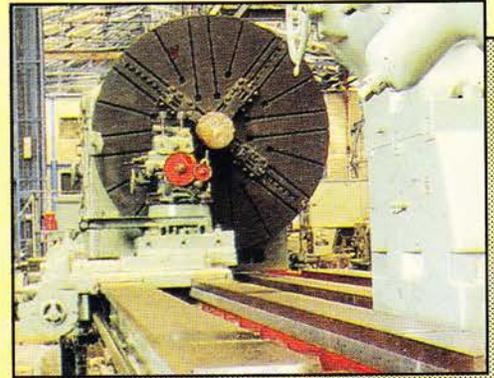
e. Dalam menunjang keselarasan lajunya Criminal Justice System, maka dalam menghadapi dan menanggulangi kejahatan dimensi baru, perlu lebih meningkatkan media yang sudah ada untuk menyelaraskan persepsi, disamping mengadaptasikan para penyidik terhadap hal-hal baru yang potensial terhadap terjadinya kejahatan dimensi baru, sehingga penegakan hukum yang dilakukan dapat menimbulkan efek jera dan pengurangan niat (pencegahan) bagi pelaku.

# PAI INDONESIA

## OFFICES :

**SURABAYA :** UJUNG – SURABAYA P.O. BOX 1134  
 TELEPHONE : (031) 291403  
 TELE X : 31223 PAL SB  
 FAX : (031) 22516, 22888

**JAKARTA :** ARTHALOKA BUILDING, 5TH FLOOR  
 JL. JEND. SUDIRMAN NO. 2, JAKARTA – 10220  
 TELEPHONE : (021) 5703257, 5703258  
 5705302, 5705303  
 TELE X : 62295 PAL JKT 1A, 61331 BPPT 1A  
 61321 BPPT 1A, ARTHA 46441  
 FAX : (021) 5704275



## PRODUCTS

- \* TYPE OF PATROL BOATS
  - FPB 28
  - FPB 57
  - JET FOIL
  - NAVY
  - POLICE
  - CUSTOM
  - NAVY
  - SAR
  - NAVY PATROL
  - TRANSPORTER
- \* CARGO SHIPS
  - 3500 DWT
  - 3000 DWT
  - 2250 DWT
  - 1000 DWT
  - TUG BOAT
  - 300 HP – 5000 HP
  - FISHING BOAT
  - 100 GT – 500 GT
  - FERRY BOAT
  - 100 BRT – 3000 BRT
  - PRODUCT TANKER
  - CARGO
  - SEMI CONTAINER
  - CONTAINER
  - STEERABLE PROPELLER
  - CP PROPELLER
  - SKIP JACK
  - PURSE SEINER
  - LONG LINER
  - LCU
  - LCM
  - RORO
- \* DIESEL ENGINES LICENSE HOLDER  
 MARINE TYPE – INDUSTRIAL TYPE
  - M A N
  - MAN B&W
  - WARTSILA
  - MT U
- \* JOINT OPERATION  
 MALAYSIA SHIPYARD AND ENGINEERING  
 SDN, BHD (MSE)
- \* REPAIRER EQUIPMENT & SHIP MAINTENANCE :
  - GRAVING DOCK 1 X 20.000 DWT
  - FLOATING DOCK 1 X 5.000 TLC, 2 X 1.500 TLC
  - CENTRAL CONSTRUCTION, ELECTRICITY, MACHINE AND ARMMENT WORKSHOP,
  - CRANE 2 X 30 TON/GRAVING DOCK 2 X 2,5 TON/FLOATING DOCK
  - FLOATING CRANE 2 X 200 TON 2 X 50 TON
- \* ENERGY ENGINEERING
  - MANUFACTURING B.O.P STEAM POWER PLANT STEAM POWER UP TO 400 H.W.
  - MANUFACTURING BOILER & B.O.P. COMPONENTS UP TO 400 H.W.

WITH PLEASURE TO SERVE YOU :  
 MARINE ENGINEERING : DESIGN & CONSULTING  
 SHIPBUILDING : CONSTRUCTION & FABRICATION  
 REPAIR & DOCKING : OVERHAUL & SERVICES  
 GENERAL ENGINEERING : FABRICATION & SERVICES  
 QUALITY CONTROL : APPRAISAL SERVICES & CONSULTING

WE INVITE YOU, THE CUSTOMER, TO TRY PT. PAL INDONESIA :  
 WE GUARANTEE IT WILL MEET WORLD CLASS STANDARDS OF QUALITY AND  
 COMPETITIVE PRICING ; WITH AND AN ADDED FEATURE : THE PROMPT, EFFICIENT AND  
 COURTEOUS SERVICE THAT CAN ONLY COME FROM PT. PAL INDONESIA